



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
7. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2025-2045 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 13 September 2024. RPJP Nasional menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2045. Sebagai dasar hukum, maka RPJP Nasional menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun sektor swasta.

RPJP Nasional memuat visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Sektor Pertanahan dan Penataan Ruang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Terhadap pencapaian kata kunci “Bersatu” dan “Berdaulat” misalnya, sektor penataan ruang dapat berkontribusi dalam bentuk diantaranya melalui penguatan konektivitas dan integrasi ekonomi domestik serta pembangunan kawasan perbatasan negara. Perlindungan lahan sawah dan ketahanan pangan juga dapat menjadi kontribusi penting dari sektor pertanahan dan penataan ruang dalam mewujudkan kata kunci “Berdaulat” dan “Berkelanjutan”.

Dukungan dari sektor dalam bentuk pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru, pembangunan perkotaan dan permukiman layak huni, serta perbaikan ekosistem dan iklim investasi dapat menjadi kontribusi signifikan terhadap pencapaian kata kunci “Maju”: demikian pula halnya dengan kontribusi sektor pada aspek pelestarian hutan dan kawasan lindung serta konservasi sumber daya air yang dapat menjadi kontribusi penting terhadap pencapaian kata kunci “Berkelanjutan”.

Memperhatikan dukungan-dukungan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045 tersebut, maka dapat dipahami bahwa sektor pertanahan dan penataan ruang memainkan peran kunci dalam pembangunan nasional. Sesuai tugas dan fungsinya, sektor pertanahan dan penataan ruang adalah pengelola modal dasar pembangunan nasional yaitu kekayaan alam yang meliputi ruang darat, laut, dan udara. Sektor ini menjadi pengawal amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Amanat konstitusi ini sekaligus menjadi tujuan suci (*noble aim*), atau tujuan abadi, bagi keberadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), sebagaimana halnya Pembukaan UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” yang menjadi visi

bernegara dan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” sebagai misi bernegara.

Sebagaimana RPJP Nasional yang menjabarkan visi dan misi bernegara tersebut ke dalam visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, demikian pula halnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN yang menjabarkan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan misi Presiden periode 2025-2029, atau yang lebih dikenal sebagai Asta Cita, dijabarkan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan Kementerian ATR/BPN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari delapan Asta Cita, Kementerian ATR/BPN setidaknya terkait langsung dengan 3 (tiga) di antaranya yaitu:

a. Asta Cita 2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. Asta Cita 2 ini menekankan pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sangat relevan dengan kegiatan penataan ruang, karena penataan ruang yang baik mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam perencanaan wilayah. Melalui penataan ruang yang tertib dan sesuai peraturan, pemerintah dapat mencegah konflik lahan, mendorong efisiensi pemanfaatan ruang, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Dengan demikian, penataan ruang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang tidak absen dan mampu membangun kepercayaan publik secara nyata. Bentuk keterkaitan ini diantaranya adalah dengan indikator persentase kepatuhan pemanfaatan ruang dan persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang siap terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)*. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai mandat untuk:

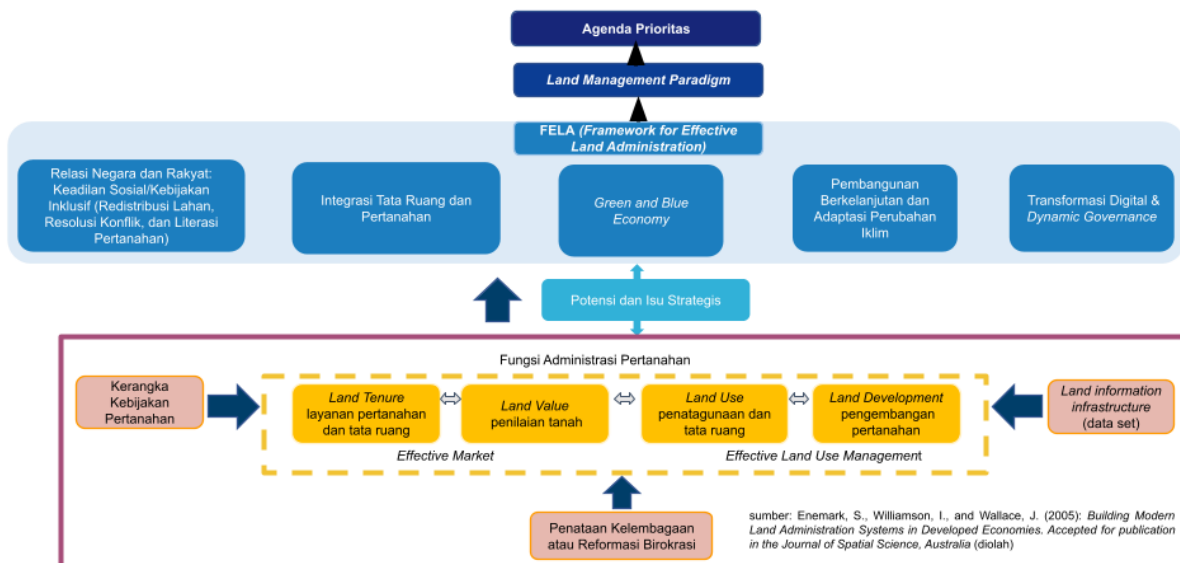
- 1) memfasilitasi dan mempercepat penyesuaian Rencana Tata Ruang (RTR) untuk percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
- 2) menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak pengelolaan atas lahan areal penggunaan lain yang ditetapkan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
- 3) mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) melaksanakan redistribusi lahan untuk mendukung program Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan;
- 5) memfasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan untuk percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) mengembangkan sistem informasi geografis Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan berbasis data spasial;

- 7) melaksanakan program reforma agraria untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan produktif; dan
 - 8) mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional salah satunya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
- b. Asta Cita 6 “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”. Bentuk keterkaitannya diantaranya adalah reforma agraria yang menjadi salah satu program kerja untuk swasembada pangan sekaligus perbaikan kesejahteraan petani. Selain itu juga ada keterkaitan dengan salah satu indikator yang digunakan pada Asta Cita ini yaitu persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya.
- c. Asta Cita 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Bentuk keterkaitannya diantaranya adalah peningkatan pemanfaatan tanah sebagai bagian dari reformasi hukum. Dalam Asta Cita 7, program prioritas Reformasi Hukum, Kementerian ATR/BPN juga melakukan penguatan pembangunan sektor strategis yang berlandaskan hukum melalui penyelesaian kasus pertanahan. Selain itu juga mendukung dalam program prioritas Pemerintah Digital.
- d. Asta Cita 8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.” Di dalam Asta Cita ini, Kementerian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mendukung pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan menetapkan mekanisme inventarisasi, identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah ulayat, serta memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran dalam bentuk hak pengelolaan atau hak milik atas tanah bersamanya. Regulasi ini diperkuat dengan pemanfaatan sistem digital, penyelesaian sengketa, dan sosialisasi di daerah, sehingga menjadi landasan penting bagi negara dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

Governansi dalam pertanahan dan ruang memang tidak dapat dipisahkan. Koherensi antara keduanya tampak dari paradigma manajemen pertanahan (*land management*) yang terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu 1) kebijakan pertanahan (*land policies*); 2) infrastruktur informasi pertanahan (*land information infrastructures*); dan 3) fungsi-fungsi administrasi pertanahan (*land administration functions*) (sumber: Enemark et al., 2005). Dari 3 (tiga) komponen tersebut, penataan ruang menjadi bagian dari kebijakan dan administrasi pertanahan, sementara infrastruktur informasi mencakup data-data kadaster dan topografi baik untuk lingkungan terbangun (*built environment*) maupun lingkungan alam (*natural environment*).

Selain itu, dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sistem administrasi pertanahan diarahkan melalui pendekatan *Framework for Effective Land Administration* (FELA). Pendekatan ini menekankan 5 (lima) isu strategis utama: keadilan sosial dalam pengelolaan tanah, integrasi tata ruang, dukungan terhadap ekonomi hijau dan biru, respons terhadap perubahan iklim, serta transformasi digital dan tata kelola dinamis. Fungsi utama administrasi pertanahan mencakup kepastian hak atas tanah, penilaian tanah yang adil, penatagunaan ruang, dan pengembangan lahan. Semua ini didukung oleh

kebijakan yang terarah, infrastruktur data yang andal, serta reformasi kelembagaan, guna menciptakan pasar tanah yang efektif dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

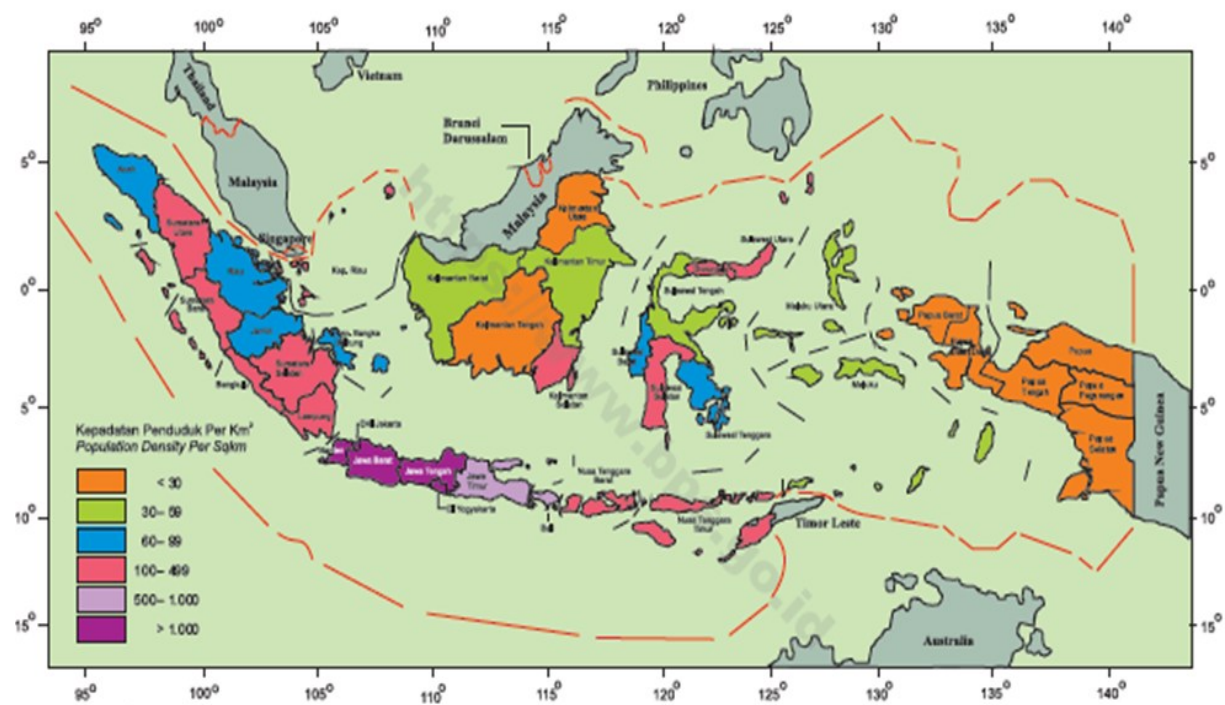


Gambar 1.1 Paradigma manajemen pertanahan
Sumber: Enemark et al., 2005

Tantangan pembangunan sektor agraria, pertanahan dan ruang dalam 5 (lima) tahun mendatang menjadi semakin kompleks. Secara spesifik, salah satu persoalan agraria dan tata ruang yang dihadapi adalah ketimpangan wilayah dan keseimbangan antara kebutuhan lahan hunian, lahan konsumsi untuk ketahanan pangan, industri, dan kawasan hutan. Berbagai kebutuhan ini mengikuti jumlah penduduk yang diproyeksikan meningkat sesuai dengan perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045. Perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 menggunakan 2 (dua) skenario, pada skenario A penduduk diproyeksikan mencapai 294.100.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu) jiwa pada tahun 2030 dan 319.000.000 (tiga ratus sembilan belas juta) jiwa pada tahun 2045 sedangkan pada skenario B penduduk mencapai 292.500.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu) jiwa pada tahun 2030 dan 311.600.000 (tiga ratus sebelas juta enam ratus ribu) jiwa pada tahun 2045 (sumber: Data Survei Penduduk Antar Sensus 2015 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Pusat Statistik, dan *United Nations Population Fund*).

Sementara jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, menurut Badan Informasi Geospasial (BIG), total luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.180.053 km² (lima juta seratus delapan puluh ribu lima puluh tiga kilometer persegi), dengan rincian luas daratan sekitar 1.922.570 km² (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh kilometer persegi) dan luas perairan sekitar 3.157.483 km² (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilometer persegi). Dari luas daratan 1.922.570 km² (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh kilometer persegi) luas wilayah daratan Indonesia, sekitar 1.248.324,7 km² (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat koma tujuh kilometer persegi) atau 64,93% (enam puluh empat koma sembilan tiga persen) adalah kawasan hutan dan hanya 674.245,3 km² (enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima koma tiga kilometer persegi) atau sebesar 35,07% (tiga puluh lima koma nol tujuh persen) untuk kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Dari komparasi

data tersebut, peningkatan kebutuhan ruang untuk hunian dan aktivitas ekonomi dapat menyebabkan terjadinya kompetisi dan konflik. Selain itu, ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi hal yang perlu diatasi sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan tanah dan ruang yang akan dikelola dan dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 1.2 Kepapatan Penduduk di setiap provinsi di Indonesia Per/km² tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

A. Potensi Ruang

Ruang dapat didefinisikan sebagai dimensi fisik yang mencakup seluruh wilayah permukaan bumi, termasuk daratan, lautan, dan atmosfer di atasnya. Ruang meliputi berbagai elemen yang saling berkaitan, seperti lingkungan alam, infrastruktur buatan manusia, dan distribusi aktivitas sosial, ekonomi, serta ekologi. Ruang ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berfungsi sebagai wadah bagi interaksi manusia, baik dalam pembangunan, mobilitas, maupun pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan ruang sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan ruang bagi kepentingan manusia dan pelestarian lingkungan.

Ruang merupakan elemen yang harus diatur agar setiap penggunaan wilayah sesuai dengan peruntukannya, seperti zona permukiman industri, pertanian, dan kawasan lindung. Tata kelola ruang berfokus pada perencanaan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan. Pengaturan ruang juga bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan lahan, degradasi lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya, sehingga ruang dapat digunakan secara adil dan efisien.

Indonesia memiliki potensi ruang yang sangat besar, baik dari segi geografis, sumber daya alam, maupun keragaman ekosistemnya.

Terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki luas daratan lebih dari 1.922.570 km² (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh kilometer persegi) dan wilayah laut yang mencapai 3.270.000 km² (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu kilometer persegi). Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi. Potensi ruang ini harus dikelola dengan bijak agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sektor utama yang memanfaatkan ruang adalah pertanian. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Potensi lahan pertanian di Indonesia sangat besar, terutama untuk tanaman pangan yang mendukung dan menopang ketahanan pangan nasional. Pertanian juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, di mana sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar (sumber: Badan Pusat Statistik, 2024). Sektor ini juga memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam.

Sektor lain yang memanfaatkan ruang darat adalah kehutanan. Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terbesar dan terkaya akan keanekaragaman hayati di dunia. Namun, pengelolaan hutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan iklim. Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.795.306 ha (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam hektare) (sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Sektor kehutanan Indonesia baru berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 0,66% (nol koma enam enam persen), jadi jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan luasan hutan Indonesia (sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Kawasan hutan yang luas ini berpotensi mendatangkan nilai ekonomi karbon yang signifikan melalui penyerapan karbon (*Carbon Sequestration*).

Potensi ruang di Indonesia juga terdapat dalam sektor kelautan dan perikanan. Indonesia adalah negara dengan potensi sektor perikanan tertinggi di dunia. Sebagai negara kepulauan, sektor perikanan di Indonesia sangat menjanjikan. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan menjadikannya sebagai salah satu negara dengan kawasan perikanan paling subur. Potensi perikanan yang melimpah telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional dan menjadi andalan dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta mendukung ekspor.

Pengelolaan ruang di Indonesia merupakan upaya terencana untuk mengatur penggunaan potensi ruang, baik di darat, laut, maupun udara, agar pemanfaatannya optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang guna mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Pengelolaan ruang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pada tingkat nasional, pengelolaan ruang diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang memberikan pedoman mengenai penggunaan lahan dan pengembangan wilayah. Setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyesuaikan kebutuhan lokal dengan arahan kebijakan nasional. RTRW menetapkan kawasan yang dapat digunakan untuk permukiman, pertanian, industri, pariwisata, dan kawasan lindung yang tidak dapat digunakan. Hal ini dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Pengelolaan ruang juga mencakup aspek pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Namun, pengelolaan ruang seringkali menghadapi tantangan seperti kemacetan, banjir, hingga ketidakseimbangan antara permukiman dan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, diperlukan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.

B. Potensi Pertanian

Tanah di Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian. Tanah menyediakan lahan untuk pertanian, permukiman, dan kegiatan industri. Dengan lebih dari 190.000.000 ha (seratus sembilan puluh juta hektare) lahan pertanian, Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian. Potensi ini menjadi salah satu modal utama bagi sektor agraria. Tanah tidak hanya menjadi media bagi pertumbuhan tanaman, tetapi juga merupakan fondasi bagi berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan bahan baku alam.

Potensi tanah dapat dilihat dari aspek kesuburan, kandungan mineral, kemampuan drainase, serta keanekaragaman hayati yang didukung oleh tanah tersebut. Berbagai jenis tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi bagaimana manusia dapat memanfaatkannya secara optimal. Secara keseluruhan, potensi tanah di Indonesia sangat beragam dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi negara, baik melalui sektor pertanian, perkebunan, maupun pertambangan. Pengelolaan yang bijak akan menghasilkan manfaat jangka panjang. Namun, jika tanah dieksploitasi secara berlebihan atau tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat menurun drastis dan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki.

Pengelolaan potensi pertanian merupakan upaya sistematis untuk memanfaatkan tanah secara optimal, mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan tanah, hingga pengelolaan lahan untuk kepentingan industri dan infrastruktur. Pengelolaan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa tanah tetap produktif tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, pengelolaan potensi pertanian menjadi krusial karena tanah merupakan sumber daya penting yang mendukung sektor-sektor vital. Pengelolaan potensi tanah memerlukan pendekatan yang seimbang. Tanah yang digunakan untuk perkebunan besar harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan untuk menghindari degradasi tanah. Begitu pula dengan industri pertambangan yang seringkali merusak struktur tanah harus diikuti oleh program reklamasi pasca penambangan guna memulihkan fungsi ekologis tanah.

Pengelolaan potensi pertanahan juga tidak terlepas dari aspek legalitas dan kepemilikan tanah. Reformasi agraria yang berkeadilan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Kepastian hukum atas hak kepemilikan dan penggunaan tanah perlu diperjelas guna mencegah konflik lahan yang sering kali terjadi. Dengan demikian, pengelolaan potensi pertanahan yang efektif tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada tanah.

1.2.2 Permasalahan Kementerian ATR/BPN

Pelaksanaan pembangunan nasional mengharuskan adanya pengaturan dan pengelolaan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil evaluasi Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra dan perbaikan kinerja Tahun 2024-2029.

Berdasarkan Evaluasi Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi dan direspons pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang yang menyebabkan kurangnya sinkronisasi kebijakan dan menurunkan efektivitas implementasi tata ruang;
- b. dampak perubahan iklim, seperti bencana alam, menimbulkan tantangan besar bagi perencanaan tata ruang sehingga memerlukan revisi kebijakan secara berkelanjutan;
- c. ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan mengakibatkan daerah pedesaan cenderung kurang diperhatikan dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan;
- d. partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang masih rendah, menyebabkan kebijakan tata ruang tidak selalu mencerminkan kebutuhan lokal;
- e. kurangnya sumber daya dan keahlian membuat penerima lahan reforma agraria kesulitan mengelola lahan secara produktif dan optimal;
- f. konflik tanah yang melibatkan pemegang hak lama atau pengusaha besar seringkali menghambat penerima lahan untuk memanfaatkan hak mereka;
- g. keterbatasan infrastruktur birokrasi dan kurangnya koordinasi antar instansi memperlambat proses distribusi sertifikat tanah dan akses reforma agraria;
- h. banyak bidang tanah yang belum terdaftar karena masalah administrasi, verifikasi data yang kurang, serta kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya sertipikasi tanah;
- i. ketidaklengkapan data dan keterbatasan informasi sejarah kepemilikan lahan menyulitkan proses verifikasi dan seringkali memicu perselisihan hukum;
- j. tumpang tindih (*overlap*) kepemilikan tanah dan klaim lahan di wilayah perkotaan dan perbatasan menyebabkan munculnya kasus sengketa tanah yang baru;
- k. konflik kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan terkait agraria di wilayah perkebunan dan proyek infrastruktur nasional;
- l. keterbatasan akses ke wilayah terpencil menyebabkan banyak daerah belum terjangkau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara optimal, sehingga menghambat peningkatan pendaftaran tanah;

- m. keterlambatan digitalisasi layanan pertanahan di beberapa wilayah menghambat akses investor pada layanan properti dan memperlambat proses perizinan properti;
- n. kurangnya koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan instansi lain, seperti pemerintah daerah, menghambat sinkronisasi data properti dan memperlambat proses perizinan;
- o. konflik sosial terkait penguasaan tanah dan agraria di beberapa daerah menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan menghambat pengembangan ekonomi lokal; dan
- p. keterlambatan penyelesaian sengketa tanah (K4) yang disebabkan oleh perbedaan hasil pengukuran dengan data surat ukur menghambat proses verifikasi dan sertifikasi lahan.

1.2.3 Isu Strategis Kementerian ATR/BPN

UUD 1945 mencantumkan bahwa tujuan akhir yang diharapkan adalah agar tanah dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan sistem administrasi pertanahan yang mampu memberi jaminan atas penggunaan tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah nantinya akan dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan pertanahan di Indonesia sayangnya masih memiliki berbagai tantangan. Beberapa isu strategis yang penting untuk menjadi perhatian dalam proses implementasi administrasi pertanahan di antaranya adalah jaminan atas *land tenure*, *land value*, *land use*, serta *land development*. Aspek-aspek ini penting diperhatikan untuk memastikan seluruh proses administrasi pertanahan berjalan baik dan berpihak pada masyarakat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tanah yang saat ini terjadi juga semakin menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur penguasaan, pengendalian, serta penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi

Selain itu, implementasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN selama ini masih berfokus pada pengelolaan bidang tanah yang eksisting. Melihat potensi pengembangan tata ruang yang saat ini ada, perencanaan tata ruang idealnya juga mengakomodasi ruang-ruang di bawah tanah, di atas tanah, dan wilayah perairan. Di banyak negara tata ruang wilayah bawah tanah sudah banyak dilakukan, terlebih kaitannya dengan kebutuhan transportasi di perkotaan seperti kereta bawah tanah. Semakin sempitnya areal perkotaan dan meningkatnya populasi juga membuat wacana pengembangan tata ruang di atas permukaan menjadi semakin krusial untuk dilakukan. Ruang bawah permukaan tanah dan atas permukaan tanah akan ke depan akan menjadi alternatif penggunaan ruang untuk mengakomodasi kebutuhan ruang, utamanya di wilayah perkotaan.

Berdasarkan pemetaan evaluasi dan isu eksisting yang terkait dengan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan, didapatkan isu strategis saat ini, yaitu:

“Lemahnya Ketetapan dan Pengendalian dalam Pemanfaatan Ruang serta Belum Tertibnya Penguasaan dan Pengelolaan Tanah ”

A. Isu Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan sebuah sistem proses terintegrasi yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasca ditetapkannya RTR dan seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang berperan penting dalam menjaga tertib tata ruang. Berjalannya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR nantinya akan berdampak pada kecilnya pelanggaran pemanfaatan ruang yang mungkin terjadi. Pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat preventif akan mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang melalui berbagai instrumen, seperti penilaian pelaksanaan KKPR dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), penilaian perwujudan RTR, dan pemberian insentif-disinsentif, serta penertiban pemanfaatan ruang yang bersifat kuratif dalam bentuk pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang. Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mencapai tertib tata ruang dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang kedepannya akan mengalami tantangan yang semakin kompleks. Pada tahun 2045, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 319.000.000 (tiga ratus sembilan belas juta) jiwa dengan usia produktif yang besar serta jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 72,8% (tujuh puluh dua koma delapan persen) (sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Biro Pusat Statistik, 2022). Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan lahan diprediksi akan meningkat sehingga ketersediaan lahan akan menjadi isu yang sangat penting. Tingginya arus urbanisasi yang diprediksi akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan juga akan berpengaruh terhadap ketidakseimbangan populasi dengan ketersediaan lahan. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian akan memicu tingginya kesenjangan (disparitas) di beberapa kawasan, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kerentanan suatu kawasan terhadap bencana. Pertumbuhan eksponensial penggunaan sumber daya alam di sisi lain juga akan mempersulit penerapan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan. Perubahan penggunaan lahan akibat tekanan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun akan mempengaruhi kondisi penggunaan lahan yang keberadaannya diproyeksikan akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung sesuai pada RTR.

Proses pengendalian penting untuk memastikan implementasi penataan ruang telah sesuai dengan perencanaan, terlebih di lapangan banyak terjadi ketidaksesuaian data seperti yang terjadi pada status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) daerah, RTR, dan status hak atas tanah. Proses pengendalian ini membutuhkan skema insentif dan disinsentif agar dapat mengawal implementasi dari penataan ruang tersebut. Namun demikian, peran pemerintah daerah masih belum optimal dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayahnya. Penyelesaian penertiban pemanfaatan ruang harus bersifat holistik dan sanksi diberikan harus menimbulkan efek jera, terlebih pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) di lapangan tidak semuanya sesuai dengan tujuan perencanaan di awal. Per tahun 2022, pemantauan melalui interpretasi citra satelit menunjukkan bahwa dari 2.641 (dua ribu enam ratus empat puluh satu) jumlah bidang dengan luas 1.180.257 ha (satu juta seratus delapan puluh ribu

dua ratus lima puluh tujuh hektare), ada 882 (delapan ratus delapan puluh dua) bidang seluas 330.724,47 ha (tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma empat tujuh hektare) yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai peruntukan pemberian hak. Sementara itu, sejumlah 1.358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) bidang dengan luas sebesar 252.335,9 ha (dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan hektare) terindikasi tidak sesuai dengan RTRW. Pemantauan satelit ini sayangnya belum bisa mengidentifikasi penguasaan tanah, penguasaan melebihi batas hak, dan plasma sebab data-data tersebut baru bisa diperoleh dengan metode pemantauan lapangan.

Wilayah-wilayah yang masih dianggap terbelakang juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebagai warga negara, masyarakat di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal sama-sama memiliki hak atas perencanaan dan pemanfaatan ruang yang baik serta tepat sasaran. Pembangunan dengan demikian tidak selalu tentang industrialisasi yang berorientasi percepatan ekonomi, melainkan juga soal pemerataan yang mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlangsungan lingkungan. Berbagai pertimbangan seperti perubahan demografi, krisis iklim, kebencanaan, sampai pada ketahanan pangan juga perlu diintegrasikan dalam proses perencanaan tata ruang. Alih fungsi lahan secara masif, terutama dari lahan pertanian ke non-pertanian, dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan mempercepat degradasi lingkungan, terutama di wilayah-wilayah penyangga kota. Penerapan RTR yang tidak optimal dapat menyebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Melalui proyeksi dan analisis risiko yang baik, maka perencanaan tata ruang yang dihasilkan dapat menjamin kualitas hidup masyarakat. Proses-proses mitigasi pun bisa dilakukan seiring dengan perencanaan yang dilakukan sehingga hak-hak hidup masyarakat dapat terjamin dan berbagai persoalan maupun kerugian karena hal-hal yang dapat diprediksi menjadi dapat diminimalkan. Perencanaan RTR di wilayah-wilayah tertentu seperti pulau-pulau kecil, batas hutan, maupun perbatasan negara perlu melibatkan tidak hanya pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN, melainkan juga melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain yang terkait.

Kerja sama antar K/L lantas menjadi penting agar perencanaan dan pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan karena adanya tumpang tindih kepentingan. Harmonisasi data yang saat ini masih bersifat silo juga diperlukan untuk menjamin kualitas perencanaan yang dihasilkan agar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh K/L baik di daerah maupun pusat. Sinkronisasi dokumen-dokumen regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga perlu dilakukan agar perencanaan pada tingkat daerah dapat berjalan sesuai peruntukannya. Tidak sinkronnya kebijakan di berbagai level dapat menyebabkan tumpang tindih data dan kebijakan yang memperbesar potensi konflik. Penyesuaian format RTR pun menjadi penting untuk mempermudah proses integrasi dalam OSS sehingga dapat mempermudah proses bisnis yang dilakukan. Kepastian proses bisnis dan kualitas perencanaan yang baik nantinya akan memudahkan proses investasi sehingga nilai kebermanfaatan ruang dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai pemetaan isu dan masalah terkait penataan ruang dirangkum dengan poin-poin sebagai berikut:

1. terjadinya alih fungsi lahan pertanian;
2. terjadinya perkembangan pembangunan fisik di kawasan rawan bencana;

3. semakin meluasnya *urban sprawl* akibat tidak terkendalinya perkembangan fisik perkotaan;
4. munculnya *mega region* yang belum diatur di dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
5. masih belum optimalnya pengembangan antar regional yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan;
6. masih rendahnya daya saing sektor industri karena masih berbasis sumber daya alam dan padat karya;
7. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan bukan yang direncanakan;
8. pengembangan destinasi pariwisata baru yang menyebabkan perubahan pola ruang dan pemanfaatan ruang;
9. harmonisasi ruang darat dan laut perlu diikuti ruang kehutanan; dan
10. perencanaan tata ruang belum merespons isu-isu kontemporer (pembangunan rendah karbon, transformasi digital, geopolitik dan globalisasi).

B. Isu Pertanahan

Ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah menjadi isu penting terkait dengan struktur agraria Indonesia yang bertujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Realita menunjukkan bahwa tanah menjadi aset yang kepemilikannya dapat terakumulasi pada segelintir pihak, baik oleh pemilik modal, petani kaya, maupun penduduk perkotaan yang menguasai tanah-tanah di pedesaan. Privatisasi tanah lantas menjadi persoalan utama yang perlu dikelola agar distribusi tanah lebih adil dan mengedepankan kepentingan sosial. Berdasarkan data masyarakat sipil bahwa 68% (enam puluh delapan persen) dari seluruh daratan di Indonesia saat ini dikuasai oleh hanya 1% (satu persen) kelompok pengusaha dan badan korporasi besar. Ketimpangan ini disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan besar yang menggusur tanah masyarakat adat dan petani kecil. Selain itu, perkembangan kota dan pembangunan infrastruktur juga sering menyebabkan konsentrasi penguasaan tanah pada segelintir pihak. Privatisasi tanah lantas menjadi persoalan utama yang perlu dikelola agar distribusi tanah lebih adil dan mengedepankan kepentingan sosial.

Kepastian hukum hak atas tanah juga menjadi salah satu persoalan tenurial terkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Terdapat bidang tanah yang belum terdaftar, belum bersertipikat, sehingga kepemilikan tanah tersebut dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak (*mafia tanah*) yang membajak negara melalui sekumpulan kuasa (*bundle of power*) yang dimainkannya. Dalam proses pendaftaran dan pemberian kepastian hak atas tanah, ketidaksesuaian kepemilikan tanah pada sertipikat dengan objek bidang tanah seringkali menimbulkan masalah hukum yang kompleks, terlebih jika proses pendaftaran tanah yang belum berjalan dengan baik dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap prosedur legalitas tanah. Selain itu juga kepastian batas bidang tanah antara kawasan hutan dan bukan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) belum *clean and clear* sehingga berdampak pada kepastian hak atas tanah yang ternyata secara eksisting tumpang tindih dengan kawasan hutan. Adanya sistem waris-pecah dimana lahan yang diwariskan, dipecah, dan dibagi kepada beberapa pihak secara “di bawah tangan” menjadi salah satu faktor yang mendorong ketidaksesuaian tersebut. Alas hak yang diturunkan karena peninggalan masa lalu namun belum didaftarkan legalitas tanahnya juga menjadi faktor adanya tumpang tindih pasca penetapan batas

kawasan hutan. Ketidaksinkronan ini semakin kompleks karena pada periode tersebut tidak terdapat basis data spasial terintegrasi yang memuat informasi batas administrasi, batas kawasan hutan, dan hak kepemilikan tanah. Penyelesaian tumpang tindih memerlukan pendekatan yang menggabungkan penelusuran historis dokumen, verifikasi spasial berbasis teknologi geospasial. Kesesuaian antara objek dan subjek agraria ini menjadi persoalan, terlebih lagi tidak semua subjek agraria paham atas mekanisme pendaftaran tanah. Ketidaktahuan ini lantas berpengaruh pula pada kecenderungan masyarakat untuk memasrahkan proses pendaftaran tanah pada pihak ketiga bahkan terjebak dalam skenario percaloan.

Upaya penurunan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah telah dilakukan negara melalui penyelenggaraan reforma agraria. Operasionalisasi reforma agraria tersebut dijalankan melalui dua skenario utama yaitu legalisasi aset dengan target 4.500.000 ha (empat juta lima ratus ribu hektare) dan redistribusi tanah dengan target 4.500.000 ha (empat juta lima ratus ribu hektare). Capaian legalisasi aset melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target 3.900.000 ha (tiga juta sembilan ratus ribu hektare) tercapai dengan sangat baik bahkan melampaui target. Capaian legalisasi aset melalui PTSL per Mei 2024 sekitar 10.500.000 ha (sepuluh juta lima ratus ribu hektare) yang terdiri dari 33.000.000 (tiga puluh tiga juta) bidang tanah. Sayangnya di sisi lain, target legalisasi aset tanah transmigrasi seluas 600.000 ha (enam ratus ribu hektare) baru tercapai sekitar 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen) atau seluas 148.621 ha (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu hektare). Persoalan rendahnya capaian target pada legalisasi tanah transmigrasi disebabkan persoalan tumpang tindih dengan kawasan hutan dan perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan transmigrasi yang terjadi di bawah tangan. Begitu juga halnya dengan redistribusi tanah yang dioperasikan dalam 2 (dua) skenario yaitu redistribusi tanah negara/bekas HGU dan tanah negara lainnya berhasil melampaui target dari 400.000 ha (empat ratus ribu hektare) menjadi 1.400.000 ha (satu juta empat ratus ribu hektare). Berbeda dengan target dari redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dari target 4.100.000 ha (empat juta seratus ribu hektare) hanya tercapai 383.076 ha (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh enam hektare) atau sekitar 9,3% (sembilan koma tiga persen).

Redistribusi tanah melalui reforma agraria menjadi langkah konkret negara dalam rangka mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan memberikan keadilan melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Belum optimalnya integrasi lintas K/L menyebabkan tanah dari pelepasan kawasan hutan tidak semua dapat dijadikan sebagai objek redistribusi tanah, padahal ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terbesar ada di kawasan hutan, khususnya terkait dengan 20% (dua puluh persen) dari areal pelepasan kawasan hutan untuk “plasma” masyarakat. Kondisi ini membuat banyak lahan potensial menjadi tidak dapat difungsikan dengan baik meski memiliki kapasitas untuk dilakukan *redevelopment*.

Reforma agraria di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan, serta terluar juga perlu dipercepat untuk mendukung Indonesia sebagai negara kepulauan karena dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan pertanahan yang mendukung transformasi ekonomi ini kedepannya akan turut berkontribusi dalam mendorong Indonesia keluar dari *middle income trap* serta mengentaskan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi soal.

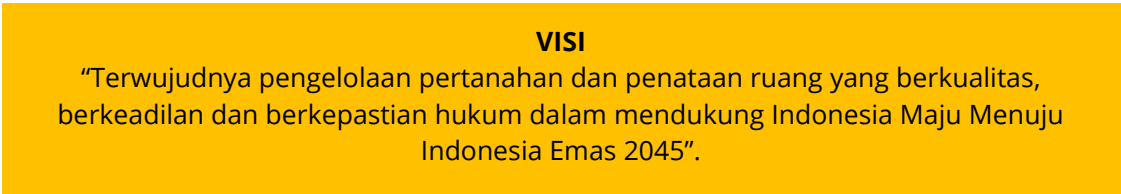
Dengan demikian, berbagai pemetaan isu dan masalah terkait penguasaan dan pengelolaan pertanahan dirangkum dengan poin-poin sebagai berikut:

1. tingginya rasio gini pemilikan dan penguasaan tanah;
2. belum semua bidang tanah terdaftar/bersertipikat;
3. pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat;
4. jaminan kepastian hukum hak atas tanah;
5. tumpang tindih kewenangan antar K/L;
6. transformasi digital pelayanan pertanahan; dan
7. proses bisnis pelayanan pertanahan yang rumit, tingginya sengketa dan konflik pertanahan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN

2.1. Visi Kementerian

Kementerian ATR/BPN menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian ATR/BPN selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:



Gambar 2.1 Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Visi tersebut akan menjadi pedoman, motivasi, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berkualitas mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut menekankan pentingnya transformasi tata kelola, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kepastian hukum melalui kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan kekinian data. Transformasi tata kelola dilakukan melalui digitalisasi, transparansi, dan koordinasi lintas sektor, sementara transformasi ekonomi mendorong pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan produktif, serta transformasi sosial berfokus pada penyelesaian konflik agraria dan pemberdayaan masyarakat. Kelengkapan data memastikan seluruh bidang tanah terdaftar, akurasi, dan konsistensi menjaga keselarasan antara kebijakan dan kondisi di lapangan, serta kekinian data menjamin relevansi informasi. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung visi “Indonesia Maju, Berdaulat, Adil, dan Makmur” melalui pembangunan yang inovatif, berdaulat atas sumber daya, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pernyataan mengenai transformasi tata kelola, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang memiliki keterkaitan erat dengan RPJMN Tahun 2025-2029, yang menekankan pentingnya reformasi agraria dan penataan ruang guna mencapai pembangunan berkelanjutan. RPJMN menetapkan prioritas untuk mempercepat legalisasi tanah, mengurangi konflik agraria, dan memastikan pemanfaatan ruang yang efektif, yang membutuhkan data pertanahan dan tata ruang yang lengkap, akurat, konsisten, dan selalu diperbarui. Transformasi tata kelola dengan digitalisasi dan transparansi mendukung upaya ini, menciptakan layanan publik yang efisien, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor.

Pada aspek tata kelola, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pertanahan dan tata ruang sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan pemanfaatan lahan. RPJMN mendorong sinergi lintas sektor dan integrasi kebijakan untuk memastikan bahwa pembangunan di semua wilayah berjalan sesuai rencana tata ruang nasional. Selain itu, modernisasi layanan pertanahan melalui sistem elektronik (seperti *e-certificate* dan pendaftaran tanah *online*) merupakan bagian dari

transformasi yang dibutuhkan untuk mendukung prioritas RPJMN dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Secara ekonomi, pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang tepat akan mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan mendukung investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Percepatan sertifikasi tanah membuka akses kredit bagi masyarakat dan dunia usaha, memperluas peluang ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini selaras dengan agenda RPJMN untuk memperkuat ekonomi daerah dan mempercepat pemulihan pasca-pandemi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan ruang yang produktif serta berkelanjutan.

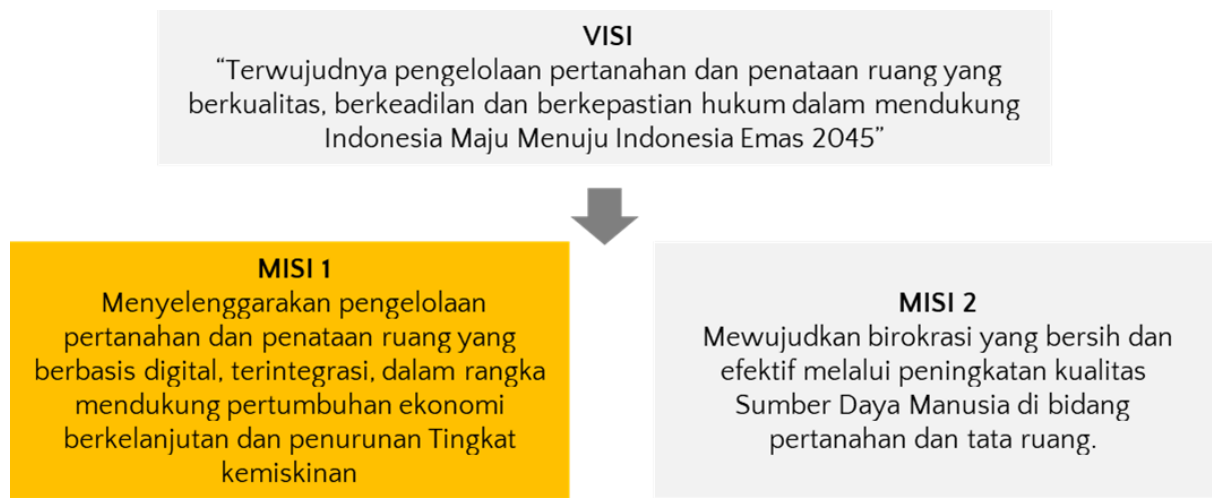
Transformasi sosial dalam sektor ini juga menjadi fokus utama RPJMN melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik agraria. Redistribusi lahan dalam rangka reforma agraria meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi mereka akses terhadap sumber daya produktif. Selain itu, penataan ruang yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dan hak ulayat menjadi penting untuk menghindari ketimpangan sosial dan konflik. Kebijakan ini tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain aspek ekonomi dan sosial, RPJMN juga menekankan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan mitigasi perubahan iklim. Transformasi tata ruang yang terencana dan terukur sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan ruang yang efisien membantu pemerintah mengurangi risiko kerusakan lingkungan, mencegah alih fungsi lahan yang berlebihan, dan menjaga kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan tercapainya sinergi antara transformasi di sektor pertanahan dan tata ruang dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan visi “Indonesia Maju, Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Kebijakan yang terukur dan berbasis data akan memperkuat daya saing nasional sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Transformasi ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga Indonesia dapat mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

2.2 Misi Kementerian/Lembaga

Untuk mencapai visi Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029, berdasarkan mandat Kementerian ATR/BPN dijalankan melalui 2 (dua) misi dengan uraian sebagai berikut :



Gambar 2.2 Misi 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital dan terintegrasi merupakan pendekatan strategis yang sangat penting dalam rangka mencapai transformasi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat mengelola data dan informasi terkait ruang dan pertanahan secara lebih efisien, serta mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan sumber daya. Hal ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pelestarian lingkungan.

Salah satu komponen utama dari pendekatan ini adalah digitalisasi, yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara *real-time*. Sistem berbasis digital memfasilitasi pengelolaan data yang lebih baik, termasuk peta penggunaan lahan, informasi kepemilikan tanah, dan data lingkungan. Integrasi data dari berbagai sumber ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi pertanahan dan tata ruang. Dengan informasi yang lebih akurat dan terkini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya.

Dengan menerapkan sistem digital dalam administrasi pertanahan, proses pengelolaan menjadi lebih efisien. Digitalisasi dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat proses layanan publik, seperti pendaftaran tanah dan permohonan izin penggunaan lahan. Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari sistem informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan informasi yang relevan mengenai penggunaan dan kepemilikan lahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya.

Penerapan penataan ruang yang terintegrasi dan berbasis digital mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem pemantauan yang efektif, pemerintah dapat mengidentifikasi penggunaan lahan yang merugikan lingkungan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Data yang akurat dan terkini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kawasan lindung dan mengelola risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Dengan demikian, penataan ruang yang baik berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

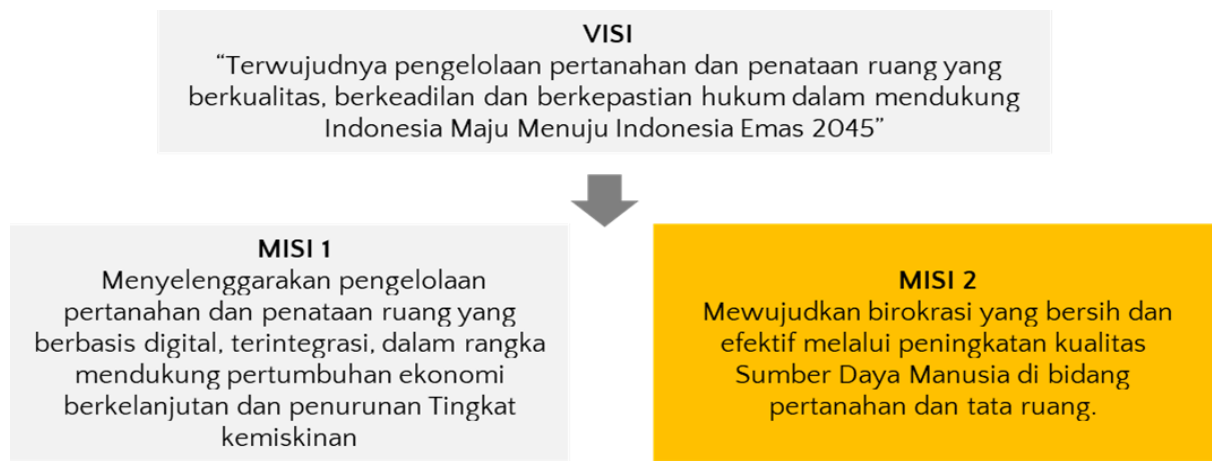
Aspek pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari transformasi ini. Sistem berbasis digital memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pertanahan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada. Selain itu, informasi yang transparan dapat membantu dalam penyelesaian konflik agraria dan meningkatkan keadilan sosial. Pemberdayaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di masyarakat.

Penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efisien dan terintegrasi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan mempermudah akses informasi mengenai kepemilikan tanah dan izin penggunaan lahan, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Sertifikasi tanah yang cepat dan efektif membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kredit dan mengembangkan usaha. Selain itu, pemanfaatan ruang yang terencana dengan baik dapat menciptakan kawasan industri dan komersial yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.

Pengelolaan pertanahan yang berbasis digital dan terintegrasi juga dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan informasi, pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan lahan dan ruang. Hal ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda, menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan ini juga membantu dalam penyelesaian konflik agraria yang seringkali menjadi sumber ketegangan sosial.

Dalam konteks perubahan iklim yang semakin mendesak, pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat. Dengan data yang akurat dan sistem pemantauan yang efisien, pemerintah dapat merumuskan kebijakan mitigasi yang lebih efektif dan responsif terhadap dampak perubahan iklim. Penataan ruang yang baik juga dapat meminimalkan risiko bencana dan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem yang ada, sehingga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman lingkungan.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berbasis digital dan terintegrasi sangat penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui digitalisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, pendekatan ini menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.



Gambar 2.3 Misi 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Visi ini menargetkan Indonesia untuk menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045, bersamaan dengan peringatan 100 (seratus) tahun kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, reformasi birokrasi menjadi kunci, karena birokrasi yang baik akan memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu aspek penting dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas adalah memastikan bahwa institusi pemerintah bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah. Penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi hal yang sangat penting, dimana unit pengendalian intern dan lembaga antikorupsi berperan aktif dalam mencegah penyimpangan. Selain itu, pembentukan budaya anti-korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ditanamkan sejak dini, sehingga dapat menciptakan iklim kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Efektivitas birokrasi mengacu pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Untuk itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang berbelit-belit serta pengurangan birokrasi yang tidak perlu. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi akan sangat membantu dalam mempercepat pelayanan publik. Sistem informasi berbasis digital dapat meningkatkan aksesibilitas, memberikan data yang lebih akurat, dan mengurangi waktu pemrosesan dokumen. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari birokrasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Mewujudkan birokrasi yang berdaya saing sangat penting untuk menghadapi tantangan global dan lokal. Birokrasi yang berdaya saing memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor publik menjadi fokus utama dalam menciptakan birokrasi yang mampu bersaing. Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, ASN dapat meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik dan inovatif kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga penting untuk memperkuat daya saing birokrasi.

Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing akan berkontribusi secara langsung dalam mendorong pembangunan nasional. Keberhasilan dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan, baik dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya, sangat bergantung pada kualitas birokrasi. Dengan pengelolaan program-program pembangunan yang lebih baik, diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai lebih cepat dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses birokrasi agar dapat merespons tantangan yang ada.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu indikator utama dari keberhasilan birokrasi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan survei dan evaluasi secara berkala terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dengan mendengarkan suara masyarakat, pemerintah dapat terus memperbaiki dan menyesuaikan layanan publik agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi yang ada di masyarakat, serta mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Dengan keterlibatan masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kerja sama ini dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antar instansi pemerintah juga sangat penting dalam menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, birokrasi dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan yang tidak hanya fokus pada pencapaian *output*, tetapi juga *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing adalah langkah strategis yang krusial untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan reformasi birokrasi yang tepat, pemerintah dapat memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, dan memberikan tujuan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, serta menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara maju yang diakui dunia.

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kementerian

Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Guna mempertegas proses pengejawantahan tujuan Renstra Kementerian ATR/BPN maka perlu disusun tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan (IKT), tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif.

Sedangkan IKT secara jelas muncul pada nomenklatur Renstra K/L sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, penyusunan IKT yang sesuai dengan regulasi menjadi langkah krusial untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian ATR/BPN. IKT yang disusun membantu Kementerian ATR/BPN untuk memantau dan mengevaluasi kinerja kementerian, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

IKT yang disusun menyelaraskan dengan visi dan misi Presiden yang telah dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta visi dan misi Kementerian ATR/BPN. Sebagai contoh, salah satu misi nasional adalah peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, Kementerian ATR/BPN memiliki peran besar dalam pengelolaan tanah untuk pertanian, pengurangan sengketa pertanahan, dan distribusi tanah yang adil. IKT yang disusun dapat melibatkan persentase pengurangan jumlah sengketa pertanahan atau jumlah sertifikat tanah yang terdistribusi kepada masyarakat, yang secara langsung mendukung sasaran pembangunan nasional dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

IKT dalam Renstra Kementerian ATR/BPN dirumuskan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis yang jelas dan terukur, yang langsung terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang. IKT disesuaikan dengan jumlah tujuan dalam Renstra yang mencakup aspek kunci dalam regulasi penyusunan IKT yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Kementerian sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan presiden.

Kementerian ATR/BPN menyusun IKT juga berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan. Program seperti redistribusi tanah sering kali menjadi sorotan publik dan lembaga pengawasan. Oleh karena itu, IKT yang jelas dan sesuai regulasi memberikan dasar yang kuat untuk memantau hasil dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses distribusi tanah.

Dalam penyusunan Renstra K/L, Kementerian ATR/BPN memperhatikan kerangka regulasi yang ada. Di sisi lain, penyusunan kerangka pendanaan yang tepat untuk mencapai IKT juga penting. Dengan IKT yang spesifik, pendanaan dari APBN maupun sumber non-APBN dapat lebih terfokus pada area yang paling membutuhkan perhatian.

Penyusunan IKT yang jelas juga memfasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan target. Dengan sistem pemantauan yang berbasis pada IKT yang terukur, Kementerian ATR/BPN dapat melakukan perbaikan yang lebih cepat dan tepat jika terdapat hambatan atau ketidaksesuaian dalam implementasi program.

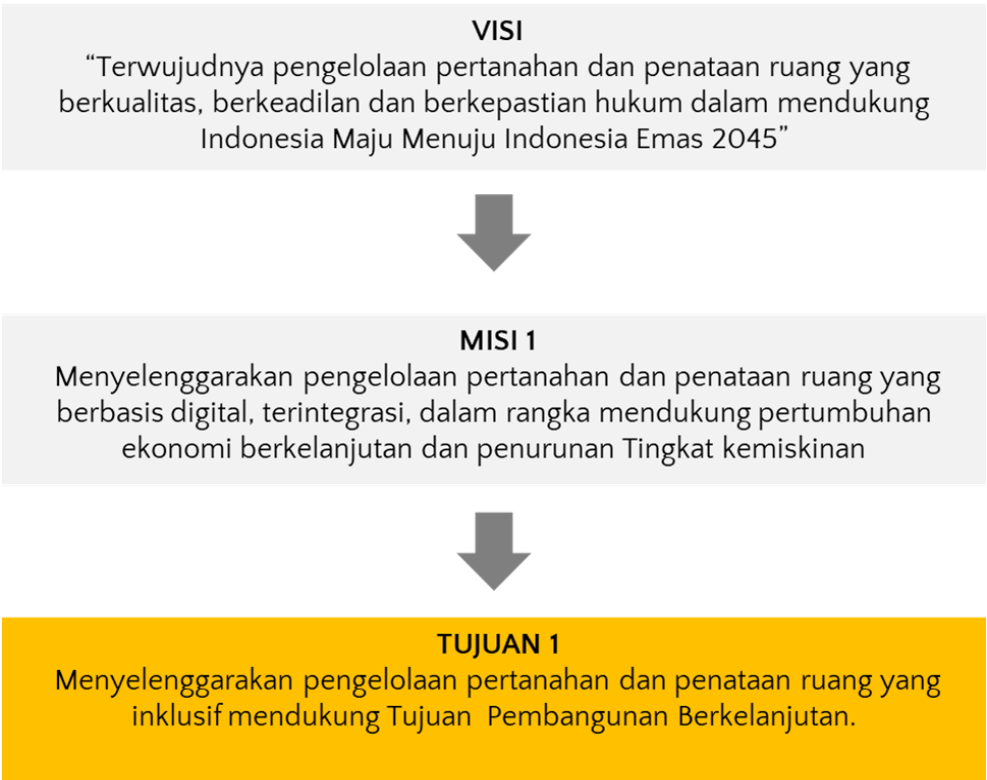
Pada tahap selanjutnya perlu penjabaran Tujuan dan IKT ke dalam sasaran strategis, proses penjabaran tersebut disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (*Land Management Paradigm*). Dalam mencapai Misi 1 "Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan”, dirumuskan 3 (tiga) tujuan mencakup:

- 1) Tujuan 1: menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Inklusif Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada Tujuan 1 terdapat 3 (tiga) IKT yaitu:

- 1. Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS;
- 2. Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang;
- 3. Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan.



Gambar 2.4 Tujuan 1 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029

Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, penataan ruang dapat mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya, mengurangi konflik pertanahan, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis.

Optimalisasi penggunaan lahan memungkinkan investasi dan pengembangan industri yang lebih efisien, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi para investor. Selain itu, penataan ruang yang baik juga memperhatikan pelestarian lingkungan, dengan menetapkan kawasan lindung dan memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga membantu menjaga kualitas hidup masyarakat dan mengurangi risiko bencana.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan penataan ruang menjadi faktor kunci dalam menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses ini tidak hanya

memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan ruang publik yang lebih baik dan akses terhadap layanan dasar. Secara keseluruhan, penataan ruang yang inklusif dan berkelanjutan menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, menghasilkan komunitas yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan, serta mendukung tujuan pembangunan yang lebih luas dan untuk masa depan yang lebih baik.

Adapun dari bidang pertanahan dalam mendukung tujuan ini dengan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang didukung oleh sejumlah faktor penting, antara lain kepastian hukum dalam proses penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, kemudahan prosedur, transparansi informasi nilai tanah, serta pengenaan tarif pelayanan pertanahan yang adil. Bahwa keberhasilan pembangunan nasional, program, dan kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan akan berdampak pada peningkatan ekonomi pada suatu wilayah. Salah satu indikator adalah adanya peningkatan nilai tanah. Dengan peningkatan nilai tanah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi pertanahan. Indikator utama peningkatan ekonomi pertanahan adalah adanya peningkatan kegiatan ekonomi disektor pertanahan. Kegiatan dimaksud antara lain peningkatan nilai transaksi tanah, pajak tanah (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan), Hak Tanggungan (HT), dan Layanan Pertanahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tujuan ini menjadi arah dalam orientasi kebijakan pertanahan yang berkelanjutan dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Nilai tambah ekonomi pertanahan memiliki hubungan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* karena peningkatan nilai tanah melalui pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (*SDGs* 8), mengurangi kemiskinan (*SDGs* 1), serta menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan (*SDGs* 11) dengan memperhatikan keadilan sosial, akses yang merata, serta menjaga fungsi ekologis lahan untuk mendukung tujuan lain seperti penanganan perubahan iklim (*SDGs* 13) dan perlindungan ekosistem darat (*SDGs* 15). Dengan demikian, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga elemen kunci dalam mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

2) Tujuan 2 : meningkatkan kepastian hak atas tanah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan nasional

Pada Tujuan 2 terdapat 1 (satu) IKT yaitu:

1. Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah



Gambar 2.5 Tujuan 2 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029

Menyelenggarakan tata kelola pertanahan yang efektif, efisien, berkepastian hukum, partisipatif, dan terintegrasi lintas sektor merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa penggunaan lahan dilakukan dengan cara yang optimal, sesuai dengan potensi dan karakteristik setiap wilayah.

Efektivitas dalam tata kelola mencakup pengurangan birokrasi yang berlebihan dan penerapan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, seperti pendaftaran tanah dan penerbitan izin penggunaan lahan. Dengan demikian, proses pengelolaan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepastian hukum adalah elemen kunci dalam tata kelola pertanahan yang baik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan transparan, masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait penggunaan dan kepemilikan lahan. Kepastian ini menciptakan iklim investasi yang lebih baik, karena investor merasa lebih aman dalam menanamkan modal mereka di suatu wilayah jika status hukum tanah yang mereka gunakan jelas. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi konflik lahan yang sering terjadi akibat tumpang tindih penggunaan lahan.

Pendekatan partisipatif dalam tata kelola pertanahan juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya

pertanahan. Proses yang inklusif ini berkontribusi pada penyelesaian sengketa lahan secara lebih damai dan adil, serta mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

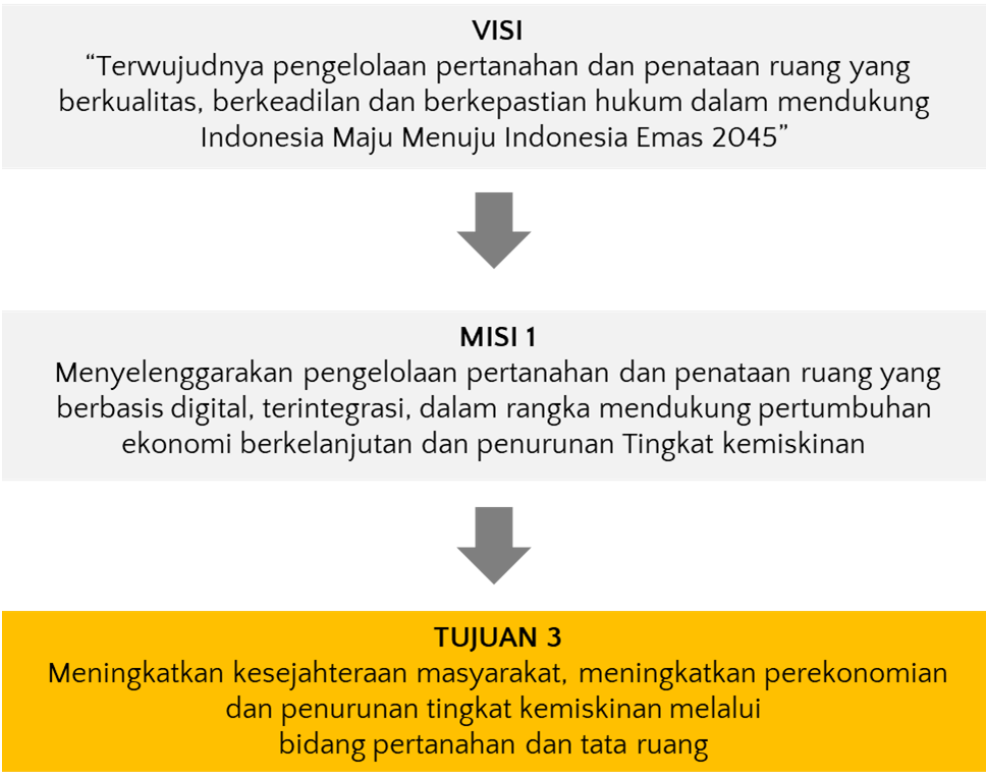
Terakhir, tata kelola pertanahan yang terintegrasi lintas sektor memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan holistik ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan menghindari konflik kepentingan antara sektor-sektor yang berbeda.

Melalui kombinasi efektivitas, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan integrasi lintas sektor, tata kelola pertanahan yang baik dapat menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Tujuan 3 : meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan penurunan tingkat kemiskinan melalui bidang pertanahan dan tata ruang

Pada Tujuan 3 terdapat 1 (satu) IKT yaitu:

1. Persentase Penerima Reforma Agraria yang Meningkatkan Kesejahteraannya



Gambar 2.5 Tujuan 3 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045, perlu sinergi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menciptakan keadilan dan pemerataan merupakan salah satu kunci untuk memastikan aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan seimbang dengan aspek lingkungan dan ekonomi.

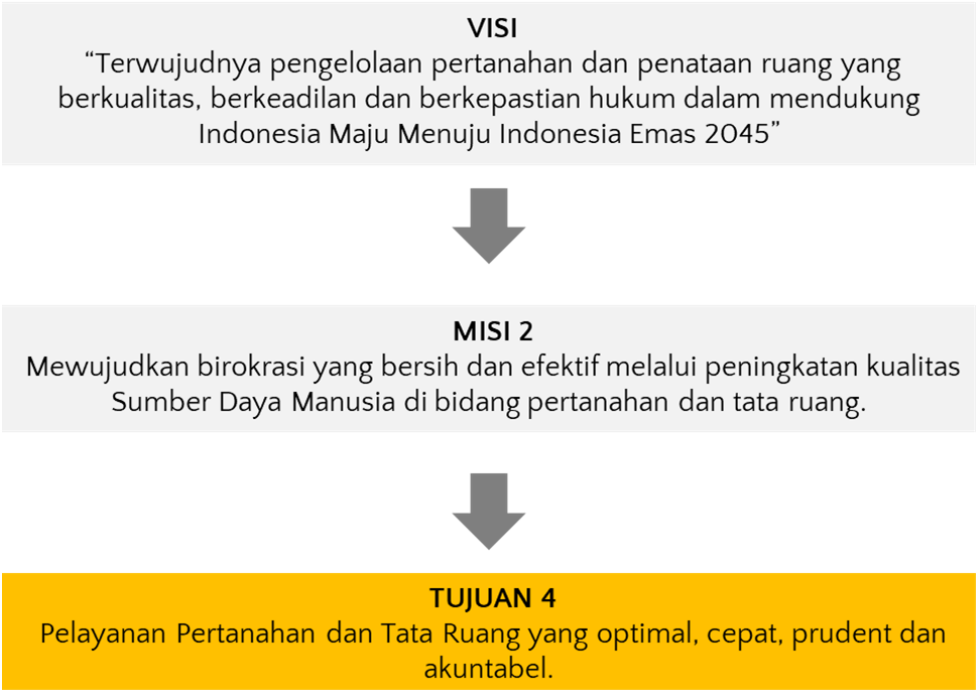
Keadilan dalam bidang pertanahan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, kelompok masyarakat, serta pelaku usaha memiliki akses yang setara terhadap tanah sebagai sumber daya strategis. Hal ini mencakup perlindungan hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria secara adil, serta distribusi kepemilikan tanah yang lebih merata guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, dalam aspek penataan ruang, pemerataan pembangunan menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kebijakan pertanahan dan penataan ruang yang berkeadilan, diharapkan pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan mendukung investasi yang berdampak positif bagi perekonomian nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

4) Tujuan 4 : pelayanan yang optimal, cepat, *prudent*, dan akuntabel

Pada Tujuan 4 terdapat 1 (satu) IKT yaitu:

1. Skor Penilaian Indeks *Business-Ready (B-Ready)*



Gambar 2.6 Tujuan 4 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029

Transformasi pelayanan yang optimal, cepat, *prudent*, dan akuntabel akan menghasilkan lembaga yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, lembaga dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan inklusif, serta menciptakan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sinergi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan memperkuat efektivitas program pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5) Tujuan 5 : Reformasi birokrasi yang bersih melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), manajemen risiko yang kuat, serta pengendalian kepatuhan (*compliance*)

Pada Tujuan 5 terdapat 1 (satu) IKT yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi



Gambar 2.7 Tujuan 5 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029

Salah satu aspek penting dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas adalah memastikan bahwa institusi pemerintah bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2004:23), *governance* didefinisikan sebagai "cara penggunaan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat." Sementara itu, *United Nations Development Program* (UNDP) mendeskripsikan *governance* sebagai "pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan."

Dengan menerapkan *Good Public Governance*, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, *Good Public Governance* juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas dan kepastian pengelolaan pertanahan dan penataan ruang, manajemen risiko sangat penting dalam mencapai reformasi birokrasi yang bersih karena memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi publik. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko, pemerintah dapat mencegah korupsi dan ketidakefisienan yang dapat menghambat upaya reformasi. Pendekatan manajemen risiko yang

terstruktur memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap transaksi keuangan, proses pengadaan, dan implementasi kebijakan, sehingga mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyalahgunaan, dan kecurangan.

Pengendalian terhadap kepatuhan merupakan bentuk pengelolaan sistem pemerintahan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya kerugian dan tindak pidana serta untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi yang bersih melalui *good public governance* (tata kelola pemerintah yang baik), *risk management* (manajemen risiko) yang kuat, serta *compliance* (pengendalian terhadap kepatuhan) dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kerja sama ini dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antar instansi pemerintah juga sangat penting dalam menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, birokrasi dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan yang tidak hanya fokus pada pencapaian *output*, tetapi juga *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat.

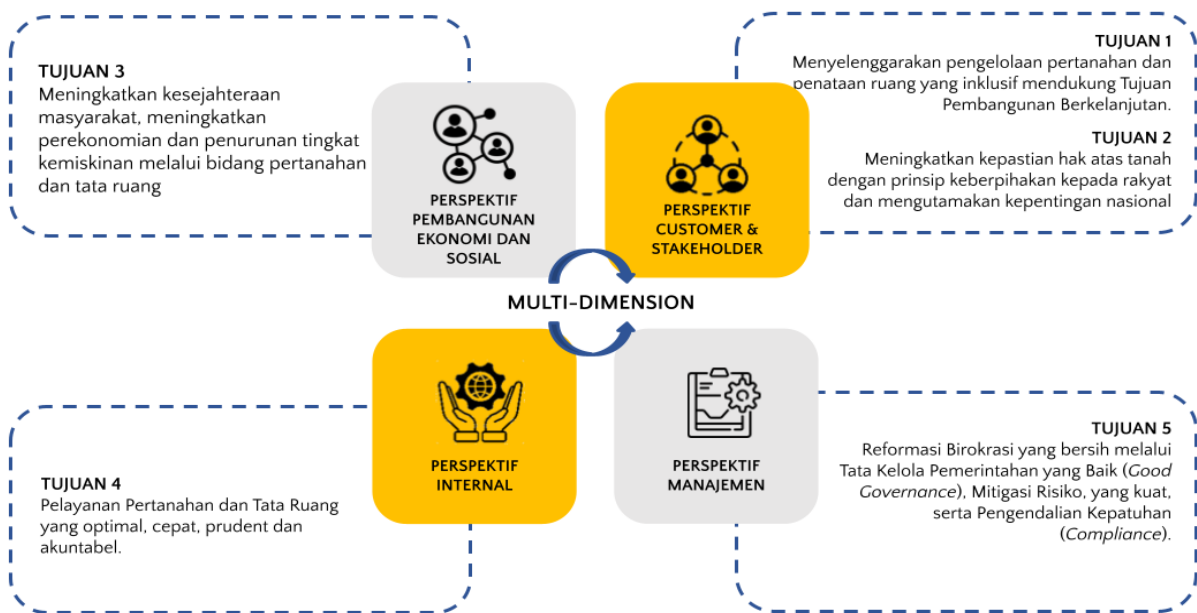


Gambar 2.8 Tujuan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029

2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian ATR/BPN yang menjadi tanggung jawab Menteri dan Wakil Menteri. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja (*performance management*) yang mengalirkan (*cascade*) visi dan misi

pada tujuan dan sasaran yang disertai indikator kinerjanya, akan dikelola berdasarkan 4 (empat) perspektif untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi. Keempat perspektif adalah perspektif pembangunan dan ekonomi sosial, *customer*, dan *stakeholders* serta perspektif internal dan manajemen. Secara lebih lengkap elaborasi keempat perspektif tersebut dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2.9 Perspektif Manajemen Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Perspektif *stakeholder* dan *customer* akan menjadi alat ukur kinerja bagi Kementerian ATR/BPN, agar kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dukungan manajemen dan perspektif internal yang akan selalu dikembangkan melalui *institutional building* dan *capacity building* merupakan agenda yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan dampak dari kinerja Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) untuk memastikan pencapaian sasaran strategis selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam perspektif pembangunan ekonomi dan sosial, secara teoritis perspektif ini bertumpu pada 2 (dua) komponen utama yaitu modal ekonomi dan modal sosial, Kementerian ATR/BPN berfokus pada optimalisasi anggaran untuk program prioritas nasional. Digitalisasi layanan pertanahan diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, penerapan tata ruang yang tepat akan mendorong investasi dan memberikan manfaat ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dari perspektif pelanggan, Kementerian ATR/BPN berupaya meningkatkan kepuasan publik dengan menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses seperti Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Penyelesaian sengketa tanah secara adil dan tepat waktu juga menjadi prioritas untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang mendorong tata kelola yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Pada perspektif proses bisnis internal, Kementerian ATR/BPN fokus pada digitalisasi dan penguatan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas layanan. Pengembangan sistem terintegrasi antara data pertanahan dan tata ruang membantu mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dilakukan agar pelayanan publik lebih cepat dan akuntabel.

Pengawasan pemanfaatan ruang juga menjadi komponen penting dalam perspektif ini untuk menghindari alih fungsi lahan ilegal dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penguatan GTRA di daerah didorong agar redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria berjalan lebih efektif. Semua proses ini mendukung tercapainya kepastian hukum dan stabilitas pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ditetapkan.

Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM. Program pelatihan dan pengembangan pegawai di bidang pertanahan, tata ruang, dan hukum dilakukan untuk memastikan kualitas layanan. Di samping itu, infrastruktur teknologi terus ditingkatkan agar Kementerian ATR/BPN dapat menyediakan layanan berbasis digital yang andal dan aman, seperti layanan *online* dan *platform* berbasis *cloud*.

Kementerian ATR/BPN juga membangun budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas untuk mendorong inovasi dan tanggung jawab dalam setiap proses kerja. Selain itu, sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta diperkuat guna memastikan koordinasi dalam pelaksanaan reforma agraria dan pemanfaatan tata ruang. Semua perspektif dalam *Balance Scorecard* (BSC) ini berfungsi sebagai landasan strategis untuk mewujudkan layanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam mencapai 5 (lima) Tujuan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029, disusun 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis 1 : terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

Peningkatan kualitas penataan ruang di Indonesia menuntut penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan wilayah. Salah satu isu utama adalah belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan dan tata ruang secara menyeluruh. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang serta pengelolaan pertanahan di berbagai level masih sering terjadi, mengakibatkan tumpang tindih hak atas tanah dan peruntukan ruang. Pada Tahun 2015 hingga 2024, terdapat 49.889 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) kasus yang terjadi akibat tidak serasnya basis data spasial lintas sektor, yang kemudian berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan investasi.

Di sisi lain, tekanan terhadap lahan produktif terus meningkat seiring pesatnya urbanisasi dan ekspansi infrastruktur. Menurut Data Kementerian ATR/BPN, di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat terjadi alih fungsi lahan sawah mencapai 136.000 ha (seratus tiga puluh enam ribu hektare) pada Tahun 2019 hingga 2021. Lemahnya pengendalian dapat menyebabkan ruang-ruang yang seharusnya dijaga untuk ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem tereduksi untuk kepentingan jangka pendek.

Permasalahan semakin kompleks dengan belum meratanya penyusunan dan pemanfaatan RDTR. Pada Tahun 2024, dari 567 (lima ratus enam puluh tujuh) Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) masih terdapat 267 (dua ratus enam puluh tujuh) RDTR yang belum terintegrasi dalam sistem OSS. Ketidaktersediaan RDTR mengakibatkan proses perizinan sering tidak berbasis rencana tata ruang, yang pada akhirnya berisiko menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, ketidaktepatan lokasi kegiatan usaha, dan gangguan terhadap kepentingan publik maupun kelestarian lingkungan.

Isu penatagunaan tanah yang belum optimal juga menjadi tantangan serius. Lemahnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang telah memicu banyak pelanggaran, seperti pembangunan di kawasan lindung atau sempadan sungai. Pada tahun 2024, terdapat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana dan cenderung mengabaikan aspek daya dukung lingkungan. Ketika pengendalian ini tidak diperkuat, potensi bencana dan kerusakan lingkungan akan terus meningkat, terlebih di tengah ancaman perubahan iklim. Saat ini, lebih dari 60% (enam puluh persen) wilayah Indonesia tergolong berisiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor, dan kekeringan ekstrim.

Dengan memperkuat integrasi data spasial, menyediakan RDTR yang berkualitas dan terjangkau, serta menerapkan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Setiap langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan koordinasi dan efisiensi penataan ruang, tetapi juga membangun fondasi bagi terciptanya wilayah yang lebih tertata, adaptif terhadap risiko, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.

2) Sasaran strategis 2 : peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam mendukung perekonomian nasional

Penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas merupakan pondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai program pembangunan strategis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penyediaan tanah dalam skala besar untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan infrastruktur lainnya. Meskipun Undang-Undang telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih sering menemui kendala teknis dan sosial, seperti ketidaksesuaian data yuridis dan fisik, sengketa kepemilikan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Pada tahun 2024, capaian pengadaan tanah untuk mendukung berbagai proyek strategis tersebut telah mencapai 36.617,37 ha (tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh belas koma tiga puluh hektare), namun tantangan dalam percepatan dan efisiensi pengadaan tanah tetap menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Dalam konteks penyediaan lahan untuk kepentingan umum, Kementerian ATR/BPN juga mendorong konsolidasi tanah sebagai pendekatan kolaboratif untuk menata kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tidak efisien.

Melalui program ini, tanah-tanah dengan status dan bentuk penguasaan yang tidak beraturan dapat dioptimalisasi menjadi kawasan hunian, fasilitas umum, hingga ruang terbuka hijau yang lebih tertata dan berdaya guna. Di sisi lain, penyusunan kebijakan pertanahan yang akurat juga memerlukan instrumen ekonomi pertanahan yang kuat.

Hingga tahun 2024, telah disusun peta Zona Nilai Tanah (ZNT) seluas 3.270.800 ha (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus hektare) sebagai landasan untuk transparansi nilai tanah dalam proses pengadaan, perpajakan, serta penilaian aset negara dan investasi. Namun, cakupan ZNT ini masih perlu diperluas untuk mencakup seluruh wilayah strategis nasional agar sistem nilai tanah menjadi lebih adil, objektif, dan mendorong pemanfaatan lahan yang efisien. Idealnya, kebijakan pertanahan ke depan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya saing investasi, memperkuat akses masyarakat terhadap tanah, dan menjamin keberlanjutan tata ruang, sehingga penyelenggaraan pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

3) Sasaran strategis 3 : kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat

Sasaran strategis kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu penjabaran untuk penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keberpihakan kepada rakyat. Kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat, memperoleh hak kepemilikan tanah yang sah dan terlindungi secara hukum.

Hingga Desember 2024, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 120.900.000 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu) bidang tanah melalui PTSL. Capaian ini melampaui target awal tahun 2024 sebesar 120.000.000 (seratus dua puluh ribu juta) bidang tanah, dan telah mencapai sekitar 95,9% (sembilan puluh lima koma sembilan persen) dari target nasional sebanyak 126.691.049 (seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh sembilan) bidang tanah yang ditetapkan untuk diselesaikan hingga akhir tahun 2029.

Pada posisi terkini per Juni tahun 2025, jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat tercatat sebanyak 96.367.586 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam) bidang, yang mencakup luas wilayah sebesar 47.219.768 ha (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan hektare). Sementara itu, sisa bidang tanah yang telah terdaftar namun belum bersertipikat masih dalam proses penyelesaian baik secara administratif maupun teknis.

Untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2029, Kementerian ATR/BPN menargetkan tambahan penerbitan sertipikat sebanyak 30.323.463 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga) bidang tanah atau sekitar 11.200.000 ha (sebelas juta dua ratus ribu hektare). Dengan demikian, pada akhir tahun 2029, ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia yang menjadi objek pendaftaran telah mencapai jumlah keseluruhan sebanyak 126.691.049 (seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh sembilan) bidang tanah

yang telah terdaftar dan bersertipikat secara lengkap serta sah menurut hukum.

Program PTSL ini telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, sekitar 74.900.000 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu) bidang tanah berhasil didaftarkan dalam tujuh tahun terakhir, melampaui hasil pendaftaran tanah selama 55 (lima puluh lima) tahun sebelumnya (1961–2016). Sepanjang tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah meredistribusi sebanyak 251.049 (dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh sembilan) bidang tanah kepada masyarakat, yang mencakup luas sekitar 125.552 ha (seratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua hektare). Dengan capaian ini, total luas bidang tanah yang telah berhasil didistribusi kepada masyarakat mencapai sekitar 4.300.000 ha (empat juta tiga ratus ribu hektare) atau setara dengan 6.100.000 (enam juta seratus ribu) bidang tanah sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria.

Terdapat potensi legalisasi aset dari berbagai jenis tanah yang hingga saat ini belum bersertipikat. Salah satunya adalah tanah milik masyarakat adat, di mana masih banyak komunitas adat yang belum mendapatkan pengakuan hukum formal atas wilayah yang mereka kelola secara turun-temurun. Selain itu, tanah di kawasan transmigrasi juga menjadi sasaran legalisasi, karena sejumlah lahan yang diberikan kepada transmigran belum sepenuhnya memiliki sertipikat hak atas tanah. Potensi lainnya berada di kawasan perkotaan dan perdesaan, di mana masih terdapat bidang tanah milik individu maupun kelompok yang belum terdaftar secara resmi. Tanah eks-HGU yang masa berlakunya telah habis juga menjadi lahan potensial untuk legalisasi, karena dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam rangka mendukung program reforma agraria. Begitu pula dengan tanah negara yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat melalui redistribusi tanah.

Melalui percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian tumpang tindih kepemilikan, serta penguatan sistem administrasi pertanahan yang transparan dan berbasis digital, kebijakan ini dapat mencegah praktik perampasan lahan dan ketidakpastian hukum yang merugikan rakyat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap permodalan dan investasi produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkeadilan juga mendukung stabilitas nasional serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak rakyat atas tanah.

Dalam sasaran strategis ini juga menargetkan terciptanya sistem penyelesaian yang adil, cepat, transparan, dan berbasis pada penghormatan hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat adat. Administrasi pertanahan harus terintegrasi dengan data digital yang akurat dan mudah diakses publik untuk meminimalkan tumpang tindih klaim. Melalui penertiban administrasi pertanahan, termasuk digitalisasi data dan verifikasi kepemilikan lahan. Melalui evaluasi dan redistribusi tanah yang lebih adil, hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan dapat lebih terlindungi, sementara kepentingan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, tetap terjaga.

Berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 5.973 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh

tiga) kasus pertanahan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut terdiri atas 1.664 (seribu enam ratus enam puluh empat) kasus sengketa, 60 (enam puluh) kasus konflik, dan 4.249 (empat ribu dua ratus empat puluh sembilan) perkara hukum. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 3.056 (tiga ribu lima puluh enam) kasus telah berhasil diselesaikan, yang meliputi 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) sengketa, 37 (tiga puluh tujuh) konflik, dan 1.882 (seribu delapan ratus delapan puluh dua) perkara. Lebih lanjut, kasus-kasus pertanahan ini diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya. Sebanyak 5.552 (lima ribu lima ratus lima puluh dua) kasus termasuk dalam kategori *low intensity conflict*, yakni konflik dengan intensitas rendah seperti perselisihan warisan antar individu. Sementara itu, terdapat 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) kasus yang masuk dalam kategori *high intensity conflict*, yaitu konflik yang melibatkan individu dengan korporasi atau antar korporasi dengan negara. Selain itu, terdapat pula 47 (empat puluh tujuh) kasus yang tergolong *political intensity conflict*, yaitu konflik yang berpotensi menimbulkan dampak politik, seperti sengketa antara masyarakat dengan negara yang berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur.

Untuk menurunkan jumlah kasus sengketa konflik pertanahan di Indonesia, diperlukan strategi yang terstruktur dan menyeluruh. Salah satu langkah utama adalah melaksanakan reforma agraria yang adil dan partisipatif. Hal ini mencakup pemberian akses lahan kepada petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya, serta redistribusi lahan-lahan terlantar atau eks-HGU yang tidak diperpanjang. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses verifikasi dan validasi data tanah juga menjadi kunci keberhasilan.

Strategi lainnya adalah sinkronisasi regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, seperti antara Undang-Undang di bidang pertanahan, kehutanan, minerba, dan Proyek Strategis Nasional (PSN), harus diselaraskan. Aparat penegak hukum juga perlu bertindak tegas terhadap kriminalisasi warga dalam konflik lahan, serta melindungi hak masyarakat adat melalui pengakuan formal atas wilayah kelola mereka. Untuk mencegah timbulnya konflik baru, perlu dilakukan langkah-langkah preventif. Salah satunya adalah penyuluhan dan edukasi hukum agraria kepada masyarakat, agar mereka memahami hak atas tanah serta prosedur legalitas yang sah. Selain itu, sistem perizinan juga harus dibuat lebih transparan dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya dan melakukan studi dampak sosial serta lingkungan sebelum izin diterbitkan.

- 4) Sasaran strategis 4 : keadilan hak atas tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Masalah ketidakmerataan kepemilikan dan penguasaan tanah masih menjadi isu besar di Indonesia. Ketidaksetaraan ini menghalangi banyak orang, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah, untuk memiliki tanah yang sah dan layak untuk digunakan, baik sebagai tempat tinggal maupun untuk kegiatan produktif lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menjalankan berbagai program, seperti reforma agraria, redistribusi tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam kepemilikan tanah. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan memanfaatkan tanah dengan lebih baik untuk kepentingan masyarakat.

Hingga Tahun 2024 Indeks Gini Rasio Ketimpangan Penguasaan Tanah sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) yang berarti 68% (enam puluh delapan persen) tanah dan kekayaan Indonesia dikuasai oleh hanya 1% (satu persen) kelompok masyarakat.

Saat ini, Pemerintah terus melaksanakan reforma agraria dengan target memberikan legalisasi aset melalui redistribusi tanah yang ditindaklanjuti dengan penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Pada tahun 2024, redistribusi tanah telah mencakup lebih dari 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu) bidang tanah, dengan sekitar 237.000 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu) diantaranya sudah disertipikatkan. Meski pencapaian ini cukup signifikan, masih banyak tanah yang belum terdaftar atau tersertifikasi. Bahkan, ada sekitar 5.100.000 (lima juta seratus ribu) bidang tanah yang belum terdaftar dan 30.700.000 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu) bidang yang belum memiliki sertipikat. Selain itu, masih terdapat lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) kasus sengketa pertanahan yang sedang diproses. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus lebih cepat dan efisien agar semua masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka atas tanah.

Idealnya, semua lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat mengakses dan memiliki tanah secara adil dan merata. Pemerintah harus memastikan bahwa sertifikasi tanah mencakup seluruh bidang tanah di Indonesia, termasuk tanah ulayat dan tanah wakaf, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak kepemilikan tersebut. Penyelesaian sengketa pertanahan juga harus dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, agar tidak ada yang terpinggirkan dari hak tanah mereka. Hingga tahun 2024, sekitar 95,9% (sembilan puluh lima koma sembilan persen) dari sekitar 120.900.000 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu) bidang tanah yang terdaftar sudah tercatat, namun hanya sekitar 74.800.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu) bidang yang telah disertipikatkan. Penyelesaian sengketa dan percepatan sertifikasi tanah menjadi langkah penting untuk memastikan semua orang memiliki hak yang jelas atas tanah mereka.

Penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting untuk meningkatkan akses mereka terhadap hunian yang layak. Pemerintah telah mengalokasikan tanah negara untuk membangun perumahan yang dapat diakses oleh mereka yang kurang mampu. Pada tahun 2024, lebih dari 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu) bidang tanah telah disiapkan untuk redistribusi guna pembangunan perumahan. Program transmigrasi dan redistribusi tanah juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Hingga akhir tahun 2024, sekitar 123.915 (seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas) kepala keluarga telah mendapatkan akses reforma agraria, dengan target 129.200 (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus) kepala keluarga yang akan mendapatkan tanah hingga akhir tahun. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat di daerah padat penduduk atau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi untuk memperoleh tanah yang layak dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, tanah tidak hanya memberikan hak kepemilikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata di seluruh masyarakat.

5) Sasaran strategis 5 : pelayanan pertanahan dan tata ruang yang efisien dan efektif

Pelayanan pertanahan dan tata ruang di Indonesia menghadapi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius agar dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan adil. Salah satu isu utama adalah ketimpangan kepemilikan tanah, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak. Program-program seperti transmigrasi dan pembagian tanah untuk kesejahteraan masyarakat belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, proses sertipikasi tanah yang lambat juga menjadi hambatan besar, dengan sekitar 30.000.000 (tiga puluh juta) bidang tanah yang belum disertipikasi. Sengketa pertanahan yang memakan waktu lama juga memperburuk keadaan, memperlambat kepastian hukum dan memperburuk akses masyarakat terhadap hak atas tanah mereka. Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk menerapkan teknologi digital dalam pelayanan pertanahan, penerapan sistem digital masih terbatas, yang menghambat efisiensi dalam administrasi pertanahan dan tata ruang.

Saat ini, kondisi eksisting menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam proses pendaftaran dan sertipikasi tanah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Hingga Desember 2024, lebih dari 74.000.000 (tujuh puluh empat juta) bidang tanah terdaftar dan sekitar 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) bidang sudah disertipikatkan, tetapi masih ada sekitar 5.100.000 (lima juta seratus ribu) bidang tanah yang perlu didaftarkan pada 2025. Meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sektor pertanahan mencapai sekitar Rp 2.830.000.000.000 (dua triliun delapan ratus tiga puluh miliar rupiah) pada tahun 2024, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital, yang mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan. Penyelesaian sengketa pertanahan juga masih memakan waktu lama, dan sebagian besar kasus belum dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penyelesaian sengketa, konflik dan perkara di bidang pertanahan yang perlu segera diperbaiki.

Kondisi ideal yang harus dicapai adalah sistem pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih efisien, transparan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan kepemilikan tanah perlu diutamakan, dengan program yang memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat adat memiliki akses yang lebih mudah terhadap hak atas tanah. Proses sertipikasi tanah harus dipercepat, dengan target agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan disertipikatkan pada tahun 2025. Penyelesaian sengketa pertanahan juga harus dilakukan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses hukum dan memberikan transparansi dalam keputusan pengadilan. Implementasi teknologi digital di sektor pertanahan perlu diperluas, dengan semua kantor pertanahan di Indonesia mengadopsi sistem digital yang mempermudah akses layanan serta mempercepat proses administrasi dan perizinan.

Selain itu, untuk mencapai kondisi ideal ini, penguatan SDM dalam sektor pertanahan dan tata ruang sangat diperlukan. Peningkatan kapasitas teknis, manajerial, serta pemahaman tentang regulasi dan teknologi baru akan sangat membantu dalam mendorong efisiensi pelayanan. Kelembagaan di sektor ini juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat secara merata. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

6) Sasaran strategis 6 : meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak

Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak menjadi strategi utama di Kementerian ATR/BPN. Melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak, baik dari aspek teknis maupun manajerial, kebijakan ini diarahkan untuk membentuk aparatur negara yang mampu berpikir strategis, responsif terhadap perubahan, serta tanggap terhadap dinamika sosial dan kebijakan nasional.

Langkah-langkah strategis ini diwujudkan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek: mulai dari penguatan teknis pertanahan dan tata ruang, keterampilan manajerial, hingga literasi digital. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola risiko (*risk management*), menyusun kebijakan berbasis data, serta melakukan pengawasan internal dengan pendekatan *compliance* yang kuat.

Peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip *Good Public Governance* juga menjadi bagian integral dari pengembangan SDM. Nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi terus ditanamkan dalam setiap jenjang organisasi. Dengan demikian, budaya kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dapat dibangun secara sistematis dari dalam tubuh organisasi.

Selanjutnya, penguatan dalam aspek manajemen risiko dan kepatuhan terhadap Regulasi (*Compliance*) memberikan pegawai kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, menganalisis dampaknya, dan merumuskan langkah mitigasi secara tepat. Proses ini penting tidak hanya untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan, tetapi juga sebagai bentuk peningkatan kapabilitas organisasi dalam menjaga integritas dan reputasi institusi di mata publik.

Integrasi pendekatan *risk-based thinking* ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan juga menempatkan SDM sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan resilien. Dalam jangka panjang, SDM yang kompeten dan berintegritas akan memperkuat fondasi organisasi yang profesional dan berbasis kinerja.

Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan *Corporate University* (CorpU) sebagai pusat pembelajaran berbasis pengetahuan yang terstruktur, guna memastikan kesinambungan kompetensi pegawai secara sistemik. Dengan pendekatan ini, pengembangan kapasitas SDM tidak lagi bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang organisasi dalam membangun birokrasi modern yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Peningkatan kapasitas SDM di Kementerian ATR/BPN juga secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek manajemen SDM aparatur dan penguatan

akuntabilitas kinerja. Kompetensi pegawai yang semakin profesional memperkuat integrasi sistem merit, perencanaan SDM berbasis kebutuhan organisasi, serta pelaksanaan sistem kerja yang kolaboratif dan berorientasi hasil. Upaya ini selaras dengan indikator-indikator penilaian reformasi birokrasi yang menuntut peningkatan kualitas tata kelola, penguatan budaya kerja berintegritas, serta pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Penguatan nilai-nilai ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (ASN BerAKHLAK) yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM di Kementerian ATR/BPN. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku setiap individu ASN, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi untuk membangun budaya organisasi yang sehat, transparan, dan berdaya saing. Dengan adanya internalisasi nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), Kementerian ATR/BPN tidak hanya mendorong peningkatan kompetensi teknis pegawai, tetapi juga mengedepankan integritas, moralitas, dan etika publik yang kuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara profesional, cepat, dan bebas dari penyimpangan.

Dalam konteks ini, sistem merit memegang peranan penting sebagai landasan utama dalam pengelolaan ASN yang berfokus pada profesionalisme dan objektivitas. Sistem merit memastikan bahwa setiap pegawai ASN diangkat, ditempatkan, dan dikembangkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja mereka, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau faktor-faktor non-teknis lainnya. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, seperti akuntabilitas dan orientasi pelayanan, menjadi semakin relevan dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan berdaya saing.

Penerapan sistem merit yang tepat akan menjamin bahwa ASN Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas. Misalnya, nilai berorientasi pelayanan mengingatkan setiap pegawai untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, sementara nilai akuntabel dan kompeten memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat transparan dan profesional. Selain itu, nilai adaptif dan kolaboratif akan mendorong ASN untuk siap menghadapi perubahan dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang ada di lapangan.

Penguatan sistem merit di Kementerian ATR/BPN akan berkontribusi pada tercapainya tujuan reformasi birokrasi yang bersih dan berdaya saing. Melalui kebijakan peningkatan kualitas SDM yang terarah, sistem merit mengharuskan setiap proses seleksi, pengembangan karier, dan promosi berdasarkan penilaian yang objektif terhadap kompetensi dan kinerja individu, sehingga ASN yang terpilih dan dikembangkan benar-benar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi negara dan masyarakat.

Dasar hukum yang mendasari penerapan sistem merit di Indonesia semakin diperkuat dengan peraturan-peraturan terbaru yang memastikan sistem pengelolaan ASN berjalan secara transparan, objektif, dan berbasis pada kualifikasi serta kinerja. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi payung hukum utama yang menegaskan bahwa seluruh pengelolaan ASN harus dilaksanakan

berdasarkan prinsip merit. Ini memastikan bahwa setiap keputusan terkait ASN, mulai dari seleksi, penempatan, hingga pengembangan karier, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan, kompetensi, dan kinerja individu secara objektif.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur lebih lanjut mengenai manajemen ASN, khususnya mengenai bagaimana sistem merit diterapkan dalam praktik seleksi, penempatan, dan pengembangan karier pegawai. Regulasi ini memberikan kerangka yang jelas bagi instansi pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip merit.

Peraturan Pemerintah dimaksud dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara juga memperkuat implementasi sistem merit dengan memberikan pedoman teknis yang lebih rinci. Peraturan-peraturan ini mengatur bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan sistem merit dilakukan untuk memastikan keberhasilannya dalam menciptakan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip merit. Dengan regulasi yang tegas dan terstruktur ini, Kementerian ATR/BPN serta seluruh instansi pemerintah dapat menjalankan pengelolaan ASN yang lebih transparan, adil, dan berbasis pada kinerja yang baik.

Dengan sistem merit yang kokoh, ASN Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga bebas dari korupsi dan penyimpangan. Penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam kerangka sistem merit ini akan menghasilkan birokrasi yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Semua ini akan memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN siap menghadapi tantangan pembangunan nasional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan semangat kebersihan, transparansi, dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 dibangun dengan 6 (enam) sasaran strategis yang saling terhubung erat, membentuk suatu siklus pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan dan adil. Semua sasaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja dalam sinergi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan (sasaran strategis 1) tidak hanya bergantung pada pengelolaan ruang yang tepat, tetapi juga pada kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas (sasaran strategis 2). Kebijakan ini menjadi dasar untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang. Tanpa kebijakan yang jelas dan tegas, ruang yang telah ditata dengan baik berisiko terancam oleh konflik atau sengketa yang bisa menghambat pertumbuhan (sasaran strategis 3).

Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak atas tanah tidak terganggu. Dalam hal ini, kepastian hak atas tanah (sasaran strategis 3) menjadi krusial, karena masyarakat hanya akan merasa aman dalam mengelola dan memanfaatkan tanah jika mereka memiliki kepastian hukum mengenai hak mereka. Kepastian ini tidak hanya berperan dalam mengurangi kasus pertanahan, tetapi juga mendorong produktivitas tanah yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kepastian dan keadilan hak atas tanah (sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4) tidak cukup hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemberian hak atas tanah secara adil menjadi landasan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya. Ketika seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak yang setara, maka potensi konflik dan ketidakpuasan akan semakin berkurang, sementara tingkat kesejahteraan secara umum akan meningkat.

Pelayanan pertanahan dan tata ruang yang efisien dan efektif (sasaran strategis 5) memainkan peran penting dalam menghubungkan seluruh elemen di atas. Tanpa adanya sistem pelayanan yang baik dan transparan, sulit bagi masyarakat untuk memperoleh hak mereka atau menyelesaikan sengketa dengan cepat. Oleh karena itu, pelayanan yang optimal, didukung oleh teknologi informasi dan sistem digital, menjadi pondasi dalam mewujudkan ruang yang tertata dengan baik, penyelesaian sengketa yang adil, serta pencapaian keadilan sosial.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak (sasaran strategis 6) merupakan elemen penentu dalam menjalankan seluruh strategi di atas. Tanpa pemerintahan yang akuntabel dan berdampak, seluruh kebijakan, penyelesaian sengketa, pelayanan, dan pengelolaan tata ruang akan terhambat.

Secara keseluruhan, 6 (enam) sasaran strategis ini bekerja dalam integrasi yang mendalam. Keberhasilan satu sasaran saling mendukung dan memperkuat sasaran lainnya. Misalnya, penyelesaian sengketa yang efektif akan mendukung kepastian hak atas tanah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan peningkatan kapasitas SDM yang akan mempercepat pencapaian ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan besar untuk menciptakan pertanahan yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan akan lebih mudah tercapai. Hal ini secara langsung akan mendukung pembangunan nasional dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Isu-isu global sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek di dalam negeri, dimana isu tersebut menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Isu global yang saat ini mengemuka terutama yaitu perubahan iklim yang mempengaruhi berbagai sektor seperti sektor pertanian, sektor kelautan, dan sektor infrastruktur. Di sisi lain, ketahanan pangan menjadi tantangan khususnya dalam hal ketergantungan pada impor bahan pangan di tengah krisis global. Isu ketahanan pangan menjadi faktor pendorong inovasi dalam sektor pertanian serta diversifikasi pangan.

Isu global lainnya yang saat ini sedang berkembang pesat yaitu digitalisasi yang merambah seluruh sektor dan berpotensi mendukung efisiensi, efektivitas, inovasi, dan transformasi layanan, serta meningkatkan akses dan inklusivitas dalam berbagai hal. Meskipun saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan khususnya dalam hal infrastruktur digital dan literasi teknologi, digitalisasi menawarkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi.

Dalam hal perdagangan global, Indonesia harus bersaing di tengah ketidakpastian perdagangan dunia dan perubahan geopolitik namun dengan memanfaatkan posisi strategis di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) serta sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut melalui respons yang strategis dan inovatif.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Isu-isu global sangat berpengaruh terhadap Indonesia dari berbagai aspek, dimana isu tersebut menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Isu strategis yang saat ini sedang berkembang salah satunya yaitu perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian, sektor kelautan, dan sektor infrastruktur di Indonesia. Di sisi lain, ketahanan pangan menjadi tantangan untuk kaitannya terhadap ketergantungan pada impor bahan pangan di tengah krisis global. Isu ketahanan pangan di Indonesia ini menjadi faktor pendorong inovasi dalam sektor pertanian serta diversifikasi pangan. Selain isu ketahanan pangan, isu global yang saat ini sedang berkembang pesat yaitu digitalisasi dan revolusi industri pada seluruh sektor di Indonesia yang mendukung efisiensi, efektivitas, inovasi dan transformasi layanan, serta meningkatkan akses dan inklusivitas dalam berbagai hal. Meskipun saat ini masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur digital dan literasi teknologi, digitalisasi menawarkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi. Dalam hal ekonomi global, Indonesia harus bersaing di tengah ketidakpastian perdagangan dunia dan perubahan geopolitik namun dengan memanfaatkan posisi strategis di ASEAN serta sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang memerlukan respons yang strategis dan inovatif.



Gambar 3.1 *Megatrend* Dunia Tahun 2045
Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017

Indonesia memiliki visi untuk keluar dari *middle income trap* pada tahun 2036 dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 mengingat pertumbuhan ekonominya cukup stabil dibanding negara lain di ASEAN dalam periode 5 (lima) tahun terakhir. Namun, sejak lama pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami ketimpangan antar wilayah. Kondisi ini dipengaruhi oleh Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman kondisi geografis dan budaya. Fenomena ini melibatkan perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan, peluang ekonomi, dan akses terhadap sumber daya.

Menurut pendapat Gill dan Kharas (2007) dalam laporan Bank Dunia, *middle income trap* merupakan suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpendapatan rendah ke menengah sehingga negara tersebut tidak dapat mencapai status pendapatan tinggi.

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dan menanggulangi ancaman *middle income trap*, Indonesia perlu melakukan transformasi digital dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3% (lima koma tiga persen) pada tahun 2022 (Sumber: BPS, 2023) menunjukkan potensi besar namun masih perlu dioptimalkan melalui pengembangan ekonomi digital. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital antara 3,17%-4,66% (tiga koma tujuh belas persen sampai dengan empat koma enam puluh enam persen) (Sumber: Katadata, 2023) menjadi indikasi bahwa sektor ini dapat menjadi penggerak utama untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan yang mencakup isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kompetisi ekonomi global. Perencanaan pembangunan di Indonesia perlu mengakomodasi isu 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim akan menjadi krusial dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan bonus demografi yang signifikan, di mana penduduk Indonesia mencapai 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) jiwa dengan 63,4% (enam puluh tiga koma empat persen) tinggal di perkotaan (BPS, 2023), potensi

angkatan kerja yang besar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Namun, di sisi lain, *aging society* yang mulai muncul juga harus diantisipasi melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan sistem kesehatan yang kuat, guna menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.



Gambar 3.2. 17 (Tujuh Belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
Sumber: United Nation, 2015

Transformasi Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesuksesan dalam mengelola tantangan digitalisasi, keberlanjutan, dan dinamika demografis.

Bidang pertanahan dan penataan ruang memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai isu global. Kedua aspek ini berperan dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta lingkungan.

Pada sisi pengaturan tata ruang, isu-isu yang ditangani meliputi perubahan iklim, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, ketersediaan air, keanekaragaman hayati, kesehatan, dan konflik. Tata ruang yang tepat membantu mitigasi dampak perubahan iklim dengan mengalokasikan ruang hijau dan kawasan konservasi. Selain itu, kebijakan tata ruang juga memastikan keberlanjutan ekosistem dan mendukung ketahanan pangan dengan memprioritaskan lahan pertanian. Manajemen air yang baik dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan konflik terkait penggunaan lahan juga dapat diatasi melalui perencanaan tata ruang yang partisipatif dan inklusif. Dukungan digitalisasi dalam perencanaan tata ruang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perencanaan. Kemajuan dalam perangkat lunak dan teknologi informasi memungkinkan model perencanaan tata ruang yang lebih akurat dan *real time*.

Sementara itu kebijakan pertanahan berfokus pada aspek sosial dan ekonomi seperti kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Kebijakan pertanahan yang adil dan transparan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan, memperkuat hak-hak kepemilikan, dan memberdayakan kelompok rentan. Selain itu, kebijakan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kepastian hukum bagi investasi di sektor pertanian dan perkotaan. Penguatan aspek kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sinergi antara tata ruang dan kebijakan pertanahan menjadi landasan bagi solusi menyeluruh untuk tantangan global. Keduanya tidak hanya melibatkan aspek lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Dengan penerapan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, kontribusi pertanahan dan penataan ruang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

3.2.1. Arah Kebijakan

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan pembangunan berkelanjutan serta visi misi yang akan dicapai, Kementerian ATR/BPN menetapkan tahapan transformasi bertahap selama 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan *Society 5.0* yang menekankan transformasi tata kelola berbasis digital, sosial, lingkungan, dan tata pemerintahan modern.



Gambar 3.3 Tahapan Transformasi Rencana Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2025-2029

Seiring dengan tujuan Indonesia Emas 2045, yang tertuang dalam RPJP Nasional Tahun 2025–2045, sektor pertanahan dan tata ruang menjadi pilar utama untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Kementerian ATR/BPN memainkan peran sentral dalam mengelola sumber daya alam dan ruang di Indonesia, dengan fokus pada pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029, yang diselaraskan dengan RPJP Nasional Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029, berfokus pada transformasi pengelolaan pertanahan dan tata ruang dengan mengintegrasikan prinsip *Society 5.0*. Dengan pemanfaatan teknologi cerdas seperti *big data*, *artificial intelligence* (AI), *cloud computing*, dan *internet of things* (IoT), Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan ruang dan tanah. Tahapan Renstra ini akan memastikan keadilan sosial melalui akses informasi yang lebih mudah, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian masalah sosial seperti konflik pertanahan dan ketimpangan lahan. Pada

tahun 2029, pengelolaan pertanahan dan tata ruang akan lebih terintegrasi dan berkelanjutan, dengan peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Tahun 2025

Fokus pada pembangunan basis data pertanahan dan tata ruang yang lengkap, berkualitas, digital, dan memiliki kepastian hukum. Ini mencakup transformasi organisasi melalui penguatan kelembagaan berbasis manajemen risiko serta integrasi layanan pertanahan dan tata ruang yang berbasis teknologi informasi secara menyeluruh.

1. Penguatan Basis Data Pertanahan dan Tata Ruang (Lengkap dan Berkualitas)

Tahun 2025 akan menjadi tahun penting bagi Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat basis data pertanahan dan tata ruang yang lebih terpadu, lengkap, dan berkualitas. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan 126.691.049 (seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh sembilan) bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2025. PTSL menjadi program strategis pemerintah untuk memastikan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat Indonesia, mendukung sektor ekonomi, dan meningkatkan investasi.

Selain PTSL, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik menetapkan standar pendaftaran tanah yang lebih transparan dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan keterbukaan informasi pada sektor pertanahan dan tata ruang yang berbasis data *real-time*.

Dalam konteks *Society 5.0*, pengelolaan data pertanahan dan tata ruang berbasis digital mengintegrasikan *big data*, *cloud computing*, dan AI untuk mengelola dan memproses data dengan lebih efisien. Sistem digital ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pertanahan secara langsung melalui platform *online*, mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan ruang.

2. Transformasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK)

Dalam rangka mendukung transformasi digital, struktur organisasi di Kementerian ATR/BPN akan diperkuat dengan menambahkan unit yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan dan tuntutan era digital. Unit baru ini akan fokus pada pengelolaan data pertanahan dan tata ruang yang lebih integratif serta pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan kualitas data.

Peningkatan manajemen risiko dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang melalui pembaruan SOP dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berbasis teknologi, dengan tujuan mengurangi potensi sengketa pertanahan dan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan tata ruang.

Di era *Society 5.0*, organisasi yang *agile* dan adaptif sangat penting untuk menjawab kebutuhan yang berkembang pesat, salah satunya dalam pengelolaan data pertanahan yang dinamis. Penggunaan AI dalam analisis data akan membantu aparat pemerintah untuk mengelola sumber daya tanah secara lebih produktif dan berkelanjutan.

3. Pemaduan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Informasi

Platform digital terpadu akan dikembangkan untuk memadukan layanan pertanahan dan tata ruang dalam satu sistem yang mudah diakses oleh masyarakat dan instansi terkait. Penggunaan *cloud computing* memungkinkan data pertanahan dan tata ruang yang ada dapat diakses secara *real-time* oleh pihak yang membutuhkan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi.

Integrasi layanan pertanahan dan tata ruang melalui *e-Government* dan Sistem Informasi Geografis/*Geographic Information System* (GIS) serta pengembangan dari sistem informasi yang sudah dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN seperti Sentuh Tanahku, Bhumi, Geoportal, Loketku serta beberapa aplikasi lainnya akan mempermudah proses pengelolaan dan penyajian data yang lebih akurat dan *up to date*. Hal ini akan mencakup pemetaan wilayah pertanahan dan ruang yang berbasis *spatial data*, sehingga memudahkan pengelolaan wilayah dan pemanfaatan ruang untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

Masyarakat yang memiliki akses langsung melalui platform digital dapat mengakses data dan informasi terkait pertanahan dan tata ruang tanpa harus mengunjungi kantor pertanahan. Hal ini memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan ruang dan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak atas tanah dan penggunaan ruang yang berkelanjutan.

B. Tahun 2026

Mengarah pada penguatan SDM aparatur serta infrastruktur pendukung melalui pengaturan kelembagaan yang adaptif, *agile*, dan berkelanjutan. Di samping itu, integrasi SDM dengan infrastruktur tata kelola dilakukan untuk mendukung mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim dalam skala nasional maupun daerah.

1. Penguatan SDM Aparatur

Pelatihan dan pendidikan SDM: pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang akan menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Program pelatihan berbasis teknologi digital akan diterapkan untuk meningkatkan keterampilan aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi pertanahan berbasis digital, GIS, *cloud computing*, dan *big data*.

Program pelatihan aparatur ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan sistem yang dibentuk sedemikian rupa, serta penguatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bawah Kementerian ATR/BPN serta memastikan bahwa kompetensi SDM dalam sektor pertanahan dan tata ruang meningkat secara signifikan.

Dengan penerapan prinsip *Society 5.0*, pengembangan kompetensi digital bagi aparatur akan mempersiapkan mereka untuk beroperasi dalam ekosistem berbasis data, menggunakan teknologi seperti AI dan IoT untuk mengelola data pertanahan dan tata ruang dengan lebih efisien dan akurat.

2. Penguatan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan

Penyusunan NSPK dan SOP: Pemerintah akan menyusun NSPK dan SOP berupa proses bisnis, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan SOP pelayanan untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang adaptif, *agile*, dan berkelanjutan. Penyusunan regulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pertanahan dan tata ruang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Serta pembentukan unit baru yang membidangi manajemen risiko tiap lini di Kementerian ATR/BPN atas amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Kementerian ATR/BPN juga akan menyesuaikan struktur organisasi dalam tubuh Kementerian ATR/BPN dengan kebutuhan era digital dan manajemen risiko, serta memberikan ruang bagi pengembangan unit-unit baru yang berbasis pada teknologi. Organisasi pemerintahan yang berbasis *digital governance* harus dapat merespons perubahan dengan cepat. Oleh karena itu, tata kelola yang *agile* dan adaptif akan menjadi dasar untuk pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih efisien dan transparan.

3. Integrasi SDM terhadap Infrastruktur Pendukung dan Tata Kelola

Peningkatan infrastruktur digital: pada tahun 2026, infrastruktur pendukung untuk pengelolaan pertanahan dan tata ruang akan diperkuat. Platform digital yang lebih canggih akan diimplementasikan untuk memadukan layanan pertanahan dan tata ruang dalam satu sistem terintegrasi berbasis *cloud computing* dan data geospasial.

Pengembangan infrastruktur pendukung: peningkatan kapasitas SDM akan disertai dengan penguatan infrastruktur digital seperti GIS, Sistem Informasi Pertanahan dan platform berbasis *blockchain* untuk memastikan transparansi dan keamanan data pertanahan dan tata ruang. Dengan mengutamakan pemanfaatan teknologi cerdas dalam pembangunan infrastruktur untuk mengelola data secara lebih efisien. Dengan integrasi teknologi berbasis *cloud*, AI, dan *big data*, pengelolaan pertanahan dan tata ruang menjadi lebih terpadu, akurat, dan dapat diakses secara *real-time* oleh seluruh pihak terkait, baik masyarakat maupun pemerintah.

4. Mitigasi Risiko terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam Tata Kelola Pertanahan dan Ruang

Pemetaan dan analisis risiko bencana: dalam rangka memperkuat mitigasi risiko terhadap bencana alam dan perubahan iklim, Kementerian ATR/BPN akan mengembangkan peta risiko bencana berbasis data geospasial yang dapat membantu perencanaan tata ruang yang lebih aman dan berkelanjutan. Pemanfaatan GIS dan data berbasis satelit untuk menganalisis risiko bencana akan mendukung kebijakan tata ruang yang lebih tepat dan responsif terhadap potensi bencana.

Revisi RTRWN juga diharapkan dapat mengintegrasikan mitigasi risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan akan diperkenalkan, untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang tidak mengabaikan potensi ancaman bencana.

Pemanfaatan teknologi AI dan *big data* untuk memodelkan potensi bencana dan perubahan iklim memungkinkan perencanaan tata ruang yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman perubahan lingkungan. Teknologi ini akan memastikan pengelolaan tanah dan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana.

Konsep *Society 5.0* mengusung paradigma pembangunan berbasis teknologi cerdas, yang mengintegrasikan dunia fisik dan dunia siber. Penerapan konsep ini dalam Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 akan memungkinkan pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Beberapa elemen *Society 5.0* yang diterapkan dalam tahapan di atas yaitu:

- a. *Digital Governance*: penerapan pemerintahan berbasis data yang memanfaatkan AI, *cloud computing*, IoT, dan *big data* untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan dan responsif;
- b. *E-Government*: platform digital yang mengintegrasikan layanan pertanahan dan tata ruang untuk memudahkan akses masyarakat dan pengambilan keputusan berbasis data; dan
- c. *Smart Infrastructure*: Pengembangan infrastruktur cerdas yang mengintegrasikan teknologi *cloud computing* dan data geospasial dalam perencanaan tata ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

C. Tahun 2027

Tahun ini difokuskan pada integrasi lintas sektor nasional dan internasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur kewilayahan. Pemerintah mulai bergeser dari peran sebagai *Land Administrator* menjadi *Land Manager* untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk ekonomi digital dan hijau.

1. Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang

Kerja sama Nasional dan Internasional: Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ATR/BPN, akan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang dengan K/L terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan K/L lain di lingkaran pemerintah serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan tanah dan ruang secara berkelanjutan.

Pemerintah akan menyusun kebijakan pengelolaan kawasan strategis nasional yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan konservasi alam. Penataan kawasan ini akan mempertimbangkan keberlanjutan, pencegahan bencana, dan pelestarian lingkungan. Peraturan NSPK yang mendukung pengelolaan tata ruang lintas sektor akan diperkenalkan untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor industri, sektor agrikultur, sektor pariwisata, dan sektor konservasi alam.

2. Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pertanahan dan Ruang

Peran Pemerintah sebagai *Land Manager*: pada tahun 2027, pemerintah akan melakukan perubahan dalam peranannya sebagai *Land Administrator* menjadi *Land Manager*, yang lebih berfokus pada pengelolaan tanah untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah akan mengambil peran aktif dalam mengelola tanah negara, tidak hanya sebagai pengelola administrasi tanah, tetapi juga sebagai pengelola tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor-sektor lain seperti industri hijau dan ekonomi biru. Pembaruan peraturan pertanahan yang memungkinkan perubahan peran ini akan memperkenalkan mekanisme pengelolaan tanah yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya, mengingat pentingnya sumber daya alam dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Proses tersebut mengedepankan pengelolaan tanah berbasis teknologi. Dengan mengimplementasikan AI dan *machine learning*, pemerintah akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara melalui analisis data *real-time* untuk merencanakan dan mengelola ruang secara lebih efisien dan produktif, sambil mempertahankan prinsip keberlanjutan.

3. Perencanaan Infrastruktur Berkelanjutan dalam Tata Ruang

Pembangunan Infrastruktur: Pemerintah akan menyusun RTRWN yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim. Pembangunan infrastruktur hijau dan infrastruktur biru menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk penataan kawasan ekonomi hijau dan kawasan wisata alam yang berbasis pada prinsip keragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk memastikan bahwa RTR yang disusun mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Penerapan teknologi berbasis data memungkinkan perencanaan infrastruktur yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan memanfaatkan teknologi cerdas seperti AI dan *IoT*, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mendukung ketahanan lingkungan dan keberlanjutan.

Melalui penerapan kerangka kerja di atas Indonesia dapat menciptakan ekosistem pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang, serta memastikan transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan.

Tahapan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029 pada tahun 2027, fokus pada penguatan tata kelola pertanahan dan ruang lintas sektor berkelanjutan, mengedepankan kolaborasi lintas sektor, perubahan peran pemerintah dari *Land Administrator* menjadi *Land Manager*, dan perencanaan infrastruktur berkelanjutan. Semua ini sejalan dengan prinsip *Society 5.0*, yang mengintegrasikan teknologi cerdas dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dengan mengoptimalkan

teknologi berbasis data, pemerintah akan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terpadu dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

D. Tahun 2028

Difokuskan untuk menguatkan tata kelola yang dapat menjawab tantangan sosial seperti kedaulatan pangan, penyelesaian konflik agraria, serta hubungan bilateral dan multilateral terkait pertanahan. Penguatan juga dilakukan terhadap pemanfaatan RTR yang terintegrasi untuk mitigasi risiko bencana di berbagai skala wilayah.

1. Mendukung Penyelesaian Masalah Sosial, Kedaulatan Pangan, dan Kedaulatan Negara

Reforma agraria dan redistribusi tanah: tahun 2028 akan menjadi titik puncak bagi penguatan reforma agraria yang bertujuan untuk redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Program redistribusi tanah akan lebih terintegrasi dengan program ketahanan pangan dan pembangunan perumahan rakyat untuk mencapai keadilan sosial. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan dapat mendukung redistribusi tanah yang lebih efisien dan terfokus dikarenakan proses redistribusi tanah yang terhambat karena adanya sengketa dan konflik. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria akan terus dijalankan dan disesuaikan untuk memastikan hak-hak masyarakat terkait penguasaan tanah terjamin secara adil.

Dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, pertanahan akan digunakan untuk pertanian yang berkelanjutan. Pengelolaan tanah pertanian akan difokuskan pada produktivitas pangan yang tinggi, sambil tetap mempertahankan keseimbangan dengan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah akan melanjutkan program pemanfaatan tanah untuk kedaulatan pangan dengan menata ulang kawasan pertanian yang produktif dan mengalokasikan lahan pertanian yang sesuai dengan kebijakan pertanian berkelanjutan. Penyusunan peta pertanian dan pangan berbasis data geospasial lintas sektor untuk memastikan pemetaan lahan pertanian yang tepat guna mendukung produksi pangan lokal yang lebih banyak.

Kedaulatan Negara dan penyelesaian kasus pertanahan: penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan negara dan masyarakat akan menjadi prioritas untuk menjamin kedaulatan negara atas sumber daya alam. Program penyelesaian sengketa pertanahan dan penguatan hak atas tanah akan melibatkan teknologi digital untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan dan penataan ruang serta pengaturan pertanahan yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan dalam mendukung ketersediaan lahan produktif agar tidak beralih fungsi secara tidak terkendali, memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi petani, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah untuk sektor

pertanian, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berkontribusi melalui penyusunan RDTR yang mengintegrasikan kawasan pangan strategis, redistribusi tanah bagi masyarakat, serta program reforma agraria yang membuka akses permodalan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan keberlanjutan produksi pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Penguatan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang serta Peta Bidang Tanah dan Nilai Tanah (Kadaster Lengkap)

Pemanfaatan RTR untuk penyelesaian masalah sosial dilaksanakan pemerintah dengan mengintegrasikan RTRW peta bidang tanah dan nilai tanah untuk mendukung penyelesaian masalah sosial terkait pemanfaatan ruang.

Penguatan kebijakan perencanaan tata ruang dengan memperhatikan keragaman sosial dan kebutuhan lokal, termasuk penyelesaian masalah aksesibilitas lahan bagi masyarakat miskin, serta pemberian hak atas tanah kepada mereka yang belum memiliki akses. Didukung dengan pengembangan RTR yang berbasis data spasial yang memungkinkan penggunaan lahan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penguatan kadaster lengkap untuk pemetaan tanah merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan pertanahan yaitu dengan adanya kadaster lengkap, yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk memantau status tanah secara lebih akurat. Program Kadaster Tanah yang terintegrasi akan memastikan keamanan hukum bagi setiap bidang tanah, sehingga mengurangi konflik pertanahan dan meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. Penyusunan peta nilai tanah dan peta bidang tanah yang lebih akurat dengan pemanfaatan teknologi pemetaan digital, untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang.

3. Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang

Mitigasi risiko bencana dilaksanakan dengan pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berbasis pada risiko bencana menjadi bagian integral dari perencanaan nasional. Peta bencana dan peta risiko iklim akan dipadukan dalam RTRW untuk memastikan pengelolaan ruang yang lebih aman bagi masyarakat. Pengembangan GIS berbasis data *real-time* untuk mendeteksi potensi bencana dan mengimplementasikan kebijakan mitigasi berbasis perencanaan ruang. Penyusunan *One Spatial Planning Policy* salah satunya adalah integrasi peta bencana dalam perencanaan tata ruang akan mengharuskan penyusunan peta risiko bencana yang memperhatikan potensi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, serta dampak perubahan iklim.

4. Meningkatkan Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ruang

Pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru oleh Kementerian ATR/BPN akan memperkuat peran tata ruang dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru, dengan menata kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti kawasan pariwisata alam dan perikanan berkelanjutan. Penyusunan

kawasan konservasi dan kawasan ekonomi berkelanjutan akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keragaman hayati dan ketahanan ekosistem dengan pengembangan kebijakan perencanaan kawasan berkelanjutan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lebih terpadu, berkelanjutan, dan inklusif.

Pada tahun 2028, integrasi konsep *Society 5.0* dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang akan semakin jelas terlihat, dengan pemanfaatan AI, IoT, *cloud computing*, dan *big data* untuk memecahkan masalah sosial, kedaulatan pangan, dan konflik pertanahan. Teknologi akan memungkinkan untuk memproses data dengan akurat, *real-time*, dan terintegrasi, yang mempercepat penyelesaian sengketa dan memberikan solusi yang lebih transparan dan berkeadilan. Penyelesaian konflik akan lebih efektif berkat platform digital yang menghubungkan semua pihak terkait, memungkinkan dialog yang lebih baik dan mengurangi ketegangan sosial terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah.

E. Tahun 2029

Stelsel positif dalam tata kelola pertanahan dan ruang mengacu pada pendekatan yang proaktif dalam memastikan bahwa hak atas tanah dan ruang dapat diakui dan dilindungi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya reaktif terhadap konflik atau sengketa pertanahan, tetapi juga mendorong pencegahan masalah dengan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif. Terkait stelsel positif dalam tata kelola pertanahan dan ruang yang akan diwujudkan dalam tahun ke-5 (lima) Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 diharapkan mampu dilaksanakan sepenuhnya, namun target optimis ini dibarengi dengan tendensi negatif yang mendorong kepastian hukum hak atas tanah melalui stelsel positif bertendensi negatif guna menyelesaikan pekerjaan rumah dalam mewujudkan stelsel positif sepenuhnya.

Dalam stelsel positif, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung keberlanjutan akses dan pengelolaan tanah yang adil. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat marginal seperti petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh hak atas tanah dan mengelola tanah tersebut.

Dalam menuju stelsel positif dalam tata kelola pertanahan dan ruang di Indonesia pada tahun 2029, mewujudkan akses inklusif dan keadilan sosial, pendaftaran tanah merupakan satu aspek krusial dalam tata kelola pertanahan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Dalam konteks stelsel positif, sistem pendaftaran tanah tidak hanya mengakui hak yang sudah ada, tetapi juga secara proaktif mendaftarkan tanah untuk memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak tanah secara menyeluruh. Dengan penerapan teknologi cerdas, transparansi, dan inklusivitas, pendaftaran tanah dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang lebih inklusif.

Pada tahun ke-5 (lima) Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029, terfokus pada inklusivitas tata kelola pertanahan dan ruang, dengan mendorong akses informasi dan layanan pertanahan bagi semua lapisan masyarakat. Ini merupakan wujud *dynamic government* untuk menciptakan *citizenship* yang berkelanjutan. Inklusivitas dalam tata kelola pertanahan di

Indonesia sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan keragaman budaya yang kaya, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap tanah. Tanpa adanya inklusivitas, ketimpangan dalam distribusi tanah akan terus berlanjut, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan konflik agraria yang merugikan banyak pihak, dalam mewujudkan inklusivitas tata kelola pertanahan dan ruang menuju stelsel positif dengan mempertimbangkan kerangka kebijakan yang berfokus pada:

1. Reformasi kebijakan pertanahan dan tata ruang: Kementerian ATR/BPN dalam 5 (lima) tahun Renstra akan menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil, termasuk memperjelas hak atas tanah bagi masyarakat adat dan petani kecil yang akan mempermudah proses legalisasi tanah dan menyederhanakan prosedur administrasi pertanahan.
2. Pemberdayaan masyarakat lokal, kebijakan yang akan disusun menitikberatkan pada masyarakat yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok miskin, sering kali tidak memiliki hak yang jelas atas tanah. Dengan proses yang inklusif mereka akan dilibatkan dalam pertimbangan proses pengambilan keputusan, kemudian akan dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak atas tanah mereka, serta memberikan pelatihan dalam pengelolaan tanah secara berkelanjutan akan membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam tata kelola pertanahan dan ruang.
3. Penyelesaian konflik pertanahan dan tata ruang dengan upaya diluar pengadilan, upaya tersebut guna mendukung stelsel positif;
4. Peningkatan ekonomi lokal dilaksanakan dengan memberikan akses yang adil terhadap tanah, masyarakat dapat lebih produktif dalam mengelola tanah mereka. Hal ini akan meningkatkan perekonomian lokal khususnya di sektor pertanian, yang menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Peningkatan ekonomi juga dilaksanakan dengan pendekatan berbasis keadilan sosial yang dimasukkan dalam setiap kebijakan atau program yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan, hal ini berarti bahwa kebijakan harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat rentan untuk memperoleh hak atas tanah dan memitigasi ketimpangan yang ada.
5. Perlindungan lingkungan dengan kerja sama dengan masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang cara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan inklusivitas dalam program redistribusi tanah, pengelolaan tanah dapat mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak.
6. Peningkatan kerja sama antar sektor dalam tata kelola pertanahan yang inklusif membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak dan menguntungkan masyarakat luas.
7. Pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum pertanahan dan tata ruang digunakan untuk memastikan bahwa tata kelola pertanahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip inklusivitas, perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel. Pembentukan Penyidik Pertanahan dan Penyidik Tata Ruang dalam Jabatan Fungsional Tertentu menjadi upaya nyata yang dilaksanakan, serta memberikan rumah terhadap jabatan tersebut untuk proses penindakan

hukum. Implementasi kebijakan tersebut akan dijelaskan dalam regulasi yang disusun kemudian. Kementerian ATR/BPN terus mendorong terwujudnya peradilan pertanahan di Indonesia, sehingga penyelesaian terhadap kejahatan pertanahan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan ruang yang inklusif menuju stelsel positif, dilaksanakan dengan langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan Akses Inklusif dan Keadilan Sosial dengan Digitalisasi Data Pertanahan dan Ruang

Stelsel positif dalam tata kelola pertanahan mengacu pada pendekatan yang proaktif dalam memastikan bahwa hak atas tanah dapat diakui dan dilindungi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya reaktif terhadap konflik atau sengketa pertanahan, tetapi juga mendorong pencegahan masalah dengan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif.

Dalam stelsel positif, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung keberlanjutan akses dan pengelolaan tanah yang adil. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat marginal seperti petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya, memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh hak atas tanah dan mengelola tanah tersebut. Guna mewujudkan keterbukaan data dan informasi secara terstruktur dan sistematis, diperkuat dengan data pertanahan dan ruang sudah tervalidasi secara tekstual dan parsial baik dalam data fisik maupun data digital.

Tujuan utama dari penerapan stelsel positif yaitu menciptakan sistem pendaftaran tanah yang inklusif dan transparan, yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok terpinggirkan untuk mengakses hak atas tanah secara jelas dan sah. Salah satu langkah besar yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian ATR/BPN yaitu PTSL yang bertujuan untuk memetakan dan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia, serta program dan kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan digitalisasi pertanahan dan ruang seperti pembuatan peta foto tegak sebagai alat kontrol dan referensi dalam pendaftaran tanah.

Foto tegak memiliki peran penting dalam mewujudkan stelsel positif dengan menjadi dasar referensi spasial yang akurat. Foto tegak yang telah dikoreksi geometris dapat menggambarkan kondisi permukaan bumi secara tepat, memungkinkan batas bidang tanah ditampilkan sesuai posisi sebenarnya, sehingga mengurangi potensi pergeseran dan tumpang tindih data. Peran utama foto tegak dalam pendaftaran tanah yaitu sebagai sebagai dasar referensi spasial yang akurat, mempermudah identifikasi batas alami dan buatan, menjadi bahan sinkronisasi antar data, meningkatkan efisiensi pengukuran dan verifikasi, meningkatkan kualitas peta bidang tanah (PBT) dan mengurangi *overlap*, dan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

2. Mengurangi Kesenjangan antara Masyarakat dan Teknologi

Akses terhadap keterbukaan informasi pertanahan dan tata ruang merupakan tujuan utama pada tahun ke-5 (lima) Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan teknologi, implementasinya dengan membangun akses terbuka yang lebih luas bagi masyarakat terhadap informasi tentang pertanahan dan tata ruang, termasuk data hak atas tanah, penggunaan lahan, dan RTR.

Dalam mendukung aksesibilitas data dan informasi pertanahan dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah memperkenalkan platform digital inklusif yang memudahkan semua lapisan masyarakat mengakses informasi terkait pertanahan dan tata ruang. Platform ini menyediakan informasi tentang status tanah, legalitas tanah, dan RTR yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau.

Hal tersebut akan didukung dengan menyusun kebijakan akses terbuka yang memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat dan kelompok yang terpinggirkan, dapat mengakses informasi terkait pertanahan dan tata ruang. Dalam rangka mendukung digital *governance*, Kementerian ATR/BPN juga akan melibatkan sektor swasta untuk memastikan platform ini dapat diakses secara luas dan mudah digunakan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Penerapan teknologi cerdas dalam akses data mencerminkan prinsip utama *Society 5.0*, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Platform digital yang berbasis AI dan *cloud computing* akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan data pertanahan dan tata ruang secara efisien dan transparan serta dapat memberikan saran serta masukan terhadap kebijakan pertanahan dan tata ruang yang sedang dijalankan.

Aspek ini memprioritaskan aksesibilitas informasi yang setara dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Penggunaan platform digital yang memungkinkan aksesibilitas yang mudah dan terbuka untuk informasi pertanahan dan tata ruang akan mengurangi kesempatan teknologi dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang dan Pembangunan *Citizenship* Berkelanjutan

Tahun 2029 akan menjadi tahun penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pertanahan dan tata ruang. Kementerian ATR/BPN menggandeng masyarakat untuk memberikan masukan terhadap perencanaan tata ruang, serta melaporkan masalah pertanahan yang mereka hadapi seperti sengketa tanah atau penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kementerian ATR/BPN memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan mereka dalam proses pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Program ini dilaksanakan dengan menyediakan pelatihan tentang hak atas tanah, sistem pengelolaan tata ruang, dan strategi mitigasi bencana yang terkait dengan perencanaan

tata ruang. Program ini akan didukung dengan regulasi yang memperkuat aksesibilitas masyarakat terhadap kebijakan pertanahan dan penataan ruang, serta memastikan keterlibatan mereka dalam proses pembentukan kebijakan publik. Penerapan *digital governance* pada tahun 2029 akan semakin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan kebijakan publik terkait pertanahan dan tata ruang. Teknologi digital akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses data secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan ruang yang lebih inklusif.

Kementerian ATR/BPN akan menetapkan regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dengan memperkenalkan mekanisme yang lebih transparan dan inklusif, yang memungkinkan suara masyarakat terdengar dalam setiap keputusan terkait penggunaan ruang. Kunci dari proses kegiatan tersebut yaitu memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam perencanaan pertanahan dan tata ruang. Data partisipasi masyarakat yang terkumpul dari platform ini akan digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan melibatkan masyarakat melalui platform digital, data partisipasi masyarakat akan menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan publik yang lebih responsif dan inklusif. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN akan memberikan pelatihan tentang hak atas tanah, pengelolaan tata ruang, dan mitigasi bencana, yang semakin memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

Pada tahun 2029, konsep *Society 5.0* akan mencapai puncaknya dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi digital cerdas yang memberikan akses informasi secara *real-time* dan terbuka. Pemerintah akan meluncurkan platform berbasis AI, *cloud computing*, dan IoT, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan efisien, sekaligus mempercepat proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. *Society 5.0* menekankan pada keadilan sosial melalui aksesibilitas data yang setara dan penggunaan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ruang. Melalui *digital governance* yang mengutamakan inklusivitas, masyarakat akan lebih terlibat dan memiliki akses ke informasi kritis terkait pertanahan dan tata ruang, sehingga menciptakan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan ruang.

Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029 mengedepankan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat, hal tersebut akan membuka jalan bagi terciptanya pemerintahan berbasis data yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Pada tahun 2029, inovasi digital dan keberagaman teknologi akan memungkinkan setiap lapisan masyarakat untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Dengan memperkenalkan platform digital inklusif, Kementerian ATR/BPN tidak hanya menyediakan akses informasi yang lebih luas tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang adil, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tujuan transformasi ekonomi pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045, pelaksanaan kebijakan reforma agraria akan difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan/atau industri. Hal ini diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari *middle income trap*. Selain itu, kebijakan reforma agraria juga difokuskan pada wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan, dan terluar untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan.

Pelaksanaan reforma agraria meliputi pelaksanaan redistribusi melalui pemberian TORA dan sertifikasi tanah (penataan aset) yang dilengkapi dengan pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses) serta perbaikan pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah publikasi positif/sistem stelsel positif, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh lembaga bank tanah, serta penilaian pertanahan yang andal (*land valuation*).

Kebijakan Penataan Ruang disusun untuk mendukung RPJP Nasional Tahun 2025-2045, kebijakan tersebut meliputi menyediakan rencana tata ruang nasional dan daerah, mewujudkan penataan ruang yang berkualitas melalui penguatan integrasi pertanahan dan penataan ruang, serta mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam rangka mendukung tujuan transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi untuk mewujudkan lingkungan hidup berkualitas, pelaksanaan kebijakan penataan ruang akan dilaksanakan di seluruh daerah dengan mengintegrasikan pertanahan dan penataan ruang, integrasi tata ruang laut dan tata ruang darat (kawasan hutan dan APL) dalam rencana tata ruang untuk mewujudkan '*One Spatial Planning Policy*' satu produk RTR. Selain itu, dalam rangka agar mendukung tujuan transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif, kebijakan penataan ruang juga difokuskan pada kota lengkap dalam RTR untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan hak atas tanah, dengan pencantuman *Right, Restriction, and Responsibility* (RRR) ke dalam sertifikat hak atas tanah.

Pada bidang pertanahan, arah kebijakan yang perlu diterapkan adalah sebagai berikut:

1. perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah;
2. optimalisasi reforma agraria melalui penataan aset dan akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan manfaat pertanahan;
4. meningkatkan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
5. mitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan; dan
6. Reformasi Birokrasi dengan menerapkan merit sistem dan perbaikan SDM.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, penting untuk mengintegrasikan berbagai sektor terkait guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Kebijakan pertanahan ini diharapkan mampu

memberikan *outcome* berupa jaminan kepastian hukum masyarakat terhadap kepemilikan tanah, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tercapainya pembangunan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatnya *awareness* dan literasi digital masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang, meningkatnya produktivitas pelayanan publik (efisiensi proses layanan) di bidang pertanahan dan tata ruang dan *interoperability* data pertanahan dan tata ruang bagi dan antar K/L, jaminan keamanan terhadap data pertanahan dan tata ruang, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan dan tata ruang, meningkatnya pegawai unggul yang inovatif dan kreatif, serta meningkatnya pola karier yang terarah berbasis profesionalitas pegawai dan berkelanjutan.

Pada bidang tata ruang, menetapkan arah kebijakan penataan ruang yang mengutamakan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis pada RTRW Nasional dan RTRW Daerah, guna mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui:

1. penyusunan dan penyesuaian RTR secara sinergis antara pusat dan daerah;
2. pemanfaatan teknologi informasi dan sistem geospasial dalam perencanaan dan pengendalian ruang;
3. pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif melalui instrumen perizinan, insentif, disentif, dan pengawasan;
4. peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap RTR; dan
5. penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

3.2.2. Strategi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahap I Tahun 2025-2029 dari RPJP Nasional, yaitu penguatan fondasi transformasi tata kelola/*governance*, digital, dan sosial untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian proses administrasi pertanahan meliputi kelengkapan, akurasi, konsistensi logis, kekinian data pertanahan, tata ruang, dan sumber daya alam, Renstra Kementerian ATR/BPN dijabarkan dalam 5 (lima) tahapan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian penguatan fondasi.

Pada tahap I rencana agenda pembangunan jangka panjang nasional bidang agraria dan tata ruang berfokus pada peningkatan kualitas dan kepastian. Peningkatan kualitas yang dimaksud meliputi penguatan fondasi transformasi (*governance*, *digital*, dan sosial) untuk meningkatkan kualitas data dan proses administrasi pertanahan yakni kelengkapan, akurasi, konsistensi logis, kekinian data pertanahan, tata ruang, dan sumber daya alam yang dilaksanakan melalui agenda prioritas:

1. meningkatkan kualitas administrasi pertanahan, tata ruang, dan sumber daya alam yang terpercaya untuk mewujudkan kepastian melalui transformasi digital;
2. meningkatkan kualitas dan *support* kepastian *land tenure* (kualitas, kepastian informasi terkait kepemilikan dan penguasaan);
3. pengetahuan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di level komunitas terkait pemanfaatan ruang dan tanah;

4. penguatan *land value* dan *land development* dengan penataan kelembagaan (*institutional arrangement*);
5. meningkatkan kualitas untuk mereduksi konflik yang disebabkan oleh regulasi;
6. *dynamic governance* (*adaptif* dan *agile*);
7. mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan reforma agraria;
8. mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan melalui penegasan batas wilayah dengan mengintegrasikan peta pertanahan dan tata ruang; dan
9. mendukung percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Kementerian ATR/BPN berupaya untuk melakukan penguatan basis data pertanahan dan tata ruang (lengkap dan berkualitas) melalui pengembangan sistem basis data pendukung kualitas dan kepastian produk pertanahan dan produk tata ruang berbasis informasi pertanahan dalam rangka memenuhi kelengkapan RDTR dan kelengkapan peta bidang tanah terpetakan, serta melalui pengembangan sistem basis data tata ruang yang terintegrasi dengan batas desa, lahan pertanian, hutan dan APL dengan risiko bencana dan mitigasi perubahan iklim pada skala nasional. Strategi dan kebijakan yang diambil dalam mencapai sasaran tersebut adalah:

1. penguatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang berkepastian hukum;
2. penguatan sumber daya dan infrastruktur tata kelola pertanahan dan ruang;
3. tata kelola pertanahan dan ruang lintas sektor berkelanjutan;
4. tata kelola pertanahan dan ruang sebagai upaya menyelesaikan tantangan sosial; dan
5. inklusivitas tata kelola pertanahan dan ruang.

3.2.3. Strategi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, khususnya mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, serta mendukung Asta Cita 2 yang menekankan pada upaya memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan target-target strategis dalam RPJMN. Target-target tersebut menjadi landasan penting dalam mendukung arah pembangunan nasional dan mewujudkan prioritas pembangunan sektor agraria dan tata ruang yang selaras dengan visi nasional. Target RPJMN dijabarkan ke dalam Matriks Kinerja Pendanaan (MKP) Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029. MKP ini menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan pendanaan, penentuan prioritas program, serta penetapan IKU yang terukur dan akuntabel, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan berorientasi hasil.

Namun demikian, pencapaian target-target yang telah dirancang tersebut tidak terlepas dari berbagai batasan pembangunan (*development constraints*) yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Faktor-faktor pembatas tersebut antara lain keterbatasan ruang fiskal (ketersediaan anggaran negara), dinamika perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi global maupun domestik, situasi geopolitik internasional,

perkembangan teknologi, serta faktor sosial dan lingkungan yang dapat berdampak terhadap efektivitas implementasi program. Kompleksitas tantangan ini menyebabkan adanya risiko ketidakcapaian target RPJMN dan Renstra Tahun 2025–2029 apabila tidak dikelola secara tepat.

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai upaya terkoordinasi untuk melindungi dan menambah nilai dari pencapaian tujuan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sebagai bagian integral dari strategi organisasi dalam menghadapi ketidakpastian atas rencana yang telah ditetapkan. Melalui penerapan manajemen risiko, diharapkan dapat diidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, ditentukan tingkat eksposurnya terhadap tujuan, menentukan perlakuan serta langkah-langkah mitigasi risiko yang perlu dilakukan secara tepat. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, penerapan manajemen risiko secara integral menjadi salah satu faktor penting dalam kerangka implementasi perencanaan strategis. Pada RPJMN Tahun 2025–2029, terdapat prioritas peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif, yang bertujuan untuk mensinergikan program-program pengembangan kewirausahaan dan kesempatan kerja kepada para penerima manfaat, salah satunya melalui program reforma agraria. Program ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian masyarakat penerima TORA melalui skema penataan aset berupa pemberian tanah yang disertai sertifikat, serta penataan akses berupa fasilitasi pendampingan usaha. Dengan demikian, penerima TORA diharapkan dapat mengelola tanah yang diberikan secara produktif dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan kegiatan reforma agraria pada periode 2020–2024, ditemukan bahwa pencapaian target banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal (*cross cutting issues*) yang melibatkan instansi lain, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Salah satu contoh nyata adalah terkait dengan penerbitan surat keputusan pelepasan kawasan hutan, yang merupakan kewenangan instansi di luar Kementerian ATR/BPN, namun sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program reforma agraria.

Adapun permasalahan penguasaan fisik oleh pihak lain/masyarakat objek tanah terindikasi terlantar, potensi adanya hak tanggungan atas objek tanah terlantar, potensi terjadi perubahan data subjek, data fisik atau perbuatan hukum yang belum tercatat dalam perubahan di buku tanah dan basis data tanah terindikasi terlantar. Kementerian ATR/BPN akan mengatasinya dengan mengidentifikasi penguasaan fisik dan hak tanggungan serta pemutakhiran data atas objek tanah terlantar dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengupayaan penyelesaiannya.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai risiko yang ada, Kementerian ATR/BPN telah merumuskan berbagai langkah mitigasi risiko strategis, yaitu:

1. dilakukan penilaian kinerja secara sistematis melalui berbagai dokumen pertanggungjawaban, antara lain Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja unit Eselon I dan II, berdasarkan capaian target tahunan sebagaimana

- tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan;
2. dilaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dengan disertai analisis faktor keberhasilan dan kegagalan, serta rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret; dan
 3. dalam penyusunan target indikator kinerja pada Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029, diterapkan pendekatan rentang nilai (*range*) dari batas bawah hingga batas atas untuk seluruh level indikator, mulai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) hingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan deviasi capaian dan memberikan fleksibilitas dalam merespons dinamika yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan.

Berdasarkan hasil analisa untuk pelaksanaan kegiatan reforma agraria periode 2020-2024 terdapat pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh faktor luar (*cross cutting* dengan instansi lainnya) yang menyebabkan pencapaian target yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, sebagai contoh terkait penerbitan surat keputusan terkait pelepasan kawasan hutan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai langkah mitigasi risiko Kementerian ATR/BPN terhadap pencapaian kinerja kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian indikator kegiatan reforma agraria yang tercantum pada RPJMN sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Batas Skala Atas (Semula Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025)

No	Uraian	Basis Indeks GINI	Batas Skala Atas (Semula Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total
1	Target Redistribusi Tanah (Bidang)		175.860	354.990	659.045	354.995	425.118	1.970.008
2	Indeks GINI (Petani/ Nelayan)	0,4794	0,4533	0,4492	0,4416	0,4375	0,4327	
3	Perubahan Indeks (Petani/ Nelayan)		0,002	0,0041	0,0076	0,004	0,0048	
4	Perubahan Total (Petani/ Nelayan)		0,002	0,0062	0,0138	0,0178	0,0227	

Reforma agraria merupakan salah satu instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pemerataan akses dan pemanfaatan sumber daya agraria bagi masyarakat miskin dan rentan. Langkah pertama adalah identifikasi risiko, yang meliputi risiko regulasi (perubahan kebijakan dan tumpang tindih peraturan), risiko sosial (konflik agraria, resistensi dari pemilik lahan, dan lemahnya partisipasi masyarakat), risiko teknis (keterbatasan data spasial yang akurat dan kapasitas kelembagaan), serta risiko ekonomi (terbatasnya akses permodalan dan pasar bagi penerima manfaat).

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting untuk mendukung reforma agraria, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan program reforma agraria di daerah melalui wadah koordinasi lintas sektor yaitu GTRA. Melalui forum GTRA diharapkan dapat menyelesaikan konflik

agraria, serta memberikan kepastian hukum dan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat melalui penataan aset dan akses. Peran pemerintah daerah dalam reforma agraria tercakup dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan, diantaranya:

1. perencanaan pembangunan daerah: Pemda mengelola dan melaksanakan program-program pembangunan daerah, termasuk reforma agraria, yang merupakan acuan bagi rencana kerja dan anggaran;
2. pembentukan GTRA: Pemda, seperti tingkat provinsi yang diketuai oleh Gubernur dan Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota, membentuk GTRA yang melibatkan berbagai pihak seperti kantor wilayah BPN/kantor pertanahan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mengidentifikasi dan menyelesaikan sengketa agraria serta konsiliasi untuk menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan atau pihak lain, mendorong percepatan Peraturan Daerah;
3. melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan cara membangun kolaborasi dengan K/L dan organisasi masyarakat sipil untuk mengimplementasikan program reforma agraria;
4. membantu dalam rangka verifikasi subjek dalam pelaksanaan penataan aset melalui redistribusi tanah atau legalisasi aset lainnya, serta penataan akses;
5. menyediakan dukungan pemberdayaan ekonomi, seperti akses permodalan, pasar, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria; dan
6. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan proses reforma agraria untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang baik.

Tabel 3.2 Batas Skala Bawah (Menjadi)

No	Uraian	Batas Skala Bawah (Menjadi)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Total
1	Target Redistribusi Tanah (Bidang)	59.687	231.600	417.600	308.000	212.013	1.229.500
2	Indeks GINI (Petani/ Nelayan)	0,4548	0,4522	0,4475	0,4441	0,4417	
3	Perubahan Indeks (Petani/ Nelayan)	0,0006	0,0025	0,0046	0,0034	0,0023	
4	Perubahan Total (Petani/ Nelayan)	0,0006	0,0031	0,0077	0,0111	0,0134	

Karena dinamika kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia maka perlu pencantuman batas skala bawah dengan tujuan agar tetap memiliki rentang kendali dari target kinerja yang ingin dicapai. Melalui integrasi langkah-langkah perencanaan strategis yang adaptif, penerapan manajemen risiko yang komprehensif, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat menjaga kontribusi sektor agraria dan tata ruang secara optimal dalam mendukung pencapaian target RPJMN, serta memperkuat pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Uraian	Satuan	Target				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS	Persen	11,45% - 11,81%	12,52% - 12,87%	15,73% - 16,09%	20,72% - 21,07%	23,46% - 23,81%

Adapun pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kedaulatan negara. Salah satu tantangan utama dalam percepatan pembangunan di kawasan ini adalah ketidakjelasan batas wilayah dan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko berbasis penegasan batas wilayah yang terintegrasi dengan peta pertanahan dan tata ruang menjadi kunci keberhasilan.

Dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, dan juga mencegah laju alih fungsi lahan, Kementerian ATR/BPN berperan dalam menentukan kebijakan melalui kolaborasi pemetaan dengan Kementerian Pertanian untuk LSD dan LP2B sebagai dasar peta tematik penyusunan dokumen RTR.

Dalam penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang, terdapat sejumlah risiko strategis yang perlu dikelola secara sistematis, yaitu:

1. risiko keterlambatan penyelesaian RTRW dapat memperlambat penetapan kebijakan ruang. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya asistensi dan pendampingan penyelesaian RTRW serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRW;
2. risiko terhambatnya akses kemudahan berusaha masyarakat karena RDTR yang belum terintegrasi dengan OSS. Perlakuan risiko difokuskan pada percepatan penyelesaian dan digitalisasi RDTR serta integrasi RDTR dengan OSS, sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan;
3. risiko meningkatnya pelanggaran pemanfaatan ruang akibat ketidaksesuaian dengan RTR dan KKPR. Penanganan risiko dilakukan melalui penegakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disertai sosialisasi masif kepada pelaku usaha dan masyarakat agar pemanfaatan ruang lebih tertib dan sesuai aturan;
4. risiko penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak memperhatikan dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan. Perlakuan risiko difokuskan pada peningkatan validasi dokumen sebelum penerbitan hak atau izin, serta monitoring pasca penerbitan untuk memastikan kepatuhan dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari; dan
5. risiko adanya tumpang tindih batas wilayah yang disebabkan ketidakjelasan batas administrasi, keterbatasan data spasial, dan potensi konflik sosial. Upaya mitigasi dilakukan dengan sinkronisasi data pertanahan dan tata ruang di kawasan perbatasan, melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah, serta memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan TNI guna memastikan kejelasan batas wilayah sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Dengan pengelolaan risiko yang terstruktur melalui perlakuan tersebut, diharapkan tata kelola Pertanahan dan Penataan Ruang dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, serta mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penyelenggaraan pengadaan tanah dan konsolidasi tanah, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat seperti:

1. risiko timbulnya masalah hukum pada proses pengadaan tanah berpotensi menghambat kelancaran pembangunan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir risiko ini, dilakukan pendampingan dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah dengan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih transparan;
2. risiko perbedaan persepsi akibat regulasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan yang melibatkan berbagai K/L. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun keterlambatan implementasi. Perlakuan risiko dilakukan melalui harmonisasi regulasi dengan K/L terkait guna menyamakan pemahaman, menyelaraskan kepentingan, serta memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor;
3. risiko kualitas data yang kurang memadai dalam mendukung perhitungan indikator sasaran strategis peningkatan nilai tambah ekonomi PNBP, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), transaksi hak tanggungan, dan nilai tanah. Kondisi ini dapat menurunkan akurasi pengambilan keputusan. Untuk itu, dilakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN dalam menyusun standar data yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja;
4. risiko adanya dinamika masyarakat yang dapat menghambat penyelenggaraan konsolidasi tanah. Penolakan atau ketidakpahaman masyarakat dapat memperlambat proses konsolidasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga tercipta pemahaman bersama serta dukungan dalam pelaksanaan program;
5. risiko status tanah yang bermasalah pada lokasi konsolidasi tanah dapat mengganggu kepastian hukum dan menimbulkan konflik. Untuk mengantisipasinya, dilakukan penyusunan materi teknis konsolidasi tanah yang melibatkan *stakeholder* dan masyarakat, sehingga perencanaan konsolidasi tanah lebih matang, partisipatif, dan minim potensi sengketa. Penyelenggaraan pengadaan tanah dan konsolidasi tanah diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, serta mampu mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif masih menyisakan potensi pembatalan produk hukum, baik karena cacat administrasi maupun sebagai tindak lanjut putusan pengadilan. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Sebagai langkah mitigasi, dilakukan peningkatan kualitas data pertanahan, baik spasial maupun tekstual, melalui program digitalisasi produk pertanahan agar lebih akurat, terintegrasi, dan minim kesalahan administrasi. Adanya berbagai macam alas hak kepemilikan tanah sebagai peninggalan sejarah masa lalu berpotensi menimbulkan

tumpang tindih hak, ketidakseragaman administrasi, dan sengketa pertanahan. Untuk mengurangi risiko tersebut, dilaksanakan program konversi dan penyeragaman alas hak ke dalam sistem hukum pertanahan nasional. Upaya ini didukung dengan inventarisasi dan pendataan ulang secara partisipatif, sehingga status tanah dapat dipetakan dengan lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi pertanahan tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, tetapi juga diatur oleh berbagai K/L lain dengan perbedaan sudut pandang. Hal ini berisiko menimbulkan disharmoni kebijakan dan hambatan dalam implementasi program. Sebagai perlakuan risiko, dilakukan harmonisasi regulasi dan pembentukan forum koordinasi antar kementerian untuk menyatukan persepsi dan interpretasi kebijakan, sehingga implementasi penyelenggaraan pertanahan dapat berjalan lebih sinergis dan konsisten.

Dalam penyelenggaraan layanan pertanahan dan tata ruang, terdapat sejumlah risiko strategis yang perlu diperhatikan guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Kualitas data dan informasi geospasial pertanahan dan tata ruang yang masih rendah dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Untuk mengatasi risiko ini, dilakukan pemutakhiran data secara berkala, penerapan standar nasional maupun internasional geospasial, serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi dan validasi data. Langkah ini bertujuan untuk memastikan data yang tersedia lebih akurat, mutakhir, dan dapat dijadikan rujukan yang andal. Sistem informasi antar instansi pemerintah yang belum sepenuhnya terintegrasi berpotensi menimbulkan kurangnya sinkronisasi data dan perlambatan proses pelayanan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, dibangun kerangka *interoperability* dan *Application Programming Interface (API)* bersama, dilakukan sinkronisasi basis data secara berkala, serta dibentuk tim koordinasi teknis lintas instansi. Dengan demikian, proses pertukaran data antar lembaga menjadi lebih efisien, konsisten, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan. Risiko ini ditangani dengan perencanaan kebutuhan infrastruktur berbasis prioritas layanan, pemanfaatan teknologi *cloud* untuk mengurangi beban fisik server, serta peningkatan kapasitas jaringan agar layanan digital dapat berjalan lebih stabil, cepat, dan dapat diakses secara luas.

Terdapat sejumlah risiko yang perlu dikelola secara sistematis agar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak tetap konsisten, transparan, dan efektif, sebagai berikut:

1. terdapat risiko potensi tumpang tindih regulasi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi konsistensi kebijakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan menghambat pelaksanaan program. Untuk memitigasinya, dilakukan penyusunan matriks perbandingan (*gap analysis*) antara ketentuan eksternal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dengan kebijakan internal, guna mengidentifikasi area yang tumpang tindih. Selanjutnya, dilaksanakan harmonisasi regulasi, pembentukan forum sinkronisasi kebijakan, serta penerbitan panduan teknis yang menyatukan interpretasi aturan, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara seragam;

2. potensi rendahnya budaya risiko pada seluruh pegawai atau SDM dapat menunda deteksi dini dan respons terhadap risiko yang muncul. Untuk mengatasi hal ini, dirancang mekanisme internalisasi manajemen risiko melalui pelatihan bagi seluruh level pegawai, didukung pemantauan oleh unit masing-masing maupun lini kedua. Selain itu, dilakukan penyelenggaraan pelatihan manajemen risiko secara rutin, pembangunan sistem pelaporan risiko yang mudah diakses, serta integrasi indikator kesadaran risiko dalam penilaian kinerja pegawai. Pemberian *reward* kepada staf kunci yang berperan sebagai agen perubahan juga menjadi strategi dalam menumbuhkan budaya sadar risiko secara menyeluruh;
3. terdapat potensi lemahnya pengendalian yang menyebabkan prosedur tidak terimplementasi sepenuhnya. Risiko ini diatasi dengan melakukan reviu dan pembaruan SOP, menambahkan langkah-langkah pengendalian yang lebih jelas, serta menyederhanakan proses bisnis agar lebih ringkas dan mudah diterapkan. Penguatan sistem pengawasan internal dilakukan melalui audit kepatuhan secara berkala, pembagian tugas dan wewenang yang lebih jelas dalam SOP, serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan evaluasi implementasi prosedur secara konsisten.

Dengan memperhatikan faktor-faktor risiko yang telah diidentifikasi serta langkah-langkah mitigasi (perlakuan), terdapat kemungkinan capaian suboptimal pada target pembangunan dalam kisaran batas atas merupakan target RPJMN dan batas bawah merupakan target DIPA sebagaimana terlampir dalam Matrik Kinerja Pendanaan Renstra.

3.2.4. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian ATR/BPN dilaksanakan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini mencakup serangkaian kegiatan pemantauan, penilaian, dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dari unit pelaksana hingga tingkat kementerian. Pengendalian dilakukan dengan memantau pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi hambatan, peluang perbaikan, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran strategis.

Evaluasi kebijakan strategis dilakukan dengan tujuan memberikan klarifikasi terhadap hubungan sebab akibat antara keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan pelaksanaan rencana. Dalam evaluasi ini, seluruh aspek pelaksanaan diukur secara menyeluruh, termasuk kesesuaian antara kebijakan yang diambil dengan dinamika lingkungan strategis, efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan, dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Hasil evaluasi kebijakan strategis digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian arah kebijakan maupun prioritas program untuk periode selanjutnya.

Evaluasi proses pelaksanaan difokuskan pada penilaian implementasi kebijakan, program, dan kegiatan secara teknis dan operasional. Analisis ini mencakup identifikasi tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan, penilaian efisiensi penggunaan sumber daya, serta kesesuaian proses dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini

umumnya dilakukan selama fase implementasi berjalan, sehingga memungkinkan adanya tindakan korektif secara cepat apabila ditemukan deviasi dari rencana. Tujuannya yaitu untuk mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang tepat.

Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja aktual atau realisasi hasil yang telah dicapai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Indikator yang digunakan mengacu pada IKU dan indikator kinerja program (IKP) yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau sering disebut dengan metode “*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals*” (SMART). Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi sejauh mana capaian yang dihasilkan, penyebab ketidaksesuaian dengan target, serta rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kementerian ATR/BPN untuk periode 5 (lima) tahun (2025-2029), termasuk evaluasi paruh waktu dilakukan untuk memastikan pencapaian target dan perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah. Evaluasi triwulan, tahunan, dan paruh waktu digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan secara agregat dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada sisa periode pelaksanaan. Evaluasi tahunan disusun untuk menilai capaian akhir tahun, sedangkan evaluasi akhir periode Renstra dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan strategis selama 5 (lima) tahun pelaksanaan rencana.

Evaluasi paruh waktu pada tahun 2027 menjadi momen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Renstra. Pada tahap ini, dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap capaian yang telah diraih selama 3 (tiga) tahun pertama, sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan penyesuaian strategi agar lebih tepat sasaran. Proses evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan dan langkah strategis selanjutnya.

Apabila evaluasi paruh waktu menemukan adanya perubahan besar dalam kebijakan nasional, regulasi, atau situasi eksternal yang signifikan seperti pergeseran kondisi ekonomi atau dinamika politik maka revisi strategi dapat dilakukan pada periode tersebut. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga relevansi dan efektivitas Renstra dalam merespons tantangan dan peluang baru. Revisi strategi pada paruh waktu akan difokuskan pada perbaikan arah kebijakan, penyempurnaan program, serta realokasi sumber daya agar pelaksanaan tetap selaras dengan prioritas yang telah diperbarui.

Selain itu, pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkelanjutan didukung oleh penyusunan laporan triwulanan dan tahunan yang wajib dihasilkan setiap tahun. Laporan ini memberikan gambaran yang akurat dan terukur mengenai perkembangan kinerja sepanjang tahun berjalan. Dengan adanya laporan berkala, proses pengendalian dan pemantauan menjadi lebih efektif karena setiap deviasi atau hambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Pendekatan ini memastikan bahwa

perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat pada setiap tahap pelaksanaan Renstra.

Sumber data yang digunakan dalam proses pengendalian dan evaluasi berasal dari berbagai dokumen dan sistem informasi yang terverifikasi, antara lain laporan kinerja unit kerja, laporan keuangan, hasil pemantauan lapangan, data dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan/Sistem Informasi Pemerintah Daerah), serta sistem informasi internal Kementerian ATR/BPN. Selain itu, data pendukung dari K/L lain, maupun mitra kerja strategis juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memastikan hasil evaluasi yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, bahwa Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029 akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mewujudkan kesinambungan Pembangunan Nasional, karena dalam Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029 menerapkan cakupan manajemen kinerja yang dapat dievaluasi secara periodik, baik dalam triwulan, tahunan maupun evaluasi Renstra paruh waktu. Tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemantauan Rutin

Tabel 3.3 Pemantauan Rutin Kinerja Renstra
Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Deskripsi
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja Kementerian)	Oktober sampai dengan Desember	Penyusunan rencana kerja pada setiap tahun anggaran dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai bagian dari Renstra.
Pengendalian Triwulanan	Januari, April, Juli, Oktober	Evaluasi capaian tiap triwulan, laporan ke pimpinan untuk pembahasan lebih lanjut.
Pengendalian Tahunan	Desember tiap tahun	Review tahunan kinerja dan evaluasi program yang telah dilaksanakan untuk merencanakan tahun berikutnya.

2. Evaluasi Paruh Waktu (Tengah Periode)

Tabel 3.4 Evaluasi Paruh Waktu (Tengah Periode) Kinerja Renstra
Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Deskripsi
Evaluasi Paruh Waktu	Pertengahan tahun ke-3 (tiga) yaitu Juni 2027	Evaluasi terhadap capaian Renstra setelah 3 (tiga) tahun berjalan, untuk menilai apakah tujuan strategis masih relevan atau perlu penyesuaian.
Analisis Kinerja Paruh Waktu	Juni 2027	Evaluasi komprehensif terhadap efektivitas strategi yang telah dilaksanakan pada 2 (dua) tahun pertama dan perbaikan yang dibutuhkan untuk 2 (dua) tahun sisa.
Penyesuaian Strategis (jika diperlukan)	Juli sampai dengan Agustus 2027	Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu, dilakukan penyesuaian strategis atau revisi target agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang berkembang.

3. Pelaporan Hasil Evaluasi Tahunan dan Akhir Periode

Tabel 3.5 Pelaporan Hasil Evaluasi Tahunan dan Akhir Periode
Kinerja Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Deskripsi
Evaluasi Tahunan	Januari tiap tahun	Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pencapaian tujuan strategis pada tahun sebelumnya.
Analisis Kinerja Tahunan	Januari tiap tahun	Penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk mengetahui apakah target tahunan tercapai.
Evaluasi Akhir Periode Renstra	Desember 2029	Evaluasi final untuk menilai pencapaian keseluruhan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 dan dampaknya terhadap tujuan jangka panjang.

4. Penjadwalan Khusus untuk Setiap Tahap Evaluasi

Tabel 3.5 Penjadwalan Khusus untuk Setiap Tahap Evaluasi
Kinerja Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029

Tahun	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Deskripsi
Tahun 2025	Penyusunan Rencana Kerja 2025 dan pengendalian awal	Desember 2024 sampai dengan Januari 2025	Menyusun rencana kerja tahunan dan memastikan pengendalian awal Renstra berjalan sesuai harapan.
Tahun 2026	Pengendalian dan Evaluasi Triwulanan I, II, III dan Tahunan	Maret, Juni, September, Desember 2026	Mengkaji capaian target tahun 2025 dan 2026, serta memantau progres implementasi program.
Tahun 2027	Evaluasi Paruh Waktu dan Penyesuaian Renstra	Juni sampai dengan Agustus 2027	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian Renstra hingga pertengahan periode, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Tahun 2028	Pengendalian dan Evaluasi Triwulanan I, II, III dan Tahunan	Maret, Juni, September, Desember 2028	Fokus pada evaluasi dan pembenahan persiapan untuk tahun akhir Renstra.
Tahun 2029	Evaluasi Akhir Periode Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja 2029	Desember 2029	Menilai keberhasilan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029, serta mempersiapkan rencana kerja untuk tahun mendatang sesuai dengan hasil evaluasi.

3.3 Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kerangka regulasi mencakup perencanaan pembentukan peraturan untuk mendukung, mendorong, dan mengatur perilaku Kementerian ATR/BPN sebagai Kementerian Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian ATR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan

umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian ATR di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR;
6. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sedangkan sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;
7. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
9. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
10. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

3.4 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dengan kata lain, kerangka regulasi berfungsi sebagai landasan aturan untuk mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang mencakup:

1. Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
3. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
6. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
8. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
9. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda;
11. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang di Provinsi Kalimantan Barat;
12. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara;
13. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kefamenanu dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;

15. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan;
16. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting;
17. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Sembilang;
18. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
19. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah;
20. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Khatulistiwa;
21. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bang Sejahtera;
22. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Metropolitan Nusamba;
23. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
24. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Sangiran;
25. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto;
26. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Soroako dan Sekitarnya;
27. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Observasi Nasional Timau;
28. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Tanjung Puting;
29. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jasa-Sungai Kelik;
30. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Miangas;
31. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jayapura;
32. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Long Pahangai;
33. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kwandang;
34. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Tanah Merah;
35. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku;
36. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat;
37. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Surakarta;
38. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Pekanbaru;
39. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Malang Raya;
40. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Sembilang;

41. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Hutan Hujan Sumatera;
42. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Daruba, Sanggowo, dan Bere-Bere;
43. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua;
44. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
45. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Hutan Lindung Mahato;
46. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Lorentz;
47. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Belitong;
48. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ijen;
49. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Sei Manggaris;
50. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Tarakan;
51. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kalabahi;
52. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
53. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan;
54. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
55. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
56. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
57. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
58. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
59. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018

- tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
60. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
 61. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 62. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 63. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
 64. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
 65. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 66. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 67. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
 68. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata

- Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi;
69. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
 70. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 71. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
 72. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
 73. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 74. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar;
 75. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
 76. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 77. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang;
 78. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
 79. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan;
 80. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan;

81. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penyelenggaraan Kearsipan;
82. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
83. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029;
84. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
85. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Satu Data Indonesia;
86. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
87. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
88. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Utara;
89. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Pihak Tertentu;
90. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
91. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pola Karier di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
92. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Tarif, Akomodasi, dan Konsumsi Pelayanan Pertanahan;
93. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Jabatan Manajerial dan Non Manajerial;
94. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pemberian Tunjangan Kinerja;
95. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
96. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
97. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
98. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

99. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Manajemen Talenta;
100. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Manajemen Kinerja;
101. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Standar Pelayanan Bidang Pertanahan;
102. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Standar Pelayanan Bidang Survei dan Pemetaan;
103. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Peta Proses Bisnis;
104. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
105. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
106. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Struktur dan Organisasi Politeknik Agraria STPN;
107. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penyelenggaraan Ikatan Dinas pada Politeknik Agraria STPN;
108. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana Terapan;
109. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Statuta Politeknik Agraria STPN;
110. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai *Whistleblowing System*;
111. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Benturan Kepentingan;
112. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Tata Kelola Pengawasan Intern;
113. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon;
114. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Bireuen;
115. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan;
116. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Gresik;
117. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Banyumas;
118. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Survei Pemetaan, Pertanahan dan Ruang;
119. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penanganan Data Spasial Pendaftaran Tanah;
120. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral;
121. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Uji Kompetensi Penata Kadastral;

122. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Asisten Penata Kadastral;
123. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Uji Kompetensi Penata Ruang;
124. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Peralihan Hak Elektronik dan Akta Elektronik;
125. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penyelenggaraan Administrasi atas Satuan Rumah Susun;
126. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pelaksanaan Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria, Penyelenggaraan Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Pengalihan Hak atau Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria, serta Pemindahtanganan Sertipikat Hak Atas Tanah Transmigrasi;
127. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penilaian Tanah;
128. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penilaian Dampak Sosial Pengadaan Tanah;
129. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan;
130. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pencadangan Tanah;
131. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pengendalian dan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah; dan
132. Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Kebijakan yang akan diterapkan pada periode perencanaan yang akan datang perlu diwadahi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum sehingga mampu memberikan pedoman atau arahan substansi hukum bidang pertanahan dan tata ruang.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat esensial yang dimiliki oleh K/L dalam bentuk struktur organisasi, tata kelola, dan pengelolaan ASN yang berfungsi untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan. Perangkat ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi setiap K/L, dengan berpedoman pada RPJMN guna memastikan keselarasan dengan arah pembangunan nasional. Melalui kerangka kelembagaan yang kokoh, setiap K/L diharapkan dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah dirumuskan.

Struktur organisasi dalam kerangka kelembagaan bukan hanya sekedar susunan unit atau jabatan, melainkan harus dirancang untuk menjadi penopang utama dalam pelaksanaan strategi organisasi. Struktur ini berfungsi sebagai "wadah" atau "rumah" bagi strategi yang dirumuskan, sehingga desainnya harus mampu mengakomodasi kebutuhan strategis dan operasional. Dengan demikian, setiap elemen dalam struktur organisasi harus memiliki peran dan fungsi yang jelas dan relevan, yang tidak hanya menunjang efektivitas

pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga memperkuat sinergi antar unit kerja.

Dalam menyusun struktur organisasi yang sesuai, terdapat beberapa kriteria desain yang perlu dipertimbangkan agar dapat selaras dengan arah kebijakan dan strategi organisasi. Khususnya bagi Kementerian ATR/BPN, kriteria desain ini menjadi acuan penting dalam membentuk struktur yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan pengembangan di bidang pertanahan dan penataan ruang, serta mendukung prioritas pembangunan periode 2025-2029. Beberapa kriteria desain struktur organisasi tersebut meliputi:

Tabel 3.3 Kriteria Desain Struktur Organisasi

No.	Fungsi	Unit Kerja
Fungsi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang		
1.	perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;	Direktorat Jenderal Tata Ruang
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;	
3.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;	
4.	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;	
5.	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;	
6.	pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan	
7.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
Fungsi pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik		
1.	perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;	
3.	pelaksanaan kebijakan pemanfaatan peralatan survei dan pemetaan;	
4.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;	

No.	Fungsi	Unit Kerja
5.	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;	
6.	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar kadastral, pengukuran dan pemetaan pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;	
7.	pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan	
8.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
Fungsi pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah		
1.	perumusan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;	
3.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;	
4.	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;	
5.	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;	
6.	pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan	
7.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
Fungsi Redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu		
1.	perumusan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;	

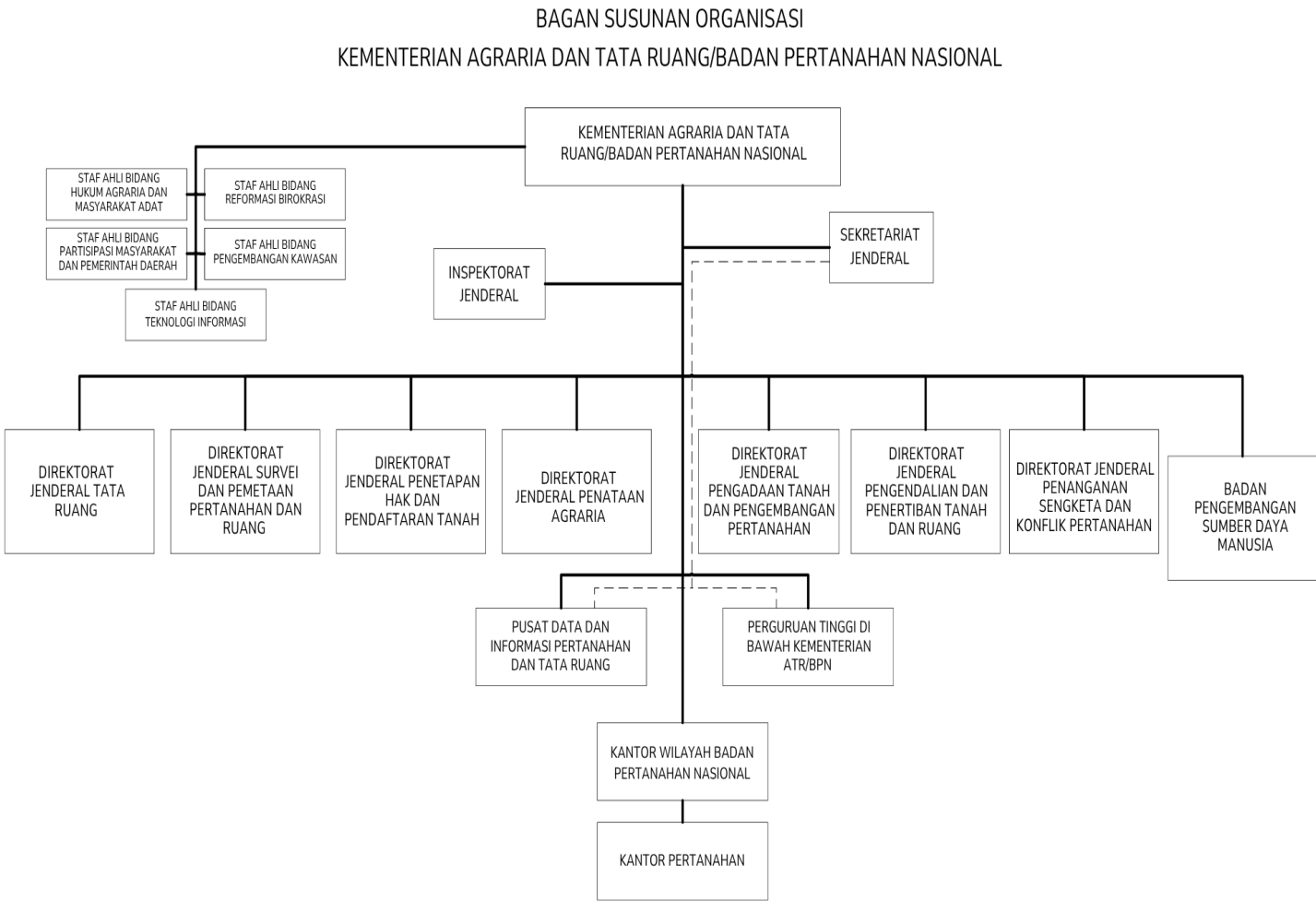
No.	Fungsi	Unit Kerja
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
3.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;	
4.	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;	
5.	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;	
6.	pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan	
7.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
Fungsi pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan		
1.	perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;	
3.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;	
4.	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;	
5.	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;	
6.	pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan	
7.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	

No.	Fungsi	Unit Kerja
Pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah		
1.	perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;	
3.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;	
4.	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;	
5.	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan mang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;	
6.	pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan	
7.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
Fungsi penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan		
1.	perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
2.	pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;	
3.	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;	
4.	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik	

No.	Fungsi	Unit Kerja
	pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;	
5.	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;	
6.	pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan	
7.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
Fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi		
1.	koordinasi kegiatan Kementerian ATR/BPN;	Sekretariat Jenderal
2.	koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN;	
3.	pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian ATR/BPN;	
4.	pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;	
5.	koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;	
6.	koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan	
7.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
Fungsi pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang		
1.	perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia bidang pertanahan dan tata ruang;	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pertanahan dan tata ruang;	
3.	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang;	
4.	pelaksanaan administrasi badan; dan	
5.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
Fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian		
1.	perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;	Inspektorat Jenderal
2.	pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;	
3.	pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;	
4.	penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian ATR/BPN;	

No.	Fungsi	Unit Kerja
5.	pelaksanaan administrasi inspektorat jenderal; dan	
6.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	

3.6. Struktur Organisasi



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Kementerian ATR/BPN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Manajemen kinerja adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai, indikator keberhasilan, dan cara mencapainya. Dalam program reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja dan kerangka pendanaan berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan strategi organisasi, sehingga pencapaian kinerja dapat dievaluasi dengan jelas. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat dinilai keberhasilannya, sedangkan kerangka pendanaan menjamin bahwa strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Bab ini membahas tentang hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik IKSS, IKPP, maupun IKK.

4.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam konteks Renstra Tahun 2025-2029 Kementerian ATR/BPN, tujuan yang ditetapkan merujuk pada pencapaian visi dan misi Kementerian ATR/BPN yang mencakup pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, menanggulangi sengketa pertanahan, dan memfasilitasi akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap sertifikat tanah. Tujuan ini menjadi dasar bagi penyusunan sasaran strategis yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Tujuan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan tersebut. Indikator Kinerja Tujuan dalam Renstra Kementerian ATR/BPN telah dirumuskan dengan jelas dan dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, agar dapat memberikan gambaran objektif tentang kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan yang lebih besar tersebut. Indikator Kinerja Tujuan ini mengukur pencapaian pada level makro, berhubungan langsung dengan hasil akhir dari proses pembangunan yang lebih besar dalam konteks pertanahan dan penataan ruang. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Tujuan akan mencerminkan keberhasilan dalam mencapai visi yang lebih luas yang sudah dicanangkan dalam rencana strategis Kementerian ATR/BPN.

Pada tahapan selanjutnya sasaran strategis dan IKSS pada Renstra Tahun 2025-2029 menjadi IKU dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN. Sasaran strategis digambarkan dalam suatu aliran kinerja (*performance flow*) yang terkait dalam suatu rangkaian proses bisnis dengan program dan kegiatan yang lebih terperinci, serta menetapkan area prioritas yang akan diberikan perhatian lebih besar. Setiap sasaran strategis berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan, berfungsi sebagai langkah terukur menuju hasil yang lebih spesifik, dan akan menjadi tolok ukur pencapaian pada tingkat yang lebih operasional dan terukur.

Indikator sasaran strategis adalah alat ukur yang lebih mendetail, yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tercapai. Indikator ini berfungsi untuk memecah sasaran strategis menjadi hasil yang lebih spesifik, yang bisa diukur dengan parameter yang lebih tepat dan relevan. Indikator sasaran strategis ini dapat mencakup pengukuran terhadap *output* yang dihasilkan oleh program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan sasaran tersebut.

Secara keseluruhan, hubungan antara tujuan, IKT, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 menunjukkan sebuah proses yang sistematis dalam penyusunan rencana strategis. Tujuan besar dipecah menjadi sasaran strategis yang terukur, dan IKT berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut pada level makro. Di sisi lain, indikator sasaran strategis berfokus pada evaluasi hasil yang lebih langsung dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.

A. Tujuan 1 (Satu)

Pada Tujuan 1 (satu): Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Inklusif Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Tujuan 1 (satu) dan Target Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target					Unit Penanggung Jawab
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Persen	11.45% -	12,52% -	15,73% -	20,72% -	23,46% -	1. Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) 2. Ditjen Penataan Agraria (Pentag) 3. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) 4. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR)
Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	Persen	52%	54%	56%	58%	60%	
Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan	Indeks	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	

Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang dirumuskan dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan-IKSS, yaitu:

1.1. Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

IKSS "Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan" digunakan

untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan".

IKSS ini mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi ke dalam dokumen rencana tata ruang, yang kemudian diimplementasikan dalam pengelolaan ruang yang efektif. Proporsi penduduk yang tinggal di wilayah dengan RTRW yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan menjadi representasi tingkat perlindungan terhadap risiko bencana, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan fungsi ruang dalam mendukung produktivitas ekonomi, serta pemenuhan aspek kenyamanan dan keterjangkauan ruang.

Oleh karena itu, peningkatan nilai indikator ini menunjukkan kemajuan dalam penyediaan ruang yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk memastikan validitas pengukuran, diperlukan evaluasi konsistensi substansi RTRW terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, pembaruan data kependudukan secara periodik, serta perhatian terhadap pemerataan pelaksanaan di seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan dan perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, IKSS ini menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan tata ruang dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

$$IKSS\ 1 = \frac{Penduduk\ RTRW\ PBB\ (i)(t)}{Penduduk\ Nasional\ (t)}\ 100\%$$
$$IKSS\ 1 = \frac{Penduduk\ RTRW\ PBB\ (i)(t)}{Penduduk\ Provinsi\ (t)}\ 100\%$$

Keterangan:

1.1A	:	Level Nasional
1.1B	:	Level Provinsi
Penduduk Nasional(t)	:	Jumlah penduduk Indonesia pada tahun t
Penduduk RTRWPPB(i)(t)	:	Jumlah penduduk provinsi i dengan RTRW Provinsi yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP pada tahun t
Penduduk Provinsi (j)(t)	:	Jumlah penduduk provinsi j pada tahun t
Penduduk RTRWKPB(i)(t)	:	Jumlah penduduk kabupaten/kota i pada tahun t dengan RTRW Kab/Kota yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan

Berikut adalah *Baseline* dan *Target* dari IKSS "Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan":

Tabel 4.2 Target Kinerja IKSS Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan

Indikator	Baseline 2024	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Level Nasional	98,58	98,58	100	100	100	100	Persen
Level Provinsi (Rata-rata)	99,74	99,74	100	100	100	100	Persen

IKSS "Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan" sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, yang dikontribusikan melalui dokumen RTR yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

Penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, diasumsikan akan memiliki (potensi) ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan, karena dokumen RTR sudah memperhatikan aspek lingkungan dan kerawanan bencana, daya dukung dan daya tampung wilayah.

Perda RTRW yang terbit sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat kajian lingkungan hidup strategis yang dituangkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota diberlakukan sejak terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang kemudian pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
- 2) Sebelum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam penyusunan RTRW, kajian lingkungan hidup menggunakan metode penilaian cepat yang dikonsultasikan ke KLH sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3) selain implementasi kedua regulasi dari KLH tersebut, dalam proses penyusunan RTRW juga telah dilengkapi dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

1.2. Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi *Online Single Submission* (OSS)

RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS memberikan kepastian hukum, kejelasan pemanfaatan ruang, serta mempercepat proses perizinan berusaha. Semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS, semakin luas pula akses masyarakat terhadap kemudahan berusaha, yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi, efisiensi pemanfaatan ruang, dan optimalisasi fungsi ruang secara produktif.

Selain itu, keterpaduan RDTR dan OSS menjamin bahwa kegiatan usaha yang berkembang tetap berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan, sehingga produktivitas ruang tidak mengorbankan aspek keamanan, kenyamanan, maupun keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, IKSS ini menjadi ukuran kuantitatif untuk menilai sejauh mana tata ruang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan ruang yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga akurasi pengukuran, perlu dilakukan verifikasi terhadap kualitas substansi RDTR, tingkat integrasi aktual dengan OSS, serta cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang benar-benar terfasilitasi oleh mekanisme tersebut.

IKSS ini merupakan kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, salah satunya berkontribusi melalui penyediaan dokumen RTR melalui penyediaan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha bagi penduduk.

Perhitungan IKSS dilakukan dengan melihat capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang melalui keterpaduan RDTR dengan sistem perizinan OSS secara nasional. Formula ini menggunakan rasio antara jumlah RDTR yang terintegrasi dengan OSS terhadap total RDTR nasional, dengan asumsi jumlah penduduk nasional terdistribusi merata di seluruh wilayah perencanaan. Asumsi distribusi penduduk secara merata digunakan untuk menyederhanakan proses estimasi dan perhitungan indikator. Hal ini penting agar formula dapat diterapkan secara konsisten setiap tahun, tanpa bergantung pada dinamika data penduduk di setiap wilayah yang cenderung kompleks

dan berubah-ubah. Dengan demikian, indikator lebih stabil dan mudah dioperasikan dalam sistem pemantauan kinerja.

$$IKSS\ 2 = \frac{\frac{RDTR\ OSS\ Nasional\ (t)}{RDTR\ Nasional\ (t)} \sum Penduduk\ Nasional\ (t)}{\sum Penduduk\ Nasional\ (t)} \times 100\%$$

Keterangan:

RDTROSS_NASIONAL(t)	: total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t
RDTR_NASIONAL(t)	: total RDTR secara nasional sampai tahun t
ΣPENDUDUK NASIONAL(t)	: jumlah penduduk nasional tahun t

Berikut merupakan *baseline* dan target dari IKSS proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS:

Tabel 4.3 Target Kinerja IKSS Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS

Baseline 2024	Target (%)					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
10,30	11,45 - 11,81	12,52 - 12,87	15,73 - 16,09	20,72 - 21,07	23,46-23,81	Persen

Dalam perhitungan indikator ini, pembilang menggunakan akumulasi target persetujuan substansi RDTR setiap tahun, sementara penyebut tetap menggunakan target jumlah RDTR nasional baik untuk batas bawah maupun batas atas.

Rentang capaian (*range*) IKSS setiap tahun ditetapkan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan serta efisiensi anggaran. Pada 5 (lima) tahun anggaran batas atas mengacu pada RPJMN yang merupakan satu kesatuan anggaran dengan pinjaman luar negeri sedangkan untuk batas bawah yaitu pada tahun 2025, *range* ditetapkan lebih sempit, dengan batas bawah berdasarkan DIPA Awal tahun 2025. Sedangkan untuk batas bawah tahun 2026-2029 berdasarkan kenaikan inflasi.

Sebagai tambahan terkait batas bawah tahun 2026 ditetapkan sesuai dengan target Pagu Indikatif tahun 2026 dan batas bawah untuk tahun 2027 hingga tahun 2029 disesuaikan dengan potensi ketersediaan sumber pendanaan untuk kegiatan penyelesaian RDTR.

Dengan mekanisme ini, indikator IKSS diharapkan dapat secara konsisten menggambarkan perkembangan akses kemudahan berusaha melalui ketersediaan RDTR terintegrasi dengan OSS, sekaligus menjaga fleksibilitas dalam menghadapi keterbatasan dan dinamika alokasi anggaran tahunan.

1.3. Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang

“Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang” merupakan indikator yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan ruang di wilayah tertentu telah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yang ditetapkan secara formal, baik melalui RTRW maupun RDTR. Dalam konteks pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”, tingkat kepatuhan terhadap rencana tata ruang mencerminkan efektivitas pengelolaan ruang yang berorientasi pada tertib pemanfaatan, pengendalian pembangunan, dan keberlanjutan fungsi ruang secara jangka panjang.

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan menjamin bahwa penggunaan lahan, pembangunan fisik, dan aktivitas sosial-ekonomi terjadi dalam koridor yang telah dianalisis dari sisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Tingginya tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang mengindikasikan bahwa pelaku pembangunan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, telah mengikuti prinsip tata ruang yang tertib, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara efisien dan aman, tanpa menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan, ataupun gangguan terhadap fungsi ruang lainnya.

Dalam perspektif keberlanjutan, kepatuhan pemanfaatan ruang juga menjadi prasyarat penting untuk menjaga fungsi ekosistem, melindungi kawasan lindung, serta memastikan ruang tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang. Sementara itu, dari sisi kenyamanan dan produktivitas, tata ruang yang dipatuhi menjamin tersedianya infrastruktur pendukung, keterhubungan antar wilayah, serta zonasi ruang yang mendukung efisiensi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Indikator ini juga memberikan gambaran tentang kualitas pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Oleh karena itu, pengukuran persentase kepatuhan tidak hanya menilai tingkat ketaatan, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan yang dimiliki suatu daerah.

$$IKSS\ i = \sum \frac{KKPR\ Patuh}{KKPR\ yang\ Dinilai}$$

Keterangan:

KKPR Patuh	: Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh
KKPR yang Dinilai	: Jumlah Dokumen KKPR yang Dinilai

Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap KKPR maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan kepada rencana tata ruang maka kualitas ruang hidup masyarakat akan naik dan tujuan ruang yang aman dan nyaman tercapai). Berikut adalah Baseline dan Target dari IKSS Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang:

Tabel 4.4 Target Kinerja IKSS Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang

Baseline 2024	Target					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
50	52	54	56	58	60	Persentase

1.4. Proporsi Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

IKSS "Proporsi Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang" merupakan ukuran kuantitatif yang mencerminkan sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan penataan ruang mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Penyelenggaraan penataan ruang mencakup seluruh aspek pengelolaan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang, serta pembinaan dan pengawasan. Indikator ini sangat relevan dalam mengukur ketercapaian sasaran strategis “Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan” karena peningkatan kinerja daerah dalam menyelenggarakan tata ruang secara langsung berdampak pada kualitas ruang yang dihasilkan, baik dari aspek ketertiban, efisiensi, keberlanjutan, maupun keadilan spasial.

Daerah yang menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang umumnya memiliki kemajuan dalam hal penyusunan dokumen rencana tata ruang yang lengkap dan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih ketat, peningkatan kepatuhan pemanfaatan ruang, serta pemanfaatan teknologi informasi geospasial dalam perencanaan dan pengawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang, serta integrasi antara perencanaan ruang dan pembangunan juga menjadi indikator perbaikan kinerja yang esensial.

Dengan meningkatnya proporsi daerah yang mengalami perbaikan kinerja, dapat diinterpretasikan bahwa semakin luas wilayah yang mampu menyelenggarakan penataan ruang secara tertib dan efisien. Hal ini mendukung terciptanya ruang yang aman dari risiko bencana dan konflik pemanfaatan lahan, nyaman dari sisi aksesibilitas dan kualitas lingkungan, produktif secara ekonomi dan sosial, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

$$IKSS\ i = \sum \frac{Prov\ yang\ mengalami\ peningkatan\ kinerja\ TURBINLAK}{Provinsi\ di\ Indonesia}$$

Semakin banyak Pemda yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang penataan ruang terlayani dengan baik. Berikut merupakan *baseline* dan target dari IKSS proporsi daerah yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang:

Tabel 4.5 Target Kinerja IKSS Proporsi Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

Baseline 2024	Target					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
0	0	50	50	58	58	Persen

2. Sasaran Strategis 2 (SS-2): peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam mendukung perekonomian nasional. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan IKSS, yaitu:

2.1. Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan

Indeks pertumbuhan nilai tambah ekonomi pertanahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan program strategis terhadap perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah yang efektif, penataan ruang yang optimal, dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan nilai tanah secara signifikan. Sebagai aset strategis, tanah yang memiliki nilai tinggi juga mencerminkan potensi ekonomi yang besar serta daya saing suatu wilayah di tingkat lokal maupun nasional.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Landasan pelaksanaan strategi ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan.

Ruang lingkup kegiatan teknis pada IKSS ini meliputi pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, serta kegiatan pertanahan dan tata ruang lainnya. Penyelenggaraan pengadaan tanah diarahkan untuk mendukung pembangunan PSN dan provinsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, memperlancar konektivitas, mendorong investasi, dan meningkatkan sektor pariwisata, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan pembangunan didukung oleh sejumlah faktor penting, antara lain kepastian hukum dalam penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, kemudahan prosedur, transparansi informasi nilai tanah, serta pengenaan tarif pelayanan pertanahan yang adil. Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah juga diupayakan agar selaras dengan rencana tata ruang dan peruntukan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, sasaran strategis ini menegaskan pentingnya orientasi kebijakan

pertanahan yang berkelanjutan dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Rumus yang digunakan indeks ini, sebagai berikut:

Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian =

$$\frac{\text{Rata-rata (laju pertumbuhan Nilai Transaksi + laju pertumbuhan Nilai PNPB + laju pertumbuhan Nilai BPHTB + laju pertumbuhan Nilai HT)}}{(\text{Laju pertumbuhan Nilai Tanah})}$$

Keterangan:

a. Laju pertumbuhan nilai transaksi

$$\frac{(\text{nilai transaksi sesudah} - \text{nilai transaksi sebelum})}{\text{nilai transaksi sebelum}}$$

b. Laju pertumbuhan nilai PNPB

$$\frac{(\text{Nilai PNPB sesudah} - \text{Nilai PNPB sebelum})}{\text{Nilai PNPB sebelum}}$$

c. Laju pertumbuhan nilai BPHTB

$$\frac{(\text{nilai BPHTB sesudah} - \text{nilai BPHTB sebelum})}{\text{nilai BPHTB sebelum}}$$

d. Laju pertumbuhan nilai Hak Tanggungan

$$\frac{(\text{nilai HT sesudah} - \text{nilai HT sebelum})}{\text{nilai HT sebelum}}$$

e. Laju pertumbuhan nilai tanah

$$\frac{(\text{rata rata nilai tanah sesudah} - \text{rata rata nilai tanah sebelum})}{\text{rata rata nilai tanah sebelum}}$$

Tabel 4.6 Target Kinerja IKSS Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian

Baseline 2024	Target					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
1,47	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	Indeks

B. Tujuan 2 (Dua)

Pada Tujuan 2: meningkatkan kepastian hak atas tanah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan nasional, guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut:

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Tujuan 2 dan Target Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target					Unit Penanggung Jawab
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah	Nilai	6	6	7	7	8	1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat.

1. Sasaran Strategis 3: Kepastian Hak atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

1.1. Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah

Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah diwujudkan melalui pendaftaran tanah dan penanganan kasus pertanahan, termasuk pencegahan timbulnya kasus baru. Pendaftaran tanah dihasilkan dari kegiatan teknis, yuridis, dan administratif atas data yuridis (bukti penguasaan atau kepemilikan tanah) dan data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian objek yang dihasilkan oleh kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sedangkan penanganan kasus pertanahan dilakukan melalui penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Kepastian hukum juga termasuk aspek kepastian hak, pembatasan penggunaan haknya dan tanggung jawab atas hak yang dimilikinya yang didasarkan atas informasi rencana tata ruang (*right, restriction dan responsibility*). Kemudian pencegahan timbulnya kasus baru yang muncul dilakukan, antara lain dengan upaya deteksi dini atas potensi kasus yang dapat terjadi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya kasus pertanahan.

Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai, sebagai berikut:

$$\frac{A - B}{A} \times 100$$

Keterangan:

A : jumlah sertipikat yang terbit s.d t (n)

B : jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya s.d t (n)

Tabel 4.2 Interval Nilai dan Konversi Indeks Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah

Nilai Indeks	Nilai Perhitungan
5	<99,995
6	99,9951 - 99,996
7	99,9961 - 99,997
8	99,9971 - 99,998
9	99,9981 - 99,999

Adapun target kinerja indeks nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah pada Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Target Kinerja IKSS Nilai Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah

Baseline 2024	Target					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
5	6	6	7	7	8	Nilai

Korelasi sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, bahwa semakin banyak bidang tanah yang terdaftar dan bidang tanah tersebut semakin sedikit yang berperkara di pengadilan maka nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah tersebut semakin baik.

Dalam IKT dan IKSS tersebut, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berkontribusi terhadap jumlah sertifikat yang terbit. Semakin sedikit sertifikat yang dibatalkan (dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang terbit), maka nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah akan semakin naik, hal ini mengakibatkan bahwa kekuatan hukum sertifikat yang diterbitkan menguat. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas dan fungsi agar menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga nilai kepastian hukum atas tanah dapat tercapai. Berdasarkan data di atas, dengan memperhatikan *baseline* pada tahun 2024 bahwa akumulasi bidang tanah bersertipikat sebesar 104.532.024 (seratus empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat) bidang, maka diproyeksikan jumlah penerbitan sertifikat selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Tahun	Akumulasi Sertipikat yang Terbit	Akumulasi Sertipikat yang terbit s.d T(n)
2025	2.678.453	98.285.031
2026	7.162.572	105.447.603
2027	7.162.572	112.610.175
2028	7.162.572	119.772.747
2029	7.162.572	126.935.319
Jumlah	31.328.741	563.050.875

Jadi meskipun target indikator ini pada tahun 2025 dan 2026 tetap sebesar 6 (enam) dan tahun 2027-2028 juga sebesar 7 (tujuh) tetapi tetap terjadi peningkatan dalam persentase di dalam *range*-nya.

Indikator ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan orientasi penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dalam berkontribusi mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek sosial. Indikator ini dilaksanakan oleh:

- a. fungsi penetapan hak dan pendaftaran tanah; dan
- b. fungsi penanganan sengketa dan konflik pertanahan;

C. Tujuan 3 (Tiga)

Pada Tujuan 3: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan penurunan tingkat kemiskinan melalui bidang pertanahan dan tata ruang. Guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut:

Tabel 4.9 IKT 3 dan Target IKT

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target					Unit Penanggung Jawab
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
Persentase Penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya	Persen	14,98 %	46,98%	46,98%	51,31%	53,89%	Direktorat Jenderal Penataan Agraria

Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang dirumuskan dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu:

- 1. Sasaran Strategis 4: keadilan Hak Atas Tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan IKSS, yaitu:

- 1.1 Penurunan indeks gini ketimpangan kepemilikan tanah untuk petani/nelayan

Penurunan indeks gini ketimpangan kepemilikan tanah untuk petani/nelayan merupakan instrumen strategis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program reforma agraria mampu mengurangi ketimpangan dalam distribusi kepemilikan tanah. Indeks ini menggambarkan distribusi yang lebih adil dan merata atas sumber

daya agraria, khususnya kepada kelompok petani dan nelayan sebagai pelaku utama sektor pangan dan kelautan. Ketimpangan kepemilikan tanah yang tinggi selama ini menjadi hambatan struktural dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah.

Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi isu yang perlu diselesaikan di Indonesia. Selama periode Tahun 2020-2024, upaya Kementerian ATR/BPN dalam menurunkan indeks gini ketimpangan kepemilikan tanah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama melalui redistribusi tanah dan program sertifikasi tanah. Namun, keberhasilan ini terbatas oleh kendala infrastruktur, penegakan hukum yang belum optimal, dan konflik tanah yang masih terjadi di beberapa daerah. Selain itu, meskipun ada kemajuan di wilayah pedesaan, ketimpangan pemilikan tanah di daerah perkotaan masih menjadi tantangan utama.

Penurunan ketimpangan penguasaan tanah diharapkan dapat berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan dan dalam jangka panjang akan menurunkan potensi biaya sosial dan ekonomi. Pickett dan Wilkinson (2015) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penduduk, dengan ketimpangan yang tinggi menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial dan kesehatan. Temuan ini sejalan dengan Fajnzylber dkk (2002) dan Kang (2015) yang menemukan bahwa ketimpangan berkorelasi positif dengan tingkat kriminalitas, termasuk di dalamnya korupsi. Oleh sebab itu, IKSS diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pendapatan sekaligus mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu menurunkan Rasio Gini Pendapatan menjadi 0,372-0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua sampai dengan nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) pada tahun 2029.

Rumus yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indeks ini, sebagai berikut:

$$Indeks\ Gini = 1 - \sum (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

Keterangan:

X_i	: Proporsi Kumulatif Pemilik Tanah (subjek) dalam Kelas i atau kelompok luasan
X_{i+1}	: Proporsi Jumlah Kumulatif Pemilik Tanah (subjek) Kelas $i + 1$ atau di atas kelompok luasan
Y_i	: Proporsi Kumulatif Luas Tanah dalam Kelas i atau kelompok luasan
Y_{i+1}	: Proporsi Kumulatif Luas Tanah Kelas $i + 1$ atau di atas kelompok luasan

Adapun Target Kinerja Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah pada Renstra Kementerian ATR/BPN periode Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 4.10 Target Kinerja IKSS Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Untuk Petani/Nelayan

TARGET	TAHUN					
	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 4.1 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Untuk Petani/nelayan	0,0057	0,0020	0,0062	0,0138	0,0178	0,0227
Kegiatan (Bidang)		175.860	354.990	659.045	354.995	425.118

1.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria

Salah satu dari 5 (lima) sasaran visi untuk mewujudkan Negara Nusantara yang Maju dan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5% (empat koma lima sampai dengan lima persen) dan penurunan rasio gini pendapatan menjadi 0,372–0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua sampai dengan nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) pada tahun 2029. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kedua sasaran tersebut saling berkaitan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah akan berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan. Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran makro tersebut melalui kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan penerima reforma agraria.

Reforma agraria, sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria melalui kegiatan penataan aset dan penataan akses, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerima program reforma agraria memperoleh tambahan aset berupa tanah yang dilegalisasi melalui penerbitan sertipikat. Kepemilikan atas aset tanah tersebut memberikan landasan bagi peningkatan produktivitas ekonomi.

Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria tidak hanya diukur melalui jumlah aset yang didistribusikan, namun juga melalui sejauh mana program ini berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi penerimanya. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian strategis dalam konteks ini adalah persentase peningkatan pendapatan subjek penerima reforma agraria. Indikator ini mencerminkan proporsi penerima program yang mengalami perbaikan kondisi kesejahteraan sebagai hasil dari intervensi reforma agraria, melalui peningkatan pendapatan yang teragregasi dalam upaya peningkatan produktivitas lahan, maupun peningkatan akses terhadap fasilitas pendukung usaha dan pembiayaan.

Secara teknis, indikator ini dihitung berdasarkan selisih peningkatan pendapatan subjek penerima reforma agraria sebelum dan sesudah menerima program reforma agraria, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap variabel pendapatan sebagai salah satu gambaran peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aspek sosial ekonomi masyarakat. Salah satu pendekatan pengukuran yang digunakan adalah formula:

$$IKSS\ 4.2 = \frac{(\text{pendapatan setelah} - \text{pendapatan sebelum})}{(\text{Pendapatan sebelum})} \times 100\%$$

Masyarakat penerima program reforma agraria umumnya memperoleh tambahan aset berupa kepemilikan tanah yang sebelumnya tidak dimiliki, dan kepemilikan ini disertifikasi sehingga menjadi alat bukti hukum atas penguasaan tanah. Dalam penyelenggaraan pertanahan yang terintegrasi dengan reforma agraria, kepemilikan aset tanah yang sah memungkinkan penerima program untuk memperoleh akses terhadap fasilitas produksi dan permodalan melalui kegiatan penataan akses (*access reform*). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, penataan akses merupakan pemberian dukungan berupa permodalan, pelatihan, maupun pendampingan kepada subjek reforma agraria agar mampu memanfaatkan tanah secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Penataan akses ini dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait dalam kerangka kerja GTRA, dengan lingkup kegiatan mencakup identifikasi penerima manfaat melalui pemetaan sosial, peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan, serta pendampingan usaha. Sinergi antara penataan aset dan penataan akses inilah yang menjadi landasan bagi keberhasilan program reforma agraria dalam meningkatkan pendapatan sebagai bentuk gambaran kesejahteraan masyarakat dari segi aspek ekonomi. Dengan demikian, indikator persentase peningkatan pendapatan subjek reforma agraria menjadi cerminan dari efektivitas kebijakan pertanahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan.

Tabel 4.11 Target Kinerja IKSS Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria

TARGET	TAHUN					
	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 4.2 - Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria	4,9%	5%	5,1%	5,2%	5,3%	5,4%
Kegiatan (KK)		43.200	112.000	272.600	513.600	278.000

Tabel 4.12 Interval Nilai dan Konversi Indeks Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah

Persentase	Nilai
<5%	Cukup
≥5%-5,5%	Baik
>5,5%	Sangat Baik

D. Tujuan 4 (Empat)

Pada Tujuan 4: pelayanan pertanahan dan tata ruang yang optimal, cepat, *prudent* dan akuntabel, guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut:

Tabel 4.13 IKT 4 (empat) dan Target IKT

Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Satuan	Target					Unit Penanggung Jawab
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
Skor Penilaian Indeks <i>B-Ready</i> pada aspek <i>Business Location</i>	Skor	39,85	44,85	49,85	54,85	59,85	1. Direktorat Jenderal Tata Ruang 2. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 3. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 4. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien.

- 1. Sasaran Strategis 5 (SS-5): Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien

1.1. B-Ready/ *Business Ready (Business Location)*

Pelayanan yang optimal, cepat, *prudent*, dan akuntabel diukur dengan Nilai “*Business Ready (B-Ready)*”. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang di Indonesia berkaitan erat dengan *B-Ready* dari Bank

Dunia, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi regulasi bagi sektor swasta. *B-Ready* menilai aspek-aspek seperti lokasi bisnis, pelayanan publik, serta kerangka regulasi untuk membantu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Program ini menekankan pentingnya pengelolaan hak properti, kepastian investasi, dan pelayanan perizinan yang efektif, yang semuanya relevan dalam konteks pertanahan dan penataan ruang.

Di Indonesia, bidang pertanahan dan penataan ruang menjadi bagian penting dalam mengatur ketersediaan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Akses terhadap informasi lahan dan perizinan yang transparan, seperti yang diukur dalam pilar *public services* dan *efficiency* *B-Ready*, sangat penting bagi investor dan pengusaha dalam proses akuisisi properti atau pemanfaatan lahan.

Melalui standar seperti ini, program *B-Ready* menjamin kepastian hukum dengan mendorong penguatan hak milik dan keamanan berinvestasi di lahan serta mengurangi kesimpangsiuran informasi dalam pasar properti. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kualitas administrasi lahan dan memperbaiki layanan guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih menarik bagi investor domestik dan asing.

Salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur indikator B-Ready adalah Lokasi Bisnis (*Business Location*). Parameter Lokasi Bisnis membahas tiga aspek utama, yaitu pembelian, sewa, atau pembangunan, yang tersedia bagi wirausahawan untuk menentukan lokasi usaha mereka. Penilaian dilakukan melalui tiga dimensi utama atau pilar. Pilar pertama berfokus pada kualitas regulasi yang mengatur pengalihan properti, pembangunan, dan perizinan pertanahan, mencakup kerangka regulasi yang diperlukan untuk sewa properti tetap, kepemilikan properti, perencanaan kota, dan izin lingkungan. Pilar kedua menilai kualitas layanan publik serta transparansi informasi dalam proses pengalihan properti, pembangunan, dan perizinan pertanahan. Pilar ketiga mengukur efisiensi operasional dalam mendirikan lokasi bisnis secara nyata. Setiap pilar dipecah menjadi kategori yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, lalu dibagi lagi menjadi sub kategori. Subkategori ini terdiri dari beberapa indikator, yang masing-masing memiliki komponen tersendiri. Poin diberikan pada setiap indikator dan diakumulasi untuk menentukan total skor pada setiap sub kategori, kategori, dan pilar. Pilar yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian ATR/BPN antara lain:

- a. *Regulatory Framework* (Pillar I) menilai kualitas regulasi yang mengatur pengalihan properti, pembangunan, dan perizinan pertanahan, mencakup kerangka regulasi yang diperlukan untuk sewa properti tetap, kepemilikan properti, perencanaan kota, dan izin lingkungan. Yang menjadi unit penanggungjawab pada Pillar I ini adalah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah,

- Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- b. *Public Services* (Pillar II) menilai kualitas layanan publik serta transparansi informasi dalam proses pengalihan properti, pembangunan, dan perizinan pertanahan. Yang menjadi unit penanggungjawab pada Pillar II ini adalah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
 - c. *Operational Efficiency* (Pillar III) mengukur efisiensi operasional dalam mendirikan lokasi bisnis secara nyata. Yang menjadi unit penanggungjawab pada Pillar III ini adalah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Adapun Target Kinerja *B-Ready/Business Ready (Business Location)* pada Renstra Kementerian ATR/BPN periode Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 4.14 Target Kinerja IKSS B-Ready/ *Business Ready (Business Location)*

Baseline 2024	TARGET					SATUAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
34,85	39,85	44,85	49,85	54,85	59,85	Nilai

E. Tujuan 5 (Lima)

Pada Tujuan 5 (lima): Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Public Governance*), Manajemen Risiko yang kuat, serta Pengendalian Kepatuhan (*Compliance*), guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut:

Tabel 4.15 IKT 5 (lima) dan Target IKT

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target					Unit Penanggung Jawab
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86	88	90	92	94	1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal

Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- 1. Sasaran Strategis 6 (enam): Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak
 - 1.1. Indeks Reformasi Birokrasi.

Max Weber sebagai salah satu pakar ilmu sosial telah mulai memperkenalkan birokrasi kepada publik. Terinspirasi oleh keunggulan mesin-mesin industri dan manajemen organisasi, Weber

mendefinisikan birokrasi adalah sebuah organisasi yang memiliki prosedur, tanggung jawab, hirarki, dan impersonal. Dengan mengadopsi cara kerja mesin dan manajemen organisasi, birokrasi yang diklaim sebagai organisasi penyelenggara kepentingan publik, dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Tabel 4.16 Target Kinerja IKSS Indeks Reformasi Birokrasi

Baseline 2024	TARGET					SATUAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
84	86	88	90	92	94	Indeks

Indikator yang digunakan dalam Sasaran Strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi untuk menunjukkan sudah bekerjanya *Good Governance*, melalui perubahan *Mindset* dan *Culture Set* yang meliputi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tatalaksana, 5) Penataan Sumber Daya Manusia, 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 7) Penguatan Pengawasan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang ke semuanya diukur setiap tahun dan terangkum dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis tersebut di atas sebagai *goals* dari 3 (tiga) Tujuan yang telah ditetapkan memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagaimana diuraikan targetnya setiap tahun dalam tabel berikut:

Tabel 4.17 Target Kinerja IKSS

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Ukuran	2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 1.1 Proporsi Penduduk yang Tinggal di Daerah dengan RTRW yang Sudah Mempertimbangk an Pembangunan Berkelanjutan	Persentase (Level Nasional)	98,58	100	100	100	100
	Persentase (Level Provinsi)	99,74	100	100	100	100
IKSS 1.2 Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Kemudahan Berusaha Melalui RDTR yang Terintegrasi OSS	Persentase	11,45 - 11,81	12,52 - 12,87	15,73 - 16,09	20,72 - 21,07	23,46 - 23,81

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Ukuran	2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 1.3 Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	Persentase	52	54	56	58	60
IKSS 1.4 Proporsi Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase	0	50	50	58	58
IKSS 2.1 Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian	Indeks	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
IKSS 3.1 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah	Nilai	6	6	7	7	8
IKSS 4.1 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Untuk Petani/Nelayan	Indeks	0,0020	0,0062	0,0138	0,0178	0,0227
IKSS 4.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria	Persentase	5%	5,1%	5,2%	5,3%	5,4%
IKSS 5.1 B-Ready (<i>Business Ready</i>)	Nilai	39,85	44,85	49,85	54,85	59,85
IKSS 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	86	88	90	92	94

4.1.2. Indikator Kinerja Program

Program yang dilaksanakan dalam rencana strategis ini dipertajam dengan sasaran program beserta indikator kinerja program, yang akan diaktualisasikan melalui kegiatan (*activity*) dengan indikator kinerja kegiatannya. Terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Pertanahan, dan Program Dukungan Manajemen. Adapun rincian jumlah sasaran dan indikator masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 2 (dua) sasaran program dengan 5 (lima) IKP.
2. Program Pengelolaan Pertanahan terdiri dari 3 (tiga) sasaran program dengan 12 (dua belas) IKP.
3. Program Dukungan Manajemen terdiri dari 3 (tiga) sasaran program dengan 12 (dua belas) IKP.

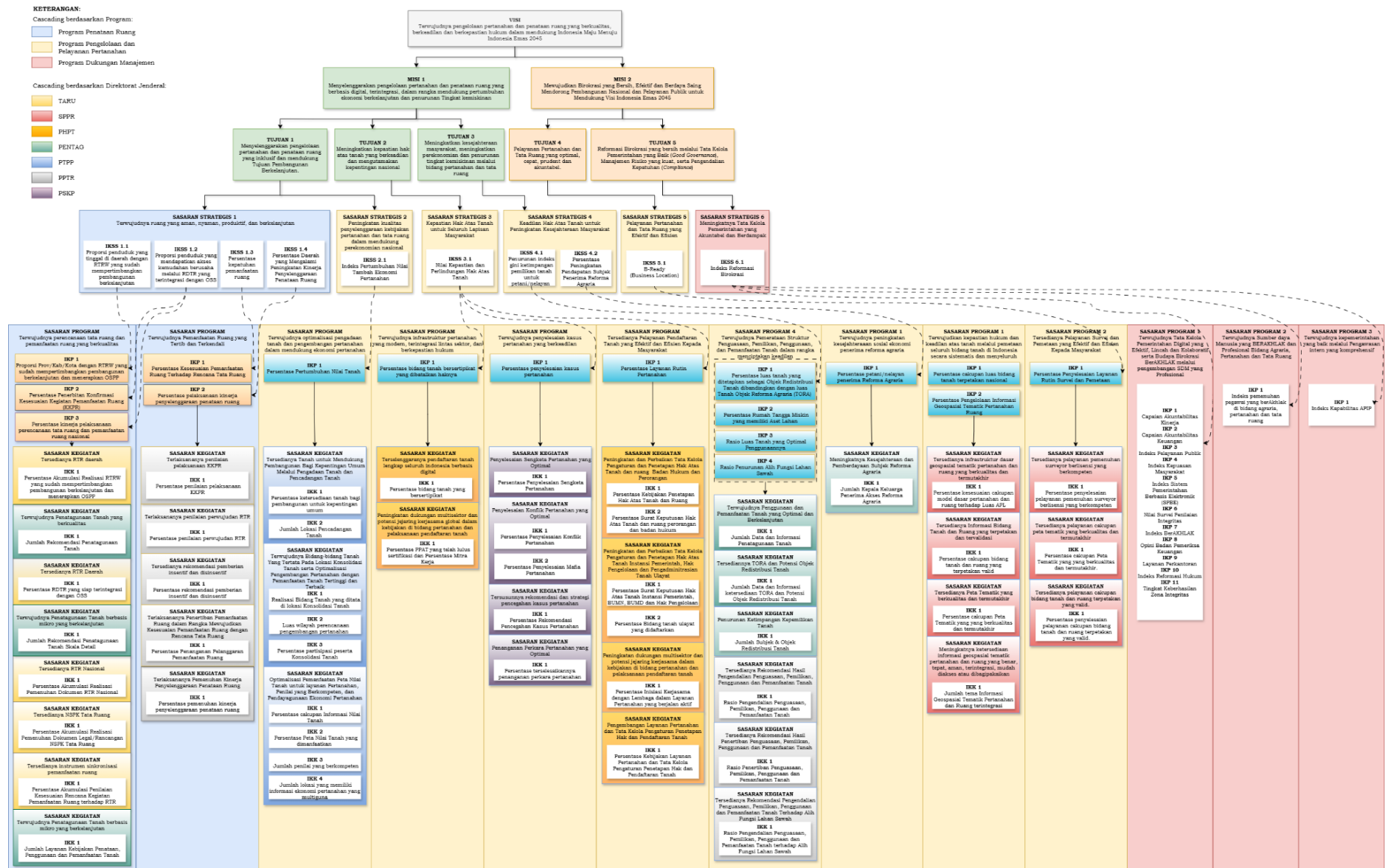
4.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan

Terkait indikator kinerja kegiatan terlampir dalam *Cascading* Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029. Adapun rincian jumlah kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) kegiatan untuk mendukung terlaksananya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan 22 (dua puluh dua) IKK.
2. 22 (dua puluh dua) kegiatan dalam Program Pengelolaan Pertanahan dilengkapi 35 (tiga puluh lima) IKK.
3. 22 (dua puluh dua) kegiatan menunjang Program Dukungan Manajemen, disertai 135 (seratus tiga puluh lima) IKK.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sub-bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Informasi lebih lengkap terhadap kerangka pendanaan terdapat pada Anak Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.



Gambar 3.3 Cascading Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN ini telah disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah dalam mencapai tujuan nasional di bidang pertanahan dan penataan ruang. Dokumen ini tidak hanya menjadi arah bagi implementasi program-program prioritas Kementerian ATR/BPN, namun juga mencerminkan tekad untuk mewujudkan transformasi tata kelola, ekonomi, dan sosial yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian pengelolaan pertanahan dan penataan ruang meliputi kelengkapan, akurasi, konsistensi logis, serta kekinian data pertanahan dan tata ruang untuk mendukung tercapainya: “Indonesia Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur”. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan setiap program, kegiatan, hingga sub-komponen yang disusun dapat diimplementasikan dengan terukur dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *output*, *outcome*, serta dampak positif dalam pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan.

Keberhasilan Renstra Kementerian ATR/BPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, namun juga oleh kemampuan seluruh jajaran organisasi untuk secara konsisten melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Komitmen kuat dari seluruh pimpinan dan jajaran pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN menjadi elemen kunci untuk menghadirkan kualitas layanan agraria dan tata ruang yang optimal. Pelaksanaan program-program strategis ini juga akan didukung oleh sinergi yang harmonis antara Kementerian ATR/BPN dan berbagai pemangku kepentingan eksternal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan tata ruang yang terintegrasi dan penyelenggaraan pertanahan yang transparan, kredibel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan-tantangan dinamis yang dihadapi, baik dari sisi regulasi, perubahan kebutuhan publik, maupun perkembangan teknologi, menuntut adanya fleksibilitas dan kesediaan untuk beradaptasi di dalam pelaksanaan Renstra ini. Setiap perubahan regulasi maupun kebijakan harus terus dipantau dan dianalisis untuk memastikan bahwa Rencana Strategis tetap relevan dan mendukung pencapaian visi. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN harus menerapkan pendekatan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan Renstra ini, yang mencakup penyesuaian strategi, perbaikan program, serta penyempurnaan sistem kerja. Langkah ini akan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga tetap sesuai dengan kondisi dan tuntutan aktual di lapangan.

Monitoring, pengukuran kinerja secara periodik, serta evaluasi yang berkelanjutan adalah bagian integral dari Renstra ini. Proses ini tidak hanya akan menjadi tolak ukur pencapaian, namun juga sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan langkah-langkah yang diperlukan agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran Renstra. Setiap pencapaian dari tahun pertama hingga tahun kelima akan memberikan gambaran jelas mengenai perkembangan serta efektivitas dari setiap program yang telah direncanakan, sehingga dapat diidentifikasi area yang memerlukan penguatan atau penyesuaian lebih lanjut.

Pelaksanaan Renstra Kementerian ATR/BPN ini diharapkan dapat menghadirkan transformasi yang nyata dan berdampak jangka panjang. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, diharapkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang dibangun dapat menjadi pondasi kuat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menjadikan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai pilar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, dan keadilan sosial di Indonesia. Melalui Renstra ini, Kementerian ATR/BPN siap melangkah bersama menuju pencapaian visi besar bangsa, yaitu “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian ATR/BPN

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNEP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
VISI																	
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS, BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM Mendukung INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045																	
MISI 1:	Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan Tingkat kemiskinan.																
TUJUAN 1:		Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang inklusif dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.															
Indikator Kinerja Tujuan		Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS										11,65%			11,81%		
		Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang												52			
Sasaran Strategis 1:	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																
DJTRPENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.1	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan														
			Level Nasional							98,58%	98,58%			98,58%			
			Level Provinsi (Rata-Rata)							99,74%	99,74%			99,74%			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
VISI																								
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS, BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045																								
MISI 1:		Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan Tingkat kemiskinan.																						
TUJUAN 1:		Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang inklusif dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.																						
Indikator Kinerja Tujuan		Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS														11,81%								
		Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang															52							
Sasaran Strategis 1:		Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																						
DJTRPENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.1	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan																					
			Level Nasional															98,58%						
			Level Provinsi (Rata-Rata)																99,74%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									Persentase								
		Sasaran Program	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas						Persentase								
		Indikator Kinerja Program	1. Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP							99,10%	99,10%				99,10%		
DJTR	Kegiatan 1:	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah															
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR daerah						Persentase								
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP								17,50%				31,25%		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis														
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	O80 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	Matek dan Raperda RTRW		10	1.197,88			26	4.640,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota														
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	O81 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I	Persub RTRW		15	1.565,81			27	4.615,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis														
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	O85 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II	Matek dan Raperda RTRW		13	1.533,97			26	6.450,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																								
	Sasaran Program		Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas																					
	Indikator Kinerja Program		1. Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP							99,10%							100,00%	100,00%						
DJTR	Kegiatan 1:	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR daerah																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP							31,25%							27,50%	41,25%						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis																					
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	080 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	26		4.640,00			4.640,00	4.640,00	10	10	1.134,00			1.134,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota																					
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	081 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I	27	171,74	4.443,26			4.615,00	4.615,00	10	10	1.310,00			1.310,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis																					
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	085 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II	26	360,00	6.090,00			6.450,00	6.450,00	9	9	1.008,00			1.008,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																		Unit Organisasi Pelaksana
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
Program:	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																				
	Sasaran Program	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas																			
	Indikator Kinerja Program	1. Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP						100,00%	100,00%											Direktorat Jenderal Tata Ruang	
DJTR	Kegiatan 1:	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah																			
	Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR daerah																		Direktorat Jenderal Tata Ruang	
	Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP						65,00%	100,00%												
	Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis																			
			6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	080 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	13	14	1.456,00			1.568,00			4.640,00	1.134,00	1.680,00	1.680,00	1.568,00
	Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota																			
			6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	081 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I	13	16	1.971,44			2.112,00			4.615,00	1.310,00	1.980,00	2.112,00	2.112,00
	Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis																			
			6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	085 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II	12	15	1.344,00			1.680,00			6.450,00	1.008,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

Program / Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota																					
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II	23	2.595,96	1.354,04		3.950,00	3.950,00	6	6	792,00			792,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB																					
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB							2					5.000,00			
PENTAG	Kegiatan 1:	Nilai Tata Guna Tanah																						
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah								8		3.462,44		3.462,44	3.462,44	23	23	11.423,48			12.751,11		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																					
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Neraca Penatagunaan Tanah	7978 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Neraca Penatagunaan Tanah	2		747,73		747,73	747,73	5	5	1.354,21			1.648,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																					
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	4		2.534,27		2.534,27	2.534,27	11	11	9.693,55			10.727,39			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																					
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	0						0	0							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Tanah Kritis																					
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	2		180,45		180,45	180,45	7	7	375,72			375,72			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO					II. PENDANAAN																	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028										
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN													
PENTAG			Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota																						
					6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II	7	15	970,20			1.980,00			8	16	1.164,24			2.112,00		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB																						
					6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB																
		Kegiatan 1:	Nilai Tata Guna Tanah																							
			Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah							53	53	34.581,94			34.581,94			15	15	5.882,47			5.882,47		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																						
					5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Neraca Penatagunaan Tanah	7978 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Neraca Penatagunaan Tanah	5	5	1.697,44			1.697,44			5	5	1.748,36			1.748,36		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																						
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	10	10	7.482,72			7.482,72			4	4	3.771,40			3.771,40		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																						
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	32	32	25.047,16			25.047,16			0	0						
	Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Tanah Kritis																								
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	6	6	354,62			354,62			6	6	362,70			362,70				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota																				
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II	9	16	1.375,26			2.112,00		3.950,00	792,00	1.980,00	2.112,00	2.112,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB																				
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB								5.000,00						
	PENTAG	Kegiatan 1:	Nilai Tata Guna Tanah																				Direktorat Jenderal Penataan Agraria
			Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah							17	17	5.383,96			6.509,47		3.462,44	12.751,11	34.581,94	5.882,47	6.509,47	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
			Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																			
					5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Neraca Penatagunaan Tanah	7978 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Neraca Penatagunaan Tanah	5	5	675,31			1.800,81		747,73	1.648,00	1.697,44	1.748,36	1.800,81	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																			
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	6	6	4.338,30			4.338,30		2.534,27	10.727,39	7.482,72	3.771,40	4.338,30			
Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																						
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	0	0								25.047,16					
Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Tanah Kritis																						
		6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	6	6	370,36				370,36		180,45	375,72	354,62	362,70	370,36			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO							Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)						Tahun 2025				
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Vol (Batas Bawah)			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
Sasaran Strategis 1:	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																
DJTRPENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.2	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS							10,30%	11,65%				11,81%		
Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
	Sasaran Program		Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas						Persentase								
	Indikator Kinerja Program		2. Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)							70,40%	73,88%				73,88%		
	DJTR	Kegiatan 1: Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah								Persentase							
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR Daerah														
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS								5,90%	8,40%				9,86%	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis														
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	Matek dan Ranperkada RDTR Kab/Kota		20	2.637,11		58	8.700,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis														
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I	Matek dan Ranperkada RDTR Kab/Kota		33		73028,58	33	73.028,58	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota														
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I	Persub RDTR		29	3.472,38		75	11.617,47	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
Sasaran Strategis 1:	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																							
DJTRPENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.2	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS							11,81%							12,71%	12,87%						
	Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																							
	Sasaran Program		Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas																					
	Indikator Kinerja Program		2. Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)							73,88%							75,52%	75,52%						
	DJTR	Kegiatan 1:	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah																					
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR Daerah																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS								9,86%							15,00%	19,95%					
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis																					
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	58	8.700,00			8.700,00	8.700,00	15	15	1.965,00		1.965,00				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis																					
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I	33			73.029	73.028,58	73.028,58	50	50		112.554,00		112.554,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota																					
		6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I	75		11.617,47		11.617,47	11.617,47	33	33		4.950,00		4.950,00					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN												
Sasaran Strategis 1:	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																								
DJTRPENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.2	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS							15,93%	16,09%							20,91%	21,07%						
Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																									
	Sasaran Program		Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas																						
	Indikator Kinerja Program		2. Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)							77,09%	77,09%							78,59%	78,59%						
	DJTR	Kegiatan 1:	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR Daerah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS								35,00%	46,35%							66,00%	73,06%					
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis																						
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	16	27	2.200,80			3.564,00			17	27	2.455,27			3.564,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis																						
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I	91	91	238.270,47			238.270,47			91	91	238.270,47			238.270,47		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota																						
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I	50	50	6.950,00			6.950,00			76	76	10.749,26			10.749,26		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
Sasaran Strategis 1:	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																					
DJTRPENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.2	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS							23,65%	23,81%										Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penataan Agraria	
Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																						
	Sasaran Program		Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas																			
	Indikator Kinerja Program		2. Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)							80,02%	80,02%										Direktorat Jenderal Tata Ruang	
	DJTR	Kegiatan 1:	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah																			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR Daerah																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS							83,00%	100,00%										Direktorat Jenderal Tata Ruang	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis																			
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	18	27	2.729,68			3.510,00			8.700,00	1.965,00	3.564,00	3.564,00	3.510,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis																			
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I									73.028,58	112.554,00	238.270,47	238.270,47	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota																			
		6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I	42	42		5.838,00			5.838,00		11.617,47	4.950,00	6.950,00	10.749,26	5.838,00		

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis																			
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	082 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II	25	28	3.640,00		3.640,00		8.533,30	2.631,70	3.696,00	3.696,00	3.640,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis																			
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	083 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II							110.904,00	246.125,54	246.125,54				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota																			
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	084 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II	43	43		5.977,00		5.977,00	5.700,00		6.950,00	11.170,60	5.977,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS																			
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah				PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah I	42	42	3.681,21		6.197,26		3.960,00	6.135,73	10.342,69	6.197,26			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS																			
				6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah				PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah II	43	43	3.759,74		9.443,45			9.075,00	15.772,35	9.443,45			
PENTAG	Kegiatan 2:	Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail																				
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail							111	111	16.883,83		16.883,83		2.293,04	10.228,37	15.578,21	16.135,63	16.883,83	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN														
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau- Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu				Rekomendasi Kebijakan		4	978,00			4	1.000,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan														
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	Rekomendasi Kebijakan		8	785,46			8	785,46
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	Rekomendasi Kebijakan		4	507,58			4	507,58
	Sasaran Program	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas															
	Indikator Kinerja Program	3. Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional										50,00%				53,14%	
DJTR	Kegiatan 2:	Perencanaan Tata Ruang Nasional															
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR Nasional							Persentase							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional									20,00%				22,86%	
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Dokumen Pendukung RTR Nasional		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Pendukung RTR Nasional	Dokumen Pendukung RTR Nasional/Dokumen Fasilitasi Pendukung RTR Nasional		5	826,82			5	1.425,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)							Persentase							
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional		3		15000,00		6	21.900,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026					
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
						4			1.000,00				1.000,00											
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan																					
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	8		785,46			785,46	785,46	64	66	8.657,16			8.801,58		
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	4		507,58			507,58	507,58	0	10				1.426,79		
	Sasaran Program		Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas																					
	Indikator Kinerja Program		3. Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional							53,14%							54,43%	62,86%						
DJTR	Kegiatan 2:	Perencanaan Tata Ruang Nasional																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR Nasional																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional							22,86%							28,57%	37,14%						
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Dokumen Pendukung RTR Nasional		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Pendukung RTR Nasional	5	1.379,95	45,05			1.425,00	1.425,00	5	5	850,00			2.000,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	6		6.900,00	15.000		21.900,00	21.900,00	2	8	3.750,00	2.700,00		10.500,00	2.700,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027						Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu																			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan																						
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	96	96	13.177,04			13.177,04		96	96	13.572,36			13.572,36			
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	15	15	2.401,17			2.401,17		15	15	2.563,28			2.563,28			
		Sasaran Program	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas																						
		Indikator Kinerja Program	3. Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional							66,71%	77,14%						77,71%	89,14%							
DJTR	Kegiatan 2:	Perencanaan Tata Ruang Nasional																							
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR Nasional																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional							54,29%	62,86%						74,29%	82,86%							
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Dokumen Pendukung RTR Nasional		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Pendukung RTR Nasional	1	1	178,50			2.000,00		1	1	187,43			2.000,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)																						
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	5	6		12.525,00		1.475,00	12.525,00		5	6		12.525,00		1.475,00	12.525,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)											Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu									1.000,00								
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan																				
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	96	96	13.979,53		13.979,53	785,46	8.801,58	13.177,04	13.572,36	13.979,53				
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	15	15	2.904,31		2.904,31	507,58	1.426,79	2.401,17	2.563,28	2.904,31				
	Sasaran Program		Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas																				
	Indikator Kinerja Program		3. Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional						88,57%	100,00%													
DJTR	Kegiatan 2:	Perencanaan Tata Ruang Nasional																					
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya RTR Nasional																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional						91,43%	100,00%									Direktorat Jenderal Tata Ruang				
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Dokumen Pendukung RTR Nasional		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Pendukung RTR Nasional	1	1	196,80		2.000,00	1.425,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)																				
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN)	4	4	5.900,00		5.900,00	21.900,00	13.200,00	14.000,00	14.000,00	5.900,00				

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional														
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional	Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional		3	1.741,00			4	3.050,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN														
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN	Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN														
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN	Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN		4	1.989,00			4	2.403,65
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis RPP RTRWN														
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis RPP RTRWN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPP RTRWN	Materi Teknis dan RPP RTRWN							
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya NSPK Tata Ruang														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang									10,00%				20,00%	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang														
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang	Rancangan Peraturan NSPK		2	1.287,33			4	4.216,25
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)														
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Dokumen Laporan		1		1000,00		6	2.425,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN													
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional	4	3.050,00				3.050,00	3.050,00	3	3	1.950,00			1.950,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN								0	6				13.732,28		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN	4	2.403,65				2.403,65	2.403,65	0	2				1.200,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis RPP RTRWN																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis RPP RTRWN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPP RTRWN															
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya NSPK Tata Ruang																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang							20,00%							15,00%	40,00%						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang	4	1.200,00	3.016,25			4.216,25	4.216,25	1	4	900,00			4.017,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	6		2.425,00			2.425,00	2.425,00	1	6	400,00			3.280,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028										
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN													
			Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional																						
					5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional	3	3	2.047,50			2.160,00			3	3	2.149,88			2.160,00		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN																						
					5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN	4	6	5.750,00			8.860,89			5	6	7.546,88			12.808,40		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN																						
					5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN	6	6	3.600,00			3.600,00			4	4	1.950,00			2.400,00		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis RPP RTRWN																						
					5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis RPP RTRWN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPP RTRWN																
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya NSPK Tata Ruang																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang							25,00%	60,00%							40,00%	80,00%						
			Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang																						
					5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang	2	4	1.890,00			4.137,51			3	4	2.976,75			4.261,63		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)																						
					5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2	6	840,00			3.310,90			3	6	1.323,00			3.342,73		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional	2	2	1.430,00		1.430,00			3.050,00	1.950,00	2.160,00	2.160,00	1.430,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN	6	6	9.509,06		12.598,43			13.732,28	8.860,89	12.808,40	12.598,43				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN	4	4	2.047,50		2.414,60			2.403,65	1.200,00	3.600,00	2.400,00	2.414,60			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Materi Teknis RPP RTRWN																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis RPP RTRWN		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Materi Teknis dan RPP RTRWN															
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya NSPK Tata Ruang																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang							60,00%	100,00%											Direktorat Jenderal Tata Ruang		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang	4	4	4.167,45		4.389,48			4.216,25	4.017,00	4.137,51	4.261,63	4.389,48			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)																					
				5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	4	6	1.852,20		3.375,51			2.425,00	3.280,00	3.310,90	3.342,73	3.375,51			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
Kegiatan 3:	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang															
	Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang														
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR								100,00%					100,00%	
	Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rekomendasi Program Pembangunan		38	2.000,00			38	5.439,51
	Indikator Rincian Output	Jumlah Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan														
			5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan	Rekomendasi Program Pembangunan		0				38	1.205,00
	Indikator Rincian Output	Jumlah Persetujuan/Rekomendasi KKPR														
			5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Persetujuan/Reko mendasi KKPR		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Persetujuan/Reko mendasi KKPR	Dokumen Persetujuan/ Rekomendasi KKPR		550	3.855,31			1250	9.593,32
	Indikator Rincian Output	Jumlah Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Rekomendasi Kebijakan		0				38	8.113,59

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 3:	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang																					
		Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR						100,00%							100,00%	100,00%						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																				
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	38	5.439,51			5.439,51	5.439,51	38	38	3.673,17			5.983,47		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan																				
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan	38	1.205,00			1.205,00	1.205,00	0	38				1.325,50		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Persetujuan/Rekomendasi KKPR																				
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Persetujuan/Rekomendasi KKPR		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Persetujuan/Rekomendasi KKPR	1250		9.593,32		9.593,32	9.593,32	1.350	1.350	5.829,92			9.881,12		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																				
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	38	3.464,11	4.649,48		8.113,59	8.113,59	38	38	5.357,00			6.992,97		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO					II. PENDANAAN																
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)		Alokasi Anggaran																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 3:	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang																						
		Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR						100,00%	100,00%							100,00%	100,00%						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																					
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		38	38	3.856,83			6.581,81			38	38	4.049,67			7.239,99			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan																					
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan		38	38	1.458,05			1.458,05			38	38	1.530,95			1.603,86			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Persetujuan/Rekomendasi KKPR																					
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Persetujuan/Rekomendasi KKPR		1.418	1.450	6.429,75			10.178,55			1.489	1.550	7.089,28			10.485,89			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																					
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		38	38	5.624,85			7.692,26			38	38	5.906,09			8.461,49			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO														TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029								Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
	Kegiatan 3:	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang																				
		Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR						100,00%	100,00%											Direktorat Jenderal Tata Ruang	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																			
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	38	38	4.252,15		7.963,99			5.439,51	5.983,47	6.581,81	7.239,99	7.963,99		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan																			
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan	38	38	1.607,50		1.764,24			1.205,00	1.325,50	1.458,05	1.603,86	1.764,24		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Persetujuan/Rekomendasi KKPR																			
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Persetujuan/Reko mendasi KKPR	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Persetujuan/Reko mendasi KKPR	1.564	1.650	7.818,68		10.800,46			9.593,32	9.881,12	10.178,55	10.485,89	10.800,46		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																			
				5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	38	38	6.201,40		9.307,64			8.113,59	6.992,97	7.692,26	8.461,49	9.307,64		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)					
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
PENTAG	Kegiatan 2:	Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail															
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								74.628	25.669,75			74.715	25.690,77	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah														
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT	Layanan		19.600	603,46			19.783	605,60
		6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	Layanan		55.028	25.066,29			54.932	25.085,17		
Sasaran Strategis 1:			Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan														
PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.3	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang							50%					52%		
	Sasaran Program		Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali														
	Indikator Kinerja Program		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang							Persentase					84,0%		
	PPTR	Kegiatan 1:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang													5.000,00	
			Sasaran Kegiatan	1. Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR						Persentase							
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penilaian pelaksanaan KKPR							100,0%				12,5%	5.000,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK yang Dinilai														
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK	Produk					2.000	5.000,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
PENTAG	Kegiatan 2:	Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						74.715		25.690,77			25.690,77	25.690,77	76.413	109.366	26.545,01			29.839,93		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah																				
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT	19.783		605,60			605,60	605,60	23.521	19.247	718,06		592,60	
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	54.932		25.085,17			25.085,17	25.085,17	52.892	90.119	25.826,95		29.247,33			
Sasaran Strategis 1:			Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																				
PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.3	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang						52%								54%						
	Sasaran Program		Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali																				
	Indikator Kinerja Program		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang						84,0%							84,7%	84,7%						
	PPTR	Kegiatan 1:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang												17.927,19			18.732,34			39.960,00		
			Sasaran Kegiatan	1. Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penilaian pelaksanaan KKPR											5.000,00	5.000,00	19,3%	16,7%	5.600,00			9.850,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK yang Dinilai																				
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK	2.000	1.700,00	3.300,00			5.000,00	5.000,00	2.350	3.000	5.600,00		9.850,00		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028								
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN												
PENTAG	Kegiatan 2:	Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail																							
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							118.951	118.951	32.260,78			32.260,78		128.517	128.517	34.680,17			34.680,17			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah																						
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT	21.595	21.595	664,89			664,89		23.928	23.928	736,70			736,70		
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	97.356	97.356	31.595,89			31.595,89		104.589	104.589	33.943,47			33.943,47				
Sasaran Strategis 1:			Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																						
PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.3	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang							56%							58%								
	Sasaran Program		Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali																						
	Indikator Kinerja Program		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang							85,3%	85,3%						86,0%	86,0%							
	PPTR	Kegiatan 1:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang									18.540,00			39.390,00				19.600,00			42.350,00			
			Sasaran Kegiatan	1. Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penilaian pelaksanaan KKPR						20,6%	18,3%	5.800,00			10.350,00		21,4%	20,6%	6.000,00			11.900,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK yang Dinilai																						
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK	2.500	3.300	5.800,00			10.350,00		2.600	3.700	6.000,00			11.900,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
PENTAG	Kegiatan 2:	Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							138.102	138.102	37.101,33			37.101,33			25.690,77	29.839,93	32.260,78	34.680,17	37.101,33	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah																				
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT	26.275	26.275	808,97		808,97			605,60	592,60	664,89	736,70	808,97	
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	111.827	111.827	36.292,36		36.292,36			25.085,17	29.247,33	31.595,89	33.943,47	36.292,36			
Sasaran Strategis 1:			Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan																				
PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.3	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang						60%														
	Sasaran Program		Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali																				
	Indikator Kinerja Program		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang						86,7%	80,0%												Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	
	PPTR	Kegiatan 1:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang								21.700,00			60.875,00			5.000,00	18.732,34	18.540,00	19.600,00	21.700,00		
			Sasaran Kegiatan	1. Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase penilaian pelaksanaan KKPR						22,2%	33,3%	6.200,00			18.525,00			5.000,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
		Indikator Rincian Output	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK yang Dinilai																				
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK	2.700	6.000	6.200,00		18.525,00			5.000,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	18.525,00		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Sasaran Kegiatan	2. Terlaksananya penilaian perwujudan RTR														
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase penilaian perwujudan RTR													11,4%	6.000,00
			Indikator Rincian Output	Jumlah RTR yang Dinilai Perwujudannya														
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	Produk						5	6.000,00
			Sasaran Kegiatan	3. Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif														
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif													6,7%	8.227,19
			Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Dihasilkan														
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif	Rekomendasi						1	1.300,00
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan							
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rekomendasi Kebijakan						1	1.727,19
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	Rekomendasi Kebijakan							
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	NSPK						1	800,00
										002 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Sasaran Kegiatan	2. Terlaksananya penilaian perwujudan RTR																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase penilaian perwujudan RTR							11,4%					6.000,00	6.000,00	19,0%	18,2%	5.000,00			12.000,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah RTR yang Dinilai Perwujudannya																						
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	5	6.000,00				6.000,00	6.000,00	4	8	5.000,00			12.000,00			
		Sasaran Kegiatan	3. Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif							6,7%					8.227,19	6.927,19	30,8%	26,7%	8.132,34			18.110,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Dihilangkan																						
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif	1	1.300,00				1.300,00		4	4	3.210,00			3.210,00			
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi								1	1	1.322,34			2.500,00			
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	1.303,49	423,70			1.727,19	1.727,19									
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang								1	1	600,00			3.000,00			
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001- Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	800,00				800,00	800,00									
									002 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang								1	4	600,00			3.500,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			Sasaran Kegiatan	2. Terlaksananya penilaian perwujudan RTR																		
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase penilaian perwujudan RTR						19,0%	34,1%	5.750,00			22.500,00		6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.750,00	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
			Indikator Rincian Output	Jumlah RTR yang Dinilai Perwujudannya																		
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	4	15	5.750,00		22.500,00		6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	22.500,00	
			Sasaran Kegiatan	3. Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif																		
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif						30,8%	33,3%	9.750,00			19.850,00		8.227,19	8.132,34	7.540,00	8.100,00	9.750,00	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
			Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Dihasilkan																		
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif	4	5	3.800,00		4.750,00		1.300,00	3.210,00	1.640,00	1.800,00	3.800,00	
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1.700,00		2.650,00			1.322,34	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang							1.727,19					
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	1	1	850,00		2.950,00			600,00	700,00	800,00	850,00	
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001- Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang							800,00					
										002 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	1	3	700,00		3.250,00			600,00	1.200,00	1.300,00	700,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025						
												Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN	
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang		FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Provinsi						38	4.400,00	
								FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	Provinsi								
		Kegiatan 2:	Penertiban Pemanfaatan Ruang															19.042,71
			Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang														
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang													13,68%	19.042,71
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan									
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		Dokumen						1	500,00
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang	Laporan							
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang	NSPK						1	672,71
									002 - Rancangan NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang		FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	38	1.100,00	3.300,00			4.400,00	4.400,00									
						FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang								38	38	2.400,00			5.900,00			
	Kegiatan 2:	Penertiban Pemanfaatan Ruang											19.042,71	19.042,71			23.772,34	2.500,00		60.926,00			
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang					13,68%					19.042,71	19.042,71	17,43%	22,75%	23.772,34	2.500,00		60.926,00			
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan																
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1	500,00			500,00	500,00									
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang							1	1	500,00	2.500,00		575,00			
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	42,65	630,06		672,71	672,71									
							002 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang								1	2	680,00			1.548,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
			5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang		FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang								4.400,00						
							FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	38	38	2.700,00		6.250,00				2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00		
		Kegiatan 2:	Penertiban Pemanfaatan Ruang								29.750,00	6.000,00		94.386,00			19.042,71	26.272,34	29.650,00	33.450,00	35.750,00	
			Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang																		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang					19,95%	21,24%	29.750,00	6.000,00		94.386,00			19.042,71	26.272,34	29.650,00	33.450,00	35.750,00	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan														
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan								500,00						
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang	1	1	650,00	6.000,00		875,00		3.000,00	3.800,00	5.100,00	6.650,00		
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang							672,71						
								002 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang	1	1	800,00			1.177,00			680,00	720,00	750,00	800,00		

Program / Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	001 - Fasilitasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		Dihapuskan	Dihapuskan								
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang		BCE - Penanganan Perkara	002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang	Perkara					5	500,00	
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		BCE - Penanganan Perkara	003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Perkara					2	700,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Saksi Administratif yang Dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang														
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang				Kasus					28	4.100,00	
								QCE - Penanganan Perkara	005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)														
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)				Kasus					16	3.200,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Audit Tata Ruang														
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	003 - Audit Tata Ruang				Kasus					13	1.700,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang														
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		QCE - Penanganan Perkara	004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus					2	1.500,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	001 - Fasilitasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		Dihapuskan	Dihapuskan														
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang		BCE - Penanganan Perkara	002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang	5	500,00				500,00	500,00	5	5	500,00			575,00	
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		BCE - Penanganan Perkara	003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	2	700,00				700,00	700,00	1	1	350,00			403,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Saksi Administratif yang Dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang																			
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang				28	3.100,00	1.000,00			4.100,00	4.100,00							
							QCE - Penanganan Perkara	005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang							28	30	4.100,00			5.820,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)																			
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)				16	1.400,00	1.800,00			3.200,00	3.200,00	8	10	2.200,00			2.300,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Audit Tata Ruang																			
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	003 - Audit Tata Ruang				13		1.700,00			1.700,00	1.700,00	24	50	3.250,00			7.550,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang																			
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		QCE - Penanganan Perkara	004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	2		1.500,00			1.500,00	1.500,00	4	8	3.000,00			6.904,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	001 - Fasilitasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		Dihapuskan	Dihapuskan																
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang		BCE - Penanganan Perkara	002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang	5	5	550,00			665,00			5	5	600,00			765,00		
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		BCE - Penanganan Perkara	003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	2	5	700,00			2.315,00			2	3	750,00			1.599,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Saksi Administratif yang Dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang																					
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang																		
							QCE - Penanganan Perkara	005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	28	30	8.500,00			11.400,00			28	37	9.250,00			14.800,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)																					
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)				11	15	3.500,00			3.975,00			11	20	3.750,00			6.100,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Audit Tata Ruang																					
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	003 - Audit Tata Ruang				0	0							0	0						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang																					
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	QCE - Penanganan Perkara	004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		QCE - Penanganan Perkara	004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	3	5	2.500,00			4.960,00			5	7	4.000,00			7.987,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	001 - Fasilitasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		Dihapuskan	Dihapuskan															
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang		BCE - Penanganan Perkara	002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang	5	5	650,00			875,00			500,00	500,00	550,00	600,00	650,00		
			5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BCE - Penanganan Perkara	003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		BCE - Penanganan Perkara	003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	2	4	800,00			2.452,00			700,00	350,00	700,00	750,00	800,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Saksi Administratif yang Dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang																				
																	4.100,00						
																		4.100,00	8.500,00	9.250,00	14.800,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)																				
									11	30	4.000,00			10.500,00			3.200,00	2.200,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Audit Tata Ruang																				
									0	0							1.700,00	3.250,00					
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang																				
									5	5	4.200,00			6.560,00			1.500,00	3.000,00	2.500,00	4.000,00	4.200,00		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Orang yang Diberikan Dilat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang														
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang		UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang	Orang					32	1.600,00	
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat	Laporan					2	1.210,00	
										001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Pusat								
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah		FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah	Orang					50	510,00	
										001 - Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang								
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan							
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang		FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Provinsi					38	2.850,00	
										001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Rincian Output	Jumlah Orang yang Diberikan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang																						
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang		UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang	32	1.600,00				1.600,00	1.600,00	50	50	3.000,00			3.000,00			
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat	2		1.210,00			1.210,00	1.210,00									
									001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Pusat								1	1	600,00			805,00			
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah		FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah	50		510,00			510,00	510,00									
									001 - Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang								50	100	600,00			1.200,00			
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi								1	1	1.000,00			1.500,00			
				5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang		FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang	38	1.700,00	1.150,00			2.850,00	2.850,00									
									001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang								38	38	3.992,34			28.746,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			Indikator Rincian Output	Jumlah Orang yang Diberikan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang																						
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang		UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang	50	50	3.000,00		3.000,00		25	50	1.750,00		3.000,00					
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat																
										001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Pusat	1	1	650,00		926,00		1	1	700,00		1.065,00					
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah		FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah																
										001 - Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang	50	100	620,00		1.400,00		100	100	1.500,00		1.600,00					
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1.050,00		1.550,00		1	1	1.100,00		1.600,00						
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang		FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang																
										001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang	38	38	4.060,00		33.086,00		38	38	4.200,00		38.072,00					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
			Indikator Rincian Output	Jumlah Orang yang Diberikan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang																				
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang		UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang	25	50	1.800,00			3.400,00			1.600,00	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.800,00	
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat									1.210,00					
										001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Pusat	1	1	750,00			1.225,00				600,00	650,00	700,00	750,00	
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah		FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah									510,00					
										001 - Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang	50	100	650,00			1.800,00				600,00	620,00	1.500,00	650,00	
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1.150,00			1.700,00				1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	
					5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang		FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang									2.850,00					
										001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang	38	38	4.500,00			43.822,00				3.992,34	4.060,00	4.200,00	4.500,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN
Sasaran Strategis 1:		Terwujudnya ruang yang															
PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.4	Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang												0%		
	Sasaran Program		Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali														
	Indikator Kinerja Program		Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang						Persentase						100%		
PPTR	Kegiatan 1:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang															
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang						Persentase								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang												2,9%	1.100,00	
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	001 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemerintah Daerah							
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	002 - Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK)	Pemerintah Daerah							
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Pemerintah Daerah							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan														
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Pengawasan Kinerja Kawasan		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan	Kawasan					10	1.100,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																						
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																			
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026										
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
Sasaran Strategis 1:			Terwujudnya ruang yang																							
PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		1.4	Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang								0%						50%								
	Sasaran Program			Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali																						
	Indikator Kinerja Program		Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang								100%						100%	100%								
	PPTR	Kegiatan 1:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang																3.390,00			5.400,00				
			Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang								2,9%					1.100,00	1.100,00	17,0%	22,3%	3.390,00			5.400,00		
						5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	001 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang						0	38				1.200,00				
						5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	002 - Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK)						38	38	1.140,00			1.500,00				
						5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang						38	38	1.000,00			1.250,00				
			Indikator Rincian Output	Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan																						
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Pengawasan Kinerja Kawasan		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan	10	1.100,00			1.100,00	1.100,00	14	12	1.250,00			1.450,00				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028								
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN												
Sasaran Strategis 1:		Terwujudnya ruang yang																							
PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		1.4	Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang								50%							58%						
	Sasaran Program				Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali																				
	Indikator Kinerja Program		Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang							100%	100%							100%	100%						
	PPTR	Kegiatan 1:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang									5.200,00			6.100,00				6.200,00			6.700,00			
			Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang						23,6%	23,2%	5.200,00			6.100,00			24,6%	24,0%	6.200,00			6.700,00		
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	001 - Rekomendasi Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang	38	38	1.300,00			1.300,00			38	38	1.400,00			1.400,00	
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	002 - Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK)	38	38	1.200,00			1.700,00			38	38	1.500,00			1.800,00	
					5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	38	38	1.100,00			1.300,00			38	38	1.300,00			1.350,00	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan																					
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Pengawasan Kinerja Kawasan		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Kinerja Fungsi Kawasan	15	15	1.600,00			1.800,00			18	18	2.000,00			2.150,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
Sasaran Strategis 1:		Terwujudnya ruang yang																						
PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.4	Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang							58%														
	Sasaran Program		Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali																					
	Indikator Kinerja Program		Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang							100%	100%									Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang				
PPTR	Kegiatan 1:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang								6.650,00			8.300,00				5.400,00	6.100,00	6.700,00	8.300,00				
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang							25,2%	27,6%	6.650,00			8.300,00		1.100,00	5.400,00	6.100,00	6.700,00	8.300,00	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang		
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	001 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang	38	38	1.400,00			1.400,00			1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00			
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	002 - Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK)	38	38	1.750,00			1.900,00			1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00			
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang				BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	38	38	1.400,00			1.400,00			1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan																					
				5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Pengawasan Kinerja Kawasan		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan	20	30	2.100,00			3.600,00		1.100,00	1.450,00	1.800,00	2.150,00	3.600,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)						
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
Program: Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan																		
Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi																1,5		
Sasaran Strategis 2:			Peningkatan kualitas														1,5	
PTPP	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	2.1	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan						Indeks	1,47							1,5	67.093,23
	Sasaran Program 1		Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan															67.093,23
	Indikator Kinerja Program		Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah						Indeks	3%							2%	67.093,23
PTPP	Kegiatan 1:	Pengadaan dan Pencadangan Tanah																11.507,95
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah						Indeks	65,55 %							50 %	11.507,95
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum							65,55 %							50 %	11.330,88
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK)			NSPK								1	624,87
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			Dokumen								33	1.437,99
		Indikator Rincian																
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah			Data								33	1.163,07
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			Dokumen								512	3.101,82
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah			Data								512	5.003,14
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah							0							1	177,07
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Pencadangan Tanah			Lokasi								1	177,07

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
Program:	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan																						
	Indikator Kinerja Tujuan	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi								1,5								1,6					
Sasaran Strategis 2:		Peningkatan kualitas																					
	PTPP	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	2.1	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan						1,5					67.093,23			1,6				22.191,48	
		Sasaran Program 1		Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan											67.093,23						22.191,48		
		Indikator Kinerja Program		Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah						2%					67.093,23			4%				22.191,48	
	PTPP	Kegiatan 1:	Pengadaan dan Pencadangan Tanah												11.507,95							6.293,51	
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah						50 %					11.507,95							6.293,51	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum						50 %					11.330,88			55 %				5.946,20	
					4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK)			1	624,87				624,87	624,87		1				35,81	
					4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			33	1.437,99				1.437,99	1.437,99		33				970,24	
			Indikator Rincian																				
					4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah			33	1.116,62	46,45			1.163,07	1.163,07		1				406,16	
					6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			512		3.101,82			3.101,82	3.101,82		95				2.177,37	
					6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah			512	95,84	4.907,30			5.003,14	5.003,14		95				2.356,62	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah						1	177,07				177,07			1				347,31	
					4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001 - Pencadangan Tanah			1	177,07				177,07	177,07		1				347,31	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028							
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN											
Program: Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan																								
Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi											1,7							1,8						
Sasaran Strategis 2:																								
PTPP		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	2.1	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan							1,7				77.506,12			1,8				90.602,47		
	Sasaran Program 1			Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan										77.506,12							90.602,47			
	Indikator Kinerja Program			Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah							6%				77.506,12			8%				90.602,47		
PTPP	Kegiatan 1:	Pengadaan dan Pencadangan Tanah													13.659,34							15.044,86		
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah												13.659,34							15.044,86		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum								57 %				13.445,06			58 %				14.809,15		
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK)					1				756,80			1				832,48		
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					33				1.660,90			33				1.826,99		
		Indikator Rincian																						
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah					1				1.219,66			1				1.361,32		
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					512				3.753,20			512				4.128,52		
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah					512				6.054,50			512				6.659,84		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah								1				214,28			1				235,71		
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Pencadangan Tanah					1				214,28			1				235,71		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Tahun 2029						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
	Program: Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan																						
	Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi									1,9													
Sasaran Strategis 2:																							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Peningkatan kualitas	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan							1,9					102.566,96			67.093,23	22.191,48	77.506,12	90.602,47	102.566,96	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
	Sasaran Program 1			Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan										102.566,96			67.093,23	22.191,48	77.506,12	90.602,47	102.566,96		
	Indikator Kinerja Program			Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah						11%				102.566,96			67.093,23	22.191,48	77.506,12	90.602,47	102.566,96	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	
	PTPP	Kegiatan 1:	Pengadaan dan Pencadangan Tanah											16.567,24			11.507,95	6.293,51	13.659,34	15.044,86	16.567,24		
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah											16.567,24			11.507,95	6.293,51	13.659,34	15.044,86	16.567,24		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum							60 %				16.307,94			11.330,88	5.946,20	13.445,06	14.809,15	16.307,94	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK)				1				915,73			624,87	35,81	756,80	832,48	915,73		
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				33				2.009,69			1.437,99	970,24	1.660,90	1.826,99	2.009,69		
		Indikator Rincian																					
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah				1				1.515,32			1.163,07	406,16	1.219,66	1.361,32	1.515,32		
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				512				4.541,37			3.101,82	2.177,37	3.753,20	4.128,52	4.541,37		
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah				512				7.325,83			5.003,14	2.356,62	6.054,50	6.659,84	7.325,83		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah							1				259,30			177,07	347,31	214,28	235,71	259,30	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	
				4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Pencadangan Tanah				1				259,30			177,07	347,31	214,28	235,71	259,30		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Kegiatan 2:	Konsolidasi Tanah dan Pengembangan							Lokasi							9.672,14
			Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik													9.672,14
			Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah							4.952					1.243	4.317,96
					5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)	NSPK					1	716,55
					5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan					10	2.489,76
					6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya	Bidang					250	138,13
					6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan					22	432,22
					6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I				Bidang	1978				350	213,70

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
	Kegiatan 2:	Konsolidasi Tanah dan Pengembangan																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah																				
				5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)	1	16,55	700,00		716,55	716,55	0							
				5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10	1.179,86	1.309,90		2.489,76	2.489,76	7				1.555,11			
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya	250		138,13		138,13	138,13	45				24,86			
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	22	432,22			432,22	432,22	15				293,50			
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I				350	122,11	91,58		213,70	213,70								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
		Kegiatan 2:	Konsolidasi Tanah dan Pengembangan										23.739,76			9.672,14	5.297,11	21.432,45	22.565,14	23.739,76	
			Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik									23.739,76			9.672,14	5.297,11	21.432,45	22.565,14	23.739,76	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah					5.780				12.422,92			4.317,96	2.510,57	11.123,04	11.643,55	12.422,92	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
					5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK)		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK)			1.500,00			716,55		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
					5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			5.000,00			2.489,76	1.555,11	4.250,00	4.500,00	5.000,00	
					6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya			202,23			138,13	24,86	167,13	183,84	202,23	
					6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			3.170,69			432,22	293,50	2.875,91	3.019,71	3.170,69	
					6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I									213,70					

Program / Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II				Bidang	2974					610	327,61	
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III										520	261,61	
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV										370	170,21	
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V										1337	579,56	
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali									
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali									
		Indikator Kinerja Kegiatan	Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan							245					270	2.742,97	
				5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	Rekomendasi					1	736,00	
				5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Data					1	566,27	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	Kajian					0		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II				610	257,79	69,82			327,61	327,61							
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III				520	95,59	166,02			261,61	261,61							
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV				370		170,21			170,21	170,21							
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V				1337	531,01	48,55			579,56	579,56							
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali								375				162,56		
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali								888				474,54		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan						270	333,95	2.409,02			2.742,97		297				1.357,71		
			5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	1	4,21	731,79			736,00	736,00	0						
			5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	1	33,43	532,84			566,27	566,27	1				337,39		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	0							0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II																			
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III																			
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV																			
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V																			
								QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali		2.000			900,00			2.000			900,00					
								QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali		2.600			1.430,00			2.800			1.540,00					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan							342			5.749,41			393			6.051,59					
					5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	2			2.000,00			2			2.200,00					
					5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	1			650,00			1			700,00					
					6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	1			684,94			1			684,94					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO												TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II										327,61					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III										261,61					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV										170,21					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V										579,56					
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali		2.000			900,00				162,56	900,00	900,00	900,00	
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali		3.000			1.650,00				474,54	1.430,00	1.540,00	1.650,00	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan							472			6.131,84			2.742,97	1.357,71	5.749,41	6.051,59	6.131,84	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
				5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan		2			2.200,00			736,00		2.000,00	2.200,00	2.200,00	
				5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		1			700,00			566,27	337,39	650,00	700,00	700,00	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan		1			684,94					684,94	684,94	684,94	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)	Data					19	1.144,39	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Data					7	296,31	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah							76%					76%	2.611,22	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I	-	-		SP	10				3	388,65	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II	-	-		SP	27				4	473,95	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III	-	-							6	694,91	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV	-	-							2	227,79	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V	-	-							7	825,92	
				-	-	-	6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali								
				-	-	-	6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)	19		1.144,39			1.144,39	1.144,39		15				876,07		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	7	296,31				296,31	296,31		4				144,25		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah						76%	235,98	2.375,24			2.611,22	2.611,22		76%				1.428,84		
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I	-	-	3		388,65			388,65	388,65								
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II	-	-	4		473,95			473,95	473,95								
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III	-	-	6		694,91			694,91	694,91								
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV	-	-	2		227,79			227,79	227,79								
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V	-	-	7	235,98	589,95			825,92	825,92								
				-	-	-	6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali								3				353,97		
				-	-	-	6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali								9				1.074,87		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)		33				2.093,18				33				2.197,83		
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		7				321,29				6				268,82		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah								78%				4.560,00				78%				4.870,00		
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I		-	-																
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II		-	-																
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III		-	-																
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV		-	-																
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V		-	-																
				-	-	-	6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali		8				1.050,00				8				1.100,00		
				-	-	-	6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali		26				3.510,00				26				3.770,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)		33					2.307,72			1.144,39	876,07	2.093,18	2.197,83	2.307,72	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		5					239,18			296,31	144,25	321,29	268,82	239,18	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah								80%					5.185,00			2.611,22	1.428,84	4.560,00	4.870,00	5.185,00	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I		-	-										388,65					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II		-	-										473,95					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III		-	-										694,91					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV		-	-										227,79					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V		-	-										825,92					
				-	-	-	6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali		8					1.155,00				353,97	1.050,00	1.100,00	1.155,00	
				-	-	-	6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali		26					4.030,00				1.074,87	3.510,00	3.770,00	4.030,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025				
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)		
	Kegiatan 3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan														45.913,13
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan													45.913,13
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah							59,16%					67,98%	44.904,28
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur /Ketentuan (NSPK)				Dokumen	2				2	301,10
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah			001 - Pembaruan Peta Nilai Tanah	Bidang	4.627				3.736	617,24
		Indikator Rincian														
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah			001 - Pembuatan Peta Nilai Tanah	Hektar	3.571.800			25827,00	2.746.968	25.827,00
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen	32				34	2.086,76
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah				Bidang					86.400	11.683,91
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Satuan Kerja					512	2.817,19
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah				Hektar					209.300	1.571,08
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan							96,28%					96,28%	201,62
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Pembinaan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah				Satuan Kerja	32				34	201,62
										Persentase	0					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah penilai yang berkompeten							100 SK					100	150,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																										
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL															
	Kegiatan 3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan											45.913,13								10.600,87									
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan										45.913,13								10.600,87									
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah										44.904,28			75,97%					9.761,72									
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK)						2	301,10								150,86									
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah						3.736			617,24					94.704			442,01							
		Indikator Rincian																												
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah						2.746.968				25.827				25.827,00	25.827,00		5.228.000					54.003,96		
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						34	1.289,70		196,94		600			2.086,76	1.486,64		2					585,54	3.139,21	
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah						86.400			11.683,91				11.683,91	11.683,91		40.100						8.583,31		
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						512			2.817,19				2.817,19	2.817,19		0								
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah						209.300	1.571,08						1.571,08	1.571,08		0								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan																201,62			96,28%						94,49		
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Pembinaan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah						34	201,62						201,62	201,62		5						94,49		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah penilai yang berkompeten																150,00			100						246,78		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Kegiatan 3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
		Kegiatan 3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan														45.913,13	10.600,87	42.414,32	52.992,46	62.259,96		
			Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan													45.913,13	10.600,87	42.414,32	52.992,46	62.259,96		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah																			
					5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)						3				418,09		301,10	150,86	409,86	413,95	418,09
					5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah	001 - Pembaruan Peta Nilai Tanah					635.780				6.880,84		617,24	442,01	4.509,18	4.695,36	6.880,84
			Indikator Rincian																				
					5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah	001 - Pembuatan Peta Nilai Tanah					5.549.664					46.734,16	25.827,00	54.003,96	91.146,37	60.909,70	46.734,16
					5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						34				811,89	3.139,21	2.086,76	3.724,75	3.944,14	3.947,62	3.951,10
					6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah						86.800				11.738,41		11.683,91	8.583,31	11.711,10	11.724,75	11.738,41
					6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						516				2.817,85		2.817,19		2.817,52	2.817,68	2.817,85
					6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah						4.037.062				30.302,19		1.571,08		17.164,33	24.520,47	30.302,19
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan									96,28%				754,65		201,62	94,49	753,32	753,99	754,65
					5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001 - Pembinaan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah						34				754,65		201,62	94,49	753,32	753,99	754,65
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah penilai yang berkompeten									140				1.991,19		150,00	246,78	1.957,85	1.974,52	1.991,19
																							Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)											
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025						
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Lisensi Penilai Pertanahan		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Lisensi Penilai	Layanan	100					100	150,00	
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan				BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002- Pembinaan dan Pengembangan Penilai	Satuan Kerja	0							
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan				AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002-Penilaian Dampak Sosial	Dokumen								
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna							6						6	657,24
					5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Informasi Ekonomi Pertanahan	Lokasi	1						1	413,52
					6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi			Dokumen	5						5	243,72
TUJUAN 2: Meningkatkan kepastian hak atas tanah																		
Indikator Kinerja Tujuan				Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah														
Sasaran Strategis 3:			Kepastian Hak Atas Tanah															
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah							5 (96,13%)						6,00	452.041,67
		PHPT PSKP	3.1															
		Sasaran Program 1		Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum														
		Indikator Kinerja Program		1. Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya						Nilai	0,0018						0,0011	14.634,61
		PHPT	Kegiatan 1:	Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT														
			Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital						Persentase								
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase bidang tanah yang bersertipikat							75,88						76,67	3.803,41
					5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	NSPK	5					2	912,70

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		

Program/ Kegiatan				Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
								SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
								KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
																APBN (RM/PNEBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNEBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNEBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNEBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Lisensi Penilai Pertanahan		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	Lisensi Penilai		120				180,09				130				195,15						
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan				BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002- Pembinaan dan Pengembangan Penilai		33								33										
				5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan				AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002-Penilaian Dampak Sosial		1				1.777,76 365,33				1				1.779,37 385,15						
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna							9				2.286,24				12				5.283,34						
					5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Informasi Ekonomi Pertanahan		2				1.803,53				3				4.644,09						
					6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	ERA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				7				482,71				9				639,25						
TUJUAN 2: Meningkatkan kepastian hak atas tanah																													
Indikator Kinerja Tujuan				Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah																									
Sasaran Strategis 3:				Kepastian Hak Atas Tanah																									
PHPT PSKP	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)			Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah	3.1					7					781.289,16					7					804.927,12				
	Sasaran Program 1			Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum							0,007					8.714,21					0,005					8.875,14			
	Indikator Kinerja Program			1. Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya																									
PHPT	Kegiatan 1:	Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT																											
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital																										
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase bidang tanah yang bersertipikat									84,61					4.275,70					88,58					4.403,97		
				5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		3					1.046,94					3					1.078,35			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN
				5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah	Dokumen	15					15	44,55
				5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	3					2	2.846,16
		Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja													100	9.097,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah Lisensi/Keputusan PPAT														
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi PPAT	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi PPAT	Orang	7847					9660	9.097,00
		Sasaran Program 1		Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan													
		Indikator Kinerja Program		Persentase penyelesaian kasus pertanahan							58,03%					50%	95.670,68
PSKP	Kegiatan 1:	Penanganan sengketa pertanahan															
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal							Persentase							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan								64,50%					50%	3.993,53
					5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa	Laporan						19	1.149,80
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat							Persentase							
					5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat	Perkara						70	2.843,74

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
			5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah	15	44,55				44,55	44,55		15				49,65		
			5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	2.846,16				2.846,16	2.846,16		3				1.602,49		
		Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja						100					9.097,00			100				2.350,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Lisensi/ Keputusan PPAT																				
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi PPAT	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi PPAT	9660		9.097,00		9.097,00	9.097,00		6575				2.350,00		
		Sasaran Program 1		Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan																			
		Indikator Kinerja Program		Persentase penyelesaian kasus pertanahan					50%	33.546,70	62.123,98			95.670,68	95.670,68		52,50%				90.887,15		
PSKP	Kegiatan 1:	Penanganan sengketa pertanahan																					
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan						50%	1.211,81	2.781,72			3.993,53	3.993,53		52,50%				3.993,53		
				5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa	19	62,43	1.087,37		1.149,80	1.149,80		19				1.149,80		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat																				
				5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat	70	1.149,38	1.694,36		2.843,74	2.843,74		70				2.843,74		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN												
				5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah		15				51,14				15				52,67		
				5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evahuasi	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evahuasi		2				3.177,62				2				3.272,95		
		Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja								100				2.550,00				100				2.550,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Lisensi/Keputusan PPAT																						
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi PPAT	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi PPAT		6575				2.550,00				3925				2.550,00		
		Sasaran Program 1	Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan																						
		Indikator Kinerja Program	Persentase penyelesaian kasus pertanahan								55,00%				175.486,32				57,50%				189.474,75		
PSKP	Kegiatan 1:	Penanganan sengketa pertanahan																							
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan								55%				3.836,92				57,50%				4.029,22		
				5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa		19				851,00				19				894,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat																						
				5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat		70				2.985,92				70				3.135,22		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
				5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah		15				54,25			44,55	49,65	51,14	52,67	54,25	
				5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2				3.371,14			2.846,16	1.602,49	3.177,62	3.272,95	3.371,14	
			Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja														9.097,00	2.350,00	2.550,00	2.550,00		Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
			Indikator Rincian Output	Jumlah Lisensi/Keputusan PPAT																			
					4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi PPAT	7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi PPAT	3925				2.550,00			9.097,00	2.350,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
		Sasaran Program 1		Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan																			
		Indikator Kinerja Program		Persentase penyelesaian kasus pertanahan							60,00%				204.390,22			95.670,68	90.887,15	175.486,32	189.474,75	204.390,22	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian
PSKP	Kegiatan 1:	Penanganan sengketa pertanahan																					
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan								60%				4.228,16			3.993,53	3.993,53	3.836,92	4.029,22	4.228,16	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian
				5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa		19				939,00			1.149,80	1.149,80	851,00	894,00	939,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat																				
				5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat		70				3.289,16			2.843,74	2.843,74	2.985,92	3.135,22	3.289,16	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	Kegiatan 2:	Pencegahan dan Penanganan konflik															
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan							47,20%					50,00%	2.609,15	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat														
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat	Perkara					12	1.577,01	
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik	Laporan					15	1.032,13	
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan							53,80%					50,00%	2.421,21	
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	AEC - Kerja sama	002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan		AEC - Kerja sama	002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan	Kesepakatan					1	2.421,21	
		Sasaran Kegiatan	2. Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan							Persentase							
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan.												100%	2.320,16	
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	AEA - Koordinasi	002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		AEA - Koordinasi	002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Kegiatan					1	2.161,22	
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Rekomendasi Kebijakan					6	158,94	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 2:	Pencegahan dan Penanganan konflik																						
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan						50,00%	1.248,08	1.361,07				2.609,15	2.609,15		52,50%				2.609,15		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat																					
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat	12	1.026,05	550,97			1.577,01	1.577,01		12				1.577,01		
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik	15	222,03	810,10			1.032,13	1.032,13		15				1.032,13		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan						50,00%	1.263,10	1.158,11				2.421,21	2.421,21		52,50%				2.421,21		
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	AEC - Kerja sama	002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan		AEC - Kerja sama	002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan	1	1.263,10	1.158,11			2.421,21	2.421,21		1				2.421,21		
		Sasaran Kegiatan	2. Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan.						100%	568,71	1.751,46				2.320,16	2.320,16		100%				1.292,09		
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	AEA - Koordinasi	002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		AEA - Koordinasi	002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1	500,00	1.661,22			2.161,22	2.161,22		1				1.133,15		
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	6	68,71	90,23			158,94	158,94		6				158,94		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 2:	Pencegahan dan Penanganan konflik																							
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan							55,00%				2.957,85				57,50%				3.251,44			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat																						
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat			QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat		12			1.655,87			12				1.738,66			
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik			FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik		15			1.164,00			15				1.223,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan								55,00%				2.619,00			57,50%				2.750,00			
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	AEC - Kerja sama	002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan			AEC - Kerja sama	002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan		1			2.619,00			1				2.750,00			
		Sasaran Kegiatan	2. Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan.									100%				2.893,00			100%				3.038,00		
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	AEA - Koordinasi	002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan			AEA - Koordinasi	002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		1			1.246,47			1				1.371,11			
				4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		6			174,84			6				192,32			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
		Kegiatan 2:	Pencegahan dan Penanganan konflik																				
			Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan							60%				3.566,99			2.609,15	2.609,15	2.957,85	3.251,44	3.566,99	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian
			Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat																			
					4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat	12				1.824,03			1.577,01	1.577,01	1.655,87	1.738,66	1.824,03	
					4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik	15				1.285,00			1.032,13	1.032,13	1.164,00	1.223,00	1.285,00	
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan							60%				2.888,00			2.421,21	2.421,21	2.619,00	2.750,00	2.888,00	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian
					4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	AEC - Kerja sama	002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan		AEC - Kerja sama	002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan	1				2.888,00			2.421,21	2.421,21	2.619,00	2.750,00	2.888,00	
			Sasaran Kegiatan	2. Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan.							100%				3.191,00			2.320,16	1.292,09	2.893,00	3.038,00	3.191,00	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian
					4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	AEA - Koordinasi	002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		AEA - Koordinasi	002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1				1.508,23			2.161,22	1.133,15	1.246,47	1.371,11	1.508,23	
					4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	6				211,55			158,94	158,94	174,84	192,32	211,55	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	Kegiatan 3:	Penanganan perkara pertanahan															
		Sasaran Kegiatan	Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan							30%						50%	7.283,83
				5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	BCE - Penanganan Perkara	002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat		BCE - Penanganan Perkara	002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat	Perkara						9	435,98
				5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan	Laporan						12	2.216,75
		Indikator Rincian Output	Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat														
				5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat	Perkara						40	4.631,09
	Sasaran Program 2			Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat													
	Indikator Kinerja Program			3. Persentase Layanan Rutin Pertanahan						8501678/realisasi						20	148.128,78
PHPT	Kegiatan 1:	Penetapan Hak Tanah dan Ruang															
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan							Persentase							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang							100,00						100,00	1.250,04
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Norma/Sistem/ Prosedur/Ketentuan untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang				NSPK	2					2	1.039,34
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penetapan HAT Badan Hukum dan Perorangan				Data	1					1	210,70

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026					
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 3:	Penanganan perkara pertanahan																						
		Sasaran Kegiatan	Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan							50%	4.372,61	2.911,22			7.283,83	7.283,83		52,50%				5.764,55		
				5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	BCE - Penanganan Perkara	002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat		BCE - Penanganan Perkara	002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat	9	427,36	8,62			435,98	435,98		9				435,98		
				5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan	12	1.665,90	550,86			2.216,75	2.216,75		19				998,01		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat																					
				5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat	40	2.279,35	2.351,74			4.631,09	4.631,09		40				5.090,15		
	Sasaran Program 2			Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																				
	Indikator Kinerja Program			3. Persentase Layanan Rutin Pertanahan						2000,00%	162.941,66	0,00	179.236		148.128,78	197.159,41		2000,00%				216.875,35		
PHPT	Kegiatan 1:	Penetapan Hak Tanah dan Ruang																						
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang							100,00					1.250,04			100,00				1.219,65		
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Norma/Sistem/ Prosedur/Ketentuan untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang				2	664,34	375,00			1.039,34	1.039,34		2				1.008,95		
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penetapan HAT Badan Hukum dan Perorangan				1	210,70				210,70	210,70		1				210,70		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028								
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN												
		Kegiatan 3:	Penanganan perkara pertanahan																						
			Sasaran Kegiatan	Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terseleskannya penanganan perkara pertanahan							55%				7.936,87				57,50%				9.441,96		
					5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	BCE - Penanganan Perkara	002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat			BCE - Penanganan Perkara	002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat			9		458,00			9				481,00		
					5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan			FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan			19		1.048,00			19				1.101,00		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat																					
					5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat			QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat			41		5.008,71			42				4.925,64		
		Sasaran Program 2		Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																					
		Indikator Kinerja Program		3. Persentase Layanan Rutin Pertanahan																					
PHPT	Kegiatan 1:	Penetapan Hak Tanah dan Ruang																							
			Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang							100,00				1.974,55			100,00				2.359,15			
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Norma/Sistem/ Prosedur/Ketentuan untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang				2				1.163,06			2				1.466,92			
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penetapan HAT Badan Hukum dan Perorangan				1				811,49			1				892,23			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
		Kegiatan 3:	Penanganan perkara pertanahan																				
			Sasaran Kegiatan	Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan							60%				11.029,45			7.283,83	5.764,55	7.936,87	9.441,96	11.029,45	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian
					5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	BCE - Penanganan Perkara	002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat		BCE - Penanganan Perkara	002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat	9				506,00			435,98	435,98	458,00	481,00	506,00	
					5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan	19				1.157,00			2.216,75	998,01	1.048,00	1.101,00	1.157,00	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat																			
					5576 - Penanganan Perkara Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat		QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat	44				4.931,50			4.631,09	5.090,15	5.008,71	4.925,64	4.931,50	
		Sasaran Program 2		Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																			
		Indikator Kinerja Program		3. Persentase Layanan Rutin Pertanahan														148.128,78	216.875,35				
PHPT		Kegiatan 1:	Penetapan Hak Tanah dan Ruang																				
			Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang							100,00				2.759,38			1.250,04	1.219,65	1.974,55	2.359,15	2.759,38	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Norma/Sistem/ Prosedur/Ketentuan untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang				2				1.607,40			1.039,34	1.008,95	1.163,06	1.466,92	1.607,40	
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penetapan HAT Badan Hukum dan Perorangan				1				1.151,98			210,70	210,70	811,49	892,23	1.151,98	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
														APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum							100,00					100,00	806,73		
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum				Dokumen	150					150	52,70	
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen	32					32	754,03	
	PHPT	Kegiatan 2:	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah															
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat															
		Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Hak Pengelolaan								100,00					100,00	1.022,70	
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)	Lembaga	25					15	129,70	
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)	Lembaga	50					50	209,70	
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah	Lembaga	1					1	469,02	
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah	Unit Kerja	33					33	683,30	
		Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan								100,00					100,00		
		Indikator Rincian																
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	Data Inventarisasi Tanah Ulayat				Hektar							9.459,53	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum								100,00						806,73			100,00						
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum					150	52,70				52,70	52,70	200					59,75			
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					32	754,03				754,03	754,03	32					745,33			
PHPT	Kegiatan 2:	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah																								
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat																							
		Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Hak Pengelolaan								100,00					1.022,70		100,00					411,18			
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)		15	129,70				129,70	129,70	15					43,00			
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)		50	209,70				209,70	209,70	50					143,73			
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah		1	469,02				469,02	469,02	1					43,70			
				5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	002 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah		33	683,30				683,30	683,30	1					224,45			
		Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan								100,00							100,00					7.950,00			
		Indikator Rincian																								
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	Data Inventarisasi Tanah Ulayat					10.000					9.459,53		10.000					5.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																		
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																		
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028												
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN																
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum								100,00					906,19					100,00					962,49		
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum					225					110,00					250					118,30		
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					32					796,19					32					844,19		
	PHPT	Kegiatan 2:	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah																										
			Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat																									
			Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Hak Pengelolaan								100,00					1.022,70				100,00						1.022,70		
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)		15					129,70				15					129,70			
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)		50					209,70				50					209,70			
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah		1					469,02				1					469,02			
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah		33					683,30				33					683,30			
			Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan								100,00					7.950,00				100,00					7.950,00			
			Indikator Rincian																										
					4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	Data Inventarisasi Tanah Ulayat					10.000					5.000,00				10.000					5.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029			
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum								100,00					1.003,09			806,73	805,06	906,19	962,49	1.003,09	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum					250					123,96			52,70	59,75	110,00	118,30	123,96	
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					32					879,13			754,03	745,33	796,19	844,19	879,13	
	PHPT	Kegiatan 2:	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah																						
			Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadinitrasian Tanah Ulayat																					
			Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Hak Pengelolaan								100,00					1.022,70			1.022,70	411,18	1.022,70	1.022,70	1.022,70	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat)		15					129,70			129,70	43,00	129,70	129,70	129,70	
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat)		50					209,70			209,70	143,73	209,70	209,70	209,70	
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah		1					469,02			469,02	43,70	469,02	469,02	469,02	
					5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	002 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah		102					683,30			683,30	224,45	683,30	683,30	683,30	
			Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan								100,00					7.950,00			7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
			Indikator Rincian																						
					4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	Data Inventarisasi Tanah Ulayat					10.000					5.000,00			9.459,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	Indikator Rincian Output	Tersedianya Administrasi Pertanahan																
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Data Inventarisasi Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan	Bidang								
	Indikator Rincian Output	Tersedianya Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat																
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Pendaftaran Tanah Ulayat	Bidang								
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Pendaftaran Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal		001 Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat									
	Kegiatan 3:	Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan																
	Sasaran Kegiatan	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Inisiasi Kerjasama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif								100,00					100,00	509,94		
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	AEE - Kemitraan	001 - Kajian Potensi Kemitraan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AEC - Kerja Sama	001 - Kajian Potensi Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Kesepakatan	1				1	59,94		
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	AEE - Kemitraan	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AEC - Kerja Sama	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Kesepakatan	6				6	450,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																		
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026			
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)
	Indikator Rincian Output	Tersedianya Administrasi Pertanahan																					
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Data Inventarisasi Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan								50				50,00		
		Indikator Rincian Output	Tersedianya Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat																				
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Pendaftaran Tanah Ulayat								25				7.900,00		
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Pendaftaran Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal		001 Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat														
	Kegiatan 3:	Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan																					
		Sasaran Kegiatan	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Inisiasi Kerjasama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif							100,00					509,94		100,00				509,94		
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	AEE - Kemitraan	001 - Kajian Potensi Kemitraan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AEC - Kerja Sama	001 - Kajian Potensi Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	1		59,94			59,94	59,94	1				59,94		
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	AEE - Kemitraan	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AEC - Kerja Sama	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	6		450,00			450,00	450,00	6				450,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028					
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN												
			Indikator Rincian Output	Tersedianya Administrasi Pertanahan																					
					4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Data-Inventarisasi Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan		50			50,00			50			50,00				
			Indikator Rincian Output	Tersedianya Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat																					
					4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Pendaftaran Tanah Ulayat		40			7.900,00			40			7.900,00				
					4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Pendaftaran Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal		001 Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat															
		Kegiatan 3:	Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan																						
			Sasaran Kegiatan	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Inisiasi Kerjasama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif							100,00			525,30			100,00			541,10					
					4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	AEE - Kemitraan	001 - Kajian Potensi Kemitraan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AEC - Kerja Sama	001 - Kajian Potensi Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		1			61,80			1			63,70				
					4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	AEE - Kemitraan	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AEC - Kerja Sama	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		6			463,50			6			477,40				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				Unit Organisasi Pelaksana
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)												TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Indikator Rincian Output	Tersedianya Administrasi Pertanahan																					
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Data- inventarisasi Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan		50				50,00			50,00	50,00	50,00	50,00			
		Indikator Rincian Output	Tersedianya Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat																					
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Pendaftaran Tanah Ulayat		30				7.900,00			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00			
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	003 - Pendaftaran Tanah Ulayat	7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal		001 Administrasi- Pertanahan dan- Pendaftaran Tanah- Ulayat															
	Kegiatan 3:	Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan																						
		Sasaran Kegiatan	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Inisiasi Kerjasama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif								100,00				557,30		509,94	509,94	525,30	541,10	557,30	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	AEE - Kemitraan	001 - Kajian Potensi Kemitraan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AEC - Kerja Sama	001 - Kajian Potensi Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		1				65,60		59,94	59,94	61,80	63,70	65,60			
				4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	AEE - Kemitraan	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AEC - Kerja Sama	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		6				491,70		450,00	450,00	463,50	477,40	491,70			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO												
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				
													Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
														APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)		
			Sasaran Kegiatan	Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah													
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah													
					-			7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001- NSPK Tata Kelola dan Pengembangan Layanan Pertanahan							
					-			7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Pengembangan Layanan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Persentase						
								7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Laporan Penyelenggaraan Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah							
TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,																	
		Indikator Kinerja Tujuan	Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya												14,98		
Sasaran Strategis 4: PENTAG & PPTI			Keadilan Hak Atas Tanah untuk														
			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	4.1	Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan						0,479441	0,0006	0,00			0,0020	
		Sasaran Program 1		Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan													
		Indikator Kinerja Program		1. Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)						INDEKS		5%	1.719,80		8%	51.806,59	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			Sasaran Kegiatan	Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah														100%							
					-			7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001- NSPK Tata Kelola dan Pengembangan Layanan Pertanahan								2					271,90		
					-			7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Pengembangan Layanan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah								1					1.000,00		
								7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001 - Laperan Penyelenggaraan Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah								1					360,00		
TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,																									
			Indikator Kinerja Tujuan	Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya							14,98							46,98							
Sasaran Strategis 4: PENTAG & PPT			Keadilan Hak Atas Tanah untuk															0,0031	0,0062						
			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	4.1	Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/ nelayan						0,0020														
			Sasaran Program 1		Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan																				
			Indikator Kinerja Program		1. Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)						8%	173,69	51.632,90			51.806,59	48.874,54	24%	26%	69.720,00	2.498,55		86.317,97		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028						
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN													
			Sasaran Kegiatan	Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah							100%							100%								
					-			7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001- NSPK Tata Kelola dan Pengembangan Layanan Pertanahan		2			271,90			2				271,90				
					-			7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Pengembangan Layanan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		1			1.000,00			1				1.000,00				
								7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Laporan Penyelenggaraan Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		1			360,00			1				360,00				
TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indikator Kinerja Tujuan Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya											46,98						51,31									
Sasaran Strategis 4: PENTAG & PPTI			Keadilan Hak Atas Tanah untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)								0,0077	0,0138					0,0111	0,0178								
		Sasaran Program 1		Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan																						
		Indikator Kinerja Program		1. Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)							58%	60%	112.808,87		97.867,32		78%	83%	108.436,99		91.726,91					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
			Sasaran Kegiatan	Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah																				
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah																		Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		
					-			7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001- NSPK Tata Kelola dan Pengembangan Layanan Pertanahan		2			271,90			271,90	271,90	271,90	271,90			
					-			7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Pengembangan Layanan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		1			1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
								7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Laporan Penyelenggaraan Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		1			360,00			360,00	360,00	360,00	360,00			
TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,																								
			Indikator Kinerja Tujuan	Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya								53,89												
Sasaran Strategis 4: PENTAG & PPTI																								
			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Keadilan Hak Atas Tanah untuk Penurunan Indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan								0,0134	0,0227									Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang		
			Sasaran Program 1																					
			Indikator Kinerja Program									100%	100%	125.951,04			108.156,37			51.806,59	86.317,97	97.867,32	91.726,91	108.156,37
			1. Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)																					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
PENTAG	Kegiatan 3:	Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan								Persentase							
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah								4	612,15			4	3.491,85	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update														
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	003 - Pemutakhiran Data LBS		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	003 - Pemutakhiran Data LBS	Rekomendasi Kebijakan	1	393,06			1	393,06	
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Penatagunaan Tanah														
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Penatagunaan Tanah		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Penatagunaan Tanah	NSPK	3	219,09			3	219,09	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah														
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah	Laporan	6	2.879,70			6	2.879,70	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update														
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	043 - Data LBS	Rekomendasi Kebijakan	0				0		
		Kegiatan 4:	Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria														
		Sasaran Kegiatan	Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah								10.232	1.107,65			42.100	48.314,75	
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Landreform														
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Landreform		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Landreform	NSPK	3	815,94			3	848,63	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Indikatif TORA														
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Data Indikatif TORA	Hektar							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										VOLUME	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
PENTAG	Kegiatan 3:	Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah							4		3.491,85			3.491,85	3.491,85	1	1	3.869,82			4.191,92	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update																				
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	003 - Pemutakhiran Data LBS		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	003 - Pemutakhiran Data LBS	1		393,06			393,06	393,06	1	1	658,12			658,12	
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Penatagunaan Tanah																				
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Penatagunaan Tanah		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Penatagunaan Tanah	3		219,09			219,09	219,09	1	2	154,12			476,22	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah																				
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah	6		2.879,70			2.879,70	2.879,70	7	7	3.057,58			3.057,58	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update																				
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	043 - Data LBS	0							0	0					
	Kegiatan 4:	Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria																					
		Sasaran Kegiatan	Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah							42.100	173,69	48.141,05			48.314,75	45.382,69	15.000	385.300	65.850,18	2.498,55		82.126,04	
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Landreform																				
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Landreform		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Landreform	3	173,69	674,94			848,63	848,63	5	5	540,27			540,27	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Indikatif TORA																				
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Data Indikatif TORA								1	1	451,70			451,70	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)												Unit Organisasi Pelaksana
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
PENTAG	Kegiatan 3:	Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan																				
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah					33	33	30.949,73			30.949,73			3.491,85	4.191,92	4.392,00	4.601,78	30.949,73	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update																			
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	003 - Pemutakhiran Data LBS		1	1	761,86			761,86			393,06	658,12	691,03	725,58	761,86		
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Penatagunaan Tanah																			
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Penatagunaan Tanah		3	3	520,38			520,38			219,09	476,22	490,51	505,23	520,38		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah																			
				5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah		6	6	3.539,53			3.539,53			2.879,70	3.057,58	3.210,46	3.370,98	3.539,53		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update																			
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				32	32	26.127,97			26.127,97							26.127,97		
	Kegiatan 4:	Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria																				
		Sasaran Kegiatan	Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah					421.600	287.400	95.001,31			77.206,64			48.314,75	82.126,04	93.475,33	87.125,13	77.206,64	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Landreform																			
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Landreform		3	3	1.564,01			1.564,01			848,63	540,27	1.418,60	1.489,53	1.564,01		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Indikatif TORA																			
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah											451,70					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Redistribusi Tanah	5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Data Potensi Redistribusi Tanah	Hektar		1	811,94			1	811,94	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Landreform														
					5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform	Laporan		1	682,31			1	682,31	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data GTRA/Reforma Agraria														
					5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	005 - Data GTRA/ Reforma Agraria	PEA - Koordinasi	005 - Data GTRA/ Reforma Agraria	Kegiatan		1	4.135,75			1	4.135,75	
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I			Bidang		1.000	285,00			2.500	285,00	
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II			Bidang		2.552	253,86			15.000	1.560,00	
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III					3.145	285,77			12.500	1.187,50	
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV					2.000	162,60			5.000	425,00	
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V					1.535	120,42			7.100	582,20	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Redistribusi Tanah	5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Data Potensi Redistribusi Tanah	1		811,94		811,94	811,94	1	1	799,96	2.498,55		799,96	2.498,55		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Landreform																					
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform	1		682,31		682,31	682,31	1	1	849,29			849,29			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data GTRA/Reforma Agraria																					
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	005 - Data GTRA/ Reforma Agraria		PEA - Koordinasi	005 - Data GTRA/ Reforma Agraria	1		4.135,75		4.135,75	4.135,75	1	1	3.610,48			3.610,48			
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I				2.500		285,00		285,00	285,00									
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II				15.000		1.560,00		1.560,00	253,86									
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III				12.500		1.187,50		1.187,50	285,77									
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV				5.000		425,00		425,00	162,60									
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V				7.100		582,20		582,20	120,42									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Redistribusi Tanah							1	1		926,06			926,06		811,94	3.298,52	839,96	881,96	926,06	
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	002 - Data Potensi Redistribusi Tanah														
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Landreform																				
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform	1	1		983,16			983,16		682,31	849,29	891,75	936,34	983,16	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data GTRA/Reforma Agraria																				
				5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	005 - Data GTRA/ Reforma Agraria		PEA - Koordinasi	005 - Data GTRA/ Reforma Agraria	1	1		4.179,58			4.179,58		4.135,75	3.610,48	3.791,01	3.980,56	4.179,58	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I												285,00					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II												1.560,00					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III												1.187,50					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV												425,00					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V												582,20					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
										Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
												Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data dan Informasi P4T													
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali	Bidang						
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali	Bidang						
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		33	4.907,27		33	4.907,27
			Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA													
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi		PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi	Satuan Kegiatan		33	20.526,31		33	20.526,31
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota		PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota	Satuan Kegiatan		38	12.362,85		38	12.362,85
			Indikator Rincian Output	Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul													
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - SK Penegasan Tanah Timbul	Hektar (Rekomendasi Kebijakan)		0			0	
			Indikator Kinerja Program	2. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan								46,16%	40%	14.523,89		47,16%	40.561,74

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data dan Informasi P4T																					
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali							5.000	20.339	410,00				1.688,14		
							6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa-Bali						10.000	364.961	1.040,00				38.685,87	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi																					
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33		4.907,27		4.907,27	4.907,27	33	33	4.985,04				4.985,04		
			Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA																					
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi		PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi	33		20.526,31		20.526,31	20.526,31	34	34	21.704,07				21.704,07		
							6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota		PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota	38		12.362,85		12.362,85	12.362,85	100	317	31.302,11				8.653,97
			Indikator Rincian Output	Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul																					
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - SK Penegasan Tanah Timbul	0						5.000	5.000	157,25				157,25		
			Indikator Kinerja Program	2. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan							47,16%	40.561,74			40.561,74	40.561,74	41,00%	48,16%	57.334,29				88.321,49		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																	
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028											
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Non APBN	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		Non APBN	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
							APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data dan Informasi P4T																								
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan				CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali		37.400	30.510	3.216,40			2.562,84			27.300	20.339	2.457,00			1.728,82		
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan				CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa-Bali		569.500	442.477	62.075,50			47.787,52			501.900	374.861	57.216,60			41.234,71		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi																								
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		33	33	5.234,29			5.234,29			33	33	5.496,01			5.496,01		
			Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA																								
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi			PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi		34	34	22.138,14			22.138,14			34	34	22.565,99			22.565,99		
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota			PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota		317	317	8.653,97			8.653,97			317	317	8.653,97			8.653,97		
			Indikator Rincian Output	Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul																								
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah					RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - SK Penegasan Tanah Timbul		5.000	5.000	157,25			157,25			5.000	5.000	157,25			157,25		
			Indikator Kinerja Program	2. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan									42,00%	49,16%	108.089,35			125.354,40			43,00%	49,66%	83.957,67			81.285,26		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029	
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data dan Informasi P4T																				
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali	17.300	10.168	1.607,40			874,45			1.688,14	2.562,84	1.728,82	874,45		
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali	404.300	277.232	48.111,70			31.049,98			38.685,87	47.787,52	41.234,71	31.049,98		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi																				
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33	33	5.770,81			5.770,81			4.907,27	4.985,04	5.234,29	5.496,01	5.770,81	
			Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA																				
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi		PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi	34	34	23.047,38			23.047,38			20.526,31	21.704,07	22.138,14	22.565,99	23.047,38	
					6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota		PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota	317	317	8.653,97			8.653,97			12.362,85	8.653,97	8.653,97	8.653,97	8.653,97	
			Indikator Rincian Output	Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul																				
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - SK Penegasan Tanah Timbul	5.000	5.000	157,25			157,25			157,25	157,25	157,25	157,25	157,25	
			Indikator Kinerja Program	2. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan							44,00%	50,66%	60.772,61			66.015,70			40.561,74	88.321,49	125.354,40	81.285,26	66.015,70	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
PENTAG	Kegiatan 5:	Penataan Kembali Pengusaan dan								Hektar							
		Sasaran Kegiatan	Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah							Persentase							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah								59.687	14.523,89			175.860	40.561,74	
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah														
				6418 - Pengaturan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I				Bidang	0				1	0,27	
				6418 - Pengaturan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II					0				1	0,24	
				6418 - Pengaturan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III					0				1	0,21	
				6418 - Pengaturan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV					0				1	0,18	
				6418 - Pengaturan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V					0				1	0,16	
								QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali	Bidang	0				0		
								QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali	Bidang	0				0		
				6418 - Pengaturan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I					7.604	2.455,02			21.000	6.342,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
PENTAG	Kegiatan 5:	Penataan Kembali Penguasaan dan																							
		Sasaran Kegiatan	Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah																						
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah																						
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I								0,27		0,27	0								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II								0,24		0,24	0								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III								0,21		0,21	0								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV								0,18		0,18	0								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V								0,16		0,16	0								
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali	0								1	1	0,16			0,16			
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali	0								1	4	0,24			0,97			
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I					21.000	6.342,00				6.342,00	6.342,00	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
							APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN					
PENTAG	Kegiatan 5:	Penataan Kembali Penguasaan dan																							
		Sasaran Kegiatan	Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah				417.600	659.045	108.089,35			125.354,40			308.600	430.118	83.957,67			81.285,26					
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah																						
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I	0							0											
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II	0							0											
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III	0							0											
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV	0							0											
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V	0							0											
						QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali	1	1	0,16		0,16		1	1	0,16		0,16							
						QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali	4	4	0,99		0,99		4	4	1,00		1,00							
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I	0							0											

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
PENTAG	Kegiatan 5:	Penataan Kembali Penguasaan dan																				
		Sasaran Kegiatan	Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah						212.013	349.995	60.772,61			66.015,70			40.561,74	88.321,49	125.354,40	81.285,26	66.015,70	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah																			
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I			0								0,27					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II			0								0,24					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III			0								0,21					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV			0								0,18					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V			0								0,16					
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali	1	1	0,17			0,17			0,16	0,16	0,16	0,16		
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali	4	4	1,02			1,02			0,97	0,99	1,00	1,02		
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I			0								6.342,00					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II					5.692	1.644,08			24.000	6.264,00		
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III					23.941	5.897,58			73.770	16.893,33		
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV					9.803	2.014,56			31.400	6.123,00		
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V					10.986	1.784,22			22.890	3.753,96		
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI					1.661	728,44			2.800	1.184,40		
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	Bidang	0				0			
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	Bidang	0				0			
		Indikator Kinerja Program	3. Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya												1		
	PPTR	Kegiatan 5:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah														
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						Rasio								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							0,020					0,35	8.809,42	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO																		
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)															
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026						
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
		6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II			24.000	6.264,00				6.264,00	6.264,00	0						
		6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III			73.770	16.893,33				16.893,33	16.893,33	0						
		6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV			31.400	6.123,00				6.123,00	6.123,00	0						
		6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V			22.890	3.753,96				3.753,96	3.753,96	0						
		6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI			2.800	1.184,40				1.184,40	1.184,40	0						
					QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	0							32.100	45.600	5.264,40		7.569,57		
					QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	0							199.500	309.390	52.069,50		80.750,79		
	Indikator Kinerja Program	3. Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya												1	1					
PPTR	Kegiatan 5:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																		
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah									8.809,42	7.959,42	0,15	0,13	6.455,27		15.298,09		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II				0							0									
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III				0							0									
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV				0							0									
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V				0							0									
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI				0							0									
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	62.100	45.600	10.681,20			7.569,60		43.100	49.996	7.758,00			8.299,30				
							QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	355.500	613.445	97.407,00			117.783,66		265.500	380.122	76.198,50			72.984,80				
		Indikator Kinerja Program	3. Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya						1	1						1	1								
	PPTR	Kegiatan 5:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																						
			Sasaran Kegiatan	Tersediarnya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					0,16	0,26	10.450,00			13.636,66		0,17	0,26	10.870,00			14.828,39				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II				0							6.264,00					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III				0							16.893,33					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV				0							6.123,00					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V				0							3.753,96					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI				0							1.184,40					
								QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	27.183	45.600	5.137,59			7.569,57		7.569,57	7.569,60	8.299,30	7.569,57		
								QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	184.830	304.395	55.633,83			58.444,94		80.750,79	117.783,66	72.984,80	58.444,94		
										1	1											
				Indikator Kinerja Program	3. Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya																	
				PPTR	Kegiatan 5: Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																	
					Sasaran Kegiatan Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																	
					Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					0,17	0,26	11.100,00			16.902,52		8.809,42	6.455,27	10.450,00	10.870,00	11.100,00	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu				Rekomendasi Kebijakan						850,00	
							ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rasio							
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	NSPK							
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan		BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Hektare							5.842,07
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu				Hektare							
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen							
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Provinsi							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026				
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu				1	850,00													
							ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							0	1				1.500,00			
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							6	2	527,64			200,00			
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan		BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	200.000	3.416,31	2.425,77			5.842,07	5.842,07	200.000	219.000	5.927,64			10.348,09		
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu				4.800	1.100,00	1.017,35			2.117,35	2.117,35								
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi							0	1				1.250,00			
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							0	38				2.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu																			
							ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	1	900,00			1.500,00			1	1	900,00			1.500,00		
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2	2	200,00			200,00			2	2	220,00			200,00		
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan		BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	220.000	220.000	6.600,00			8.686,66			221.000	221.000	7.000,00			9.878,39		
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu																			
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	750,00			1.250,00			1	1	750,00			1.250,00		
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	38	38	2.000,00			2.000,00			38	38	2.000,00			2.000,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rancangan Kebijakan Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu										850,00						
							ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	1	900,00		1.500,00				900,00	900,00	900,00		
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2	2	250,00		200,00				527,64	200,00	220,00	250,00	
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan		BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	222.000	222.000	7.200,00		11.952,52		5.842,07	5.927,64	6.600,00	7.000,00	7.200,00		
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu										2.117,35						
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	750,00		1.250,00					750,00	750,00	750,00	
			5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan				FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	38	38	2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Kegiatan 6:	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah													
			Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								0,064					10.581,64
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK dan Peraturan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			NSPK							1.100,00
								AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	NSPK							
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rekomendasi Kebijakan							
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Data Indikasi Pelanggaran P4T		BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Hektare						1.200,00
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Melebihi Batas Ketentuan			Hektare							500,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Kegiatan 6:	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						0,12					10.581,64	10.581,64	0,21	0,22	14.907,90		33.100,00		
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK dan Peraturan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2	1.100,00					1.100,00	1.100,00		2					
								AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							1	2	500,00			1.100,00		
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							0	1				500,00		
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Data Indikasi Pelanggaran P4T	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	250.000	500,00	700,00				1.200,00	1.200,00	270.000	270.000	6.000,00		13.500,00		
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Melebihi Batas Ketentuan		500	500,00					500,00	500,00							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana		
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)											TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029								Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Kegiatan 6:	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan																			
			Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																			
			Indikator Kinerja Kegiatan							0,22	0,23	16.840,00			33.100,00		10.581,64	14.907,90	15.770,00	16.370,00	16.840,00	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK dan Peraturan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah									1.100,00						
								AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	2	570,00		1.100,00			500,00	530,00	550,00	570,00		
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	1	500,00		500,00				500,00	500,00	500,00		
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Data Indikasi Pelanggaran P4T	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	270.000	270.000	6.700,00			13.500,00		1.200,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00	
					5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Melebihi Batas Ketentuan									500,00						

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
				5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Tanah Telantar				Hektare							1.400,00
				5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar				Hektare							1.425,00
				5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1						456,64
				5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Provinsi							
		Indikator Rincian Output	Luas Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah														
				5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Hektare							2.500,00
				5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar				Hektare							2.000,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)
		5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Tanah Telantar				5.000	1.400,00				1.400,00	1.400,00								
		5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar				13.933	1.368,54	56,46			1.425,00	1.425,00								
		5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1		456,64			456,64	456,64	1	1	407,90			500,00		
		5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				FBA - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								9	9	500,00			500,00		
	Indikator Rincian Output	Luas Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																				
		5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	15.000	1.100,00	1.400,00			2.500,00	2.500,00	40.000	90.000	7.500,00			17.000,00		
		5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar				10.000	800,00	1.200,00			2.000,00	2.000,00								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Tahun 2029						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
			5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Tanah Telantar										1.400,00							
			5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar										1.425,00							
			5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	470,00		500,00		456,64	407,90	420,00	450,00	470,00			
			5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10	10	600,00		500,00			500,00	520,00	570,00	600,00			
		Indikator Rincian Output	Luas Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																			
			5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu		QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	40.000	90.000	8.000,00		17.000,00		2.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00			
			5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar										2.000,00							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO							Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)						Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Vol (Batas Bawah)			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN	
		Indikator Kinerja Program		4. Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah												1		
	PPTR	Kegiatan 5:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah							Rasio							
			Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah													3.645,58	
					5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan										3.645,58	
								BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Data Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah	Hektare								
Sasaran Strategis 4:			Keadilan Hak Atas Tanah untuk															
PENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	4.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria								4,90%		72.292,83			5,00%	89.855,59	
	Sasaran Program 1			Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima reforma agraria														
	Indikator Kinerja Program			1. Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria						Persentase	46,64%	42,00%	72.292,83			47,64%	89.855,59	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Kinerja Program	4. Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah														1	1							
	PPTR	Kegiatan 5:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah																						
			Sasaran Kegiatan																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah											0,09		3.645,58	3.645,58	0,24	0,22	3.635,34		3.744,40		
					5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan								100.000	2.419,02	1.226,56		3.645,58	3.645,58					
								BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Data Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah									100.000	103.000	3.635,34		3.744,40			
Sasaran Strategis 4:			Keadilan Hak Atas Tanah untuk																						
PENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	4.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria							5,00%	23.219,04	66.636,55			89.855,59	89.855,59		5,10%	43.819,04	1.821,85		152.637,86			
	Sasaran Program 1			Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima reforma agraria																					
	Indikator Kinerja Program			1. Persentase petani/ nelayan penerima Reforma Agraria						47,64%	23.219,04	66.636,55			89.855,59	89.855,59	43,00%	48,64%	43.819,04	1.821,85		152.637,86			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN												
		Indikator Kinerja Program	4. Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah							1	1							1	1						
	PPTR	Kegiatan 5: Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah																						
										0,20	0,23	4.000,00			4.120,00			0,22	0,23	4.500,00			4.635,00		
				5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan																			
							BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Data Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah		110.000	113.300	4.000,00			4.120,00			120.000	123.600	4.500,00			4.635,00		
Sasaran Strategis 4:			Keadilan Hak Atas Tanah untuk																						
PENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	4.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria							5,20%	164.653,30			268.037,57			5,30%	373.126,19			301.850,34				
	Sasaran Program 1		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima reforma agraria																						
	Indikator Kinerja Program		1. Persentase petani/ nelayan penerima Reforma Agraria							44,00%	49,64%	164.653,30			268.037,57			45,00%	50,14%	373.126,19			301.850,34		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Indikator Kinerja Program	4. Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah						1	1												
PPTR	Kegiatan 5:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah						0,24	0,23	4.800,00			4.944,00			3.645,58	3.635,34	4.000,00	4.500,00	4.800,00	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
				5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan											3.645,58					
							BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Data Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah	130.000	133.900	4.800,00			4.944,00				3.635,34	4.000,00	4.500,00	4.800,00	
Sasaran Strategis 4:			Keadilan Hak Atas Tanah untuk																			
PENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	4.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria							5,40%	514.686,29			269.167,07			89.855,59	152.637,86	268.037,57	301.850,34	269.167,07	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
	Sasaran Program 1		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima reforma agraria																			
	Indikator Kinerja Program		1. Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria						46,00%	51,14%	514.686,29			269.167,07			89.855,59	152.637,86	268.037,57	301.850,34	269.167,07	Direktorat Jenderal Penataan Agraria

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO							Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)						Tahun 2025				
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Vol (Batas Bawah)			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
PENTAG	Kegiatan 6:	Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam															
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria							Persentase							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria									9.300	72.292,83			43.200	89.855,59
		Indikator Rincian Output	Jumlah Model Penanganan Akses Reforma Agraria														
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria	Rekomendasi Kebijakan		1	800,60			1	800,60
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kerja Sama Penataan Akses Reforma Agraria														
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	AEC - Kerja sama	001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria		AEC - Kerja sama	001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria	Dokumen		1	877,06			1	877,06
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat														
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat	NSPK		2	509,95			2	512,11
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data data Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria														
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria	Data		1	1.276,84			1	1.276,84
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria														
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Laporan		1	1.675,39			1	1.675,39
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria														
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	Data		33	2.817,78			33	2.817,78

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026				
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)
PENTAG	Kegiatan 6:	Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam																					
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria						43.200	23.219,04	66.636,55			89.855,59	89.855,59	44.600	276.900	43.819,04	1.821,85		152.637,86		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Model Penanganan Akses Reforma Agraria																				
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria	1		800,60		800,60	800,60	1	1	778,32		824,62			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kerja Sama Penataan Akses Reforma Agraria																				
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	AEC - Kerja sama	001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria		AEC - Kerja sama	001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria	1		877,06		877,06	877,06	1	1	867,06		903,37			
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat																				
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat	2	160,00	352,11		512,11	512,11	3	3	97,36	1.821,85	362,68	1.821,85		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data data Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria																				
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria	1		1.276,84		1.276,84	1.276,84	1	1	1.254,56		1.315,14			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria																				
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	1		1.675,39		1.675,39	1.675,39	2	2	2.653,41		2.653,41			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria																				
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	33		2.817,78		2.817,78	2.817,78	33	33	5.085,93		5.085,93			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN																	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028										
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN														
PENTAG	Kegiatan 6:	Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam																									
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria																								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria						275.900	275.900	164.653,30			268.037,57			350.100	350.100	373.126,19			301.850,34					
		Indikator Rincian Output	Jumlah Model Penanganan Akses Reforma Agraria																								
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria	1	1	865,85		865,85		1	1	909,14			909,14						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Kerja Sama Penataan Akses Reforma Agraria																								
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	AEC - Kerja sama	001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria		AEC - Kerja sama	001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria	1	1	910,42		948,54		1	1	955,94			995,97						
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat																								
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat	2	2	102,23		373,56		3	3	107,34			384,76						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data data Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria																								
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria	1	1	1.317,28		1.380,90		1	1	1.383,15			1.449,94						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria																								
				5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	2	2	2.786,08		2.786,08		1	1	2.925,39			2.925,39						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria																								
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	33	33	5.865,94		5.865,94		33	33	6.159,24			6.159,24						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
	PENTAG	Kegiatan 6:	Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam																			
			Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria																		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria						273.300	273.300	514.686,29			269.167,07		89.855,59	152.637,86	268.037,57	301.850,34	269.167,07	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
			Indikator Rincian Output	Jumlah Model Penanganan Akses Reforma Agraria																		
					5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria	1	1	954,60		954,60		800,60	824,62	865,85	909,14	954,60	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Kerja Sama Penataan Akses Reforma Agraria																		
					5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	AEC - Kerja sama	001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria		AEC - Kerja sama	001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria	1	1	1.003,73		1.045,77		877,06	903,37	948,54	995,97	1.045,77	
			Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat																		
					5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat	2	2	112,71		396,30		512,11	2.184,53	373,56	384,76	396,30	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data data Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria																		
					5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria	1	1	1.452,30		1.522,44		1.276,84	1.315,14	1.380,90	1.449,94	1.522,44	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria																		
					5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	1	1	3.071,66		3.071,66		1.675,39	2.653,41	2.786,08	2.925,39	3.071,66	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria																		
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	33	33	6.467,20		6.467,20		2.817,78	5.085,93	5.865,94	6.159,24	6.467,20	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria															
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	001 - Akses Reforma Agraria Kategori I				Kepala Keluarga		400	188,00			5.400	2.268,00	
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	002 - Akses Reforma Agraria Kategori II				Kepala Keluarga		300	141,92			7.200	3.146,40	
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	003 - Akses Reforma Agraria Kategori III						2.000	1.212,34			12.000	5.364,00	
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV						2.800	1.328,67			6.000	2.646,00	
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	005 - Akses Reforma Agraria Kategori V						3.700	1.811,63			11.800	5.262,80	
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI						100	49,60			800	396,80	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria														
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	Kepala Keluarga								
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	Kepala Keluarga								
			Indikator Rincian Output	Jumlah Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria														
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga		27.900	59.492,84			128.200	61.379,20	
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	Kepala Keluarga		200	110,20			2.600	1.432,60	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026				
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
	Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria																						
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	001 - Akses Reforma Agraria Kategori I					5.400	2.268,00			2.268,00	2.268,00								
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	002 - Akses Reforma Agraria Kategori II					7.200	3.146,40			3.146,40	3.146,40								
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	003 - Akses Reforma Agraria Kategori III					12.000	5.364,00			5.364,00	5.364,00								
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV					6.000	2.646,00			2.646,00	2.646,00								
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	005 - Akses Reforma Agraria Kategori V					11.800	5.262,80			5.262,80	5.262,80								
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI					800	396,80			396,80	396,80								
			Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria																				
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga			QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali						12.800	20.400	8.192,00			9.512,95			
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga			QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali						31.800	256.500	19.398,00			109.315,73			
			Indikator Rincian Output	Jumlah Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria																				
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	128.200	2.542,44	58.836,76		61.379,20	61.379,20	9.200	42.400	5.428,00		22.201,23			
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	2.600	1.432,60			1.432,60	1.432,60	100	800	64,40		462,80			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria																						
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	001 - Akses Reforma Agraria Kategori I																			
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	002 - Akses Reforma Agraria Kategori II																			
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	003 - Akses Reforma Agraria Kategori III																			
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV																			
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	005 - Akses Reforma Agraria Kategori V																			
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI																			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria																						
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	20.400	20.400	9.445,20			9.512,95		20.400	20.400	9.628,80			9.512,95				
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	255.500	255.500	115.741,50			108.889,73		329.700	329.700	152.321,40			140.498,93				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria																						
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	44.400	271.900	27.483,60			136.951,23		306.000	275.100	198.594,00			138.551,23				
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	200	800	135,20			462,80		200	800	141,80			462,80				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Tahun 2029						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
			Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria	6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	001 - Akses Reforma Agraria Kategori I									2.268,00								
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	002 - Akses Reforma Agraria Kategori II									3.146,40								
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	003 - Akses Reforma Agraria Kategori III									5.364,00								
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV									2.646,00								
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	005 - Akses Reforma Agraria Kategori V									5.262,80								
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI									396,80								
			Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria																				
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	20.400	20.400	9.716,20			9.512,95		9.512,95	9.512,95	9.512,95	9.512,95	9.512,95			
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	252.900	252.900	119.115,90			107.782,13		109.315,73	108.889,73	140.498,93	107.782,13				
			Indikator Rincian Output	Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria																				
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	547.200	273.900	372.643,20			137.951,24		61.379,20	22.201,23	136.951,23	138.551,23	137.951,24			
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	200	800	148,80			462,80		1.432,60	462,80	462,80	462,80	462,80			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
MISI 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Efektif melalui																	
TUJUAN 4: Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang																	
Indikator Kinerja Tujuan Skor B-Ready (Business Ready)									Nilai	34,85					26,06		
Sasaran Strategis 5:		Pelayanan Pertanahan dan Tata													26,06		
SPPR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	5.1	(Business Location) B-Ready/Business Ready							34,85					26,06		
	Sasaran Program 1			Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh													
	Indikator Kinerja Program			1. Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional						Nilai					83%		
SPPR	Kegiatan 1:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial															
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir							Persentase							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL												83	10.720,17	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pengelolaan Data Peta Dasar												1	1.540,00	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan Data Peta Dasar		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan Data Peta Dasar	Dataset	1				1	1.540,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang												3	1.180,17	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	NSPK	0				3	1.180,17	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Peta Panjang Kawasan Hutan												519	8.000,00	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Panjang Kawasan Hutan		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Panjang Kawasan Hutan	KM	12.262,14				519	8.000,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																		Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)												TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
MISI 2:	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Efektif melalui																							
	TUJUAN 4: Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang																							
	Indikator Kinerja Tujuan Skor B-Ready (Business Ready)																							
Sasaran Strategis 5:	Pelayanan Pertanahan dan Tata																							
SPPR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	5.1	(Business Location) B-Ready/Business Ready																			Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
	Sasaran Program 1			Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh																				
	Indikator Kinerja Program			1. Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional																		Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
SPPR	Kegiatan 1:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL							4.160.008	100				121.123,42		10.720,17	338.599,86	218.133,21	120.576,44	121.123,42	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pengelolaan Data Peta Dasar							2	2	14.275,00			9.846,15		1.540,00	15.940,49	9.280,94	9.559,37	9.846,15			
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan Data Peta Dasar		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan Data Peta Dasar	2	2	14.275,00			9.846,15		1.540,00	15.940,49	9.280,94	9.559,37	9.846,15			
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang							3	3	1.076,37			1.130,19		1.180,17	1.000,00	1.025,12	1.076,37	1.130,19			
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	3	3	1.076,37			1.130,19		1.180,17	1.000,00	1.025,12	1.076,37	1.130,19			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Peta Panjang Kawasan Hutan														8.000,00							
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Panjang Kawasan Hutan		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Panjang Kawasan Hutan								8.000,00							

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)					
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali														
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang				QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - Foto Tegak PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali	Hektar								
			Indikator Rincian Output	Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali														
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang				QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - Foto Tegak PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	Hektar								
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surveyor Berlisensi yang berintegritas												50	350,00	
		Kegiatan 2:	Penyediaan informasi bidang tanah dan															
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi						Persentase								
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid												80	1.091.384,24	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pengembangan Basis Data Kadaster 3D												16.473	771,66	
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D	Dokumen						16.473	771,66	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan 3D Kadaster												0		
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BMA - Data dan Informasi Publik	XXX - Pemetaan 3D Kadaster		BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Pemetaan 3D Kadaster	Data		0				0		
			Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral												3	900,00	
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pemetaan Kadastral		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pemetaan Kadastral	NSPK	3					3	900,00	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi												515	5.903,82	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0					515	5.903,82	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			Indikator Rincian Output	Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali														960.043					44.449,99		
					6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang				QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali								960.043					44.449,99		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali														5.133.507					277.209,38		
					6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang				QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali							5.133.507					277.209,38			
			Indikator Kinerja-Kegiatan	Persentase Surveyor-Berlisensi yang berintegritas							50		350,00			350,00		60				350,00			
		Kegiatan 2:	Penyediaan informasi bidang tanah dan																						
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid							80		1.091.384,24	681.140		1.091.384,24		85	170.061,22			345.014,85			
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pengembangan Basis Data Kadastrer 3D									771,66			771,66									
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Pengembangan Basis Data Kadastrer 3D		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Pengembangan Basis Data Kadastrer 3D			771,66			771,66									
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan 3D Kadastrer							0						333.684					12.978,24			
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BMA - Data dan Informasi Publik	XXX - Pemetaan 3D Kadastrer		BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Pemetaan 3D Kadastrer	0						333.684					12.978,24			
			Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral							3		900,00			900,00		3	900,00			900,00			
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	3		900,00			900,00		3	900,00			900,00			
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi							515		5.903,82			5.903,82	515	515	5.903,82			5.903,82			
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	515		5.903,82			5.903,82	515	515	5.903,82			5.903,82			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028										
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN														
			Indikator Rincian Output	Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali							960.043	699.083	44.449,99				32.367,54			699.083	309.000	32.367,54			14.306,70		
					6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali		960.043	699.083	44.449,99				32.367,54			699.083	309.000	32.367,54			14.306,70		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali							5.133.507	3.249.252	277.209,38				175.459,61			3.249.252	1.771.000	175.459,61			95.634,00		
					6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali		5.133.507	3.249.252	277.209,38				175.459,61			3.249.252	1.771.000	175.459,61			95.634,00		
			Indikator Kinerja-Kegiatan	Persentase Surveyor-Berlisensi yang-berintegritas								70					400,00				80				450,00		
		Kegiatan 2:	Penyediaan informasi bidang tanah dan																								
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi																							
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid								90	139.787,25				362.572,96				95%	144.770,96			319.878,70		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pengembangan Basis Data Kadaster 3D																							
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D																	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan 3D Kadaster								178.216					8.201,06				50.797				3.879,57		
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BMA - Data dan Informasi Publik	XXX - Pemetaan 3D Kadaster		BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Pemetaan 3D Kadaster		178.216					8.201,06				50.797				3.879,57		
			Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral								3	900,00				945,00			3	3	945,00			992,25		
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		3	900,00				945,00			3	3	945,00			992,25		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi							515	515	5.903,82				6.199,01			515	515	6.199,01			6.508,96		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		515	515	5.903,82			6.199,01			515	515	6.199,01			6.508,96		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
			Indikator Rincian Output	Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali						309.000	147.563	14.306,70			6.832,17			44.449,99	32.367,54	14.306,70	6.832,17		
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali		309.000	147.563	14.306,70			6.832,17			44.449,99	32.367,54	14.306,70	6.832,17		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali						1.771.000	1.913.239	95.634,00			103.314,91			277.209,38	175.459,61	95.634,00	103.314,91		
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali		1.771.000	1.913.239	95.634,00			103.314,91			277.209,38	175.459,61	95.634,00	103.314,91		
			Indikator Kinerja-Kegiatan	Persentase Surveyor-Berlisensi yang berintegritas												350,00	350,00	400,00	450,00				
		Kegiatan 2:	Penyediaan informasi bidang tanah dan																				
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid							100%	138.006,07			328.289,48	1.091.384,24	345.014,85	362.572,96	319.878,70	328.289,48	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pengembangan Basis Data Kadaster 3D												771,66							
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D							771,66							
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan 3D Kadaster							10.000				2.391,76			12.978,24	8.201,06	3.879,57	2.391,76		
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BMA - Data dan Informasi Publik	XXX - Pemetaan 3D Kadaster		BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Pemetaan 3D Kadaster		10.000				2.391,76			12.978,24	8.201,06	3.879,57	2.391,76		
			Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral						3	3	992,25			1.041,86			900,00	900,00	945,00	992,25	1.041,86	
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	3	3	992,25			1.041,86			900,00	900,00	945,00	992,25	1.041,86	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi						515	515	6.508,96			6.834,41			5.903,82	5.903,82	6.199,01	6.508,96	6.834,41	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	515	515	6.508,96			6.834,41			5.903,82	5.903,82	6.199,01	6.508,96	6.834,41	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 1													21.000	4.506,60	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	Bidang	0					21.000	4.506,60	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 2													24.000	4.382,10	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	Bidang	0					24.000	4.382,10	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 3													73.770	11.198,29	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	Bidang	0					73.770	11.198,29	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 4													31.400	3.711,48	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	Bidang	0%					31.400	3.711,48	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 5													22.890	1.957,10	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	Bidang	0					22.890	1.957,10	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 6													2.800	648,20	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	Bidang	0					2.800	648,20	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1													70	33,06	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	Bidang						70	33,06	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2													122	49,14	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	Bidang						122	49,14	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO																						
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																			
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
								Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO						II. PENDANAAN																	
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																	
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028											
								Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN												
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 1					0	0							0	0							
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1		0	0							0	0							
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 2					0	0							0	0							
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2		0	0							0	0							
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 3					0	0							0	0							
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3		0	0							0	0							
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 4					0	0							0	0							
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4		0	0							0	0							
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 5					0	0							0	0							
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5		0	0							0	0							
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 6					0	0							0	0							
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6		0	0							0	0							
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1					70	70	33,06			33,06			70	70	33,06			33,06			
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1		70	70	33,06			33,06			70	70	33,06			33,06			
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2					122	122	49,14			49,14			122	122	49,14			49,14			
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2		122	122	49,14			49,14			122	122	49,14			49,14			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 1							0	0							4.506,60					
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	0	0							4.506,60					
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 2							0	0							4.382,10					
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	0	0							4.382,10					
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 3							0	0							11.198,29					
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	0	0							11.198,29					
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 4							0	0							3.711,48					
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	0	0							3.711,48					
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 5							0	0							1.957,10					
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	0	0							1.957,10					
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 6							0	0							648,20					
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	0	0							648,20					
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1							70	70	33,06			33,06			33,06	33,06	33,06	33,06	33,06	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	70	70	33,06			33,06			33,06	33,06	33,06	33,06	33,06	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2							122	122	49,14			49,14			49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	122	122	49,14			49,14			49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN															
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3													104	34,75
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	Bidang	0%					104	34,75
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4													74	19,20
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	Bidang	0					74	19,20
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5													267	52,17
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	Bidang	0					267	52,17
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 1													191	80,77
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	Bidang	0					191	80,77
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 2													535	191,19
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	Bidang	0					535	191,19
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 3													2.645	724,85
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	Bidang						2.645	724,85
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 4													258	58,27
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	Bidang						258	58,27
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 5													5.118	809,41
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	Bidang	0					5.118	809,41
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali													0	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali	Bidang	0					0	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026					
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					APBN (RM /PNBP)				APBN (PHLN)	Non APBN	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN														
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3							104			34,75			34,75		104	104	34,75			34,75		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	104			34,75			34,75		104	104	34,75			34,75		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4							74			19,20			19,20		74	74	19,20			19,20		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	74			19,20			19,20		74	74	19,20			19,20		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5							267			52,17			52,17		267	267	52,17			52,17		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	267			52,17			52,17		267	267	52,17			52,17		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 1							191			80,77			80,77		191	191	80,77			80,77		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	191			80,77			80,77		191	191	80,77			80,77		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 2							535			191,19			191,19		535	535	191,19			191,19		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	535			191,19			191,19		535	535	191,19			191,19		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 3							2.645			724,85			724,85		2.645	2.645	724,85			724,85		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	2.645			724,85			724,85		2.645	2.645	724,85			724,85		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 4							258			58,27			58,27		258	258	58,27			58,27		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	258			58,27			58,27		258	258	58,27			58,27		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 5							5.118			809,41			809,41		5.118	5.118	809,41			809,41		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	5.118			809,41			809,41		5.118	5.118	809,41			809,41		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali							0								5.502	5.502	2.384,57			2.384,57		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali	0								5.502	5.502	2.384,57			2.384,57		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3							104	104	34,75			34,75			104	104	34,75			34,75		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	104	104	34,75			34,75			104	104	34,75			34,75		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4							74	74	19,20			19,20			74	74	19,20			19,20		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	74	74	19,20			19,20			74	74	19,20			19,20		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5							267	267	52,17			52,17			267	267	52,17			52,17		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	267	267	52,17			52,17			267	267	52,17			52,17		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 1							191	191	80,77			80,77			191	191	80,77			80,77		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	191	191	80,77			80,77			191	191	80,77			80,77		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 2							535	535	191,19			191,19			535	535	191,19			191,19		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	535	535	191,19			191,19			535	535	191,19			191,19		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 3							2.645	2.645	724,85			724,85			2.645	2.645	724,85			724,85		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	2.645	2.645	724,85			724,85			2.645	2.645	724,85			724,85		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 4							258	258	58,27			58,27			258	258	58,27			58,27		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	258	258	58,27			58,27			258	258	58,27			58,27		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 5							5.118	5.118	809,41			809,41			5.118	5.118	809,41			809,41		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	5.118	5.118	809,41			809,41			5.118	5.118	809,41			809,41		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali							10.224	10.224	4.431,08			4.431,08			5.502	5.502	2.384,57			2.384,57		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali	10.224	10.224	4.431,08			4.431,08			5.502	5.502	2.384,57			2.384,57		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)											Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029	
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3						104	104	34,75			34,75			34,75	34,75	34,75	34,75					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	104	104	34,75		34,75			34,75	34,75	34,75	34,75					
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4						74	74	19,20			19,20			19,20	19,20	19,20	19,20					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	74	74	19,20		19,20			19,20	19,20	19,20	19,20					
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5						299	299	52,17			52,17			52,17	52,17	52,17	52,17					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	299	299	52,17		52,17			52,17	52,17	52,17	52,17					
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 1						193	193	80,77			80,77			80,77	80,77	80,77	80,77					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	193	193	80,77		80,77			80,77	80,77	80,77	80,77					
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 2						537	537	191,19			191,19			191,19	191,19	191,19	191,19					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	537	537	191,19		191,19			191,19	191,19	191,19	191,19					
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 3						2.649	2.649	724,85			724,85			724,85	724,85	724,85	724,85					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	2.649	2.649	724,85		724,85			724,85	724,85	724,85	724,85					
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 4						259	259	58,27			58,27			58,27	58,27	58,27	58,27					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	259	259	58,27		58,27			58,27	58,27	58,27	58,27					
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 5						5.122	5.122	809,41			809,41			809,41	809,41	809,41	809,41					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	5.122	5.122	809,41		809,41			809,41	809,41	809,41	809,41					
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali						6.571	6.571	2.847,87			2.847,87				2.384,57	4.431,08	2.384,57	2.847,87				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali	6.571	6.571	2.847,87		2.847,87				2.384,57	4.431,08	2.384,57	2.847,87				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025						
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali														0	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	Bidang	0						0	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1														25	52,79
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	Bidang	0						25	52,79
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2														34	33,93
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	Bidang	0						34	33,93
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3														448	370,94
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	Bidang	134						448	370,94
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4														13	8,36
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	Bidang	30						13	8,36
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5														1.003	0,46
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	Bidang	1589						1.003	0,46
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1														3	6,82
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	Bidang	15,00						3	6,82
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2														8	3,85
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	Bidang	3651						8	3,85

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali							0							178.877	178.877	42.912,59			42.912,59		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	0							178.877	178.877	42.912,59			42.912,59		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1							25		52,79			52,79		174	174	204,10			204,10		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	25		52,79			52,79		174	174	204,10			204,10		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2							34		33,93			33,93		27	27	26,95			26,95		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	34		33,93			33,93		27	27	26,95			26,95		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3							448		370,94			370,94		508	508	420,62			420,62		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	448		370,94			370,94		508	508	420,62			420,62		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4							13		8,36			8,36		13	13	8,36			8,36		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	13		8,36			8,36		13	13	8,36			8,36		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5							1.003		0,46			0,46		605	605	280,12			280,12		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	1.003		0,46			0,46		605	605	280,12			280,12		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1							3		6,82			6,82		37	37	71,15			71,15		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	3		6,82			6,82		37	37	71,15			71,15		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2							8		3,85			3,85		2	2	3,85			3,85		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	8		3,85			3,85		2	2	3,85			3,85		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																				
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028													
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
							APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali									198.925	332.293	36.343,60				79.717,09				178.874	178.874	42.911,87				42.911,87		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral					QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat		U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	198.925	332.293	36.343,60				79.717,09				178.874	178.874	42.911,87				42.911,87		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1									174	174	204,10				204,10				174	174	204,10				204,10		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga		U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	174	174	204,10			204,10				174	174	204,10			204,10				204,10		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2									27	27	26,95				26,95				27	27	26,95				26,95		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga		U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	27	27	26,95			26,95				27	27	26,95			26,95				26,95		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3									508	508	420,62				420,62				508	508	420,62				420,62		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga		U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	508	508	420,62			420,62				508	508	420,62			420,62				420,62		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4									13	13	8,36				8,36				13	13	8,36				8,36		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga		U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	13	13	8,36			8,36				13	13	8,36			8,36				8,36		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5									605	605	280,12				280,12				605	605	280,12				280,12		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga		U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	605	605	280,12			280,12				605	605	280,12			280,12				280,12		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1									37	37	71,15				71,15				37	37	71,15				71,15		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga		U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	37	37	71,15			71,15				37	37	71,15			71,15				71,15		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2									2	2	3,85				3,85				2	2	3,85				3,85		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga		U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	2	2	3,85			3,85				2	2	3,85			3,85				3,85		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)											Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali						198.925	213.722	36.343,60			51.271,91				42.912,59	79.717,09	42.911,87	51.271,91				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral			QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	198.925	213.722	36.343,60			51.271,91				42.912,59	79.717,09	42.911,87	51.271,91				
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1						174	174	204,10			204,10			52,79	204,10	204,10	204,10	204,10				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	174	174	204,10			204,10			52,79	204,10	204,10	204,10	204,10				
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2						27	27	26,95			26,95			33,93	26,95	26,95	26,95	26,95				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	27	27	26,95			26,95			33,93	26,95	26,95	26,95	26,95				
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3						508	508	420,62			420,62			370,94	420,62	420,62	420,62	420,62				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	508	508	420,62			420,62			370,94	420,62	420,62	420,62	420,62				
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4						13	13	8,36			8,36			8,36	8,36	8,36	8,36	8,36				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	13	13	8,36			8,36			8,36	8,36	8,36	8,36	8,36				
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5						605	605	280,12			280,12			0,46	280,12	280,12	280,12	280,12				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	605	605	280,12			280,12			0,46	280,12	280,12	280,12	280,12				
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1						37	37	71,15			71,15			6,82	71,15	71,15	71,15	71,15				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	37	37	71,15			71,15			6,82	71,15	71,15	71,15	71,15				
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2						2	2	3,85			3,85			3,85	3,85	3,85	3,85	3,85				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	2	2	3,85			3,85			3,85	3,85	3,85	3,85	3,85				

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO								
													Tahun 2025					
													Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
		APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN														
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3													6	9,50
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	Bidang	8					6	9,50
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5													101	86,15
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	Bidang	2					101	86,15
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3													3	13,44
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	Bidang	0					3	13,44
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5													38	82,34
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	Hektar	61					38	82,34
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali													1.000	771,60
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali	Hektar	0					1.000	771,60
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali													40	79,40
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali	Hektar	11					40	79,40
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali													463.217	200.758,25
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali	Hektar						463.217	200.758,25
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali													2.036.237	488.492,81
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	Hektar						2.036.237	488.492,81

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3							6		9,50			9,50		0	1				1,58		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	6		9,50			9,50		0	1				1,58		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5							101		86,15			86,15		53	53	45,21			45,21		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	101		86,15			86,15		53	53	45,21			45,21		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3							3		13,44			13,44		0	1				4,48		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	3		13,44			13,44		0	1				4,48		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5							38		82,34			82,34		52	52	138,11			138,11		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	38		82,34			82,34		52	52	138,11			138,11		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali							1.000		771,60			771,60		1	1.000	0,96			771,60		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali	1.000		771,60			771,60		1	1.000	0,96			771,60		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali							40		79,40			79,40		1.468	2.000	79,40			3.970,00		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali	40		79,40			79,40		1.468	2.000	79,40			3.970,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali							463.217		200.758,25			200.758,25		45.000	171.872	17.419,49			74.489,32		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali	463.217		200.758,25			200.758,25		45.000	171.872	17.419,49			74.489,32		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali							2.036.237		488.492,81			488.492,81		360.000	733.880	66.923,99			176.057,83		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	2.036.237		488.492,81			488.492,81		360.000	733.880	66.923,99			176.057,83		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028										
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN													
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3							0	1				1,58			0	1				1,58		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	0	1				1,58			0	1				1,58		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5							53	53	45,21			45,21			53	53	45,21			45,21		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	53	53	45,21			45,21			53	53	45,21			45,21		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3							0	1				4,48			0	1				4,48		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	0	1				4,48			0	1				4,48		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5							52	52	138,11			138,11			52	52	138,11			138,11		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	52	52	138,11			138,11			52	52	138,11			138,11		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali							1	1.000	0,96			771,60			1	1.000	0,96			771,60		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali	1	1.000	0,96			771,60			1	1.000	0,96			771,60		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali							1.468	2.000	79,40			3.970,00			1.468	2.000	79,40			3.970,00		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali	1.468	2.000	79,40			3.970,00			1.468	2.000	79,40			3.970,00		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali							45.000	171.872	17.419,49			74.489,32			45.000	171.872	17.419,49			74.489,32		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali	45.000	171.872	17.419,49			74.489,32			45.000	171.872	17.419,49			74.489,32		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali							360.000	733.880	66.923,99			176.057,83			360.000	733.880	66.923,99			176.057,83		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	360.000	733.880	66.923,99			176.057,83			360.000	733.880	66.923,99			176.057,83		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3							0	1				1,58			9,50	1,58	1,58	1,58	1,58	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	0	1				1,58			9,50	1,58	1,58	1,58	1,58	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5							53	53	45,21			45,21			86,15	45,21	45,21	45,21	45,21	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	53	53	45,21			45,21			86,15	45,21	45,21	45,21	45,21	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3							0	1				4,48			13,44	4,48	4,48	4,48	4,48	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	0	1				4,48			13,44	4,48	4,48	4,48	4,48	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5							52	52	138,11			138,11			82,34	138,11	138,11	138,11	138,11	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	52	52	138,11			138,11			82,34	138,11	138,11	138,11	138,11	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali							1	1.000	0,96			771,60			771,60	771,60	771,60	771,60	771,60	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali	1	1.000	0,96			771,60			771,60	771,60	771,60	771,60	771,60	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali							1.468	2.000	79,40			3.970,00			79,40	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali	1.468	2.000	79,40			3.970,00			79,40	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali							45.000	171.872	17.419,49			74.489,32			200.758,25	74.489,32	74.489,32	74.489,32	74.489,32	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali	45.000	171.872	17.419,49			74.489,32			200.758,25	74.489,32	74.489,32	74.489,32	74.489,32	
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali							360.000	733.880	66.923,99			176.057,83			488.492,81	176.057,83	176.057,83	176.057,83	176.057,83	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	360.000	733.880	66.923,99			176.057,83			488.492,81	176.057,83	176.057,83	176.057,83	176.057,83	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
														APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga												352.016	221.770,08		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga	Hektar	514.115,90					352.016	221.770,08	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga													330.000	118.800,00	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U29 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	Hektar	21.620.066					330.000	118.800,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga													0		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	Hektar	-					0		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga													0		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U31 -Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga	Hektar	-					0		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali													3.982	17.479,19	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali	Dokumen						3.982	17.479,19	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali													2.212	6.159,43	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali	Dokumen						2.212	6.159,43	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Peningkatan Kualitas Kadastral													2	372,85	
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Peningkatan Kualitas Kadastral	Dataset						2	372,85	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN														
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga							352.016				221.770		221.770,08		0	352.016					221.770,08	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga	352.016				221.770		221.770,08		0	352.016					221.770,08	
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga							330.000				118.800		118.800,00		0	330.000					118.800,00	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	330.000				118.800		118.800,00		0	330.000					118.800,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga							0								0	0						
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	0								0	0						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga							0								0	0						
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U31 -Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga	0								0	0						
		Indikator Rincian Output	Jumlah Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali							3.982		17.479,19				17.479,19		1.668	4.543	3.265,42	4.055,44		20.715,66		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali	3.982		17.479,19				17.479,19		1.668	4.543	3.265,42	4.055,44		20.715,66		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali							2.212		6.159,43				6.159,43		1.112	2.502	240,40			301,04	23,73	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali	2.212		6.159,43				6.159,43		1.112	2.502	240,40			301,04	23,73	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Peningkatan Kualitas Kadastral							2		372,85				372,85		2	2	372,85			372,85		
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Peningkatan Kualitas Kadastral	2		372,85				372,85		2	2	372,85			372,85		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN																	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028											
										Vohume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN														
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga							170.590	170.590		107.473,63			107.473,63		170.590	170.590		107.473,63			107.473,63		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga	170.590	170.590		107.473,63			107.473,63		170.590	170.590		107.473,63			107.473,63		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga							270.114	270.114		97.248,22			97.248,22		270.114	270.114		97.248,22			97.248,22		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	270.114	270.114		97.248,22			97.248,22		270.114	270.114		97.248,22			97.248,22		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga							0	153.671					64.486,12		0	153.671					64.486,12		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	0	153.671					64.486,12		0	153.671					64.486,12		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga							0	99.102					44.711,38		0	132.172					59.631,41		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U31 -Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga	0	99.102					44.711,38		0	132.172					59.631,41		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali							1.086	1.086	4.160,78			4.160,78		1.086	1.086	4.160,79			4.160,79				
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali	1.086	1.086	4.160,78			4.160,78		1.086	1.086	4.160,79			4.160,79				
			Indikator Rincian Output	Jumlah Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali							938	938	204,95			606,91	3.917,09	938	938	121,76			121,76				
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali	938	938	204,95			606,91	3.917,09	938	938	121,76			121,76				
			Indikator Rincian Output	Jumlah Peningkatan Kualitas Kadastral							2	2	372,85			372,85			2	2	372,85			372,85			
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Peningkatan Kualitas Kadastral	2	2	372,85			372,85			2	2	372,85			372,85			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga							170.599	170.599			107.473,63			107.473,63		221.770,08	221.770,08	107.473,63	107.473,63	107.473,63
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga	170.599	170.599			107.473,63			107.473,63		221.770,08	221.770,08	107.473,63	107.473,63	107.473,63
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga							270.174	270.174			97.248,29			97.248,29		118.800,00	118.800,00	97.248,22	97.248,22	97.248,29
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	270.174	270.174			97.248,29			97.248,29		118.800,00	118.800,00	97.248,22	97.248,22	97.248,29
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga							0	162.888						68.353,92				64.486,12	64.486,12	68.353,92
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	0	162.888						68.353,92				64.486,12	64.486,12	68.353,92
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga							0	0										44.711,38	59.631,41	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U31 -Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga	0	0										44.711,38	59.631,41	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali							820	820	3.265,42	4.055,44		2.927,64				17.479,19	20.715,66	4.160,78	4.160,79	2.927,64
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali	820	820	3.265,42	4.055,44		2.927,64				17.479,19	20.715,66	4.160,78	4.160,79	2.927,64
		Indikator Rincian Output	Jumlah Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali							0	13.260				2.055,09				6.159,43	324,77	4.524,00	121,76	2.055,09
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali	0	13.260				2.055,09				6.159,43	324,77	4.524,00	121,76	2.055,09
		Indikator Rincian Output	Jumlah Peningkatan Kualitas Kadastral							2	2	372,85			372,85				372,85	372,85	372,85	372,85	372,85
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Peningkatan Kualitas Kadastral	2	2	372,85			372,85				372,85	372,85	372,85	372,85	372,85

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025				
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	Volume (Batas Atas)
		Indikator Kinerja Program	2. Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang													
	SPPR	Kegiatan 3:	Penyediaan Peta Tematik													
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir													
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir												1,21%	2.566,20
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Peta Tematik Kawasan												150.000	2.566,20
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Peta Tematik Kawasan		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Peta Tematik Kawasan	Hektar	50000				150.000	2.566,20
		Indikator Rincian	Jumlah Peta Tematik													
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Tematik Kawasan		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Tematik	Hektar	100000					
		Kegiatan 4:	Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik													
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan													
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi												20,00%	5.872,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik												1	60,00
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik	NSPK	1				1	60,00
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang												1	5.812,00
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Dan Ruang		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang	Data	1				1	5.812,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026			
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
							VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
		Indikator Kinerja Program	2. Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang																			
	SPPR	Kegiatan 3:	Penyediaan Peta Tematik																			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir				1,21%		2.566,20			2.566,20			21%	2.566,20			39.802,13			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Peta Tematik Kawasan				150.000		2.566,20			2.566,20		150.000	150.000	2.566,20			2.566,20			
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Peta Tematik Kawasan			BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Peta Tematik Kawasan	150.000		2.566,20		2.566,20		150.000	150.000	2.566,20		2.566,20	
		Indikator Rincian	Jumlah Peta Tematik													2.338.300			37.235,93			
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Tematik Kawasan			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Tematik Kawasan						2.338.300			37.235,93			
		Kegiatan 4:	Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik																			
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi				20,00%		5.872,00			5.872,00			40,00%	5.872,00			10.500,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik				1		60,00		0	60,00		0	1	60,00			500,00			
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik			AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik	1		60,00		60,00		1	60,00		500,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang				1		5.812,00		0	5.812,00		0	1	5.812,00			10.000,00			
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Dan Ruang			BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang	1		5.812,00		5.812,00		1	5.812,00		10.000,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028						
										Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
							Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Kinerja Program	2. Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang																					
	SPPR	Kegiatan 3:	Penyediaan Peta Tematik																					
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir					46,75%	39.802,13				41.792,24			74,18%	41.792,24			43.881,85				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Peta Tematik Kawasan				150.000	150.000	2.566,20			2.694,51			150.000	150.000	2.694,51			2.829,24				
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Peta Tematik Kawasan		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Peta Tematik Kawasan	150.000	150.000	2.566,20		2.694,51		150.000	150.000	2.694,51		2.829,24				
		Indikator Rincian	Jumlah Peta Tematik				2.338.300	2.988.400	37.235,93			39.097,73			2.988.400	3.238.500	39.097,73			41.052,62				
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Tematik Kawasan		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Tematik	2.338.300	2.988.400	37.235,93		39.097,73		2.988.400	3.238.500	39.097,73		41.052,62				
		Kegiatan 4:	Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik																					
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi					60,00%	10.500,00				11.025,00			80,00%	11.025,00			11.576,25				
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik				1	1	500,00			525,00			1	1	525,00			551,25				
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik	1	1	500,00		525,00		1	1	525,00		551,25				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang				1	1	10.000,00			10.500,00			1	1	10.500,00			11.025,00				
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Dan Ruang		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang	1	1	10.000,00		10.500,00		1	1	10.500,00		11.025,00				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)											Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
	Indikator Kinerja Program	2. Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang																			Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang			
SPPR	Kegiatan 3:	Penyediaan Peta Tematik																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir						100,00%	43.881,85				46.075,95			2.566,20	39.802,13	41.792,24	43.881,85	46.075,95	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Peta Tematik Kawasan					150.000	150.000	2.829,24				2.970,70			2.566,20	2.566,20	2.694,51	2.829,24	2.970,70			
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Peta Tematik Kawasan		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Peta Tematik Kawasan	150.000	150.000	2.829,24		2.970,70			2.566,20	2.566,20	2.694,51	2.829,24	2.970,70			
		Indikator Rincian	Jumlah Peta Tematik					3.238.500	3.040.600	41.052,62				43.105,25				37.235,93	39.097,73	41.052,62	43.105,25			
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Tematik Kawasan		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Tematik	3.238.500	3.040.600	41.052,62		43.105,25				37.235,93	39.097,73	41.052,62	43.105,25			
	Kegiatan 4:	Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik																						
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi						100,00%	11.576,25				12.155,06			5.872,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
		Indikator Rincian Output	Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik					1	1	551,25				578,81			60,00	500,00	525,00	551,25	578,81			
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik		AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik	1	1	551,25		578,81			60,00	500,00	525,00	551,25	578,81			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang					1	1	11.025,00				11.576,25			5.812,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			
				5544 - Survei dan Pemetaan Tematik	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Dan Ruang		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang	1	1	11.025,00		11.576,25			5.812,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Sasaran Program 2	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat														
		Indikator Kinerja Program	Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan						80%						80%		
	SPPR	Kegiatan 5:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial														
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten						Persentase								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten						58						19,52%	203,35	
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Surveyor Berlisensi												2.740	150,00	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	002 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	002 - SK Surveyor Berlisensi	Orang	13.697				2.740	150,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemberian izin Menteri (KJSB)												20	5,00	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Pemberian izin Menteri (KJSB)		ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Pemberian izin Menteri (KJSB)	Lembaga	215				20	5,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL							APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Sasaran Program 2	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																			
		Indikator Kinerja Program	Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan						80%							80%	80%					
	SPPR	Kegiatan 5:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial																			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten						19,52%		203,35			203,35		38,75%	203,35			343,70		
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Surveyor Berlisensi						2.740		150,00		0	150,00		2.740	2.700	150,00			270,00	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	002 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	002 - SK Surveyor Berlisensi	2.740		150,00		150,00		2.740	2.700	150,00			270,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemberian izin Menteri (KJSB)						20		5,00		0	5,00		20	20	5,00			6,50	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Pemberian izin Menteri (KJSB)		ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Pemberian izin Menteri (KJSB)	20		5,00		5,00		20	20	5,00			6,50	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO					II. PENDANAAN															
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028							
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
		Sasaran Program 2	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																				
		Indikator Kinerja Program	Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan						80%	80%							80%	80%					
SPPR	Kegiatan 5:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial																					
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten						59,40%	343,70				347,39			83,62%	347,39			356,25		
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Surveyor Berlisensi						2.700	2.900	270,00			270,00			2.900	3.400	270,00			275,00	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	002 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	002 - SK Surveyor Berlisensi	2.700	2.900	270,00		270,00			2.900	3.400	270,00			275,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemberian izin Menteri (KJSB)						20	20	6,50			6,83			20	20	6,83			7,17	
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Pemberian izin Menteri (KJSB)		ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Pemberian izin Menteri (KJSB)	20	20	6,50		6,83			20	20	6,83			7,17	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
		Sasaran Program 2	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																					
		Indikator Kinerja Program	Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan						80%	80%												Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
	SPPR	Kegiatan 5:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial																					
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten						100,00%	356,25			360,32				203,35	343,70	347,39	356,25	360,32	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Surveyor Berlisensi						3.400	2.300	275,00			275,00			150,00	270,00	270,00	275,00	275,00			
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	002 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	002 - SK Surveyor Berlisensi	3.400	2.300	275,00		275,00			150,00	270,00	270,00	275,00	275,00			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemberian izin Menteri (KJSB)						20	20	7,17			7,52			5,00	6,50	6,83	7,17	7,52			
				5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Pemberian izin Menteri (KJSB)		ADF - Sertifikasi Lembaga	001 - Pemberian izin Menteri (KJSB)	20	20	7,17		7,52			5,00	6,50	6,83	7,17	7,52			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi												967	48,35	
					6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi	Orang	800					967	48,35
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir														
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir														1.537,63
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500													2.365	70,95
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	Bidang	1630					2.365	70,95
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000													1.612	48,36
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	Bidang	8299					1.612	48,36
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000													88.645	1.418,32
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	Hektar	65202					88.645	1.418,32

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi							967		48,35		0	48,35		967	800	48,35			67,20			
				6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi	967		48,35			48,35		967	800	48,35			67,20			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir									1.537,63			1.537,63				1.537,63			2.509,48			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500							2.365		70,95		0	70,95		2.365	2.354	70,95			70,62			
				6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	2.365		70,95			70,95		2.365	2.354	70,95			70,62			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000							1.612		48,36		0	48,36		1.612	15.842	48,36			475,26			
				6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	1.612		48,36			48,36		1.612	15.842	48,36			475,26			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000							88.645		1.418,32		0	1.418,32		88.645	122.725	1.418,32			1.963,60			
				6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	88.645		1.418,32			1.418,32		88.645	122.725	1.418,32			1.963,60			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																		
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																		
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028												
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi							800	500	67,20				70,56				500	400	70,56				74,09		
					6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi	800	500	67,20				70,56				500	400	70,56				74,09		
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir																									
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir									2.509,48				2.634,95						2.634,95				2.766,70		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500							2.354	2.354	70,62				74,15				2.354	2.354	74,15				77,86		
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	2.354	2.354	70,62				74,15				2.354	2.354	74,15				77,86		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000							15.842	15.842	475,26				499,02				15.842	15.842	499,02				523,97		
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	15.842	15.842	475,26				499,02				15.842	15.842	499,02				523,97		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000							122.725	122.725	1.963,60				2.061,78				122.725	122.725	2.061,78				2.164,87		
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	122.725	122.725	1.963,60				2.061,78				122.725	122.725	2.061,78				2.164,87		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029			
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi						400	300	74,09				77,79			48,35	67,20	70,56	74,09	77,79	
					6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi	400	300	74,09			77,79			48,35	67,20	70,56	74,09	77,79	
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir																				
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir									2.766,70			2.905,04			1.537,63	2.509,48	2.634,95	2.766,70	2.905,04	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500						2.354	2.354	77,86				81,75			70,95	70,62	74,15	77,86	81,75	
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	2.354	2.354	77,86			81,75			70,95	70,62	74,15	77,86	81,75	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000						15.842	15.842	523,97				550,17			48,36	475,26	499,02	523,97	550,17	
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	15.842	15.842	523,97			550,17			48,36	475,26	499,02	523,97	550,17	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000						122.725	122.725	2.164,87				2.273,11			1.418,32	1.963,60	2.061,78	2.164,87	2.273,11	
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	122.725	122.725	2.164,87			2.273,11			1.418,32	1.963,60	2.061,78	2.164,87	2.273,11	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.															
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.													100%	198.774,80	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)													1.281.985	155.209,20	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	Bidang	1218379					1.281.985	155.209,20	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)													932	23.053,69	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	Bidang	776					932	23.053,69	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)													0		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	Bidang	0					0		
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha													57	16.359,71	
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha	Layanan	9186					57	16.359,71	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)													7	1.951,28	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	Bidang	16					7	1.951,28	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																								
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026												
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.																									
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.							100%			200.135,30			200.135,30						265.680,88						
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)							1.281.985			155.300,27			0	155.300,27			0	1.243.785			203.473,06				
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	1.281.985			155.300,27					155.300,27			1.243.785			203.473,06			
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)							932			23.053,69			0	23.053,69			0	1.294				38.104,32			
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	932			23.053,69					23.053,69			1.294				38.104,32		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)							750			713,66			0	713,66			0	750					713,66		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	750			713,66					713,66			750				713,66		
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha							57			16.359,71			0	16.359,71			0	57					16.359,71		
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha	57			16.359,71					16.359,71			57				16.359,71		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)							7			2.109,92			0	2.109,92			0	27.150					5.275,47		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	7			2.109,92					2.109,92			27.150				5.275,47		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN													
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.								100%				293.723,17			100%				307.583,94			
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)							0	1.243.785				213.646,72			0	1.243.785				224.329,05		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		1.243.785				213.646,72				1.243.785				224.329,05		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)							0	1.294				39.009,54			0	1.294				40.960,01		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)		1.294				39.009,54				1.294				40.960,01		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)							0	0							0	0						
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)		0								0						
			Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha							0	57				17.177,70			0	57				18.036,59		
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha		57				17.177,70				57				18.036,59		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)							0	27.150				5.539,25			0	27.150				5.816,21		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		27.150				5.539,25				27.150				5.816,21		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)										Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.							100%				322.125,76			198.774,80	265.680,88	293.723,17	307.583,94	322.125,76	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)							0	1.243.785				235.545,50		155.209,20	203.473,06	213.646,72	224.329,05	235.545,50	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		1.243.785				235.545,50		155.209,20	203.473,06	213.646,72	224.329,05	235.545,50	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)							0	1.294				42.998,01		23.053,69	38.104,32	39.009,54	40.960,01	42.998,01	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)		1.294				42.998,01		23.053,69	38.104,32	39.009,54	40.960,01	42.998,01	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)							0	0							713,66				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)		0							713,66				
		Indikator Rincian Output	Jumlah PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha							0	57				18.938,41		16.359,71	16.359,71	17.177,70	18.036,59	18.938,41	
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha		57				18.938,41		16.359,71	16.359,71	17.177,70	18.036,59	18.938,41	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)							0	27.150				6.106,02		1.951,28	5.275,47	5.539,25	5.816,21	6.106,02	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		27.150				6.106,02		1.951,28	5.275,47	5.539,25	5.816,21	6.106,02	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)												7	199,32	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	Bidang	1256					7	199,32
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/ Scan/ Fotocopy/Printout Digital Warkah													2.090	83,60
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/ S can/ Fotocopy/Print out Digital Warkah		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/ S can/ Fotocopy/Print out Digital Warkah	Bidang	906					2.090	83,60
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi													12.302	246,04
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi	Bidang	34967					12.302	246,04
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)													34.967	405,62
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	Bidang	11123					34.967	405,62

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)							7					0			0	9				371,73		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	7								9				371,73			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Printout Digital Warkah							2.090		83,60			0	83,60		0	2.090				70,80		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Print out Digital Warkah		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Print out Digital Warkah	2.090		83,60				83,60		2.090				70,80			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi							12.302		246,04			0	246,04		0	14.680				293,60		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi	12.302		246,04				246,04		14.680				293,60			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)							34.967		405,62			0	405,62		0	26.880				311,81		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	34.967		405,62				405,62		26.880				311,81			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN													
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)							0	9				390,32			0	9				409,83		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)		9				390,32				9				409,83		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/ Scan/ Fotocopy/Printout Digital Warkah							0	1.770				74,34			0	1.770				78,06		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/ Scan/ Fotocopy/ Print out Digital Warkah		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/ Scan/ Fotocopy/ Print out Digital Warkah		1.770				74,34				1.770				78,06		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi							0	14.680				308,28			0	14.680				323,69		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi		14.680				308,28				14.680				323,69		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)							0	26.880				327,40			0	26.880				343,77		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)		26.880				327,40				26.880				343,77		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)						0	9					430,32			199,32	371,73	390,32	409,83	430,32	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	9					430,32			199,32	371,73	390,32	409,83	430,32	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/ Fotocopy/Printout Digital Warkah						0	1.770					81,96			83,60	70,80	74,34	78,06	81,96	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/ Fotocopy/Print out Digital Warkah		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/ Fotocopy/Print out Digital Warkah	1.770					81,96			83,60	70,80	74,34	78,06	81,96	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi						0	14.680					339,88			246,04	293,60	308,28	323,69	339,88	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Informasi Tekstual/ Grafikal untu Surveyor Berlisensi	14.680					339,88			246,04	293,60	308,28	323,69	339,88	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)						0	26.880					360,96			405,62	311,81	327,40	343,77	360,96	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	26.880					360,96			405,62	311,81	327,40	343,77	360,96	

Program / Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun												11.123	169,07	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun	Bidang	25553					11.123	169,07
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)													25.553	500,84
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)	Bidang	62119					25.553	500,84
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Legalisasi Gambar Ukur													62.129	596,44
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur	Bidang						62.129	596,44
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan /Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah													0	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan/Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan/Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah	Bidang						0	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun							11.123		169,07		0	169,07		0	7.105				108,00		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun	11.123		169,07			169,07			7.105				108,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)							25.553		500,84		0	500,84		0	20.129				394,53		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)	25.553		500,84			500,84			20.129				394,53		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Legalisasi Gambar Ukur							62.129		596,44		0	596,44		0	23.135				204,19		
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur	62.129		596,44			596,44			23.135				204,19		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan /Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah							62.129		596,44		0	596,44		0	0						
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan/Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan/Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah	62.129		596,44			596,44			0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun						0	7.105				113,40			0	7.105				119,07				
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun			7.105				113,40				7.105			119,07		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)						0	20.129					414,25			0	20.129				434,97			
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)			20.129				414,25				20.129			434,97		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Legalisasi Gambar Ukur						0	23.135					214,40			0	23.135				225,11			
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur			23.135				214,40				23.135			225,11		
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan /Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah						0	101					16.507,58			0	101				16.507,58			
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan/Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan/Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah			101				16.507,58				101			16.507,58		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029			
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun							0	7.105					124,02			169,07	108,00	113,40	119,07	124,02	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun		7.105					124,02			169,07	108,00	113,40	119,07	124,02	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)							0	20.129					456,72			500,84	394,53	414,25	434,97	456,72	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)		20.129					456,72			500,84	394,53	414,25	434,97	456,72	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Legalisasi Gambar Ukur							0	23.135					236,38			596,44	204,19	214,40	225,11	236,38	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur		23.135					236,38			596,44	204,19	214,40	225,11	236,38	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/ Pemisahan/ Pelepasan/ Penggabungan Bidang Tanah/ Peningkatan Kualitas Bidang Tanah							0	101					16.507,58					16.507,58	16.507,58	16.507,58	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/ Pemisahan/ Pelepasan/ Penggabungan Bidang Tanah/ Peningkatan Kualitas Bidang Tanah		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/ Pemisahan/ Pelepasan/ Penggabungan Bidang Tanah/ Peningkatan Kualitas Bidang Tanah		101					16.507,58					16.507,58	16.507,58	16.507,58	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025				
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN													
Tujuan 5: Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata																
Indikator Kinerja Tujuan				Indeks Reformasi Birokrasi												86
Program: 1.Dukungan Manajemen Internal																
Sasaran Strategis 6:				Meningkatnya tata kelola												
ORPEG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		6.1	Indeks Reformasi Birokrasi							86					86
	Sasaran Program 1			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincuh dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional												
Biroren	Indikator Kinerja Program			Capaian Akuntabilitas Kinerja						Indeks	70					75,9
Birokeu				Capaian Akuntabilitas Keuangan						Persentase	93,28					93,50
Orpeg/ Ortala MR				Indeks Pelayanan Publik						Persentase	4,59				5	1.634,82
Orpeg/ Ortala MR				Indeks Kepuasan Masyarakat							90				91	100,00
Pusdatin				Indeks SPBE						Indeks	4,38				4,41	12.467,36
Setitjen				Nilai Survei Penilaian Integritas						Indeks	75,88				77	
Orpeg/ SDM				Indeks BerAKHLAK						Indeks	80				84	250,00
Birokeu				Opini BPK						Nilai	WTP				WTP	
Birorum				Layanan Perkantoran						Indeks	100					
Biro Hukum				Indeks Reformasi Hukum											88	4.354,74
Setitjen				Tingkat Keberhasilan Zona Integritas							1				1	1.713,64

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN												
Tujuan 5: Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata																									
	Indikator Kinerja Tujuan			Indeks Reformasi Birokrasi							90							92							
	Program: 1.Dukungan Manajemen Internal																								
Sasaran Strategis 6:																									
ORPEG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Meningkatnya tata kelola	Indeks Reformasi Birokrasi							90								92							
	Sasaran Program 1		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional																						
Biroren	Indikator Kinerja Program		Capaian Akuntabilitas Kinerja							80,52								82,94							
Birokeu			Capaian Akuntabilitas Keuangan							94,1								94,4							
Orpeg/ Ortala MR			Indeks Pelayanan Publik							4,62				1.802,39				4,63				1.892,51			
Orpeg/ Ortala MR			Indeks Kepuasan Masyarakat							93				110,25				94				115,76			
Pusdatin			Indeks SPBE							4,43				81.788,43				4,44				94.056,70			
Setitjen			Nilai Survei Penilaian Integritas							82				2,73				83				2,87			
Orpeg/ SDM			Indeks BerAKHLAK							92				280,00				96				295,00			
Birokeu			Opini BPK							WTP								WTP							
Birorum			Layanan Perkantoran							100								100							
Biro Hukum			Indeks Reformasi Hukum							89				5.738,38				89,5				5.817,82			
Setitjen			Tingkat Keberhasilan Zona Integritas							2				1.889,29				3				1.983,75			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
Tujuan 5: Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata																						
Indikator Kinerja Tujuan				Indeks Reformasi Birokrasi																		
Program: 1.Dukungan Manajemen Internal																						
Sasaran Strategis 6:				Meningkatnya tata kelola																		
ORPEG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	6.1	Indeks Reformasi Birokrasi																		Sekretariat Jenderal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota	
	Sasaran Program 1			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional																		
Biroren	Indikator Kinerja Program			Capaian Akuntabilitas Kinerja						85,43												
Birokeu				Capaian Akuntabilitas Keuangan						94,7												
Orpeg/Ortala MR				Indeks Pelayanan Publik						4,64				1.987,14		1.634,82	1.716,56	1.802,39	1.892,51	1.987,14		
Orpeg/Ortala MR				Indeks Kepuasan Masyarakat						95				121,55		100,00	105,00	110,25	115,76	121,55		
Pusdatin				Indeks SPBE						4,45				108.165,20		12.467,36	40.685,59	81.788,43	94.056,70	108.165,20		
Setitjen				Nilai Survei Penilaian Integritas						85				3,01			2,60	2,73	2,87	3,01		
Orpeg/SDM				Indeks BerAKHLAK						100				310,00		250,00	265,00	280,00	295,00	310,00		
Birokeu				Opini BPK						WTP												
Birorum				Layanan Perkantoran						100												
Biro Hukum				Indeks Reformasi Hukum						90				5.898,38		4.354,74	4.430,03	5.738,38	5.817,82	5.898,38		
Setitjen				Tingkat Keberhasilan Zona Integritas						3				2.082,94		1.713,64	1.799,32	1.889,29	1.983,75	2.082,94		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	BIRO SDM	Kegiatan 1:	Pembinaan Sumber Daya Manusia							Indeks						4.776,89	
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi							Indeks							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi Kualifikasi Pendidikan, Disiplin, Kinerja dan Kompetensi								50				65	698,35	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	Layanan						698,35	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia							Indeks	100				100	1.855,55	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	Layanan						1.855,55	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Karier Pegawai berbasis Manajemen Talenta							Persentase	100				100	746,77	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	Layanan						746,77	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penataan Pegawai yang Sesuai Ketentuan							Persentase	0				90	385,85	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	Layanan						385,85	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							Persentase	90				90	1.090,37	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Layanan						984,82	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	Unit						105,56	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																						
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																			
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026							
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
BIRO SDM	Kegiatan 1:	Pembinaan Sumber Daya Manusia								984,82	3.792,07			4.776,89								2.654,28			
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi Kualifikasi Pendidikan, Disiplin, Kinerja dan Kompetensi							65		698,35			698,35			65					403,91		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM			698,35			698,35							403,91			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia							100		1.855,55			1.855,55			100				854,41			
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM			1.855,55			1.855,55							854,41			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Karier Pegawai berbasis Manajemen Talenta							100		746,77			746,77			100				596,48			
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM			746,77			746,77							596,48			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penataan Pegawai yang Sesuai Ketentuan							90		385,85			385,85			90				601,98			
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM			385,85			385,85							601,98			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							90	984,82	105,56			1.090,37			90				197,50			
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		984,82				984,82							167,50			
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal			105,56			105,56							30,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
	BIRO SDM	Kegiatan 1:	Pembinaan Sumber Daya Manusia										3.072,65			4.776,89	2.654,28	2.786,99	2.905,13	3.072,65	Biro Sumber Daya Manusia	
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi Kualifikasi Pendidikan, Disiplin, Kinerja dan Kompetensi							65			467,57			698,35	403,91	424,11	424,11	467,57	Biro Sumber Daya Manusia	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				467,57			698,35	403,91	424,11	424,11	467,57		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia							100			989,08			1.855,55	854,41	897,13	941,98	989,08	Biro Sumber Daya Manusia	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				989,08			1.855,55	854,41	897,13	941,98	989,08		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengelolaan Karier Pegawai berbasis Manajemen Talenta							100			690,50			746,77	596,48	626,30	657,62	690,50	Biro Sumber Daya Manusia	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				690,50			746,77	596,48	626,30	657,62	690,50		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penataan Pegawai yang Sesuai Ketentuan							90			696,87			385,85	601,98	632,08	663,68	696,87	Biro Sumber Daya Manusia	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				696,87			385,85	601,98	632,08	663,68	696,87		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							90			228,63			1.090,37	197,50	207,38	217,74	228,63	Biro Sumber Daya Manusia	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				193,90			984,82	167,50	175,88	184,67	193,90		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal				34,73			105,56	30,00	31,50	33,08	34,73		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
BIRO ORTALA MR	Kegiatan 1:	Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko															
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima														1.389,38
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan													90	440,58
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan						90	440,58
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran													0	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Layanan						0	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	Unit	0					0	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi													90	605,77
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan						90	605,77
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan							Persentase	0	0				100	343,03
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan						100	343,03
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks SPIP & MRI							Persentase	0	0				0	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen							
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan							
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
BIRO ORTALA MR	Kegiatan 1:	Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko																						
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima							280		1.389,38			1.389,38			527				2.662,28		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan							90		440,58			440,58			92				550,55		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	90		440,58		440,58			92				550,55			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							0							0	138				460,00		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	0								100				167,50		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	0								38				292,50		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi							90		605,77			605,77		0	93				550,44		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	90		605,77		605,77			93				550,44			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan							100		343,03			343,03		0	100				558,44		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100		343,03		343,03			100				558,44			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks SPIP & MRI							0							0	104				542,84		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0								3				28,10		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi									100				356,76		
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja									1				157,98		

Program/ Kegiatan			Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
BIRO ORTALA MR	Kegiatan 1:	Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko																								
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima						534					2.837,39				540				2.979,25				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan						94					578,07				96				606,97				
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	94				578,07				96				606,97				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						0	140				483,00			0	142				507,15				
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	100				175,88				100				184,67				
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	40				307,13				42				322,48				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi						0	96				577,97			0	98				606,86				
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	96				577,97				98				606,86				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan						0	100				586,37			0	100				615,68				
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100				586,37				100				615,68				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks SPIP & MRI						0	104				611,99			0	104				642,58				
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3				29,51				3				30,98				
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100				374,60				100				393,33				
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja	1				207,88				1				218,28				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)											Unit Organisasi Pelaksana	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
BIRO ORTALA MR	Kegiatan 1:	Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko																			Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima							548				3.322,12			1.389,38	2.662,28	2.837,39	2.979,25	3.322,12	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan							100				637,32			440,58	550,55	578,07	606,97	637,32	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		100			637,32			440,58	550,55	578,07	606,97	637,32	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhihnya Layanan Perkantoran							0	144			726,41				460,00	483,00	507,15	726,41	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		100			387,80				167,50	175,88	184,67	387,80	
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		44			338,61				292,50	307,13	322,48	338,61	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi							0	100			637,21			605,77	550,44	577,97	606,86	637,21	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		100			637,21			605,77	550,44	577,97	606,86	637,21	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan							0	100			646,47			343,03	558,44	586,37	615,68	646,47	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
				5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		100			646,47			343,03	558,44	586,37	615,68	646,47	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks SPIP & MRI							0	104			674,71				542,84	611,99	642,58	674,71	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
			5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		3			32,53				28,10	29,51	30,98	32,53		
			5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		100			412,99				356,76	374,60	393,33	412,99		
			5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja	8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja		1			229,19				157,98	207,88	218,28	229,19		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO								
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai												4		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik													88	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi							Skor						100	
	BIRO HUKUM	Kegiatan	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitas Bantuan Hukum								Persentase							
			Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas							Persentase							
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan								100%					100%	4.960,00
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAA - Undang-Undang	001 - Rancangan Undang-Undang				RUU							
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAC - Peraturan Pemerintah	001 - Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang				RPP							
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAD - Peraturan Presiden	001 - Peraturan Presiden Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang				RPerpres							
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAG - Peraturan Menteri	001 - Peraturan Menteri Di Bidang Penataan Ruang, Penataan Agraria, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Serta Pengaturan Layanannya				Peraturan Menteri							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025							Tahun 2026							
												Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai						5								5								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik						88								89								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi						100								100								
BIRO HUKUM	Kegiatan	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitas Bantuan Hukum								800,00	3.554,74			4.354,74						3.664,74					
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas							800,00	2.881,18									2.996,60					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan								1.458,58						100%			1.276,55					
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAA - Undang-Undang	001 - Rancangan Undang-Undang																			
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAC - Peraturan Pemerintah	001 - Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang			2		278,58						2			320,45					
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAD - Peraturan Presiden	001 - Peraturan Presiden Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang			4		125,00						1			65,00					
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAG - Peraturan Menteri	001 - Peraturan Menteri Di Bidang Penataan Ruang, Penataan Agraria, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Serta Pengaturan Layanannya			5		655,00						5			560,00					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028								
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai							5								5							
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik							90								92							
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi							100								100							
BIRO HUKUM	Kegiatan	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitas Bantuan Hukum													13.005,00									12.080,00		
		Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas												8.605,00									7.280,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan								100%				4.955,00				100%					3.630,00		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAA - Undang-Undang	001 - Rancangan Undang-Undang				3				2.835,00				2					1.890,00		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAC - Peraturan Pemerintah	001 - Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang				1				520,00				2					1.040,00		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAD - Peraturan Presiden	001 - Peraturan Presiden Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang																			
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAG - Peraturan Menteri	001 - Peraturan Menteri Di Bidang Penataan Ruang, Penataan Agraria, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Serta Pengaturan Layanannya				6				800,00				2					300,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai									5										
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik									93										
			Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi									100										
BIRO HUKUM	Kegiatan		Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitas Bantuan Hukum												11.855,00			3.664,74	13.005,00	12.080,00	11.855,00	Biro Hukum	
			Sasaran Kegiatan 1	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas											6.655,00			2.996,60	8.605,00	7.280,00	6.655,00		
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan									100%				4.960,00	1.276,55	4.955,00	3.630,00	3.005,00	Biro Hukum	
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAA - Undang-Undang	001 - Rancangan Undang-Undang						1			945,00				2.835,00	1.890,00	945,00	
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAC - Peraturan Pemerintah	001 - Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang						1			520,00			320,45	520,00	1.040,00	520,00	
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAD - Peraturan Presiden	001 - Peraturan Presiden Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang						1			440,00			65,00			440,00	
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	AAG - Peraturan Menteri	001 - Peraturan Menteri Di Bidang Penataan Ruang, Penataan Agraria, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Serta Pengaturan Layanannya						3			500,00			560,00	800,00	300,00	500,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AAG - Peraturan Menteri	002 - Peraturan Menteri Mengenai Survei Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan				Peraturan Menteri							
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan								100%					100%	1.000,00
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				Kegiatan							
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan							Persentase	100%					100%	1.000,00
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kebijakan mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang				Rekomendasi Kebijakan							
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Penataan database peraturan perundang-undangan							Persentase	100%					100%	1.000,00
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum				Layanan							
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama							Persentase	100%					100%	100,00
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AEC - Kerja sama	001 - Naskah Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang				MoU/PKS							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AAG - Peraturan Menteri	002 - Peraturan Menteri Mengenai Survei Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan				2		400,00						4				331,10			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan															100%				168,80		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Sosiialisasi Peraturan Perundang-undangan												2				168,80		
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan								616,87							100%				629,65		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kebijakan mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang			2		616,87			616,87			3				629,65			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Penataan database peraturan perundang-undangan								385,90			385,90			100%				376,77			
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum			1		385,90			385,90			1				376,77			
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama								43,48			43,48			100%				14,83			
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AEC - Kerja sama	001 - Naskah Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang			4		43,48			43,48			3				14,83			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028					
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AAG - Peraturan Menteri	002 - Peraturan Menteri Mengenai Survei Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan				4				800,00				2				400,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan							100%				1.000,00				100%				1.000,00		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				3				1.000,00				3				1.000,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan							100%				1.000,00				100%				1.000,00		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kebijakan mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang				2				1.000,00				2				1.000,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Penataan database peraturan perundang-undangan							100%				1.000,00				100%				1.000,00		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum				1				1.000,00				1				1.000,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama							100%				100,00				100%				100,00		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AEC - Kerja sama	001 - Naskah Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang				2				100,00				2				100,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AAG - Peraturan Menteri	002 - Peraturan Menteri Mengenai Survei Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan					3				600,00			331,10	800,00	400,00	600,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan								100%				1.000,00		1.000,00	168,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Biro Hukum		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					3				1.000,00			168,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan								100%				1.000,00		1.000,00	629,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Biro Hukum		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kebijakan mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang					2				1.000,00			629,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Penataan database peraturan perundang-undangan								100%				1.000,00		1.000,00	376,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Biro Hukum		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum					1				1.000,00			376,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama								100%				100,00		100,00	14,83	100,00	100,00	100,00	Biro Hukum		
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	AEC - Kerja sama	001 - Naskah Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang					2				100,00			14,83	100,00	100,00	100,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							Persentase	100%					100%	550,00
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				Layanan							
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Layanan							
		Sasaran Kegiatan 2	Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan								100%					100%	4.000,00
				5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				Layanan							
PUSDATIN	Kegiatan 1:	Pengembangan Data dan Informasi								Persentase							
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik														
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Peningkatan kualitas informasi								3,7					3,8	5.664,93
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Sistem Informasi Pertanian dan Ruang				BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Sistem Informasi Pertanian dan Ruang					1	2.500,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran								800,00	376,34			1.176,34			100%				530,00		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1	800,00				800,00			1				110,00		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				1		376,34			376,34			1				420,00		
			Sasaran Kegiatan 2	Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum									673,56			673,56							668,14		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan									673,56			673,56			100%				668,14		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				1		673,56			673,56			1				668,14		
PUSDATIN	Kegiatan 1:	Pengembangan Data dan Informasi																							
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Peningkatan kualitas informasi																3,9				6.514,66		
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang	1		2.500,00			2.500,00	2.500,00		1				2.875,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028								
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN												
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase Terpenuhiya Layanan Perkantoran							100%				550,00				100%				550,00		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1				25,00				1				30,00		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				1				525,00				1				520,00		
			Sasaran Kegiatan 2	Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum											4.400,00								4.800,00		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan							100%				4.400,00				100%				4.800,00		
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				1				4.400,00				1				4.800,00		
PUSDATIN	Kegiatan 1:	Pengembangan Data dan Informasi																							
			Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Peningkatan kualitas informasi							4,0				7.491,86				4,1				8.615,64		
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang			BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Sistem Pertanahan dan Ruang	1				3.306,25			1				3.802,19		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	Non APBN	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029		
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)												
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran									100%				550,00			550,00	530,00	550,00	550,00	Biro Hukum	
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran						1				75,00				110,00	25,00	30,00	75,00	
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						1				475,00				420,00	525,00	520,00	475,00	
			Sasaran Kegiatan 2	Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum													5.200,00				668,14	4.400,00	4.800,00	5.200,00	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan									100%				5.200,00			4.000,00	668,14	4.400,00	4.800,00	5.200,00	Biro Hukum
					5523 - Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum						1				5.200,00				668,14	4.400,00	4.800,00	5.200,00	
PUSDATIN	Kegiatan 1:	Pengembangan Data dan Informasi																						Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang	
			Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Peningkatan kualitas informasi									4,2				9.907,99			5.664,93	6.514,66	7.491,86	8.615,64	9.907,99	Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang			1				4.372,52			2.500,00	2.875,00	3.306,25	3.802,19	4.372,52	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase peningkatan layanan elektronik							Indeks	100%					60%	351,42
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L		FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L							1	351,42
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran							Persentase	100%					100%	124.085,52
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran							1	123.470,25
			Sasaran Kegiatan 2	Terkelolanya sistem teknologi informasi							Persentase							
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi								3,8					3,9	17.090,66
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi	Layanan						1	25.814,85
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang							Indeks	25%					26%	247,59
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi							1	247,59
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi							Persentase	4,38					4,38	12.467,36
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang		CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang							1	7.523,36
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE							Indeks	3					3	100,00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase peningkatan layanan elektronik														70%				404,13			
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L		FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L	1		351,42			351,42	351,42	1				351,42			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran														100%				142.698,35			
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1	123.470,25				123.470,25	123.470,25	1				141.990,79			
		Sasaran Kegiatan 2	Terkelolanya sistem teknologi informasi																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi														4,0				19.654,26			
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi	1		25.814,85			25.814,85	25.814,85	1				29.687,07			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang														27%				284,72			
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1		247,59			247,59	247,59	1				247,59			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi														4,39				40.685,59			
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang		CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang	1		7.523,36			7.523,36	7.523,36	1				8.651,87			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE														4				2.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN													
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase peningkatan layanan elektronik								80%				464,75				90%				534,47		
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L		FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L		1				351,42				1				351,42		
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran								100%				164.103,10				100%				188.718,56		
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1				163.289,41				1				187.782,82		
			Sasaran Kegiatan 2	Terkelolanya sistem teknologi informasi																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi								4,1				22.602,40				4,2				25.992,76		
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		1				34.140,14				1				39.261,16		
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang								28%				327,43				29%				376,55		
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1				247,59				1				247,59		
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi								4,40				81.788,43				4,41				94.056,70		
					5522 - Pengembangan Data dan Informasi	CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang		CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang		1				9.949,65				1				11.442,09		
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE								5								5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029			
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase peningkatan layanan elektronik																					
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L		FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L															
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran																					
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran															
		Sasaran Kegiatan 2	Terkelolanya sistem teknologi informasi																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi																					
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi															
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang																					
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi															
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi																					
				5522 - Pengembangan Data dan Informasi	CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang		CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang															
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE																					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
BIROREN	Kegiatan 1:	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi														
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi													
	Indikator Kinerja Kegiatan	1.Persentase Kesesuaian Jumlah Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran Prioritas Nasional pada DIPA terhadap Renstra						Persentase					90			
		2. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional						Nilai	95,64				97			
		3.Persentase revisi pada output kegiatan						Persentase					<20%	1.290.956,21		
		4.Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran						Persentase					<6%	387.286,86		
		5.Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun diluar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN						Persentase					10	20.000,00		
		6.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Movey Kementerian Keuangan						Nilai					80			
		7.Persentase Unit dan Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A						Persentase					55%			
		8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						Persentase					100%			
		5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	AEC - Kerja sama	001 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
BIROREN	Kegiatan 1:	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi																						
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Persentase Kesesuaian Jumlah Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran Prioritas Nasional pada DIPA terhadap Renstra						90							90%								
			2. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional						97							98								
			3.Persentase revisi pada output kegiatan						<20%							<20%				1.316.517,14				
			4.Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran						<6%							<6%				394.955,14				
			5.Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun diluar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN						1000%							10%				658.258,57				
			6.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Monev Kementerian Keuangan						80							80								
			7.Persentase Unit dan Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A						55%							55%								
			8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						100%							100%								
			5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	AEC - Kerja sama	001 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri				19		899,62			899,62	899,62		1				926,61			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
BIOREN	Kegiatan 1:	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi																			Biro Perencanaan dan Organisasi
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi																		
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Persentase Kesesuaian Jumlah Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran Prioritas Nasional pada DIPA terhadap Renstra						98%												Biro Perencanaan dan Organisasi
			2. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional						100												Biro Perencanaan dan Organisasi
			3.Persentase revisi pada output kegiatan						<20%				1.417.320,61			1.290.956,21	1.316.517,14	1.345.348,87	1.380.193,40	1.417.320,61	Biro Perencanaan dan Organisasi
			4.Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran						<6%				425.196,18			387.286,86	394.955,14	403.604,66	414.058,02	425.196,18	Biro Perencanaan dan Organisasi
			5.Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun diluar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN										708.660,30			20.000,00	658.258,57	672.674,43	690.096,70	708.660,30	Biro Perencanaan dan Organisasi
			6.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Monev Kementerian Keuangan						98												Biro Perencanaan dan Organisasi
			7.Persentase Unit dan Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A						70%												Biro Perencanaan dan Organisasi
			8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						100%												Biro Perencanaan dan Organisasi
			S519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	AEC - Kerja sama	001 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri				1				1.012,53				926,61	954,40	983,04	1.012,53	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	AEC - Kerja sama	002 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri											
			5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran											
			5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal											
			5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran											
			5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi											
BIROKEU	Kegiatan 1:	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN														
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset													
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)										93,50	867,85		
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen						
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen						
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Capaian target PNBP							Dokumen	101,33 %			100%	489,07	
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen						
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026			
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
BIROKEU	Kegiatan 1:	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN																				
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)													93,80				1.068,24		
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16		169,93			169,93	169,93	6				162,33		
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi								1200%				905,91		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Capaian target PNBP													100%				522,67		
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran								4				202,70		
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi								4				319,97		

Program / Kegiatan				Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																		
								SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																		
								KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					
																Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
				5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	AEC - Kerja sama	002 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri					1					380,58					1						392,00					
				5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran					1					1.707,67					1						1.758,90					
				5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal					10					179,21					10						184,58					
				5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1					28.284,09					1						29.132,62					
				5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					1					1.107,19					1						1.140,41					
BIROKEU	Kegiatan 1:	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN																														
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset																													
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)								94,10					1.100,28					94,40						1.133,29					
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6						167,20					6						172,21					
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12						933,09					12						961,08					
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Capaian target PNBP								100%					538,35					100%						554,50					
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4						208,78					4						215,05					
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4						329,57					4						339,45					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana					
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)												TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	Non APBN	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
										Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)													
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN																					
BIROKEU	Kegiatan 1:	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN																					Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)								94,70				1.167,29		867,85	1.068,24	1.100,28	1.133,29	1.167,29		Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penggangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penggangan		6			177,38			162,33	167,20	172,21	177,38			
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1200%			989,91			905,91	933,09	961,08	989,91		Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Capaian target PNBP								100%			571,13		489,07	522,67	538,35	554,50	571,13		Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penggangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penggangan		4			221,50			202,70	208,78	215,05	221,50			
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		4			349,64			319,97	329,57	339,45	349,64		Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)					
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Kualitas Laporan Keuangan							Dokumen						90,00%	791,42	
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen								
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Pengelolaan Aset							Persentase						3,40	698,64	
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	Layanan								
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							Indeks						100 %	239.235,47	
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Layanan								
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	Unit								
										Layanan								
	BULP	Kegiatan 1:	Pengelolaan Administrasi Umum							Unit								
		Sasaran Kegiatan 1	Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah															
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan								64,99	70	2.671,50 1.595,11			70	2.671,50	
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan								71,32	72				72	1.595,11	
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik							Indeks								
				5521 - Pengelolaan Administrasi Umum				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	88%	90%				90%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Kualitas Laporan Keuangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028								
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Kualitas Laporan Keuangan							92,50%				1.218,49				94,50%				1.255,05			
					5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4				1.218,49				4				1.255,05			
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Pengelolaan Aset							3,50				988,80				3,55				1.018,46			
					5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	2				988,80				2				1.018,46			
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							100%				749.669,82				100%				787.151,98			
					5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1				749.603,17				1				787.083,32			
					5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	2				66,65				2				68,65			
BULP	Kegiatan 1:	Pengelolaan Administrasi Umum																								
		Sasaran Kegiatan 1	Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah																							
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan								78				1.554,03				82				1.631,73			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan								77				1.384,46				79				1.453,69			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik								93%								94%							
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1				3.459,59				1				3.632,57			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Tahun 2029						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Kualitas Laporan Keuangan									96,50%				1.292,70			791,42	1.183,00	1.218,49	1.255,05	1.292,70	
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		4				1.292,70				1.183,00	1.218,49	1.255,05	1.292,70	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Pengelolaan Aset								3,60				1.049,02			698,64	960,00	988,80	1.018,46	1.049,02		
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		2				1.049,02				960,00	988,80	1.018,46	1.049,02		
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase Terpenuhiya Layanan Perkantoran								100%				826.508,20			239.235,47	2.187.915,00	749.669,82	787.151,98	826.508,20		
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1				826.437,49				2.187.850,29	749.603,17	787.083,32	826.437,49		
				5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		2				70,71				64,71	66,65	68,65	70,71		
BULP	Kegiatan 1:	Pengelolaan Administrasi Umum																						Biro Umum dan Layanan Pengadaan
		Sasaran Kegiatan 1	Terlaksananya Pengelolaan PIBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan								85				1.713,31			2.671,50	1.480,02	1.554,03	1.631,73	1.713,31	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan								81							1.595,11	1.318,54	1.384,46	1.453,69	1.526,37	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik								95%				1.526,37								Biro Umum dan Layanan Pengadaan	
				5521 - Pengelolaan Administrasi Umum				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1				3.814,20				3.294,85	3.459,59	3.632,57	3.814,20		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhihinya Sarana dan Prasarana Kantor Pusat								95%						95%								
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		1				12.400,00	3.675,00			1				17.558,75	4.858,75	
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971 - Layanan Prasarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971 - Layanan Prasarana Internal		1				8.725,00				1				12.700,00		
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanian																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase Terpenuhihinya Layanan Perkantoran								120	95%				125.000,00			122	95%				130.101,99	
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1				81.631,40				1				85.712,97		
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase Terpenuhihinya Pengelolaan Aset																						
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		95%				23.743,97				95%				24.931,17		
BIRO HUMAS	Kegiatan 1:	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol										108.817,68				108.817,68					114.258,56			114.258,56		
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Kehumasan yang Berkualitas untuk Mendukung Citra Positif Kementerian									108.817,68				108.817,68					114.258,56			114.258,56		
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Terpenuhihinya Komunikasi Publik untuk Mendukung Citra Positif Kementerian									95	53.824,25				53.824,25				95	56.515,46			56.515,46	
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		95	53.824,25				53.824,25				95	56.515,46			56.515,46	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhihnya Sarana dan Prasarana Kantor Pusat													7.000,00	9.000,00	12.400,00	17.558,75	20.750,00	Biro Umum dan Layanan Pengadaan		
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		1				4.000,00		3.500,00	3.675,00	4.858,75	4.000,00			
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971 - Layanan Prasarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971 - Layanan Prasarana Internal		1				16.750,00		5.500,00	8.725,00	12.700,00	16.750,00			
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan													44.721,50	120.000,00	125.000,00	130.101,99	153.327,98	Biro Umum dan Layanan Pengadaan		
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase Terpenuhihnya Layanan Perkantoran													63.826,63	77.744,20	81.631,40	85.495,95	89.770,75	Biro Umum dan Layanan Pengadaan		
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1				89.998,62		77.744,20	81.631,40	85.712,97	89.998,62			
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase Terpenuhihnya Pengelolaan Aset													23.973,44	22.613,31	23.743,97	24.931,17	26.177,73	Biro Umum dan Layanan Pengadaan		
					5521 - Pengelolaan Administrasi Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		1				26.177,73		22.613,31	23.743,97	24.931,17	26.177,73			
BIRO HUMAS	Kegiatan 1:	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol											119.971,49			119.971,49		77.182,75	103.635,88	108.817,68	114.258,56	119.971,49	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Tata Kelola Kehumasan yang Berkualitas untuk Mendukung Citra Positif Kementerian											119.971,49			119.971,49		77.182,75	103.635,88	108.817,68	114.258,56	119.971,49	
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Terpenuhihnya Komunikasi Publik untuk Mendukung Citra Positif Kementerian										95	59.341,23			59.341,23		43.984,25	51.261,19	53.824,25	56.515,46	59.341,23	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		95	59.341,23			59.341,23		43.984,25	51.261,19	53.824,25	56.515,46	59.341,23		

Program / Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Terpenuhinya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan						Persentase	100			20.433,99			100%	20.433,99
				4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokoler	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokoler	Layanan							
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						Persentase	1			12.764,52			100%	12.764,52
				4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Unit			11.903,52				11.903,52
				4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	Unit			861,00			60	861,00
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan														
				4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat			4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Terpenuhiya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan							100%		20.433,99			20.433,99	20.433,99		100	35.960,18			35.960,18		
				4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokoler	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokoler	100%		20.433,99			20.433,99	20.433,99		100	35.960,18			35.960,18		
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Terpenuhiya Layanan Perkantoran							100%	11.903,52	861,00			12.764,52	12.764,52		100%	11.700,00			11.700,00		
				4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	100%	11.903,52			11.903,52	11.903,52		95	11.000,00			11.000,00			
				4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	95%		861,00			861,00	861,00		95	700,00			700,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhiya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan									1.200,00						95	4.714,52			4.714,52		
				4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat			4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			1.200,00			1.200,00			95	4.714,52			4.714,52		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028								
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Terpenuhiya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan							100	37.758,19			37.758,19				100	39.646,10			39.646,10			
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokoler	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokoler		100	37.758,19		37.758,19				100	39.646,10			39.646,10			
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Terpenuhiya Layanan Perkantoran							100%	12.285,00			12.285,00				100%	12.899,25			12.899,25			
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		95	11.550,00		11.550,00				95	12.127,50			12.127,50			
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		95	735,00		735,00				95	771,75			771,75			
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhiya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan							95	4.950,24			4.950,24				95	5.197,75			5.197,75			
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat			4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		95	4.950,24		4.950,24				95	5.197,75			5.197,75			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana	
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Terpenuhiya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan						95	41.628,40			41.628,40			20.433,99	35.960,18	37.758,19	39.646,10	41.628,40	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokoler	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokoler	100	41.628,40		41.628,40				35.960,18	37.758,19	39.646,10	41.628,40	
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Terpenuhiya Layanan Perkantoran						100%	13.544,21			13.544,21			12.764,52	11.700,00	12.285,00	12.899,25	13.544,21	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	95	12.733,88		12.733,88			11.903,52	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	95	810,34		810,34			861,00	700,00	735,00	771,75	810,34	
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhiya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan						95	5.457,64			5.457,64				4.714,52	4.950,24	5.197,75	5.457,64	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
					4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat			4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	95	5.457,64		5.457,64				4.714,52	4.950,24	5.197,75	5.457,64	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
											Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
	STPN	Kegiatan 1:	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional dan						Persentase							
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam memperoleh pengetahuan,karakter, dan keterampilan							100					100	13.720,66
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>student body</i> yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanahan agraria dan tata ruang							100					100	13.720,66
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	DBA - Pendidikan Tinggi	001 - Lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				600						
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	DBA - Pendidikan Tinggi	003 - Lulusan Diploma IV/Strata-1 Pertanahan		003 - Lulusan Diploma IV/Strata-1	Persentase	1358						
						968 - Layanan Pendidikan Kedinasan				1						
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	968.Layanan Pendidikan Kedinasan	1						
		Sasaran Kegiatan 2	Terciptanya Penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan kontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi							100					100	1.117,70
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional							100					100	1.117,70
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kajian Akademis				27						1.117,70

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
STPN	Kegiatan 1:	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional dan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	STPN	Kegiatan 1:	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional dan											136.345,65								133.954,08			
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam memperoleh pengetahuan,karakter, dan keterampilan								100				11.822,03				100				12.124,43		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>student body</i> yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanahan agraria dan tata ruang								100				11.822,03				100				12.124,43		
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	DBA - Pendidikan Tinggi	001 - Lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral					0								0						
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	DBA - Pendidikan Tinggi	003 - Lulusan Diploma IV/Strata-1 Pertanahan			003 - Lulusan Diploma IV/Strata-1	1.907				7.174,15				1.602				7.532,78			
						968 - Layanan Pendidikan Kedinasan					260				2.274,89				230				2.100,00		
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	968.Layanan Pendidikan Kedinasan		1				2.373,00				1				2.491,65		
		Sasaran Kegiatan 2	Terciptanya Penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan kontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi								100				1.681,67				100				1.882,56		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional								100				1.681,67				100				1.882,56		
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kajian Akademis					35				1.681,67				40				1.882,56		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)								Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
	STPN	Kegiatan 1:	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional dan									50.172,92				43.251,76	136.345,65	133.954,08	50.172,92	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam memperoleh pengetahuan,karakter, dan keterampilan					100				12.525,42			13.720,66	11.606,69	11.822,03	12.124,43	12.525,42		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>student body</i> yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanahan agraria dan tata ruang					100				12.525,42			13.720,66	11.606,69	11.822,03	12.124,43	12.525,42	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	DBA - Pendidikan Tinggi	001 - Lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		0													
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	DBA - Pendidikan Tinggi	003 - Lulusan Diploma IV/Strata-1 Pertanahan	003 - Lulusan Diploma IV/Strata-1	1.602				7.909,42				6.737,29	7.174,15	7.532,78	7.909,42		
						968 - Layanan Pendidikan Kedinasan		200				2.000,00				2.799,86	2.274,89	2.100,00	2.000,00		
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	1				2.616,00				2.069,54	2.373,00	2.491,65	2.616,00		
		Sasaran Kegiatan 2	Terciptanya Penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan kontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi					100				1.976,66			1.117,70	1.220,64	1.681,67	1.882,56	1.976,66		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional					100				1.976,66			1.117,70	1.220,64	1.681,67	1.882,56	1.976,66	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Kajian Akademis		45				1.976,66			1.117,70	1.220,64	1.681,67	1.882,56	1.976,66		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Sasaran Kegiatan 3	Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas						Persentase	100					100	78,30	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat							100					100	30,00	
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	BDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002 - Program Pengabdian Masyarakat											
			Sasaran Kegiatan 4	Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi						Persentase	100					100	564,69	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi							100					100	564,69	
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum				1							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			Persentase	1							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	AEC - Kerja sama	001 - Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi				7							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				1							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal				1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Sasaran Kegiatan 3	Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas														100				223,90				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat														100				200,00				
				5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	DDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002 - Program Pengabdian Masyarakat			15		78,30			78,30	78,30		20				200,00				
		Sasaran Kegiatan 4	Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi														100				1.124,48				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi														100				1.124,48				
				5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum			1		50,53			50,53	50,53		1				129,50				
				5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1		140,54			140,54	140,54		1				111,65				
				5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	AEC - Kerja sama	001 - Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi			10		210,81			210,81	210,81		15				310,67				
				5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1		121,16			121,16	121,16		1				230,68				
				5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal			1		41,65			41,65	41,65		1				341,98				

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028						
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
			Sasaran Kegiatan 3	Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas								100				231,25				100				238,95		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat								100				231,25				100				238,95		
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	BDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			002 - Program Pengabdian Masyarakat			10				231,25				15				238,95		
			Sasaran Kegiatan 4	Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi								100				1.180,65				100				1.239,46		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi								100				1.180,65				100				1.239,46		
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal			957 - Layanan Hukum			1				135,00				1				141,75		
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal			960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1				117,25				1				123,00		
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	AEC - Kerja sama			001 - Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi			16				326,20				17				342,40		
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal			958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1				242,20				1				254,31		
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal			965 - Layanan Audit Internal			1				360,00				1				378,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	Non APBN	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
			Sasaran Kegiatan 3	Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas								100				245,60			78,30	223,90	231,25	238,95	245,60	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat								100				245,60			30,00	200,00	231,25	238,95	245,60	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	BDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002 - Program Pengabdian Masyarakat					20				245,60				200,00	231,25	238,95	245,60	
			Sasaran Kegiatan 4	Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi								100				1.301,06			564,69	1.124,48	1.180,65	1.239,46	1.301,06	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi								100				1.301,06			564,69	1.124,48	1.180,65	1.239,46	1.301,06	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum					1				148,84				129,50	135,00	141,75	148,84	
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1				129,00				111,65	117,25	123,00	129,00	
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	AEC - Kerja sama	001 - Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi					18				359,30				310,67	326,20	342,40	359,30	
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					1				267,03				230,68	242,20	254,31	267,03	
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal					1				396,90				341,98	360,00	378,00	396,90	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO														
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025						
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
			Sasaran Kegiatan 5	Terselenggaranya pengelolaan pelayananan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan.								100					100	107.985,66	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Layanan Perkantoran									100					100	107.985,66
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan					1							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				Persentase	1							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal					50							
							971 - Layanan Prasarana Internal	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971. Layanan Prasarana Interna		1								
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					1							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum					1							
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi					2							
BPSDM	Sasaran Program				Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang														
	Indikator Kinerja Program			Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang								71,78							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
												Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Sasaran Kegiatan 5	Terselenggaranya pengelolaan pelayananan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan.														100					29.099,95			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Layanan Perkantoran															100					29.099,95		
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan			1		349,50				349,50	349,50		1				553,55			
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1	24.199,02				24.199,02	24.199,02		1				26.496,78			
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal				224	12.300,00	371,00			371,00	371,00		154				847,19			
						971 - Layanan Prasarana Internal	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971. Layanan Prasarana Interna	9.583	70.371,97								842				632,00			
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				1		237,70			237,70	237,70		1				95,46			
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				1		34,06			34,06	34,06		1				115,90			
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				1		72,42			72,42	72,42		1				119,09			
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				1		50,00			50,00	50,00		1				240,00			
BPSDM	Sasaran Program	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang																							
	Indikator Kinerja Program	Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlik di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang							73,78		104.831,15				18.548,90		75,00					24.256,24			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
			Sasaran Kegiatan 5	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan.								100				121.430,05				100				118.468,69			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Layanan Perkantoran								100				121.430,05				100				118.468,69			
					5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan					1				946,19				1				1.380,34			
		5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran							1				27.821,61				1				29.212,69		
		5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN			EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal							200				890,00				200				934,50		
						971 - Layanan Prasarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971. Layanan Prasarana Interna				9.303				91.173,24				3.982				86.312,20		
					5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran						1				100,00				1				105,00		
					5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						1				122,00				1				128,10		
					5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum						1				125,00				1				131,25		
					5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi						1				252,00				1				264,60		
BPSDM	Sasaran Program				Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang																						
	Indikator Kinerja Program		Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlaq di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang									76,00				26.681,86				77,00				29.350,05			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana	
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			Sasaran Kegiatan 5	Terselenggaranya pengelolaan pelayananan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan.																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Layanan Perkantoran																			
					5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan																
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran																	
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal																	
							971 - Layanan Prasarana Internal	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971. Layanan Prasarana Interna														
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran																	
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi																	
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum																	
				5526 - Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi STPN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi																	
BPSDM	Sasaran Program		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang																				
	Indikator Kinerja Program		Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanian dan tata ruang																				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	Kegiatan 1:	Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan														
		Sasaran Kegiatan	1, Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional 2, Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional													
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaran Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional						93,40							
				7979 - Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan										
	Kegiatan 2:	Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi							Indeks							
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas													
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan													
				7980 - Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan										
	KEGIATAN 3	Penyelenggaraan Penilaian kompetensi							Indeks							
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel													
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi						92							
				7981 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 1:	Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan																					
		Sasaran Kegiatan	1, Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional 2, Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaran Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional							94,00							94,60						
				7979 - Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan					32.450,00			2.993,55	2.993,55	1 Layanan				4.240,54			
	Kegiatan 2:	Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan							94							94,6						
				7980 - Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan					32.472,64			5.965,28	5.965,28	1 Layanan				5.589,80			
	KEGIATAN 3	Penyelenggaraan Penilaian kompetensi																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi							92							92						
				7981 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	32.733,88			2.475,44	2.475,44	1 Layanan				4.433,29			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028					
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
	Kegiatan 1:	Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan																					
		Sasaran Kegiatan	1, Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional 2, Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaran Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional							95							96						
				7979 - Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan				1 Layanan				4.664,59			1 Layanan			5.131,05			
	Kegiatan 2:	Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan							95							96						
				7980 - Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan				1 Layanan				6.148,78			1 Layanan			6.763,66			
	KEGIATAN 3	Penyelenggaraan Penilaian kompetensi																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi							93							93						
				7981 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan			EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				4.876,62			1 Layanan			5.364,28			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO															TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
	Kegiatan 1:	Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan																					
	Sasaran Kegiatan	1, Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional 2, Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional																					
	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaran Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional								96											Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			7979 - Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan				1 Layanan				5.644,16			4.240,54	4.664,59	5.131,05	5.644,16				
	Kegiatan 2:	Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi																					
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas																					
	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan								96											Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			7980 - Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan				1 Layanan				7.440,02			5.589,80	6.148,78	6.763,66	7.440,02				
	KEGIATAN 3	Penyelenggaraan Penilaian kompetensi																					
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel																					
	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi								93											Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
			7981 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	1 Layanan				5.900,71			4.433,29	4.876,62	5.364,28	5.900,71				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNEP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
SEKRETARIAT BPSDM	KEGIATAN 4	Dukungan Manajemen Internal								Indeks							
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik														
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)								87,6					88	
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Indeks						150,48	
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi								
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks keuangan (IKPA)													85,00	
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	Indeks						62,39	
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan													90	
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks profesionalisme aparatur sipil negara							Persentase						81	
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Indeks							
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Indeks penilaian mandiri SPIP								3,33					3,50	
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							2.497,19	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
SEKRETARIAT BPSDM	KEGIATAN 4	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)														87,9							
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum								1 Layanan				35,78			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran			150,48			150,48		1 Layanan				173,64			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi							1 Layanan				110,84				
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks keuangan (IKPA)														85,50							
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN								1 Layanan				162,28			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan			62,39			62,39		1 Layanan				230,87			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan														95							
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								1 Layanan				275,78			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks profesionalisme aparatur sipil negara														81							
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM								1 Layanan							
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan							1 Layanan								
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Indeks penilaian mandiri SPIP														3,60							
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			2.497,19			2.497,19		1 Layanan				731,69			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028						
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
SEKRETARIAT BPSDM	KEGIATAN 4	Dukungan Manajemen Internal																							
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)						88,00								88,01								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	1 Layanan					39,36			1 Layanan					43,29			
	7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)					EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan				191,00			1 Layanan			210,10							
	7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)					EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan				121,92			1 Layanan			134,12							
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks keuangan (IKPA)						86,00								86,50								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1 Layanan					178,51			1 Layanan					196,36			
	7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)					EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan				253,95			1 Layanan			279,35							
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan						95								95								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan					303,36			1 Layanan					333,69			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks profesionalisme aparatur sipil negara						81								81								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	1 Layanan								1 Layanan								
	7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)					EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1 Layanan						1 Layanan											
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Indeks penilaian mandiri SPIP						3,70								3,80								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan					804,86			1 Layanan					885,35			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
											Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
SEKRETARI AT BPSDM	KEGIATAN 4	Dukungan Manajemen Internal																				
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)						88.02											Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		1 Layanan			47,62			35,78	39,36	43,29	47,62		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 Layanan			231,11		150,48	173,64	191,00	210,10	231,11		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Layanan			147,53		110,84	121,92	134,12	147,53			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks keuangan (IKPA)							87,00										Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		1 Layanan			216,00			162,28	178,51	196,36	216,00		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		1 Layanan			307,28		62,39	230,87	253,95	279,35	307,28		
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan							95										Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1 Layanan			367,06			275,78	303,36	333,69	367,06		
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks profesionalisme aparatur sipil negara							81										Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		1 Layanan											
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan		1 Layanan											
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Indeks penilaian mandiri SPIP							3,90										Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1 Layanan			973,88		2.497,19	731,69	804,86	885,35	973,88		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)					
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	Target	
	Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase layanan perkantoran							Indeks	100					100			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum							2.323,45		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Persentase						2.062,01		
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi									
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal							19,10		
	Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	Unit								
Setditjen DJTR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal								Persentase								
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1															
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							AA					AA			
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		2	368,52		2	1.160,32		
								EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penataan Ruang	Dokumen Laporan								
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen		6	1.010,83		6	1.684,82		
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen		3	2.156,71		3	2.315,15		
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	AEC - Kerja sama	001 - Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang		AEC - Kerja sama	Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang	Kesepakatan		1	416,00		1	1.560,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026					
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase layanan perkantoran														100								
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum			2.323,45			2.323,45			1 Layanan				3.029,60			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran			2.062,01			2.062,01			1 Layanan				4.981,06			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi									1 Layanan				120,00			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal			19,10			19,10			1 unit				59,93			
	Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																						
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan		60,00			60,00	60,00		1 Layanan				81,14			
Setditjen DJTR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							AA							AA							
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	2		1.160,32			1.160,32	1.160,32	2	2	1.350,00			1.350,00			
							EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penataan Ruang								0	2				450,00			
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6		1.684,82			1.684,82	1.684,82	5	6	1.560,03			3.000,00			
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3		2.315,15			2.315,15	2.315,15	1	3	2.221,94			3.000,00			
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	AEC - Kerja sama	001 - Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang	AEC - Kerja sama	Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang	1		1.560,00			1.560,00	1.560,00	1	1	1.500,00			3.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028							
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
							APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
		Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase layanan perkantoran																					
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		1 Layanan				3.332,56			1 Layanan			3.665,82			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1 Layanan				5.479,17			1 Layanan			6.027,09			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		1 Layanan				132,00			1 Layanan			145,20			
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		1 unit				65,92			1 unit			72,51			
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																					
				7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		1 Layanan				89,25			1 Layanan			98,18			
Setditjen DJTR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)								AA							AA						
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	2	2	1.230,98			1.230,98			2	2	1.267,91		1.267,91		
								EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penataan Ruang	1	2	450,00			450,00			1	2	450,00		450,00		
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6	6	1.965,64			3.000,00			6	6	2.063,92		3.000,00		
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Penantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	3	3.090,00			3.090,00			3	3	3.182,70		3.182,70		
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	AEC - Kerja sama	001 - Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang		AEC - Kerja sama	Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang	1	1	1.575,00			3.090,00			1	1	1.653,75		3.182,70		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)														Unit Organisasi Pelaksana	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)										
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase layanan perkantoran							100														Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		1 Layanan				4.032,40			2.323,45	3.029,60	3.332,56	3.665,82	4.032,40		
					7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1 Layanan				6.629,79			2.062,01	4.981,06	5.479,17	6.027,09	6.629,79		
					7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		1 Layanan				159,72				120,00	132,00	145,20	159,72		
					7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		1 unit				79,76			19,10	59,93	65,92	72,51	79,76		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM)				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan						108,00				81,14	89,25	98,18	108,00		
Setditjen DJTR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																							
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)									AA													Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	2	2	1.305,95			1.305,95			1.160,32	1.350,00	1.230,98	1.267,91	1.305,95		
									EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penataan Ruang	1	2	450,00			450,00				450,00	450,00	450,00	450,00		
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6	6	2.167,12			3.000,00			1.684,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	3	3.278,18			3.278,18			2.315,15	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18		
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	AEC - Kerja sama	001 - Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang		AEC - Kerja sama	Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang	1	1	1.736,44			3.278,18			1.560,00	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO														
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025						
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks Maturitas SPIP								3,9					3,9		
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan		2	174,05			2	174,05		
								EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko	Indeks									
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara							81,63						80		
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan		4	751,95			4	1.566,43		
					Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						100%						100%	
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Layanan		5	392,95				5	745,91	
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran		1	10.780,89			1	10.780,89		
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Layanan									
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	Layanan		5	2.364,00				6	5.057,79	
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100%						100%		
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan		2	1.275,85			2	1.280,30		
					Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen					Persentase							100%	
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen		2	100,00				2	818,25	
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA							84,91						85		
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan BMN		1	221,80			1	501,16		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Indikator Kinerja Kegiatan	2.Indeks Maturitas SPIP							3,9							3,9						
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2		174,05			174,05	174,05	0	2				179,27		
							EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko							1	2	650,00			650,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara						80							81							
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	4		1.566,43			1.566,43	1.566,43	2	4	1.438,99			1.612,68		
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						100%							100%							
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	5		745,91			745,91	745,91	5	5	778,35			2.310,13		
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1	10.780,89				10.780,89	10.780,89	1	1	8.130,45			11.104,32		
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal							0	1				1.545,00			
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	6		5.057,79			5.057,79	5.057,79	6	14	4.862,85			26.338,96		
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat						100%							100%							
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat	2		1.280,30			1.280,30	1.280,30	2	3	1.235,00			1.918,70		
		Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen						100%							100%							
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	2		818,25			818,25	818,25	2	2	787,00			818,25		
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA						85							86							
				5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1		501,16			501,16	501,16	1	1	480,00			516,16		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Kinerja Kegiatan	2.Indeks Maturitas SPIP								4							4							
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	2	184,64		184,64		2	2	190,18			190,18				
									EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko	2	2	750,00		750,00		2	2	750,00			750,00				
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara								81						82								
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	3	4	1.660,59		1.660,59		4	4	1.710,35			1.710,35				
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhiya Layanan Perkantoran								100%						100%								
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	5	5	817,27		2.319,43		5	5	858,14			2.329,02				
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1	1	8.536,98		11.437,45		1	1	8.963,83			11.780,57				
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1	1	1.591,35		1.591,35		1	1	1.639,10			1.639,10				
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	7	13	5.956,99		24.966,13		8	13	7.148,39			25.714,44				
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat								100%						100%								
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat	3	3	1.945,13		1.976,27		3	3	2.035,55			2.035,55				
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen								100%						100%								
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	2	2	818,25		818,25		2	2	818,25			818,25				
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA								87						88								
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1	1	504,00		531,56		1	1	529,20			547,46				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)														Unit Organisasi Pelaksana		
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Tahun 2029										Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)											
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks Maturitas SPIP								4															Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	2	195,89			195,89			174,05	179,27	184,64	190,18	195,89				
									EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko	2	2	750,00			750,00				650,00	750,00	750,00	750,00				
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara								82															Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	4	4	1.761,57			1.761,57			1.566,43	1.612,68	1.660,59	1.710,35	1.761,57				
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran								100%															Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	5	5	901,04			2.338,89			745,91	2.310,13	2.319,43	2.329,02	2.338,89				
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1	1	9.412,02			12.133,99			10.780,89	11.104,32	11.437,45	11.780,57	12.133,99				
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1	1	1.688,27			1.688,27				1.545,00	1.591,35	1.639,10	1.688,27				
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	9	13	8.444,04			26.486,39			5.057,79	26.338,96	24.966,13	25.714,44	26.486,39				
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat								100%															Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat	3	3	2.096,62			2.096,62			1.280,30	1.918,70	1.976,27	2.035,55	2.096,62				
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen								100%															Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	2	2	818,25			818,25			818,25	818,25	818,25	818,25	818,25				
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA								88															Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
					5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1	1	555,66			563,86			501,16	516,16	531,56	547,46	563,86				

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN	
Setditjen SPPR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal								Indeks							
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1														
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							A					84,50	1.144,05	
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	Layanan	1				1	82,39	
	5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan				1	90,97			
	5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan				1	970,69			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2.Indeks Maturitas SPIP												3,90	50,63	
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja	Layanan					1,00	15,79	
	5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1				1,00	34,84		
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara												93	1.650,93	
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	Layanan					1	1.650,93	
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							Indeks						100%	16.600,06
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	Layanan	1				1	113,20	
	5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1				1	7.370,50		
	5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)			EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal					232	9.116,36			
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat													100,00%	383,39
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1				1	383,39	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
Setditjen SPPR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																					
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)						84,50		1.144,05						85,00				1.144,05		
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	1		82,39		82,39		1				82,39			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1		90,97		90,97		1				90,97			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1		970,69		970,69		1				970,53			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2.Indeks Maturitas SPIP						3,90		50,63			50,63		3,90				50,63			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja	1,00		15,79		15,79		1				15,79			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum	1,00		34,84		34,84		1				34,84			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara						93		1.650,93			1.650,93		93				1.650,93			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	1		1.650,93		1.650,93		1				1.650,93			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						100%					16.600,06		100%				16.600,06			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	1		113,20		113,20		1				113,20			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1	7.370,50			7.370,50		1				6.935,07			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	232		9.116,36		9.116,36		232				9.116,36			
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat						100,00%					383,39			100,00%				383,39		
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1		383,39		383,39		1				383,39			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN											
Setditjen SPPR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)						86,00				1.201,25				87				1.261,31			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		1			86,50			1				90,83			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1			95,52			1				100,30			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1			1.019,05			1				1.069,01			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2.Indeks Maturitas SPIP						4,00				53,16			4,00				55,82				
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja		1			16,58			1				17,41			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum		1			36,58			1				38,41			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara						94				1.733,47			94				1.820,15				
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		1			1.733,47			1				1.820,15			
				Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran					100%				17.430,06			100%				18.301,57			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		1			118,86			1				124,80			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1			7.281,83			1				7.645,92			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		232			9.572,18			232				10.050,79			
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat						100,00%				402,56			100,00%				422,69				
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1			402,56			1				422,69			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)											TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
Setditjen SPPR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																					
	Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																					
	Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							89					1.324,38			1.144,05	1.144,05	1.201,25	1.261,31	1.324,38	Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	1	1			95,37			82,39	82,39	86,50	90,83	95,37		
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1		105,31			90,97	90,97	95,52	100,30	105,31			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1		1.122,46			970,69	970,53	1.019,05	1.069,01	1.122,46			
	Indikator Kinerja Kegiatan	2.Indeks Maturitas SPIP								4,10				58,61			50,63	50,63	53,16	55,82	58,61	Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja Internal		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja Internal		1			18,28			15,79	15,79	16,58	17,41	18,28		
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum	1	1		40,33			34,84	34,84	36,58	38,41	40,33			
	Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara								95				1.911,15			1.650,93	1.650,93	1.733,47	1.820,15	1.911,15	Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		1			1.911,15			1.650,93	1.650,93	1.733,47	1.820,15	1.911,15		
	Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran								100%				19.216,65			16.600,06	16.600,06	17.430,06	18.301,57	19.216,65	Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	1				130,04			113,20	113,20	118,86	124,80	130,04		
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1			8.028,22			7.370,50	6.935,07	7.281,83	7.645,92	8.028,22			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	232			10.553,33			9.116,36	9.116,36	9.572,18	10.050,79	10.553,33			
Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat								100,00%				443,82			383,39	383,39	402,56	422,69	443,82	Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
			5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1			443,82			383,39	383,39	402,56	422,69	443,82			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA Kegiatan							91,01					274,00			91,02				274,00		
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1			225,25			225,25		1				225,41			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	1			48,75			48,75		1				48,75			
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit ltjen																					
Setditjen PHPT	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							A		1.815,65			1.815,65		A				1.875,19			
					5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum			1		151,52			151,52	182,78	1				87,53			
					5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran			1		400,48			400,48	304,44	1				57,14			
					5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			1		1.263,65			1.263,65	1.378,13	1				1.236,28			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2.Indeks Maturitas SPIP							3,9		35,60			35,60		3,9				373,75			
					5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1		35,60			35,60	9,24	1				373,75			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara							81		108,40			108,40		81				113,82			
					5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM			1		64,40			64,40	118,90	1				67,62			
					5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan			1		44,00			44,00	60,00	1				46,20			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							100%		6.854,92			6.854,92		100 %				7.025,74			
						5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokol			1		221,61			221,61	282,25	1				276,17		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																		Unit Organisasi Pelaksana		
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)												TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
		Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA															274,00	274,00	287,70	302,08	317,19	Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	1				260,94			225,25	225,41	236,68	248,52	260,94			
				5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		1				56,43			48,75	48,75	51,19	53,74	56,43			
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																				Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		
Setditjen PHPT	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																							
		Sasaran Kegiatan	1. Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)									A				2.170,77			1.696,24	1.875,19	1.968,95	2.067,40	2.170,77	Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum						1				173,85				87,53	163,87	168,78	173,85		
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran						1				459,50				57,14	433,12	446,11	459,50		
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						1				1.449,87				1.236,28	1.366,64	1.407,64	1.449,87		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks Maturitas SPIP									3,9				40,85			3,49	373,75	38,50	39,66	40,85	Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						1				40,85				373,75	38,50	39,66	40,85		
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara									81				124,38				113,82	117,24	120,76	124,38	Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM						1				73,89				67,62	69,65	71,74	73,89		
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan						1				50,48				46,20	47,59	49,01	50,48		
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran									100 %				8.133,17			6.691,18	7.025,74	7.377,03	7.745,88	8.133,17	Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Protokol						1				254,26				276,17	239,67	246,86	254,26		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
		5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				Persentase					1			
		5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi									1			
		5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran									1	5.784,67		
		5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal									20			
		5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan									1			
	Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100 %					100 %	136,94	
			5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi									1		
	Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA						Persentase	89					89	86,17	
			5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN			Dokumen						1		
			5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan			Dokumen						1		
	Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen														
Setditjen Pentag	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal														
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1													
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)						A					A	520,00	
			5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	Layanan							
			5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen							
			5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen							
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100					100	40,00
			5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan							
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara						Persentase						65	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																								
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026												
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN																
			5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				1		302,05			302,05	237,12		1				299,86						
				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				1		163,74			163,74	95,12		1				5,36						
				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1		5.784,67			5.784,67	5.784,67		1				4.667,85						
				EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal				20		306,00			306,00	255,00		20				330,00						
				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan				1		76,86			76,86	77,12		1				106,86						
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100%		136,94			136,94			100 %			143,79					
					5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				1		136,94			136,94	104,66		1				352,94				
					Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA						89		86,17			86,17			90							
					5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				1		23,95			23,95	24,27		1				24,22				
						EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				1		62,22			62,22	123,85		1				44,94				
					Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																					
					Setditjen Pentag	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																				
							Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1										4.237,55						5.030,43			
			Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)															A								
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	1		48,36			48,36	48,36		1				48,36				
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1		278,32			278,32	278,32		1				273,05				
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1		149,48			149,48	149,48		1				237,26				
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat															100								
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1		31,30			31,30	31,30		1				31,30				
Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara									65							65										

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN																		
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																		
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028												
									Volum (Batas Bawah)	Volum (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volum (Batas Bawah)	Volum (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN														
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum					1					326,67				1				336,47			
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi					1				177,09				1				182,40				
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran					1				4.807,89				1				6.443,91				
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal					21				339,90				23				340,87				
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					1				83,12				1				85,62				
				Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100 %				150,98				100 %				158,53			
						5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					1				141,05				1				145,28		
						Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA							91							92						
						5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN					1				25,90				1				26,68		
						5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan					1				67,29				1				69,31		
				Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																						
				Setditjen Pentag	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																					
						Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1											5.406,18							5.676,65		
						Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							A				551,67				A			620,01		
							5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		1				50,29				1				51,79	
5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran					EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1				339,49				1				349,67					
5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1				212,18				1				218,55					
Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat									100				42,44				100				43,71					
	5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1				42,44				1				43,71					
	Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara									65				90,68				65				93,40				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana								
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)											
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029						
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)													
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN												
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum					1					346,56			299,86	326,67	336,47	346,56					
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi					1					187,87				5,36	177,09	182,40		187,87			
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran					1					6.637,22		5.784,67	4.667,85	4.807,89	6.443,91	6.637,22					
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal					25					351,09				330,00	339,90	340,87		351,09			
				5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					1					88,19				106,86	83,12	85,62		88,19			
				Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100 %					166,45		136,94	143,79	150,98	158,53		166,45	Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		
						5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				1					149,64			352,94	141,05	145,28		149,64			
				Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA							93							86,17						Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		
						5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				1					27,48			24,22	25,90	26,68		27,48			
						5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				1					71,39			44,94	67,29	69,31		71,39			
				Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit ltjen																				Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		
				Setditjen Pentag	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																					
						Sasaran Kegiatan	1. Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1											5.931,35		5.030,43	5.406,18	5.676,65		5.931,35			
						Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							4				638,61		520,00		551,67		620,01	638,61	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria	
								5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum	1				53,35		48,36	50,29	51,79		53,35			
								5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1				360,16		273,05	339,49	349,67		360,16			
		5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal			953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1				225,10		237,26	212,18	218,55	225,10								
Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat									100					45,02		40,00	42,44	43,71	45,02	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria						
		5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal			958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1					45,02		31,30	42,44	43,71	45,02							
Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara									65					96,20			90,68	93,40	96,20	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria						

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	Layanan								
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen							Indeks								
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen								

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026					
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	1		85,97			85,97	85,97	1				85,97			
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																				
					5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan	1		57,09			57,09	57,09	1				59,94		

Program/ Kegiatan				Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN													
								SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran													
								KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028							
														Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN																
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		1			90,68			1			93,40							
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen											59,04					60,81								
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		1			59,04			1			60,81							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029					
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)										
						APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN													
					5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM			1					96,20				85,97	90,68	93,40	96,20	
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen														62,63					59,04	60,81	62,63	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria
					5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan			1					62,63				59,94	59,04	60,81	62,63	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Indeks Maturitas SPIP								3,3					3,4	101,12
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan							
		Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							Indeks	100					1	3.890,40
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	Layanan							
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Layanan							
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	Unit							
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA								90					92	88,65
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	Layanan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Indeks Maturitas SPIP														3,45								
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1		16,11			16,11	16,11	1				16,11					
		Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran														100%								
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	1		349,22			349,22	349,22	1				263,86					
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1	3.030,38				3.030,38	3.030,38	1				3.823,26					
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	20		157,60			157,60	157,60	28				157,60					
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA														92,5								
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1		33,72			33,72	33,72	1				33,72					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028							
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN												
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Indeks Maturitas SPIP								3,5				16,60				3,55				17,10		
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1				16,60			1				17,10			
		Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran								100%				4.610,74			100%				4.805,57			
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		1				222,79			1				229,47			
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1				3.937,96			1				4.056,09			
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		30				450,00			35				520,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA								93				35,01			93,5				36,06			
				5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		1				35,01			1				36,06			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana						
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)										
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029					
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)											
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)							APBN (PHLN)	Non APBN			
			Indikator Kinerja Kegiatan	5.Indeks Maturitas SPIP									4					17,61				101,12		16,60	17,10	17,61	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria
					5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1					17,61				16,11	16,60	17,10	17,61		
			Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran									100%					5.034,13				3.890,40		4.610,74	4.805,57	5.034,13	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria
					5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum			1					236,36				263,86	222,79	229,47	236,36		
					5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran			1					4.177,78				3.823,26	3.937,96	4.056,09	4.177,78		
					5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal			40					620,00				157,60	450,00	520,00	620,00		
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA									94					37,14				88,65		35,01	36,06	37,14	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria
					5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN			1					37,14				33,72	35,01	36,06	37,14		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025						
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
	Setditjen PTPP	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal							Dokumen								
			Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1													11.003,85	
			Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							A					A	2.514,15	
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum									1	358,44	
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				Indeks						1	1.290,94
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran										1	387,35
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi										1	477,42
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat								100					100	380,73
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi									1	380,73	
					Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen						Persentase						80
			Indikator Kinerja Kegiatan	4.Indeks Maturitas SPIP								3,325					3,325	146,48
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja				Persentase					1	146,48	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
Setditjen PTPP	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																			10.441,15		
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)														A					2.674,48		
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum				1		358,44			358,44	358,44	1				170,53			
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				1		1.290,94			1.290,94	1.290,94	1				1.259,53			
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				1		387,35			387,35	387,35	1				503,98			
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				1		477,42			477,42	477,42	1				740,44			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat															100				646,39		
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				1		380,73			380,73	380,73	1				646,39			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen							80								80						
		Indikator Kinerja Kegiatan	4.Indeks Maturitas SPIP															3,350				144,00		
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja				1		146,48			146,48	146,48	1				144,00			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028										
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN													
Setditjen PTPP	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																								
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1												16.246,02									17.521,28		
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)								A				5.237,05				A					5.498,90		
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum						1			761,89				1				799,98			
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum						1			1.917,14				1				2.013,00			
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran						1			740,86				1				777,90			
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						1			1.817,16				1				1.908,02			
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat									100			793,91				100				833,61		
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi						1			793,91				1				833,61		
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen									80							80						
			Indikator Kinerja Kegiatan	4.Indeks Maturitas SPIP									3,400			251,11				3,425				276,22		
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja						1			251,11				1				276,22		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
	Setditjen PTPP	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																			
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1										18.906,62			11.003,85	10.441,15	16.246,02	17.521,28	18.906,62		
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							A			5.773,85			2.514,15	2.674,48	5.237,05	5.498,90	5.773,85	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum					1				839,98		358,44	170,53	761,89	799,98	839,98	
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum					1				2.113,65		1.290,94	1.259,53	1.917,14	2.013,00	2.113,65	
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran					1				816,80		387,35	503,98	740,86	777,90	816,80	
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi					1				2.003,42		477,42	740,44	1.817,16	1.908,02	2.003,42	
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat								100				875,29		380,73	646,39	793,91	833,61	875,29	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					1				875,29		380,73	646,39	793,91	833,61	875,29	
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen								80											Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
		Indikator Kinerja Kegiatan	4.Indeks Maturitas SPIP								3,450				303,85		146,48	144,00	251,11	276,22	303,85	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
				5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja					1				303,85		146,48	144,00	251,11	276,22	303,85	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO														
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)				Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025								
											Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
											Vol (Batas Bawah)			APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN	
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara							Indeks							65	697,96
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM											1	697,96
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							Indeks	100 %						100 %	6.759,33
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum											1	1.830,30
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				Persentase							1	4.284,51
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal											12	644,52
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA								92						92,5	505,20
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				Layanan							1	182,11
					5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				Layanan							1	323,08
Setditjen PPTR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																	
		Sasaran Kegiatan	1. Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)															A	
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum				Layanan								
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				Layanan								
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Layanan								
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	AEE - Kemitraan	001 - Fasilitas Kemitraan Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang				Layanan								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
	Indikator Kinerja Kegiatan	5. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara					65		697,96			697,96	697,96		65					766,25				
			5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM		1		697,96			697,96	697,96		1					766,25				
	Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran													100 %					5.846,17				
			5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum		1		1.830,30			1.830,30	1.830,30		1					387,05				
			5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran		1	4.284,51				4.284,51	4.284,51		1					4.538,38				
			5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal		12		644,52			644,52	644,52		53					920,74				
	Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA													93					363,87				
			5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN		1		182,11			182,11	182,11		1					103,92				
			5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan		1		323,08			323,08	323,08		1					259,95				
Setditjen PPTR	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)											3.660,00	A	3.635,00				4.400,00				
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum		1		1.100,00			1.100,00	1.100,00		1	1.074,00			1.200,00				
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1		1.100,00			1.100,00	1.100,00		1	874,00			1.200,00				
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1		1.160,00			1.160,00	1.160,00		1	1.300,00			1.500,00				
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	AEE - Kemitraan	001 - Fasilitasi Kemitraan Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang		1		300,00			300,00	300,00										

Program / Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Non APBN		
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	AEC - Kemitraan	001 - Fasilitas Kerja Sama Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang				Layanan							
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat													100	1.114,08
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	001 - Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang				Layanan							
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara							Presentase	81					82	1.230,00
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				Layanan							
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan				Layanan							
			Indikator Kinerja Kegiatan	4.Indeks Maturitas SPIP								3,9					3,9	300,00
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja				Layanan							
			Indikator Kinerja Kegiatan	5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							Indeks	100					100	9.185,74
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				Layanan							
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				Layanan							
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				Layanan							
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal				Paket							
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan				Layanan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	AEC - Kemitraan	001 - Fasilitas Kerja Sama Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang											1	387,00			500,00				
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat												1.114,08		100	1.000,00			1.300,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	001 - Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang				1		1.114,08		1.114,08	1.114,08		1	1.000,00			1.300,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara												1.230,00		82	674,00			2.200,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				1		500,00		500,00	500,00		1	337,00			1.100,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan				1		730,00		730,00	730,00		1	337,00			1.100,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Maturitas SPIP												300,00		3,9	674,00			1.300,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja				1		300,00		300,00	300,00		1	674,00			1.300,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran												9.185,74		100	10.023,15			14.550,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				1		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1	1.600,00			2.000,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				1		422,34		422,34	422,34		1	337,00			450,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1	7.013,40			7.013,40	7.013,40		1	7.649,15			10.000,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal											1				1.500,00			
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan				1		350,00		350,00	350,00		1	437,00			600,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028								
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	AEC - Kemitraan	001 - Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang					1	400,00			530,00				1	450,00			600,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat								100	1.200,00			1.500,00				100	1.500,00			1.600,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	001 - Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang					1	1.200,00			1.500,00				1	1.500,00			1.600,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara								82,5	700,00			2.400,00				82,5	750,00			3.000,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM					1	350,00			1.200,00				1	375,00			1.500,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan					1	350,00			1.200,00				1	375,00			1.500,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	4.Indeks Maturitas SPIP								4	700,00			1.500,00				4	730,00			1.600,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja					1	700,00			1.500,00				1	730,00			1.600,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Persentase Terpenuhihya Layanan Perkantoran								100	14.200,00			18.400,00				100	17.975,00			23.500,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum					1	1.750,00			2.100,00				1	2.000,00			2.300,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi					1	350,00			500,00				1	375,00			650,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran					1	10.000,00			13.000,00				1	13.000,00			17.000,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal					1	1.500,00			2.000,00				1	1.800,00			2.500,00		
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					1	600,00			800,00				1	800,00			1.050,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	AEC - Kemitraan	001 - Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang				1	500,00			650,00				387,00	400,00	450,00	500,00	
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100	1.650,00			1.800,00			1.114,08					Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	001 - Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang				1	1.650,00			1.800,00				1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.650,00	
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara							83	800,00			3.200,00			1.230,00					Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				1	400,00			1.600,00				337,00	350,00	375,00	400,00	
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan				1	400,00			1.600,00				337,00	350,00	375,00	400,00	
		Indikator Kinerja Kegiatan	4.Indeks Maturitas SPIP							4	750,00			1.700,00			300,00					Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja				1	750,00			1.700,00				674,00	700,00	730,00	750,00	
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							100	22.850,00			30.780,00			9.185,74					Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				1	2.100,00			2.500,00				1.600,00	1.750,00	2.000,00	2.100,00	
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				1	400,00			680,00				337,00	350,00	375,00	400,00	
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1	17.000,00			23.000,00				7.649,15	10.000,00	13.000,00	17.000,00	
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal				1	2.300,00			3.100,00					1.500,00	1.800,00	2.300,00	
				5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan				1	1.050,00			1.500,00				437,00	600,00	800,00	1.050,00	

Program / Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
														APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA							88						90	850,00
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				Layanan							
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				Layanan							
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen														
	Setditjen PSKP	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal															
			Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1														9.211,10
			Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)													A	1.723,30
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum											
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				Indeks							
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran											
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi											
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat													100	351,96
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi											
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen													60%	200,80
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal											
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara							Indeks						65	273,78
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				Nilai							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																						
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																			
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026										
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA Kegiatan																								
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				1			500,00			500,00	500,00		1		437,00			550,00		
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				1			350,00			350,00	350,00		1		437,00			600,00		
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																								
Setditjen PSKP	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																									
		Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1									4.558,61	4.652,49			9.211,10	9.211,10							7.672,84			
		Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)								A		1.723,30			1.723,30	1.723,30		A					1.723,30			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum				1			636,17			636,17	636,17		1					636,17		
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				1			17,55			17,55	17,55		1					17,55		
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				4			747,12			747,12	747,12		4					747,12		
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Penantauan dan Evaluasi				3			322,46			322,46	322,46		3					322,46		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat								100		351,96			351,96	351,96		100					351,96			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				1		351,96			351,96	351,96		1					351,96			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen								60%		200,80			200,80	200,80		65%					104,69			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal				1		200,80			200,80	200,80		1					104,69			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara								65		273,78			273,78	273,78		65					273,78			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				1		273,78			273,78	273,78		1					273,78			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN													
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA Kegiatan							91	1.000,00			1.520,00				91	1.300,00			2.000,00			
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				1	500,00			720,00				1	650,00			950,00			
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				1	500,00			800,00				1	650,00			1.050,00			
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																						
Setditjen PSKP	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																								
			Sasaran Kegiatan	1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1											9.985,09								10.284,65			
			Indikator Kinerja Kegiatan	1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							A				1.828,26				A				1.883,11			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum				1				674,91				1				695,16			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				1				18,62				1				19,18			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				4				792,63				4				816,40			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Penantautan dan Evaluasi				3				342,10				3				352,37			
			Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100				373,40				100				384,60			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				1				373,40				1				384,60			
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen							70%				213,03				75%				219,42			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal				1				213,03				1				219,42			
			Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara							65				290,45				65				299,16			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				1				290,45				1				299,16			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana						
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)										
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029					
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)											
			Indikator Kinerja Kegiatan	6. Indeks IKPA									92	1.700,00				2.750,00			850,00						Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN						1	850,00				1.250,00			437,00	500,00	650,00	850,00			
					5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan						1	850,00				1.500,00			437,00	500,00	650,00	850,00			
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen																						Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria	
Setditjen PSKP	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																									
		Sasaran Kegiatan	1. Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1															10.593,20			9.211,10	7.672,84	9.985,09	10.284,65	10.593,20		
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)										A					1.939,60			1.723,30	1.723,30	1.828,26	1.883,11	1.939,60	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 - Layanan Hukum						1					716,01			636,17	674,91	695,16	716,01			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum						1					19,76			17,55	18,62	19,18	19,76			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran						4					840,90			747,12	792,63	816,40	840,90			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						3					362,94			322,46	342,10	352,37	362,94			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat										100					396,14			351,96	351,96	373,40	384,60	396,14	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi						1					396,14			351,96	373,40	384,60	396,14			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen										80%					226,00			200,80	104,69	213,03	219,42	226,00	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal						1					226,00			104,69	213,03	219,42	226,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara										65					308,14			273,78	273,78	290,45	299,16	308,14	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM						1					308,14			273,78	290,45	299,16	308,14			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Indikator Kinerja Kegiatan	5.Indeks Maturitas SPIP							Indeks						3,4	16,60
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal											
			Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							Indeks						100	6.451,85
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum											
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				Persen							
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran											
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal											
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA													96	192,81
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN											
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				Indeks							

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																									
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026													
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN					
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Indeks Maturitas SPIP							3,8		RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	16,60	16,60			3,9				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	223,92		
				5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				1			16,60			16,60	16,60		1								223,92			
		Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							100	4.558,61	1.893,24				6.451,85	6.451,85		100								4.796,59			
				5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				1			289,00			289,00	289,00		1								289,00			
				5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				1			987,25			987,25	987,25		1								987,25			
				5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1	4.558,61					4.558,61	4.558,61		1								3.020,35			
				5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal				43			617,00			617,00	617,00		43								500,00			
		Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA										192,81			192,81	192,81		96,5								198,60			
				5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				1			60,23			60,23	60,23		1								60,23			
				5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				1			132,58			132,58	132,58		1								132,58			

Program/ Kegiatan					Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator					I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
										SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
										KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
																Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
			Indikator Kinerja Kegiatan	5.Indeks Maturitas SPIP Kegiatan									4					230,64						4,1					237,56		
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					1					230,64				1							237,56			
			Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran								100					6.844,77				100							7.050,11			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum					1					306,60				1							315,79			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi					1					1.047,37				1							1.078,79			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran					1					4.836,23				1							4.981,31			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal					47					654,58				50							674,21			
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA								97					204,56				97,5							210,69			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN					1					63,90				1							65,82			
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan					1					140,66				1							144,88			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			Indikator Kinerja Kegiatan	5.Indeks Maturitas SPIP							4,2				244,69			16,60	223,92	230,64	237,56	244,69	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				1				244,69				223,92	230,64	237,56	244,69	
			Indikator Kinerja Kegiatan	6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							100				7.261,62			6.451,85	4.796,59	6.844,77	7.050,11	7.261,62	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				1				325,27				289,00	306,60	315,79	325,27	
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				1				1.111,16				987,25	1.047,37	1.078,79	1.111,16	
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1				5.130,75				3.020,35	4.836,23	4.981,31	5.130,75	
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal				52				694,44				500,00	654,58	674,21	694,44	
			Indikator Kinerja Kegiatan	7. Indeks IKPA							98				217,01			192,81	198,60	204,56	210,69	217,01	Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				1				67,79				60,23	63,90	65,82	67,79	
					5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				1				149,22				132,58	140,66	144,88	149,22	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
SETITJEN	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal															
		Sasaran Kegiatan I	Peningkatan Kualitas Manajemen Internal														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)								90,4					91	239,80
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen						239,80	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan							Indeks						4	2.208,26
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Tatakelola Pengawasan		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Interna	959 - Layanan Tatakelola Pengawasan	Layanan						1.104,13	
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965- Layanan Audit Internal				Layanan						1.104,13	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks IKPA								97,34					98	258,34
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				Layanan	97,34					98	178,46
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				Layanan							79,88
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha							Indeks	100					100	6.115,17

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
SETITJEN	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan I	Peningkatan Kualitas Manajemen Internal																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							91		239,80			239,80	239,80		93				251,79		
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi						239,80			239,80						251,79			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan							4		2.208,26			2.208,26	2.208,26		5				2.318,67		
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Tatakelola Pengawasan		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Interna	959 - Layanan Tatakelola Pengawasan			1.104,13			1.104,13						1.159,34			
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal						1.104,13			1.104,13						1.159,34			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks IKPA							98		258,34			258,34	218,36		98,5				269,66		
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				98		178,46			178,46	178,46		98,5				187,39		
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran						79,88			79,88	39,90		98,5				82,27		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha							100	5.311,39	803,78			6.115,17	6.115,17		100				6.420,93		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028					
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN											
SETITJEN	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																						
		Sasaran Kegiatan I	Peningkatan Kualitas Manajemen Internal																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							94				264,38			95				277,60			
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi								264,38							277,60			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan							6				2.434,60			7				2.556,33			
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Tatakelola Pengawasan		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Interna	959 - Layanan Tatakelola Pengawasan												1.278,17			
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965- Layanan Audit Internal								1.217,30							1.278,17			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks IKPA											1.217,30							1.278,17			
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				98,7				281,50			99				293,88			
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN								196,76							206,59			
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				98,7				84,74			99				87,28			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha											6.741,97			100				7.079,07			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	Non APBN	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
	SETITJEN	Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen Internal																				Sekretariat Inspektorat Jenderal	
			Sasaran Kegiatan I	Peningkatan Kualitas Manajemen Internal																				
			Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)							97					291,48			239,80	251,79	264,38	277,60	291,48	Sekretariat Inspektorat Jenderal
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi									291,48			239,80	251,79	264,38	277,60	291,48	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan							8					2.684,15			2.208,26	2.318,67	2.434,60	2.556,33	2.684,15	Sekretariat Inspektorat Jenderal
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 - Layanan Tatakelola Pengawasan		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Interna	959 - Layanan Tatakelola Pengawasan								1.104,13	1.159,34	1.217,30	1.278,17	1.342,08		
																1.342,08								
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965- Layanan Audit Internal												1.104,13	1.159,34	1.217,30	1.278,17	1.342,08	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks IKPA												1.342,08								
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				99,5					306,83			258,34	269,66	281,50	293,88	306,83	Sekretariat Inspektorat Jenderal
																			178,46	187,39	196,76	206,59	216,92	
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan PENGANGGARAN				99,5					89,90			79,88	82,27	84,74	87,28	89,90	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha												7.433,03			6.115,17	6.420,93	6.741,97	7.079,07	7.433,03	Sekretariat Inspektorat Jenderal

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				Layanan							2.038,39
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				Layanan							2.038,39
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal				Layanan							2.038,39
				5531 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				Layanan							70,08
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Profesionalitas ASN								86,21					88.50	1.819,15
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM				Layanan							1.819,15
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penilaian Mandiri SPIP							Indeks	3,939					4	488,00
				5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				Layanan							488,00

Program / Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Sasaran Kegiatan II	Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN						Indeks								
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM							19,53					25	716,48	
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			Layanan							716,48	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas						Presentase	44,44					50	997,16	
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			Layanan							997,16	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Integritas						Presentase	75,88					77	15,00	
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			Layanan							15,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana	
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			Sasaran Kegiatan II	Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN																		
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM							50			870,89			716,48	752,31	789,92	829,42	870,89	Sekretariat Inspektorat Jenderal
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							870,89			716,48		789,92	829,42	870,89	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas							90			1.212,05			997,16	1.047,01	1.099,36	1.154,33	1.212,05	Sekretariat Inspektorat Jenderal
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							1.212,05			997,16	1.047,01	1.099,36	1.154,33	1.212,05	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Integritas							85			18,23			15,00					Sekretariat Inspektorat Jenderal
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							18,23			15,00	15,75	16,54	17,36	18,23	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			Sasaran Kegiatan III	Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan yang resilien dan efektif														
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan							100						100	281,05
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957- Layanan Hukum				Layanan							140,53
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969- Layanan Bantuan Hukum				Layanan							140,53

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
			Sasaran Kegiatan III	Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan yang resilien dan efektif																						
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan								100		281,05			281,05	281,05		100				295,10		
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957- Layanan Hukum							140,53			140,53							147,55		
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969- Layanan Bantuan Hukum							140,53										147,55		
														140,53												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
			Sasaran Kegiatan III	Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan yang resilien dan efektif																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan													281,05	295,10	309,86	325,35	341,62	Sekretariat Inspektorat Jenderal			
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	957- Layanan Hukum										140,53	147,55	154,93	162,68	170,81				
					5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Resiko	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969- Layanan Bantuan Hukum											140,53	147,55	154,93	162,68	170,81			

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK						75		504,09			504,09	504,09		80				529,30		
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal					504,09			504,09							529,30		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat						35		2.410,46			2.410,46	2.410,46		40				2.530,98		
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal					2.410,46			2.410,46							2.530,98		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut <i>Area of Improvement</i> (AoI) Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi						83,00		356,59			356,59	356,59		85,00				374,42		
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal					356,59			356,59							374,42		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP						60		356,59			356,59	356,59		65				374,42		
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal					356,59			356,59							374,42		
		Sasaran Kegiatan 2	Menjamin mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertama dan lini kedua sesuai standar																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti						80		1.889,28			1.889,28	1.889,28		82				1.983,74		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK							85					555,76			90					583,55		
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal									555,76								583,55		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat							45					2.657,53			50					2.790,41		
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal									2.657,53								2.790,41		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut <i>Area of Improvement</i> (AoI) Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi							87,00					393,14			89,00					412,79		
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal									393,14								412,79		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP							70					393,14			75					412,79		
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal									393,14								412,79		
		Sasaran Kegiatan 2	Menjamin mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertama dan lini kedua sesuai standar																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti							85					2.082,93			89					2.187,08		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK							95				612,73			504,09	529,30	555,76	583,55	612,73	Inspektorat Jenderal
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal								612,73			504,09	529,30	555,76	583,55	612,73	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat							55				2.929,93			2.410,46	2.530,98	2.657,53	2.790,41	2.929,93	Inspektorat Jenderal
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal								2.929,93			2.410,46	2.530,98	2.657,53	2.790,41	2.929,93	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut Area of Improvement (AoI) Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi							91,00					612,73		356,59	374,42	393,14	412,79	612,73	Inspektorat Jenderal
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal								612,73			356,59	374,42	393,14	412,79	612,73	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP							80					433,43		356,59	374,42	393,14	412,79	433,43	Inspektorat Jenderal
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal									433,43		356,59	374,42	393,14	412,79	433,43	
		Sasaran Kegiatan 2	Menjamin mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertama dan lini kedua sesuai standar																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti							91					2.296,43		1.889,28	1.983,74	2.082,93	2.187,08	2.296,43	Inspektorat Jenderal

Program / Kegiatan			Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025				
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal				Layanan							
			Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Level Kapabilitas Pengawasan Intern						Persentase							
			Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Kapabilitas APIP							3,36				3,48	74,74	
				6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal				Dokumen						74,74	
RO SEKJEN TURUN KE DAERAH										Skor							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal															1.983,74				
		Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Level Kapabilitas Pengawasan Intern																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Kapabilitas APIP																					
			6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal																			
RO SEKJEN TURUN KE DAERAH												74,74			74,74						78,48			

Program/ Kegiatan				Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana	
								SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
								KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029
														Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
					6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal										1.983,74	2.082,93	2.187,08	2.296,43					
			Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Level Kapabilitas Pengawasan Intern																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Kapabilitas APIP												74,74	78,48	82,40	86,52	90,85	Inspektorat Jenderal				
					6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 - Layanan Audit Internal									74,74	78,48	82,40	86,52	90,85					
RO SEKJEN TURUN KE DAERAH														90,85											

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
BIRO SDM DAERAH	Kegiatan 1:	Pembinaan Sumber Daya Manusia																						
		Sasaran Kegiatan																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks IP ASN							65							65							
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM																		
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	968 - Layanan Pendidikan Kedinasan							426,85			34				4.950,21				
BIRO ORTALA MR DAERAH	Kegiatan 1:	Pelaksanaan Kepatuhan Internal																						
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya integritas dan akuntabilitas Kerja																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Maturitas SPIP																					
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja			519		34.752,01			34.752,01	34.740,08	519				34.752,01				
	Kegiatan 2:	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi																						
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelayanan prima																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Pelayanan Publik																					
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja			512		47.407,64			47.407,64	47.407,64	512				49.778,02				

Program/ Kegiatan			Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028					
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
BIRO SDM DAERAH	Kegiatan 1:	Pembinaan Sumber Daya Manusia																							
		Sasaran Kegiatan																							
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks IP ASN							65								65							
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM																			
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	968 - Layanan Pendidikan Kedinasan				34				4.957,26				34				249,36			
BIRO ORTALA MR DAERAH	Kegiatan 1:	Pelaksanaan Kepatuhan Internal																							
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya integritas dan akuntabilitas Kerja																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Maturitas SPIP																						
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja				519				34.752,01				519				34.752,01			
	Kegiatan 2:	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi																							
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelayanan prima																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Pelayanan Publik																						
			5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja				512				52.266,92				512				54.880,27				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO															TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
BIRO SDM DAERAH	Kegiatan 1:	Pembinaan Sumber Daya Manusia																					
		Sasaran Kegiatan																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Indeks IP ASN						65													Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM																	
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	968 - Layanan Pendidikan Kedinasan			34					256,84			426,85	4.950,21	4.957,26	249,36	256,84		
BIRO ORTALA MR DAERAH	Kegiatan 1:	Pelaksanaan Kepatuhan Internal																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya integritas dan akuntabilitas Kerja																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Maturitas SPIP																			Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja			519					43.069,97				34.752,01	34.752,01	34.752,01	43.069,97		
	Kegiatan 2:	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelayanan prima																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Pelayanan Publik																			Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 - Layanan Reformasi Kinerja			512					57.624,28				49.778,02	52.266,92	54.880,27	57.624,28		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
BIRO HUKUM DAERAH	Kegiatan 1:	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif															
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum						Dokumen								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian layanan advokasi hukum							100%					100%		
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum			Layanan	100%				100%	2.500,00		
PUSDATIN DAERAH	Kegiatan 1:	Pengembangan Data dan Informasi							Persen						24	5.664,93	
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik						Persen								
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran						Layanan	100%					100%	22.326,12	
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi			Layanan								
BIRORENKS DAERAH	Kegiatan 1:								Persentase								
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah														
		Indikator Kinerja Kegiatan	9. Nilai SAKIP							100%					100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
BIRO HUKUM DAERAH	Kegiatan 1:	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif																						
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian layanan advokasi hukum						100%							100%								
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum			100%		2.500,00			2.500,00		100%			2.500,00					
PUSDATIN DAERAH	Kegiatan 1:	Pengembangan Data dan Informasi														25								
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran												100%				36.623,52					
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi			1		22.326,12			22.326,12	22.326,12		1				36.623,52			
BIRORENKS DAERAH	Kegiatan 1:																							
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	9. Nilai SAKIP														100%							

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028						
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN												
BIRO HUKUM DAERAH	Kegiatan 1:	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif																							
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian layanan advokasi hukum							100%								100%							
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum					100%				2.500,00				100%			2.500,00			
PUSDATIN DAERAH	Kegiatan 1:	Pengembangan Data dan Informasi																							
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran							100%				36.623,52				100%			36.623,52				
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				1				36.623,52				1			36.623,52				
BIRORENKS DAERAH	Kegiatan 1:																								
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	9. Nilai SAKIP								100%							100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
BIRO HUKUM DAERAH	Kegiatan 1:	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitas Bantuan Hukum yang Efektif																				
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemberian layanan advokasi hukum							100%												Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	969 - Layanan Bantuan Hukum				100%				2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
PUSDATIN DAERAH	Kegiatan 1:	Pengembangan Data dan Informasi														5.664,93						
		Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran							100%				36.623,52			22.326,12	36.623,52	36.623,52	36.623,52	36.623,52	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				1				36.623,52				36.623,52	36.623,52	36.623,52	36.623,52	
BIRORENKS DAERAH	Kegiatan 1:																					
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	9. Nilai SAKIP							100%												Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)					
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran									15.990				
		5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi									519				
BIROKEU DAERAH	Kegiatan 1:	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN															
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset														
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)														
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan											
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Capaian target PNPB														
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Kualitas -Laporan Keuangan														
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Pengelolaan Aset														
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN											
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran							100%				100%			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
			5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				15.990		1.151,28			1.151,28	1.151,28		15.990				1.151,28		
			5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				519		34.752,01			34.752,01	34.740,08		519				34.752,01		
BIROKEU DAERAH	Kegiatan 1:	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)																				
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan			2,364		9.238,90			9.238,90	8.578,79		1			8.836,16			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Capaian target PNBP																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Kualitas -Laporan Keuangan																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Pengelolaan Aset																				
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN			72		321,89			321,89	31,74		1			32,69			
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran													100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																			
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028													
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN																
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran					15.990					1.151,28					15.990					1.151,28			
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evahuasi					519					34.752,01					519					34.752,01			
BIROKEU DAERAH	Kegiatan 1:	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN																											
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset																										
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)																										
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan					1					9.101,24				1						9.374,28			
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Capaian target PNBP																										
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Kualitas -Laporan Keuangan																										
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Pengelolaan Aset																										
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN					1					33,67				1						34,68		
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran								100%								100%										

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran				15.990				11.903,29				1.151,28	1.151,28	1.151,28	11.903,29		
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				519				17.009,66				34.752,01	34.752,01	34.752,01	17.009,66		
BIROKEU DAERAH	Kegiatan 1:	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)																				Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 - Layanan Manajemen Keuangan				1				9.655,51				8.836,16	9.101,24	9.374,28	9.655,51		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Capaian target PNBPN																				Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Kualitas -Laporan Keuangan																				Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
		Indikator Kinerja Kegiatan	4. Indeks Pengelolaan Aset																				Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
						5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN				1				35,72			32,69	33,67	34,68	35,72	
		Indikator Kinerja Kegiatan	5.Persentase Terpenuhihnya Layanan Perkantoran							100%												Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	BULP DAERAH	Kegiatan 1:	Pengelolaan Administrasi Umum														
			Sasaran Kegiatan 1	Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah													
			Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik													
										88%						90%	
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum										
			Indikator Kinerja Kegiatan	8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran						Persentase							
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran										
			Indikator Kinerja Kegiatan	5. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan													
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951- Layanan Sarana Internal									33	11.418,38
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971- Layanan Prasarana Internal		Satuan Kerja							1.000	125.950,90

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN												
BULP DAERAH	Kegiatan 1:	Pengelolaan Administrasi Umum																					
		Sasaran Kegiatan 1	Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik																				
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				2,205		25.956,63			25.956,63	26.257,09	92% 1				27.044,80		
		Indikator Kinerja Kegiatan	8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran																				
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				21,216	3.267.973,81				3.267.973,81	3.267.973,81	1				3.366.013,02		
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan							1							1						
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951- Layanan Sarana Internal				33					11.418,38		8.304				12.560,22		
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971- Layanan Prasarana Internal				1.000					125.950,90		149.513				715.295,70		

Program/ Kegiatan			Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028								
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
BULP DAERAH	Kegiatan 1:	Pengelolaan Administrasi Umum																							
		Sasaran Kegiatan 1	Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik																						
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum				94%	1			27.856,15			1			28.691,83				
		Indikator Kinerja Kegiatan	8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran																						
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran				1				3.466.993,41			1			3.571.003,21				
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan															1							
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951- Layanan Sarana Internal				8.672				13.816,24			5			15.197,87				
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971- Layanan Prasarana Internal				137.106				713.103,06			0			717.227,26				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																		Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)												TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
BULP DAERAH	Kegiatan 1:	Pengelolaan Administrasi Umum																						
		Sasaran Kegiatan 1	Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik																			Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum					98%				29.552,59			27.044,80	27.856,15	28.691,83	29.552,59			
		Indikator Kinerja Kegiatan	8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran																					
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran					1				3.678.133,31			3.366.013,02	3.466.993,41	3.571.003,21	3.678.133,31			
		Indikator Kinerja Kegiatan	5. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan								1											Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951- Layanan Sarana Internal									16.717,65			11.418,38	12.560,22	13.816,24	15.197,87	16.717,65		
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971- Layanan Prasarana Internal									659.250,58			125.950,90	715.295,70	713.103,06	717.227,26	659.250,58		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO										Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)													
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO											
										Tahun 2025										
										Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
	BIRO HUMAS DAERAH	Kegiatan 1:																		
			Sasaran Kegiatan																	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah																
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi													
RO TURUN KE DAERAH																				
	DJTR DAERAH	Kegiatan 1:	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Daerah)								Persentase									
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang																
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR												100,00%				
					6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR	Rekomendasi Kebijakan					32	1.055,52			
					6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Persetujuan KKPR		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Persetujuan KKPR	Dokumen Persetujuan KKPR					3857	11.088,88			
	PHPT DAERAH	Kegiatan 1:	Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT serta Mitra Kerja								Rekomendasi Kebijakan									
			Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital							Dokumen Persetujuan KKPR									
			Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase bidang tanah yang bersertipikat								75,88				76,67	432.667,98			
					6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang				7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT											
					BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali	Layanan					628.375				
					BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Informasi SKPT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Informasi SKPT	Layanan					279.214				

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN														
	BIRO HUMAS DAERAH	Kegiatan 1:																							
		Sasaran Kegiatan																							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah																						
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				13.793,29			13.793,29	13.824,00		80				52.850,00					
RO TURUN KE DAERAH																									
	DJTR DAERAH	Kegiatan 1:	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Daerah)																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR					100,00%							100,00%	100,00%									
				6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR		32		1.055,52			1.055,52	1.055,52	32	33	736,00		1.121,18						
				6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Persetujuan KKPR		3857		11.088,88			11.088,88	11.088,88	1.723	1.723	2.239,90		4.953,63						
	PHPT DAERAH	Kegiatan 1:	Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT serta Mitra Kerja																						
		Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital																						
		Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase bidang tanah yang bersertipikat					76,67					513.385,96		80,64				959.991,27						
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang			7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT																		
					BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali	628.375		8.151,14	8.151,14	8.797,25	659.706				8.576,18						
					BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Informasi SKPT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Informasi SKPT	279.214		558,43	558,43	558,43	289.387				578,77						

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028								
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN											
	BIRO HUMAS DAERAH	Kegiatan 1:																						
			Sasaran Kegiatan																					
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah																				
					5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			85				54.964,00			90				57.162,56			
RO TURUN KE DAERAH																								
	DJTR DAERAH	Kegiatan 1:	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Daerah)																					
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang																				
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR					100,00%	100,00%							100,00%	100,00%						
					6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR		33	33	796,95			1.154,84			33	33	836,80			1.189,49		
					6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Persetujuan KKPR		1.810	1.895	2.470,65			5.448,99			1.901	2.085	2.724,61			5.993,89		
	PHPT DAERAH	Kegiatan 1:	Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT serta Mitra Kerja																					
			Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital																				
			Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase bidang tanah yang bersertipikat					84,61					958.514,66			88,58			958.514,66				
					6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang			7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT																
						BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		627.011				8.151,14			627.011				8.151,14			
						BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Informasi SKPT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		279.214				558,43			279.214				558,43			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
	BIRO HUMAS DAERAH	Kegiatan 1:																				
		Sasaran Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah																		Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
				5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi						95			59.449,06			52.850,00	54.964,00	57.162,56	59.449,06	
RO TURUN KE DAERAH																						
	DJTR DAERAH	Kegiatan 1:	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Daerah)																			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR							100,00%	100,00%										Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
				6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR	33	33	878,64			1.225,16			1.055,52	1.121,18	1.154,84	1.189,49	1.225,16
				6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Persetujuan KKPR		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Persetujuan KKPR	1.997	2.295	3.005,31			6.593,28			11.088,88	4.953,63	5.448,99	5.993,89	6.593,28
	PHPT DAERAH	Kegiatan 1:	Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT serta Mitra Kerja																			
		Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital																			
		Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase bidang tanah yang bersertipikat								92,54				923.764,14			432.667,98	959.991,27	958.514,66	958.514,66	923.764,14
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang			7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT															
					BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali		627.011				8.151,14				8.576,18	8.151,14	8.151,14	8.151,14
					BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Informasi SKPT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Informasi SKPT		279.214				558,43				578,77	558,43	558,43	558,43

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
										Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengecekan SHAT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengecekan SHAT	Layanan						3.751.848	
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pemecahan SHAT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pemecahan SHAT	Layanan						809.051	
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	Layanan						4.510.534	
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	Layanan						15.990	
			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen						519	
	Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat						Layanan							38.174,97
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1	Bidang	198.505				148.215	
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2	Bidang	150.422				151.289	
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3	Bidang	503.825				406.411	
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4	Bidang	206.062				181.865	
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5	Bidang	1.704.227				1.938.888	
	Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat						Bidang							
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1	Bidang	798				957	278,49
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2	Bidang	4.722				2.677	677,28
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3	Bidang	7.791				12.329	2.663,06
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4	Bidang	1.826				1.291	225,93
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5	Bidang	19.290				25.594	3.454,55

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO																			
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
								Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
								VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengecekan SHAT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengecekan SHAT	3.751.848		7.503,70			7.503,70	7.503,70		3.564.081			7.128,16		
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pemecahan SHAT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pemecahan SHAT	809.051		19.417,22			19.417,22	19.417,22		834.309			20.023,42		
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	4.510.534		9.148,28			9.148,28	9.021,07		4.413.632			8.827,26		
			BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	15.990		1.151,28			1.151,28	1.151,28		17.230			1.240,56		
			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	519		34.752,01			34.752,01	34.740,08		483			34.737,20		
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1	148.215		38.174,97		38.174,97	38.174,97		147.965			38.174,97		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2	151.289		34.040,03		34.040,03	34.040,03		151.289			34.040,03		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3	406.411		78.843,73		78.843,73	78.843,73		406.411			78.843,73		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4	181.865		28.916,54		28.916,54	28.916,54		181.865			28.916,54		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5	1.938.888	192.982,88	49.378,13		242.361,00	245.616,75		6.423.007			691.548,23		
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1	957		278,49		278,49	272,09		935			272,09		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2	2.677		677,28		677,28	578,11		2.285			578,11		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3	12.329		2.663,06		2.663,06	1.063,58		4.924			1.063,58		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4	1.291		225,93		225,93	297,50		1.700			297,50		
			6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5	25.594		3.454,55		3.454,55	1.507,28		11.165			1.507,28		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
										Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN										
																								</

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
				BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengecekan SHAT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - Layanan Pengecekan SHAT		3.751.848				7.503,70				7.128,16	7.503,70	7.503,70	7.503,70	
				BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pemecahan SHAT	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pemecahan SHAT		809.051				19.417,22				20.023,42	19.417,22	19.417,22	19.417,22	
				BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan		4.574.142				9.148,28				8.827,26	9.148,28	9.148,28	9.148,28	
				BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang		15.990				1.151,28				1.240,56	1.151,28	1.151,28	1.151,28	
				EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		519				34.752,01				34.737,20	34.752,01	34.752,01	34.752,01	
			Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1		147.965			38.174,97				38.174,97	38.174,97	38.174,97	38.174,97	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2		151.289			34.040,03			34.040,03	34.040,03	34.040,03	34.040,03	34.040,03	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3		406.411			78.843,73			78.843,73	78.843,73	78.843,73	78.843,73	78.843,73	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4		181.865			28.916,54			28.916,54	28.916,54	28.916,54	28.916,54	28.916,54	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5		6.423.007			691.548,23			242.361,00	691.548,23	691.548,23	691.548,23	691.548,23	
			Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1		935			272,09			278,49	272,09	272,09	272,09	272,09	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2		2.285			578,11			677,28	578,11	578,11	578,11	578,11	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3		4.924			1.063,58			2.663,06	1.063,58	1.063,58	1.063,58	1.063,58	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4		1.700			297,50			225,93	297,50	297,50	297,50	297,50	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5		11.165			1.507,28			3.454,55	1.507,28	1.507,28	1.507,28	1.507,28	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO												
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025				
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat						Bidang							
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U19 - SHAT Redistribusi Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U19 - SHAT Redistribusi Tanah	Bidang	260.953				175.865	2.286,25
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat													
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U20 - SHAT Konsolidasi Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U20 - SHAT Konsolidasi Tanah	Bidang	3.827				3.187	41,43
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat													
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1	Bidang	381				25	21,85
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2	Bidang	1.614				34	24,96
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3	Bidang	1.521				448	267,90
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4	Bidang	314				13	5,85
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	Bidang	3.435				1.003	306,92
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	Bidang	3				0	
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	Bidang	12				8	10,23
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	Bidang	145				101	59,09
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	Bidang	50				38	43,86

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																					
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U19 - SHAT Redistribusi Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U19 - SHAT Redistribusi Tanah	175.865		2.286,25		2.286,25	2.286,22		231.033				3.003,43			
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																					
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U20 - SHAT Konsolidasi Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U20 - SHAT Konsolidasi Tanah	3.187		41,43		41,43	41,43		3.187				41,43			
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																					
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1	25		21,85		21,85	21,85		174				152,08			
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2	34		24,96		24,96	24,96		27				16,35			
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3	448		267,90		267,90	267,90		508				17,30			
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4	13		5,85		5,85	5,85									
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	1.003		306,92		306,92	306,92		605				306,80			
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	0							37				66,30			
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	8		10,23		10,23	10,23		2				2,99			
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	101		59,09		59,09	59,09		53				31,01			
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	38		43,86		43,86	43,86									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Tahun 2029						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																				
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U19 - SHAT Redistribusi Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U19 - SHAT Redistribusi Tanah		157,473				2.047,15		2.286,25	3.003,43	2.047,15	2.047,15	2.047,15		
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																				
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U20 - SHAT Konsolidasi Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U20 - SHAT Konsolidasi Tanah		3.187				41,43		41,43	41,43	41,43	41,43	41,43		
		Indikator Rincian Output	Jumlah bidang tanah yang bersertipikat																				
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1		34				24,96		21,85	152,08	24,96	24,96	24,96		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2		34				16,35		24,96	16,35	16,35	16,35	16,35		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3		508				17,30		267,90	17,30	17,30	17,30	17,30		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4								5,85						
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT		U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5		605				306,80		306,92	306,80	306,80	306,80	306,80		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1		37				66,30			66,30	66,30	66,30	66,30		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2		2				2,99		10,23	2,99	2,99	2,99	2,99		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5		115				68,77		59,09	31,01	67,28	67,28	68,77		
				6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5								43,86						

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO													
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
													Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah							Bidang								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja													100	1.236,65	
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	003 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	Orang	Orang					3881	1.236,65	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT													100	12.368,36	
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	003 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	001 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah	Laporan	Laporan					33	10.751,33	
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	004 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	002 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	Laporan	Laporan					415	1.617,03	
		Kegiatan 2:	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah dan															
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan															
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum								100%					0	625,00	
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	Dokumen	161.464					230.897	67.002,50	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja							100		1.236,65			1.236,65		100				1.488,47			
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	003 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	3881		1.236,65			1.236,65	1.236,65	3.399				1.488,47			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT							100		12.368,36			12.368,36		100				12.368,36			
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	003 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	001 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah	33		10.751,33			10.751,33	10.751,33	33				10.751,33			
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	004 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	002 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	437		1.617,03			1.617,03	1.617,03	437				1.617,03			
		Kegiatan 2:	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah dan																					
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum												625,00		17%				643,75			
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	230.897		67.002,50			67.002,50	67.091,96	206.437				56.481,11			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028						
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
							APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
		Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja						100				1.236,65			100				1.236,65					
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	003 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah				1.236,65		3881				1.236,65						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT						100				12.368,36			100				12.368,36					
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	003 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	001 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah				10.751,33		33				10.751,33						
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	004 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	002 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah				1.617,03		437				1.617,03						
		Kegiatan 2:	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah dan																						
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum						17%				663,06			17%				682,95					
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum				66.932,04		231.145				66.932,04						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja							100				1.236,65			1.236,65	1.488,47	1.236,65	1.236,65	1.236,65	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	003 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah					1.236,65			1.236,65	1.488,47	1.236,65	1.236,65	1.236,65	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT							100				12.368,36			12.368,36	12.368,36	12.368,36	12.368,36	12.368,36	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	003 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	001 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah					10.751,33			10.751,33	10.751,33	10.751,33	10.751,33	10.751,33	
				6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	004 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT	BKC - Pemantauan lembaga	002 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah					1.617,03			1.617,03	1.617,03	1.617,03	1.617,03	1.617,03	
		Kegiatan 2:	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah dan																			
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum							17%				703,44			625,00	643,75	663,06	682,95	703,44	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum					66.932,04			67.002,50	56.481,11	66.932,04	66.932,04	66.932,04	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)			Non APBN
	Kegiatan 3:	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah							persen							
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadiministrasian Tanah Ulayat						Dokumen							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan													
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	Dokumen	24.407				21.525	6.603,02
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Data Tanah Instansi Pemerintah	7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Data Tanah Instansi Pemerintah	Lembaga	33				33	12.576,15
PSKP DAERAH	Kegiatan 1:	Penyelesaian sengketa pertanahan							Dokumen							
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal						Lembaga							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan							64,50%					50%	22.014,30
				6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	002 - Berita Acara Sosialisasi/ Pembinaan/ Koordinasi/ Pemataan/ Evaluasi		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	002 - Berita Acara Sosialisasi/ Pembinaan/ Koordinasi/ Pemataan/ Evaluasi	Laporan					33	1.041,03
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah						persen							
				6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah	Perkara					1044	20.973,27

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN											
	Kegiatan 3:	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah																				
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadmitrasian Tanah Ulayat																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan																			
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	21.525		6.603,02		6.603,02	6.618,93		22.925			6.603,02		
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Data Tanah Instansi Pemerintah	7973 - Pengaturan Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Data Tanah Instansi Pemerintah	33		12.576,15		12.576,15	12.576,15		33			12.576,15		
PSKP DAERAH	Kegiatan 1:	Penyelesaian sengketa pertanahan																				
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan							50%	20.973,27	1.041,03		22.014,30	22.014,30		52,50%			21.504,72		
				6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembinaan/Koordinasi/Pemantauan/Evaluasi		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembinaan/Koordinasi/Pemantauan/Evaluasi	33		1.041,03		1.041,03	1.041,03		33			531,45		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah																			
				6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah	1044	20.973,27			20.973,27	20.973,27		1.044			20.973,27		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
		Kegiatan 3:	Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah																		
		Sasaran Kegiatan 1	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadiministrasian Tanah Ulayat																		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan																		Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD		22.925			6.603,02			6.603,02	6.603,02	6.603,02	6.603,02	6.603,02
				6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Data Tanah Instansi Pemerintah	7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	002 - Data Tanah Instansi Pemerintah		33			12.576,15			12.576,15	12.576,15	12.576,15	12.576,15	12.576,15
		PSKP DAERAH	Kegiatan 1:	Penyelesaian sengketa pertanahan																	
		Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal																		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan							60%				30.981,14			22.014,30	21.504,72	26.840,00	28.843,70	30.981,14 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan	FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembinaan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi		FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembinaan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi		34			1.206,14			1.041,03	531,45	1.094,00	1.148,70	1.206,14
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah																		
				6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah		1.712			39.814,14			20.973,27	20.973,27	27.337,57	34.551,66	39.814,14

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN
		Kegiatan 2:	Pencegahan dan Penyelesaian konflik														
		Sasaran Kegiatan	1. Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal														
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan							47,20%					50,00%	1.466,76	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah														
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah	Perkara					26	1.466,76	
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan							53,80%					50,00%	7.024,48	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah														
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah	Perkara					65	7.024,48	
		Sasaran Kegiatan	2. Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan														
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan.												100%	2.713,97	
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Rekomendasi Kebijakan					511	2.713,97	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 2:	Pencegahan dan Penyelesaian konflik																					
		Sasaran Kegiatan	1. Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan						50,00%	1.466,76				1.466,76	1.466,76		52,50%				1.466,76		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah																				
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah	26	1.466,76				1.466,76	1.466,76	26				1.466,76		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan						50,00%	2.442,37	4.582,11				7.024,48	7.024,48	52,50%				5.297,89		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah																				
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah	65	2.442,37	4.582,11			7.024,48	7.024,48	65				5.297,89		
		Sasaran Kegiatan	2. Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan.						100%		2.713,97				2.713,97	2.713,97	100%				2.713,97		
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	511		2.713,97			2.713,97	2.713,97	511				2.713,97		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028								
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN											
	Kegiatan 2:	Pencegahan dan Penyelesaian konflik																						
		Sasaran Kegiatan	1. Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan							55,00%				1.655,00				57,50%				1.800,00		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah																					
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah			QCE - Penanganan Perkara	007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah			26		1.525,43			27				1.647,46		
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan							55,00%				5.827,67				57,50%				6.410,44		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah																					
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah			QCE - Penanganan Perkara	008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah			65		7.516,20			65				8.042,33		
		Sasaran Kegiatan	2. Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan.							100%				2.858,00				100%				3.001,00		
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan			513		2.858,00			513				3.001,00		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)											
							Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
	Kegiatan 2:	Pencegahan dan Penyelesaian konflik																					
		Sasaran Kegiatan	1. Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan					60%				1.956,00			1.466,76	1.466,76	1.655,00	1.800,00	1.956,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah																				
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah	27		1.752,31			1.466,76	1.466,76	1.525,43	1.647,46	1.752,31				
		Indikator Kinerja Kegiatan	2. Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan					60%				7.051,49			7.024,48	5.297,89	5.827,67	6.410,44	7.051,49	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah																				
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah	65		8.741,75			7.024,48	5.297,89	7.516,20	8.042,33	8.741,75				
		Sasaran Kegiatan	2. Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan.					100%				3.152,00			2.713,97	2.713,97	2.858,00	3.001,00	3.152,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota			
				6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan		ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	513		3.152,00			2.713,97	2.713,97	2.858,00	3.001,00	3.152,00				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	Kegiatan 3:	Penanganan perkara pertanahan															
		Sasaran Kegiatan	Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal						Rekomendasi Kebijakan								
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan							30%					50% 43.823,30		
				6427 - Penanganan Perkara Pertanahan	BCE - Penanganan Perkara	001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah		BCE - Penanganan Perkara	001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah	Perkara				57	1.735,43		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah						persen								
				6427 - Penanganan Perkara Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah	Perkara				894	42.087,88		
PENTAG DAERAH	Kegiatan 6:	Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam mendukung kesejahteraan dan															
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria								9.300	7.549,95		43.200	21.901,78		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria														
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	Data		33	2.817,78	33	2.817,78		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria														
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	001 - Akses Reforma Agraria Kategori I		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	Kepala Keluarga		400	188,00	5.400	2.268,00		
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	002 - Akses Reforma Agraria Kategori II		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	Kepala Keluarga		300	141,92	7.200	3.146,40		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026					
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 3:	Penanganan perkara pertanahan																					
		Sasaran Kegiatan	Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan						50%		43.823,30			43.823,30	43.823,30		52,50%				43.823,30		
				6427 - Penanganan Perkara Pertanahan	BCE - Penanganan Perkara	001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah		BCE - Penanganan Perkara	001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah	57		1.735,43		1.735,43	1.735,43		57				1.735,43		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah																				
				6427 - Penanganan Perkara Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah	894		42.087,88		42.087,88	42.087,88		894				42.087,88		
PENTAG DAERAH	Kegiatan 6:	Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam mendukung kesejahteraan dan																					
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria						43.200	4.732,16	2.817,78			21.901,78	21.901,78	44.600	276.900	38.168,33			146.578,64		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria																				
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	33		2.817,78		2.817,78	2.817,78	33	33	5.085,93			5.085,93		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria																				
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	001 - Akses Reforma Agraria Kategori I		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	5.400	188,00			2.268,00	2.268,00	12.800	20.400	8.192,00			9.512,95		
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	002 - Akses Reforma Agraria Kategori II		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	7.200	141,92			3.146,40	3.146,40	31.800	256.500	19.398,00			109.315,73		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 3:	Penanganan perkara pertanahan																							
		Sasaran Kegiatan	Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan						55%					118.062,00			57,50%				126.909,00				
				6427 - Penanganan Perkara Pertanahan	BCE - Penanganan Perkara	001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah		BCE - Penanganan Perkara	001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah		89			4.350,00			90				4.619,00				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah																						
				6427 - Penanganan Perkara Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah		1.445			113.712,00			1.480				122.290,00				
PENTAG DAERAH	Kegiatan 6:	Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam mendukung kesejahteraan dan																							
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria						275.900	275.900	158.671,44			261.682,65			350.100	350.100	366.845,24		295.185,15				
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria																						
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	33	33	5.865,94		5.865,94		33	33	6.159,24		6.159,24					
		Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria																						
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	001 - Akses Reforma Agraria Kategori I		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	20.400	20.400	9.445,20		9.512,95		20.400	20.400	9.628,80		9.512,95					
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	002 - Akses Reforma Agraria Kategori II		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	255.500	255.500	115.741,50		108.889,73		329.700	329.700	152.321,40		140.498,93					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
						APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN									
		Kegiatan 3:	Penanganan perkara pertanahan																			
		Sasaran Kegiatan	Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan							60%				136.346,00			43.823,30	43.823,30	118.062,00	126.909,00	136.346,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6427 - Penanganan Perkara Pertanahan	BCE - Penanganan Perkara	001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah		BCE - Penanganan Perkara	001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah		91			4.904,00			1.735,43	1.735,43	4.350,00	4.619,00	4.904,00	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah																			
				6427 - Penanganan Perkara Pertanahan	QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah		QCE - Penanganan Perkara	002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah		1.515			131.442,00			42.087,88	42.087,88	113.712,00	122.290,00	131.442,00	
PENTAG DAERAH		Kegiatan 6:	Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam mendukung kesejahteraan dan																			
		Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria							273.300	273.300	508.091,30			262.176,31		21.901,78	146.578,64	261.682,65	295.185,15	262.176,31	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria																			
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah		BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	33	33	6.467,20		6.467,20			2.817,78	5.085,93	5.865,94	6.159,24	6.467,20	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Akses Reforma Agraria																			
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	001 - Akses Reforma Agraria Kategori I		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	20.400	20.400	9.716,20		9.512,95			2.268,00	9.512,95	9.512,95	9.512,95	9.512,95	
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	002 - Akses Reforma Agraria Kategori II		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	252.900	252.900	119.115,90		107.782,13			3.146,40	109.315,73	108.889,73	140.498,93	107.782,13	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)				Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target				
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025							
										Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										Vol (Batas Bawah)			APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	003 - Akses Reforma Agraria Kategori III						2.000	1.212,34			12.000	5.364,00
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV						2.800	1.328,67			6.000	2.646,00
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	005 - Akses Reforma Agraria Kategori V						3.700	1.811,63			11.800	5.262,80
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI						100	49,60			800	396,80
			Indikator Rincian Output	Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria													
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	27.900	59.492,84			128.200	61.379,20
					6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	Kepala Keluarga	200	110,20			2.600	1.432,60
			Kegiatan 1:	Nilai Tata Guna Tanah													
			Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas													
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah								6	2.714,71			6	2.714,71
			Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah													
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	Rekomendasi Kebijakan	4	2.534,27			4	2.534,27
			Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah													
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	Rekomendasi Kebijakan	0				0	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Tanah Kritis													
					6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	Rekomendasi Kebijakan	2	180,45			2	180,45

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	003 - Akses Reforma Agraria Kategori III				12.000	1.212,34				5.364,00	5.364,00							
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV				6.000	1.328,67				2.646,00	2.646,00							
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	005 - Akses Reforma Agraria Kategori V				11.800	1.811,63				5.262,80	5.262,80							
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI				800	49,60				396,80	396,80							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria																			
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	128.200	2.542,44	58.836,76			61.379,20	61.379,20	9.200	42.400	5.428,00			22.201,23	
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	2.600	1.432,60				1.432,60	1.432,60	100	800	64,40			462,80	
		Kegiatan 1:	Nilai Tata Guna Tanah																			
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah						6		2.714,71			2.714,71	2.714,71	18	18	10.069,27			11.103,11	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																			
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	4		2.534,27			2.534,27	2.534,27	11	11	9.693,55			10.727,39	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																			
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	0							0	0					
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Tanah Kritis																			
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	2		180,45			180,45	180,45	7	7	375,72			375,72	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027									Tahun 2028						
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN											
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	003 - Akses Reforma Agraria Kategori III																			
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV																			
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	005 - Akses Reforma Agraria Kategori V																			
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI																			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria																					
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	44.400	271.900	27.483,60		136.951,23			306.000	275.100	198.594,00			138.551,23			
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan		QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	200	800	135,20		462,80			200	800	141,80			462,80			
		Kegiatan 1:	Nilai Tata Guna Tanah																					
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah						48	48	32.884,50		32.884,50			10	10	4.134,10			4.134,10			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																					
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	10	10	7.482,72		7.482,72			4	4	3.771,40			3.771,40			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																					
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	32	32	25.047,16		25.047,16			0	0							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Tanah Kritis																					
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	6	6	354,62		354,62			6	6	362,70			362,70			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)														Unit Organisasi Pelaksana
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	003 - Akses Reforma Agraria Kategori III											5.364,00							
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV											2.646,00							
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	005 - Akses Reforma Agraria Kategori V											5.262,80							
			6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI											396,80							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria																				
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	547.200	273.900	372.643,20		137.951,24		61.379,20	22.201,23	136.951,23	138.551,23	137.951,24			
				6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan		QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	200	800	148,80		462,80		1.432,60	462,80	462,80	462,80	462,80			
		Kegiatan 1:	Nilai Tata Guna Tanah																				
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas																				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah							12	12	4.708,66		4.708,66		2.714,71	11.103,11	32.884,50	4.134,10	4.708,66	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																				
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional	6	6	4.338,30		4.338,30		2.534,27	10.727,39	7.482,72	3.771,40	4.338,30			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah																				
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral	0	0							25.047,16					
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data Potensi Tanah Kritis																				
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	039 - Data Potensi Tanah Kritis	6	6	370,36		370,36		180,45	375,72	354,62	362,70	370,36			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		

Kegiatan 2:	Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail																
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan															
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail										12	1.293,04			12	1.293,04
	Indikator Rincian Output	Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah															
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	Rekomendasi Kebijakan			8	785,46			8	785,46
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	Rekomendasi Kebijakan			4	507,58			4	507,58
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Layanan Kebijakan Penatagunaan Tanah										74.628	25.669,75			74.715	25.690,77
	Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah															
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Peta Analisis PGT	Layanan			19.600	603,46			19.783	605,60
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	7974 - Nilai Tata Guna Tanah	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	Layanan			55.028	25.066,29			54.932	25.085,17
	Kegiatan 3:	Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan															
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah														
		Indikator Rincian Output	Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update														
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	043 - Data LBS	Rekomendasi Kebijakan								

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Kegiatan 4:	Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria														
		Sasaran Kegiatan	Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah														
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah								10.232	38.904,07			42.100	41.836,12	
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul														
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001- SK Penegasan Tanah Timbul	Hektar (Rekomendas i Kebijakan)		0			0		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data dan Informasi P4T														
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali	Bidang		1.000	285,00		2.500	285,00	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa-Bali	Bidang		2.552	253,86		15.000	1.560,00	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III						3.145	285,77		12.500	1.187,50	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV						2.000	162,60		5.000	425,00	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V						1.535	120,42		7.100	582,20	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		33	4.907,27		33	4.907,27	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 4:	Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria																				
		Sasaran Kegiatan	Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah						42.100		41.836,12			41.836,12	41.836,12	20.000	385.300	59.598,47		75.874,33		
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul																			
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001- SK Penegasan Tanah Timbul	0						5.000	5.000	157,25			157,25		
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data dan Informasi P4T																			
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali	2.500		285,00			285,00	285,00	5.000	20.339	410,00		1.688,14		
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa-Bali	15.000		1.560,00			1.560,00	1.560,00	10.000	364.961	1.040,00		38.685,87		
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III				12.500		1.187,50			1.187,50	1.187,50							
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV				5.000		425,00			425,00	425,00							
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V				7.100		582,20			582,20	582,20							
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi																			
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33		4.907,27			4.907,27	4.907,27	33	33	4.985,04		4.985,04		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
		Kegiatan 4: Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria																						
		Sasaran Kegiatan	Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah						611.900	472.987	101.475,55				86.534,01		534.200	395.200	96.546,82				79.836,74	
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul																					
			6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah					RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001- SK Penegasan Tanah Timbul	5.000	5.000	157,25			157,25		5.000	5.000	157,25				157,25	
		Indikator Rincian Output	Jumlah Data dan Informasi P4T																					
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali	37.400	30.510	3.216,40			2.562,84		27.300	20.339	2.457,00				1.728,82	
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II			CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa-Bali	569.500	442.477	62.075,50			47.787,52		501.900	374.861	57.216,60				41.234,71	
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III																			
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV																			
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V																			
		Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi																					
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33	33	5.234,29			5.234,29		33	33	5.496,01				5.496,01	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Kegiatan 4:	Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria																		
			Sasaran Kegiatan	Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah																	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah					426.600	287.400	87.348,51			69.553,84		41.836,12	75.874,33	86.534,01	79.836,74	69.553,84	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
			Indikator Rincian Output	Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul																	
				6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah				RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001- SK Penegasan Tanah Timbul	5.000	5.000	157,25		157,25			157,25	157,25	157,25	157,25	
			Indikator Rincian Output	Jumlah Data dan Informasi P4T																	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali	17.300	10.168	1.607,40		874,45		285,00	1.688,14	2.562,84	1.728,82	874,45	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II		CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa-Bali	404.300	277.232	48.111,70		31.049,98		1.560,00	38.685,87	47.787,52	41.234,71	31.049,98	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III									1.187,50						
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV									425,00						
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V									582,20						
			Indikator Rincian Output	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi																	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33	33	5.770,81		5.770,81		4.907,27	4.985,04	5.234,29	5.496,01	5.770,81	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO										Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)														
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
										Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)											
										Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
		Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA	6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi		PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi	Satuan Kegiatan		33	20.526,31			33	20.526,31				
		Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA	6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota		PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota	Satuan Kegiatan		38	12.362,85			38	12.362,85				
		Kegiatan 5:	Penataan Kembali Penguasaan dan																		
		Sasaran Kegiatan	Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah																		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah									59.687	14.523,89			175.865	40.561,74				
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah																		
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali	Bidang		0				1	0,27				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	014 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali	Bidang		0				1	0,24				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III						0				1	0,21				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV						0				1	0,18				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V						0				1	0,16				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																			
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
	Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA	6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi		PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi	33		20.526,31			20.526,31	20.526,31	34	34	21.704,07			21.704,07		
	Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA	6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota		PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota	38		12.362,85			12.362,85	12.362,85	100	317	31.302,11			8.653,97		
	Kegiatan 5:	Penataan Kembali Penguasaan dan																					
	Sasaran Kegiatan	Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah																					
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah							175.865	40.561,74				40.561,74	40.561,74	231.602	354.995	57.334,29			88.321,52		
	Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah																					
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali	1	0,27			0,27	0,27	1	1	0,16			0,16			
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	014 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali	1	0,24			0,24	0,24	1	4	0,24			0,97			
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III				1	0,21			0,21	0,21									
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV				1	0,18			0,18	0,18									
			6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V				1	0,16			0,16	0,16									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA	6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi		PEA - Koordinasi	001 - Data GTRA Provinsi	34	34	23.047,38			23.047,38		20.526,31	21.704,07	22.138,14	22.565,99	23.047,38	
		Indikator Rincian	Jumlah Data GTRA	6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota		PEA - Koordinasi	002 - Data GTRA Kabupaten/Kota	317	317	8.653,97			8.653,97		12.362,85	8.653,97	8.653,97	8.653,97	8.653,97	
	Kegiatan 5:	Penataan Kembali Penguasaan dan																				
		Sasaran Kegiatan	Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah							212.018	350.000	60.772,61			87.017,79		40.561,74	88.321,52	167.679,89	107.512,35	87.017,79	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah																			
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali	1	1	0,17			0,17		0,27	0,16	0,16	0,16	0,17	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	014 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali	4	4	1,02			1,02		0,24	0,97	0,99	1,00	1,02	
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III											0,21					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV											0,18					
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V											0,16					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah														
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	Bidang		7.604	2.455,02			21.000	6.342,00
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	Bidang		5.692	1.644,08			24.000	6.264,00
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III						23.941	5.897,58			73.770	16.893,33
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV						9.803	2.014,56			31.400	6.123,00
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V						10.986	1.784,22			22.890	3.753,96
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI						1.661	728,44			2.800	1.184,40
PTPP DAERAH	Kegiatan 1:	Pengadaan dan Pencadangan Tanah															8.104,96
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah								9738,782 Hektare					50 %	8.104,96
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum								9738,782 Hektare					50 %	8.104,96
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi										512	3.101,82
		Indikator Rincian								Persentase Dokumen						512	5.003,14
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah											512

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2026					
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah	6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	21.000	6.342,00				6.342,00	6.342,00	32.100	45.600	5.264,40			7.569,60		
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	24.000	6.264,00				6.264,00	6.264,00	199.500	309.390	52.069,50			80.750,79		
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III				73.770	16.893,33				16.893,33	16.893,33								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV				31.400	6.123,00				6.123,00	6.123,00								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V				22.890	3.753,96				3.753,96	3.753,96								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI				2.800	1.184,40				1.184,40	1.184,40								
PTPP DAERAH	Kegiatan 1:	Pengadaan dan Pencadangan Tanah									95,84	8.009,12			8.104,96	8.104,96					4.533,99			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah								95,84	8.009,12			8.104,96	8.104,96					4.533,99			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum								95,84	8.009,12			8.104,96	8.104,96	55 %				4.533,99			
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Penantautan dan Evaluasi				512		3.101,82			3.101,82	3.101,82	0	95				2.177,37		
		Indikator Rincian																						
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah				512	95,84	4.907,30			5.003,14	5.003,14	0	95				2.356,62		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah	6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	62.100	45.600	10.681,20			7.569,60			43.100	49.996	7.758,00				8.299,34		
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	355.500	613.445	97.407,00			160.109,15			265.500	380.122	76.198,50				99.211,84		
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III																				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV																				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V																				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI																				
PTPP DAERAH	Kegiatan 1:	Pengadaan dan Pencadangan Tanah													9.807,70								10.788,36			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah												9.807,70								10.788,36			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum								57 %				9.807,70				58 %				10.788,36			
					6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				0	512				3.753,20			0	512				4.128,52		
		Indikator Rincian									0	512				6.054,50			0	512				6.659,84		
					6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah								6.054,50								6.659,84			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)												TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)											
												APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
		Indikator Rincian Output	Jumlah SK Redistribusi Tanah																							
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	27.183	45.600	5.137,59			7.569,50			6.342,00	7.569,60	7.569,60	8.299,34	7.569,50				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	184.830	304.395	55.633,83			79.447,10			6.264,00	80.750,79	160.109,15	99.211,84	79.447,10				
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III												16.893,33								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV												6.123,00								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V												3.753,96								
				6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI												1.184,40								
PTPP DAERAH	Kegiatan 1:	Pengadaan dan Pencadangan Tanah													11.867,20			8.104,96	4.533,99	9.807,70	10.788,36	11.867,20				
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah												11.867,20			8.104,96	4.533,99	9.807,70	10.788,36	11.867,20				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum							60 %					11.867,20			8.104,96	4.533,99	9.807,70	10.788,36	11.867,20	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota			
				6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				0	512				4.541,37			3.101,82	2.177,37	3.753,20	4.128,52	4.541,37				
		Indikator Rincian																								
						6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	QMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Pengadaan Tanah				0	512				7.325,83			5.003,14	2.356,62	6.054,50	6.659,84	7.325,83		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target						
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025						
												Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
		Kegiatan 2:	Konsolidasi Tanah dan Pengembangan														6.174,96	
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik							Data							6.174,96	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah								4.952						1.687	2.123,04
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya		0	0				250	138,13	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Bidang	0	0				22	432,22	
		Indikator Rincian								Bidang								
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I				Laporan	1.978	0				350	213,70	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II					2.974	0				610	327,61	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III				Bidang						520	261,61	
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV				Bidang						370	170,21	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																						
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																			
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026										
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
	Kegiatan 2:	Konsolidasi Tanah dan Pengembangan							0	1.971,01	4.203,95			6.174,96	6.174,96						3.404,61				
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik							1.971,01	4.203,95			6.174,96	6.174,96						3.404,61				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah						1.687	1.438,73	684,31			2.123,04	2.123,04		375				955,46				
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya							250		138,13		138,13	138,13	0	45			24,86		
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi							22	432,22			432,22	432,22	0	15			293,50		
		Indikator Rincian																							
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I				350	122,11	91,58			213,70	213,70	0	0							
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II				610	257,79	69,82			327,61	327,61	0	0							
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III				520	95,59	166,02			261,61	261,61	0	0							
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV				370		170,21			170,21	170,21	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028								
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Kegiatan 2:	Konsolidasi Tanah dan Pengembangan											13.032,45								13.665,14		
		Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik										13.032,45								13.665,14		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah						2.000				5.373,04				2.000				5.643,55		
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Konsolidasi Tanah Swadaya	0	250			167,13			0	250			183,84		
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	512			2.875,91			0	512			3.019,71		
		Indikator Rincian								0	0						0	0					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I				0	0						0	0					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II				0	0						0	0					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III				0	0						0	0					
				6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV				0	0						0	0					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
											Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V								1.337	579,56			
					QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali						0				
					QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali						0				
	Indikator Kinerja Kegiatan	Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan							245				270	1.440,70		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	Kajian					0			
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)	Data					19	1.144,39		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Data					7	296,31		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah						Data	76%				76%	2.611,22		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I			Data	10				3	388,65		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II			Persentase	27				4	473,95		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III			SP					6	694,91		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V				1.337	531,01	48,55			579,56	579,56	0	0							
						QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali	0						0	375				162,56				
						QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	0						0	888				474,54				
	Indikator Kinerja Kegiatan	Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan						270	296,31	1.144,39			1.440,70	1.440,70		296			1.020,32				
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan			ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	0						0	0								
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)	19		1.144,39			1.144,39	1.144,39	0	15			876,07				
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	7	296,31				296,31	296,31	0	4			144,25				
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah						76%	235,98	2.375,24			2.611,22	2.611,22		76%			1.428,84				
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I			3		388,65			388,65	388,65	0	0							
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II			4		473,95			473,95	473,95	0	0							
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III			6		694,91			694,91	694,91	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028								
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
							APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V					0	0						0	0					
										0	2.000				900,00			0	2.000			900,00	
										0	2.600				1.430,00			0	2.800			1.540,00	
	Indikator Kinerja Kegiatan	Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan									341				3.099,41				392			3.151,59	
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan							0	1				684,94			0	1			684,94	
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)					0	33				2.093,18			0	33			2.197,83	
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan					0	7				321,29			0	6			268,82	
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah									78%				4.560,00				78%			4.870,00	
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I					0	0						0	0					
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II					0	0						0	0					
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III					0	0						0	0					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)														Unit Organisasi Pelaksana
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
											Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN									
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V				0	0						579,56							
									0	2.000				900,00			162,56	900,00	900,00	900,00			
									0	3.000				1.650,00			474,54	1.430,00	1.540,00	1.650,00			
	Indikator Kinerja Kegiatan	Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan												3.231,84		1.440,70	1.020,32	3.099,41	3.151,59	3.231,84	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan						ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan	0	1			684,94				684,94	684,94	684,94		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)				BMA - Data dan Informasi Publik	001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)	0	33			2.307,72		1.144,39	876,07	2.093,18	2.197,83	2.307,72		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan				BMA - Data dan Informasi Publik	002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	0	5			239,18		296,31	144,25	321,29	268,82	239,18		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah													5.185,00		2.611,22	1.428,84	4.560,00	4.870,00	5.185,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I					0	0						388,65						
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II					0	0						473,95						
		6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III					0	0						694,91							

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
											Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM /PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV			SP							2	227,79
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V										7	825,92
							BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali							0	
							BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali							0	
		Kegiatan 3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan													16.315,90
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan													16.315,90
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah						59,16%						67,98%	16.072,18
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah			Bidang						86.400	11.683,91
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			Satuan Kerja						512	2.817,19
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah			Hektar						209.300	1.571,08
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna						Satuan Kerja						5	243,72
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi			Dokumen						5	243,72

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
									Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
									VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV				2		227,79				227,79	227,79	0	0						
		6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V				7	235,98	589,95				825,92	825,92	0	0						
					BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali	0									0	3			353,97			
					BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	0									0	9			1.074,87			
Kegiatan 3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan								1.814,80	14.501,10				16.315,90	16.315,90					8.892,93			
	Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan							1.814,80	14.501,10				16.315,90	16.315,90					8.892,93			
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah							1.571,08	14.501,10				16.072,18	16.072,18		75,97%			8.583,31			
			6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah				86.400		11.683,91			11.683,91	11.683,91	0	40.100			8.583,31			
			6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				512		2.817,19			2.817,19	2.817,19	0	0						
			6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah				209.300	1.571,08				1.571,08	1.571,08	0	0						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna							5	243,72				243,72	243,72	0	5			309,62			
		6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				5	243,72					243,72	243,72	0	5			309,62			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV				0	0							0	0							
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V				0	0							0	0							
							BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali	0	8				1.050,00			0	8				1.100,00			
							BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	0	26				3.510,00			0	26				3.770,00			
		Kegiatan 3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan											32.175,66								39.702,15			
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan											32.175,66								39.702,15			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah							83,41%				31.692,94				89,49%				39.062,90			
			6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah				0	86.600				11.711,10			0	86.700				11.724,75			
			6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi				0	516				2.817,52			0	516				2.817,68			
			6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah				0	2.286.748				17.164,33			0	3.266.782				24.520,47			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna							7				482,71				9				639,25			
			6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi				0	7				482,71			0	9				639,25			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)														Unit Organisasi Pelaksana	
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029									Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)										
											APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV				0	0							227,79							
			6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V				0	0							825,92							
							BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali	0	8				1.155,00				353,97	1.050,00	1.100,00	1.155,00			
							BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	0	26				4.030,00				1.074,87	3.510,00	3.770,00	4.030,00			
		Kegiatan 3:	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan											45.663,20			16.315,90	8.892,93	32.175,66	39.702,15	45.663,20			
		Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan											45.663,20			16.315,90	8.892,93	32.175,66	39.702,15	45.663,20			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah							97,08%				44.858,45			16.072,18	8.583,31	31.692,94	39.062,90	44.858,45	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah			0	86.800				11.738,41			11.683,91	8.583,31	11.711,10	11.724,75	11.738,41			
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			0	516				2.817,85			2.817,19		2.817,52	2.817,68	2.817,85			
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan	001 - Peta Zona Nilai Tanah			0	4.037.062				30.302,19			1.571,08		17.164,33	24.520,47	30.302,19			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna							11				804,75			243,72	309,62	482,71	639,25	804,75	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		
				6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	963 - Layanan Data dan Informasi			0	11				804,75			243,72	309,62	482,71	639,25	804,75			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
											Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
		Sasaran Program 1	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat						Lokasi							
		Indikator Kinerja Program	3. Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan						Dokumen							
	SPPR	Kegiatan 1:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial													
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir													
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL												83	10.720,17
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang				QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	XXX - Peta Foto PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali	Hektar						
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang				QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	XXX - Peta Foto PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	Hektar						
		Kegiatan 2:	Penyediaan informasi bidang tanah dan													
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi													
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid												80	1.864.525,73
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0				515	5.903,82
		Indikator Rincian								Persentase						
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	Bidang	0				21.000	4.506,60
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	Bidang	0				24.000	4.384,80

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026								
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
	Sasaran Program 1	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																						
	Indikator Kinerja Program	3. Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan																						
SPPR	Kegiatan 1:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL						83		1.540,00			1.540,00			87				13.724,31			
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali									960.043				44.449,99			
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali									5.133.507				277.209,38			
	Kegiatan 2:	Penyediaan informasi bidang tanah dan																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid						80					1.864.525,73			85				1.657.652,63			
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	515		5.903,82			5.903,82			515				5.903,82			
		Indikator Rincian																						
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	21.000		4.506,60			4.506,60			0							
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	24.000		4.384,80			4.384,80			0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran														
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028								
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN											
		Sasaran Program 1	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																					
		Indikator Kinerja Program	3. Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan																					
SPPR	Kegiatan 1:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL							91			14.000,00			77.10			14.275.000,00					
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali	960.043	699.083	44.449,99		32.367,54		699.083	309.000	32.367,54		14.306,70					
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	5.133.507	3.249.252	277.209,38		175.459,61		3.249.252	1.771.000	175.459,61		95.634,00					
	Kegiatan 2:	Penyediaan informasi bidang tanah dan																						
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi																					
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid							90			1.433.298,33			95%			1.223.130,23					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		515		6.199,01			515			6.508,96					
		Indikator Rincian																						
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1		0					0								
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2		0					0								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																	Unit Organisasi Pelaksana		
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		Sasaran Program 1	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat																			
		Indikator Kinerja Program	3. Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan																			
	SPPR	Kegiatan 1:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial																			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL							100				14.550.000,00			10.720,17	13.724,31	14.000,00	14.275.000,00	14.550.000,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali	309.000	147.563	14.306,70			6.832,17				44.449,99	32.367,54	14.306,70	6.832,17	
				6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang			QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	1.771.000	1.913.239	95.634,00			103.314,91				277.209,38	175.459,61	95.634,00	103.314,91	
		Kegiatan 2:	Penyediaan informasi bidang tanah dan																			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi																			
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid							100%				1.212.563,30			1.864.525,73	1.657.652,63	1.433.298,33	1.223.130,23	1.212.563,30	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		515				6.834,41			5.903,82	5.903,82	6.199,01	6.508,96	6.834,41	
		Indikator Rincian																				
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1		0							4.506,60					
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2		0							4.384,80					

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO								
												Tahun 2025					
												Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN														
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	Bidang	0					73.770	11.198,29
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	Bidang	0%					31.400	3.711,48
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	Bidang	0					22.890	1.957,10
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	Bidang	0					2.800	648,20
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali	Bidang						0	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	Bidang						0	
			Indikator Rincian														
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	Bidang	0%					350	165,76
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	Bidang	0					610	245,71
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	Bidang	0					520	173,73
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	Bidang	0					370	95,98
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	Bidang	0					1.337	260,85
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali	Bidang						0	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	Bidang						0	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	Bidang	0					935	394,57

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO																			
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
								Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
								VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	73.770		11.198,29			11.198,29		0						
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	31.400		3.711,48			3.711,48		0						
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	22.890		1.957,10			1.957,10		0						
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	2.800		648,20			648,20		0						
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali	0						32.100					2.744,55		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	0						199.500					36.448,65		
		Indikator Rincian																			
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	350		165,76			165,76		100				47,36		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	610		245,71			245,71		250				100,70		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	520		173,73			173,73		449				116,60		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	370		95,98			95,98		89				23,09		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	1.337		260,85			260,85		375				73,16		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali	0													
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	0													
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	935		394,57			394,57		0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3		0								0						
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4		0								0						
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5		0								0						
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6		0								0						
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral			QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali		32.100				2.881,78				32.100				3.025,87		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral			QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali		199.500				38.271,08				199.500				40.184,64		
		Indikator Rincian																					
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1		100				49,73				100				52,21		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2		250				105,74				250				111,02		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3		449				122,43				449				128,55		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4		89				24,24				89				25,45		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5		375				76,82				375				80,66		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral			6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali																
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral			6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali																
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1		0								0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana			
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)							
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
										Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)								
									APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	0						11.198,29						
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	0						3.711,48						
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	0						1.957,10						
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	0						648,20						
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali	32.100				3.177,16		2.744,55	2.881,78	3.025,87	3.177,16			
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	199.500				42.193,87		36.448,65	38.271,08	40.184,64	42.193,87			
		Indikator Rincian																			
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	100				54,83		165,76	47,36	49,73	52,21	54,83		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	250				116,57		245,71	100,70	105,74	111,02	116,57		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	449				134,98		173,73	116,60	122,43	128,55	134,98		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	89				26,73		95,98	23,09	24,24	25,45	26,73		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	375				84,69		260,85	73,16	76,82	80,66	84,69		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali													
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali													
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	0						394,57						

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
												Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	Bidang	0					2.285	815,97	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	Bidang	0					4.924	1.448,64	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	Bidang	0					1.700	383,69	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	Bidang	0					11.165	1.775,24	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	Bidang	134					25	52,79	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	Bidang	30					34	33,93	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	Bidang	1589					448	370,94	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	Bidang	15,00					13	8,36	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	Bidang	3651					1.003	0,46	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	Bidang	8					3	6,82	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	Bidang	2					8	3,85	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	Bidang	0					6	9,50	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	Bidang	61					101	86,15	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	Bidang	0					3	13,44	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	Hektar	11					38	82,34	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO																			
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
								Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
								VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	2.285		815,97			815,97			888			317,10		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	4.924		1.448,64			1.448,64			2.020			594,28		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	1.700		383,69			383,69			300			67,71		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5		QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	11.165		1.775,24			1.775,24			3.662			582,26		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	25		52,79			52,79			174			204,10		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	34		33,93			33,93			27			26,95		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	448		370,94			370,94			508			422,32		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	13		8,36			8,36			13			8,36		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	1.003		0,46			0,46			605			280,12		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	3		6,82			6,82			37			71,15		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	8		3,85			3,85			2			3,85		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	6		9,50			9,50			0					
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	101		86,15			86,15			53			45,21		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	3		13,44			13,44			0					
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	38		82,34			82,34			52			138,11		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO					II. PENDANAAN																	
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN				
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2		888					332,96				888					349,61		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3		2.020					625,00				2.020					656,25		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4		300					71,10				300					74,65		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5		3.662					611,37				3.662					641,94		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1		174					214,31				174					225,02		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2		27					28,29				27					29,71		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3		508					443,44				508					465,61		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4		13					8,78				13					9,22		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5		605					294,12				605					308,83		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1		37					74,71				37					78,44		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2		2					4,04				2					4,24		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3		0									0							
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5		53					47,47				53					49,84		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3		0									0							
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5		52					145,02				52					152,27		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)														Unit Organisasi Pelaksana
		SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																	
		KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
								Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)									
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN							
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2		888					367,09			815,97	317,10	332,96	349,61	367,09		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3		2.020					689,06			1.448,64	594,28	625,00	656,25	689,06		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4		300					78,38			383,69	67,71	71,10	74,65	78,38		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5		3.662					674,04			1.775,24	582,26	611,37	641,94	674,04		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1		174					236,27			52,79	204,10	214,31	225,02	236,27		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2		27					31,19			33,93	26,95	28,29	29,71	31,19		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3		508					488,89			370,94	422,32	443,44	465,61	488,89		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4		13					9,68			8,36	8,36	8,78	9,22	9,68		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5		605					324,27			0,46	280,12	294,12	308,83	324,27		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1		37					82,37			6,82	71,15	74,71	78,44	82,37		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2		2					4,45			3,85	3,85	4,04	4,24	4,45		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3		0								9,50						
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5		53					52,33			86,15	45,21	47,47	49,84	52,33		
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3		0								13,44						
		6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5		52					159,88			82,34	138,11	145,02	152,27	159,88		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)										
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
											Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
											Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali	Hektar					10	9,65	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali	Hektar					40	79,40	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U26 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali	Hektar	514115,9				463.217	200.758,25	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U27 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	Hektar	21620066				1.977.874	474.491,91	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U28 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga	Hektar					1.658.796	1.045.041,48	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U29 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga		QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga	U29 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	Hektar					111.792	40.245,12	
		Indikator Rincian														
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali	Dokumen					3.982	17.479,19	
			6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali		QAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali	Dokumen					2.212	6.159,43	
SPPR	Kegiatan 5:	Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial														
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten													
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten							58				19,52%	203,35	
			6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - SK Surveyor Berlisensi		ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Bertsensi	Orang	800				967	48,35	
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir						Persentase							

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)					Tahun 2025					
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)
													Vol (Batas Bawah)	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir														1.537,63	
				6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	Bidang	1630					2.365	70,95	
				6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	Bidang	8299					1.612	48,36	
				6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	Hektar	65202					88.645	1.418,32	
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.															
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.													100%	198.825,20	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	Bidang	1218379					1.281.985	155.300,27	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	Bidang	776					932	23.053,69	
				5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha	Layanan	0					57	16.359,71	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	Bidang	9186					7.861	2.109,92	
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	Bidang	16							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						II. PENDANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2027			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Tahun 2028			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir												2.634,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO						TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)											Unit Organisasi Pelaksana	
					SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)															
					KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
											Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN								
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir												2.905,04	1.537,63	2.509,48	2.634,95	2.766,70	2.905,04	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	2.359					62,65	70,95	54,12	56,83	59,67	62,65		
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000		BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	10.482						363,03	48,36	314,46	330,18	346,69	363,03	
					6412 - Survei dan Pemetaan Tematik	BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000		BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	101.635						1.882,48	1.418,32	1.626,16	1.707,47	1.792,84	1.882,48	
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.																			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.							100%					315.271,41	198.825,20	274.591,01	287.495,18	301.044,56	315.271,41	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	1.243.785					235.545,50	155.300,27	203.473,06	213.646,72	224.329,05	235.545,50		
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	1.294						42.998,01	23.053,69	38.104,32	39.009,54	40.960,01	42.998,01	
					5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha	57						18.938,41	16.359,71	16.359,71	17.177,70	18.036,59	18.938,41	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah)	27.150						6.106,02	2.109,92	5.275,47	5.539,25	5.816,21	6.106,02	
					6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil)	9						430,32		371,73	390,32	409,83	430,32	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO													
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO			Tahun 2025					
												Vol (Batas Bawah)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)		Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)	
				6413 - Pengukuran Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Print out Digital Warkah		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/Fotocopy/Print out Digital Warkah	Bidang	1256					2.090	83,60
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi	Bidang	906					12.302	246,04
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	Bidang	34967					34.967	405,62
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun	Bidang	11123					11.123	169,07
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)	Bidang	25553					25.553	500,84
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur	Bidang	62119					62.129	596,44
				6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral				BAH - Pelayanan Publik Lainnya	013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan/Pelepasan/Penggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah	Bidang						0	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)						EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN	TOTAL				APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
	Indikator Kinerja Program	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang														100%	100%								
PPTR DAERAH	Kegiatan 1:	Penertiban Pemanfaatan Ruang																							
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang														20,0%	24,1%	4.350,00			7.590,00			
				6670 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang		FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Hasil Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	5		1.000,00		1.000,00	1.000,00										
									001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah						26	33	4.350,00			7.590,00					
	Indikator Kinerja Program	Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya														1	1								
PPTR DAERAH	Kegiatan 2:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																							
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							0,51						2.736,67	0,12	0,06	672,71		13.210,32				

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN															
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran															
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027						Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN		APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN			
		Indikator Kinerja Program	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang						100%	100%							100%	100%							
PPTR DAERAH	Kegiatan 1:	Penertiban Pemanfaatan Ruang																							
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang							25,4%	24,1%	7.000,00			8.910,00			25,4%	24,1%	7.200,00			10.230,00		
				6670 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang		FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Hasil Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah																
									001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah	33	33	7.000,00		8.910,00			33	33	7.200,00			10.230,00			
		Indikator Kinerja Program	Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya						1	1							1	1							
PPTR DAERAH	Kegiatan 2:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																							
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							0,12	0,31	692,89			70.306,75			0,12	0,31	713,68			77.707,43		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																Unit Organisasi Pelaksana		
			SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)									TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028		Tahun 2029	
									Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)							
										APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN						
		Indikator Kinerja Program	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang						100%	100%											
PPTR DAERAH	Kegiatan 1:	Penertiban Pemanfaatan Ruang																			
		Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang																		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang						25,4%	24,1%	7.500,00			11.550,00			4.350,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
				6670 - Penertiban Pemanfaatan Ruang	FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang		FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001 - Berita Acara Hasil Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah												
									001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah	33	33	7.500,00			11.550,00			4.350,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
		Indikator Kinerja Program	Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya						1	1											
PPTR DAERAH	Kegiatan 2:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																			
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																		
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							0,13	0,31	735,09			85.287,17			672,71	692,89	713,68	735,09

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																					
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																		
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026									
										Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				
										VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	
			6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan				594		2.310,97			2.310,97	2.310,97	138	2.970		672,71			12.710,32			
			6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Tertuar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu				6		425,71			425,71	425,71		7					500,00			
	Indikator Kinerja Program		Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah														1	1							
PPTR DAERAH	Kegiatan 2:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																							
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah						0,13						3.344,82	0,25	0,20	448,47			850,00				
				6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan				8		3.344,82			3.344,82	3.344,82	15	15	448,47			850,00			
	Indikator Kinerja Program		Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya														1	1							
	Kegiatan 1:	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																							
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																						
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						0,11							5.533,92	0,21	0,21	5.913,99			11.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN													
				6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan				142	14.850	692,89			69.906,75			146	14.850	713,68			76.897,43			
			6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu				6					400,00								8				
		Indikator Kinerja Program	Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah							1	1							1	1							
PPTR DAERAH	Kegiatan 2:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																								
		Sasaran Kegiatan	Tersedianya Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah																							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah								0,17	0,23	2.100,00			3.500,00			0,20	0,23	2.500,00			3.500,00		
			6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan						10	17	2.100,00			3.500,00			12	17	2.500,00			3.500,00		
		Indikator Kinerja Program	Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya							1	1							1	1							
	Kegiatan 1:	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								0,22	0,22	6.300,00			11.330,00			0,22	0,23	6.800,00			11.669,90		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			I. KRO-RO																				Unit Organisasi Pelaksana		
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)											TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)								
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029								Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)											
				6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan				151	14.850	735,09				84.587,17						672,71	692,89	713,68	735,09	
				6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu					7					700,00										
				Indikator Kinerja Program	Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah					1	1															
PPTR DAERAH	Kegiatan 2:	Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sasaran Kegiatan																							
		Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah								0,25	0,23	2.700,00				3.500,00				448,47	2.100,00	2.500,00	2.700,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota	
				6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan				15	17	2.700,00				3.500,00				448,47	2.100,00	2.500,00	2.700,00			
				Indikator Kinerja Program	Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya					1	1															
	Kegiatan 1:	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																							
				Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					0,23	0,23	7.300,00				12.020,00				5.913,99	6.300,00	6.800,00	7.300,00	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota		

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO														
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)				Satuan	Baseline Tahun 2024 (Volume)	Target					
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025				Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)			
										Vol (Batas Bawah)			APBN (RM /PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN	
				6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				Bidang								
				6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Data Indikasi Pelanggaran P4T				Bidang								
RO ITJEN TURUN KE DAERAH																		
	ITJEN DAERAH	Kegiatan 1:																
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal														
			Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN														
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM (Kanwil)							Persentase	19,3				25	17.920,00	
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas (Kanwil)								44				50	17.920,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator				I. KRO-RO																			
						SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)																
						KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2025						Tahun 2026							
												Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)					EXC PA	Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
												VOLUME	RM	PNBP	PHLN	Non APBN				TOTAL	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)
				6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				79		4.092,30			4.092,30	4.092,30	81	90	2.456,75			5.000,00			
				6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Data Indikasi Pelanggaran P4T				351		1.441,62			1.441,62	1.441,62	724	800	3.457,24			6.000,00			
RO ITJEN TURUN KE DAERAH																									
ITJEN DAERAH	Kegiatan 1:																								
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal						65								70							
			Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN											26.941,52							28.288,59			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM (Kanwil)						25					17.920,00		30					18.816,00			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas (Kanwil)						50					17.920,00		60					18.816,00			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO						II. PENDANAAN																
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)			Alokasi Anggaran																
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2027							Tahun 2028									
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)				Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)		
APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)	APBN (PHLN)	Non APBN	APBN (RM/PNBP)			APBN (PHLN)	Non APBN													
				6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				83	93	2.600,00			5.150,00			86	95	2.800,00			5.304,50			
				6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Data Indikasi Pelanggaran P4T				746	824	3.700,00			6.180,00			768	849	4.000,00			6.365,40			
RO ITJEN TURUN KE DAERAH																										
ITJEN DAERAH	Kegiatan 1:																									
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal							75								80							
			Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN											29.703,02							31.188,17				
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM (Kanwil)								35				19.756,80				40			20.744,64			
			Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas (Kanwil)								70				19.756,80				80			20.744,64			

Program/ Kegiatan		Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		I. KRO-RO																				Unit Organisasi Pelaksana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				SEMULA (2025)			M E N J A D I (2026-2029)											TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				KEGIATAN	KRO	RO	KEGIATAN	KRO	RO	Tahun 2029						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Volume (Batas Bawah)	Volume (Batas Atas)	Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah)			Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas Kementerian ATR/BPN

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (juta rupiah)					ALOKASI NON-APBN (juta rupiah)					TOTAL (juta rupiah)					TOTAL 2025-2029 (juta rupiah)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru																						
PP 22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	00 - IBEI Pilar Ekonomi																					
KP 03-Peningkatan Produktivitas Perikanan yang	01 - PDB Perikanan	187.672	333.767	562.267	639.667	561.680	67.381,39	144.504,90	258.828,90	292.038,10	258.721,31	0	0	0	0	0	67.381,39	144.504,90	258.828,90	292.038,10	258.721,31	1.021.474,61
ProP 07-Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan		187.672	333.767	562.267	639.667	561.680	67.381,39	144.504,90	258.828,90	292.038,10	258.721,31	0	0	0	0	0	67.381,39	144.504,90	258.828,90	292.038,10	258.721,31	1.021.474,61
6419.QDE.001 - Akses Reforma Agraria Kategori I	08 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori I*	5.400	0	0	0	0	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
6419.QDE.002 - Akses Reforma Agraria Kategori II	20 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori II*	7.200	0	0	0	0	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92
6419.QDE.003 - Akses Reforma Agraria Kategori III	12 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori III*	12.000	0	0	0	0	1.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,34
6419.QDE.004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV	14 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori IV*	6.000	0	0	0	0	1.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,67
6419.QDE.005 - Akses Reforma Agraria Kategori V	15 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori V*	11.800	0	0	0	0	1.811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,63
6419.QDE.007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI	*	800	0	0	0	0	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
6419.QDE.010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	*	0	20.400	20.400	20.400	20.400	0,00	9.512,95	9.512,95	9.512,95	9.512,95	0	0	0	0	0	0,00	9.512,95	9.512,95	9.512,95	9.512,95	38.051,80
6419.QDE.011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	*	0	256.500	255.500	329.700	252.900	0,00	109.315,73	108.889,73	140.498,93	107.782,13	0	0	0	0	0	0,00	109.315,73	108.889,73	140.498,93	107.782,13	466.486,52
6413.QAA.U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1	*	191	191	191	191	193	80,77	80,77	80,77	80,77	80,77	0	0	0	0	0	80,77	80,77	80,77	80,77	80,77	403,85
6413.QAA.U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2	*	535	535	535	535	537	191,19	191,19	191,19	191,19	191,19	0	0	0	0	0	191,19	191,19	191,19	191,19	191,19	955,95
6413.QAA.U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3	*	2.645	2.645	2.645	2.645	2.649	724,85	724,85	724,85	724,85	724,85	0	0	0	0	0	724,85	724,85	724,85	724,85	724,85	3.624,25
6413.QAA.U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4	*	258	258	258	258	259	58,27	58,27	58,27	58,27	58,27	0	0	0	0	0	58,27	58,27	58,27	58,27	58,27	291,35
6413.QAA.U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5	*	5.118	5.118	5.118	5.118	5.122	809,41	809,41	809,41	809,41	809,41	0	0	0	0	0	809,41	809,41	809,41	809,41	809,41	4.047,05
1	*	957	935	935	935	935	278,49	272,09	272,09	272,09	272,09	0	0	0	0	0	278,49	272,09	272,09	272,09	272,09	1.366,85
2	*	2.677	2.285	2.285	2.285	2.285	677,28	578,11	578,11	578,11	578,11	0	0	0	0	0	677,28	578,11	578,11	578,11	578,11	2.989,72
4	*	1.291	1.700	1.700	1.700	1.700	225,93	297,50	297,50	297,50	297,50	0	0	0	0	0	225,93	297,50	297,50	297,50	297,50	1.415,93
6419.QDE.008 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria	17 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria*	128.200	42.400	271.900	275.100	273.900	59.492,84	22.201,23	136.951,23	138.551,23	137.951,24	0	0	0	0	0	59.492,84	22.201,23	136.951,23	138.551,23	137.951,24	495.147,78
6419.QDE.009 - Fasilitas Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan	08 - Fasilitas Pendampingan Usaha Kategori Kepulauan*	2.600	800	800	800	800	110,20	462,80	462,80	462,80	462,80	0	0	0	0	0	110,20	462,80	462,80	462,80	462,80	1.961,40
PP 17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang																						
KP 04-Peningkatan kualitas lahan	Meningkatnya Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal	414	295	559	669	340	160.297,94	283.283,95	565.349,89	588.054,80	73.828,38	0	0	0	0	0	160.297,94	283.283,95	565.349,89	588.054,80	73.828,38	1.668.814,96
ProP 03-Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang		414	295	559	669	340	160.297,94	283.283,95	565.349,89	588.054,80	73.828,38	0	0	0	0	0	160.297,94	283.283,95	565.349,89	588.054,80	73.828,38	1.668.814,96
6668.PBT.080 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	*	26	10	15	15	14	4.640,00	1.134,00	1.680,00	1.680,00	1.568,00	0	0	0	0	0	4.640,00	1.134,00	1.680,00	1.680,00	1.568,00	10.702,00

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS			PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (juta rupiah)					ALOKASI NON-APBN (juta rupiah)					TOTAL (juta rupiah)					TOTAL 2025-2029 (juta rupiah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		6668 .PBT .081 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/ Kab/ Kota di Wilayah I	*	27	10	15	16	16	4.615,00	1.310,00	1.980,00	2.112,00	2.112,00	0	0	0	0	0	4.615,00	1.310,00	1.980,00	2.112,00	2.112,00	12.129,00
		6668 .PBT .085 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/ Kab/ Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II	*	26	9	15	15	15	6.450,00	1.008,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0	0	0	0	0	6.450,00	1.008,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	12.498,00
		6668 .PBT .086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/ Kab/ Kota di Wilayah II	*	23	6	15	16	16	3.950,00	792,00	1.980,00	2.112,00	2.112,00	0	0	0	0	0	3.950,00	792,00	1.980,00	2.112,00	2.112,00	10.946,00
		6668 .PBT .087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/ Kab/ Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB	*	0	2	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		6668.PBT.077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/ Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I	*	58	15	27	27	27	8.700,00	1.965,00	3.564,00	3.564,00	3.510,00	0	0	0	0	0	8.700,00	1.965,00	3.564,00	3.564,00	3.510,00	21.303,00
		6668.PBT.078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/ Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I	*	33	50	91	91		73.028,58	112.554,00	238.270,47	238.270,47	0,00	0	0	0	0	0	73.028,58	112.554,00	238.270,47	238.270,47	0,00	662.123,52
		6668 .PBT .079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/ Kota di Wilayah I	*	75	33	50	76	42	11.617,47	4.950,00	6.950,00	10.749,26	5.838,00	0	0	0	0	0	11.617,47	4.950,00	6.950,00	10.749,26	5.838,00	40.104,73
		6668.PBT .082 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/ Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II	*	42	20	28	28	28	8.533,30	2.631,70	3.696,00	3.696,00	3.640,00	0	0	0	0	0	8.533,30	2.631,70	3.696,00	3.696,00	3.640,00	22.197,00
		6668.PBT.083 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/ Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II	*	0	50	94	94	0	0,00	110.904,00	246.125,54	246.125,54	0,00	0	0	0	0	0	0,00	110.904,00	246.125,54	246.125,54	0,00	603.155,08
		6668.PBT.084 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/ Kota di Wilayah II	*	52	0	50	79	43	5.700,00	0,00	6.950,00	11.170,60	5.977,00	0	0	0	0	0	5.700,00	0,00	6.950,00	11.170,60	5.977,00	29.797,60
		6668.PBT.Fasilitasi Penyjapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah I	*	0	33	50	76	42	0,00	3.960,00	6.135,73	10.342,69	6.197,26	0	0	0	0	0	0,00	3.960,00	6.135,73	10.342,69	6.197,26	26.635,68
		6668.PBT.Fasilitasi Penyjapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah II	*	0	0	50	79	43	0,00	0,00	9.075,00	15.772,35	9.443,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.075,00	15.772,35	9.443,45	34.290,80
		5538.PBT .014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Palau/ Kep dan KSN)	02 - Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional*	6	8	6	6	4	21.900,00	13.200,00	14.950,00	14.950,00	6.000,00	0	0	0	0	0	21.900,00	13.200,00	14.950,00	14.950,00	6.000,00	69.000,00
		5538.PBT.017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional	04 - Jumlah Dok Harmonisasi Rperpres RTR Nasional*	4	3	3	3	2	3.050,00	1.950,00	2.160,00	2.160,00	1.430,00	0	0	0	0	0	3.050,00	1.950,00	2.160,00	2.160,00	1.430,00	10.750,00
		5538 .PBT.015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN	*		6	6	6	6	0,00	13.732,28	8.860,89	12.808,40	12.598,43	0	0	0	0	0	0,00	13.732,28	8.860,89	12.808,40	12.598,43	48.000,00
		5538 .PBT .018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN	01 - Jumlah Dokumen Harmonisasi Rperpres RDTR KPN*	4	2	6	4	4	0,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	2.414,60	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	2.414,60	9.614,60
		5538 .PBT .Materi Teknis RPP RTRWN	*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5539 .PBT .001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	01 - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bimbingan Teknis KKPR²	38	38	38	38	38	8.113,59	6.992,97	7.692,26	8.461,49	9.307,64	0	0	0	0	0	8.113,59	6.992,97	7.692,26	8.461,49	9.307,64	40.567,95
KP 07-Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang				2.107	3.210	3.463	3.881	6.213	25.500,00	53.284,00	50.425,00	62.037,00	91.235,00	0	0	0	0	0	25.500,00	53.284,00	50.425,00	62.037,00	91.235,00	282.481,00
		ProP 06-Pengendalian pemanfaatan ruang	01 - Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal	2.016	3.062	3.363	3.767	6.088	13.400,00	27.710,00	27.090,00	30.150,00	50.775,00	0	0	0	0	0	13.400,00	27.710,00	27.090,00	30.150,00	50.775,00	149.125,00
		5568.QIA.001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK	*	2.000	3.000	3.300	3.700	6.000	5.000,00	9.850,00	10.350,00	11.900,00	18.525,00	0	0	0	0	0	5.000,00	9.850,00	10.350,00	11.900,00	18.525,00	55.625,00
		5568.QIA .002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	02 - Jumlah Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang*	5	8	8	8	15	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.500,00	0	0	0	0	0	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.500,00	64.500,00
		5568.QIA.004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif	04 - Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif*	1	4	2	3	5	1.300,00	3.210,00	1.640,00	2.700,00	4.750,00	0	0	0	0	0	1.300,00	3.210,00	1.640,00	2.700,00	4.750,00	13.600,00
		5568.BIE.003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	*		38	38	38	38	0,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	5.300,00
		5568.QIA.003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan	03 - Jumlah Kawasan pada Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan*	10	12	15	18	30	1.100,00	1.450,00	1.800,00	2.150,00	3.600,00	0	0	0	0	0	1.100,00	1.450,00	1.800,00	2.150,00	3.600,00	10.100,00
		ProP 07-Penertiban pemanfaatan ruang		91	148	100	114	125	12.100,00	25.574,00	23.335,00	31.887,00	40.460,00	0	0	0	0	0	12.100,00	25.574,00	23.335,00	31.887,00	40.460,00	133.356,00

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS			PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (juta rupiah)					ALOKASI NON-APBN (juta rupiah)					TOTAL (juta rupiah)					TOTAL 2025-2029 (juta rupiah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		5567.QCE.001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	01 - Jumlah Pengenaan Sanksi Administratif di Kawasan Strategis Nasional*	28	0	0	0	0	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		5567.QCE.005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	01 - Jumlah Pengenaan Sanksi Administratif di Kawasan Strategis Nasional*	0	30	30	37	40	0,00	5.820,00	11.400,00	14.800,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.820,00	11.400,00	14.800,00	20.000,00	52.020,00
		5567.QCE.002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)	02 - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)*	16	10	15	20	30	3.200,00	2.300,00	3.975,00	6.100,00	10.500,00	0	0	0	0	0	3.200,00	2.300,00	3.975,00	6.100,00	10.500,00	26.075,00
		5567.QCE.003 - Audit Tata Ruang	03 - Jumlah Audit Tata Ruang Wilayah KSN*	13	50	0	0	0	1.700,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
		5567.QCE.004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	04 - Jumlah Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang*	2	8	5	7	5	1.500,00	6.904,00	4.960,00	7.987,00	6.560,00	0	0	0	0	0	1.500,00	6.904,00	4.960,00	7.987,00	6.560,00	27.911,00
		5567.UAC.001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang	05 - PPNS Penataan Ruang yang dibentuk*	32	50	50	50	50	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00	0	0	0	0	0	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00	14.000,00
PN 06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																								
		PP 03-Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya (persen)																					
		KP 03-Reforma Agraria	- Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria (persen) - Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan (indeks)	527662	771380	1001875	772948	692825	87.239,88	159.450,69	196.141,93	152.690,17	138.101,03	0	0	0	0	0	84740	142451	179142	135690	121101	663124
		ProP 01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria		527662	771380	1001875	772948	692825	87.239,88	159.450,69	196.141,93	152.690,17	138.101,03	0	0	0	0	0	84740	142451	179142	135690	121101	663124
		5557.PEA.005 - Data GTRA/ Reforma Agraria	*	1	1	1	1	1	4.135,75	3.610,48	3.791,01	3.980,56	4.179,58	0	0	0	0	0	4.135,75	3.610,48	3.791,01	3.980,56	4.179,58	19.697,38
		6418.QAA.007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I*	05 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I*	1	0	0	0	0	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0	0	0	0	0,27
		6418.QAA.008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II	06 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II*	1	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0	0,24
		6418.QAA.009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III	07 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III	1	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0,21
		6418.QAA.010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV*	08 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV*	1	0	0	0	0	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0	0	0	0	0,18
		6418.QAA.011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V*	09 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V*	1	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0,16
		6418.QAA.012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali	10 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali*	0	1	1	1	1	0,00	0,16	0,16	0,16	0,17	0	0	0	0	0	0,00	0,16	0,16	0,16	0,17	0,65
		6418.QAA.013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali	11 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali*	0	4	4	4	4	0,00	0,97	0,99	1,00	1,02	0	0	0	0	0	0,00	0,97	0,99	1,00	1,02	3,98
		6418.QAA.U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I	*	21.000	0	0	0	0	2.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,02
		6418.QAA.U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II	*	24.000	0	0	0	0	1.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,08

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS			PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (juta rupiah)					ALOKASI NON-APBN (juta rupiah)					TOTAL (juta rupiah)					TOTAL 2025-2029 (juta rupiah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		6418.QAA.U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III	*	73.770	0	0	0	0	5.897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,58
		6418.QAA.U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV	*	31.400	0	0	0	0	2.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,56
		6418.QAA.U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V	*	22.890	0	0	0	0	1.784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,22
		6418.QAA.U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI	*	2.800	0	0	0	0	728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	728,44
		6418.QAA.U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	*	0	45.600	45.600	49.996	45.600,00	0,00	7.569,57	7.569,60	8.299,30	7.569,57	0	0	0	0	0	0,00	7.569,57	7.569,60	8.299,30	7.569,57	31.008,03
		6418.QAA.U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	*	0	309.390	613.445	380.122	304.395,00	0,00	80750,79	117783,66	72984,79	58444,94	0	0	0	0	0	0,00	80750,79	117783,66	72984,79	58444,94	329.964,17
		5570 .QIA.001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu	*	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		5570.QIA.002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar	*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	*		90.000	90.000	90.000	90.000	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
		6416.QAA.U19 - SHAT Redistribusi Tanah	*	175.865	231.033	157.473	157.473	157.473	2.286,25	3.003,43	2.047,15	2.047,15	2.047,15	0	0	0	0	0	2.286,25	3.003,43	2.047,15	2.047,15	2.047,15	11.431,13
		6417.RBO.001 - SK Penegasan Tanah Timbul	*	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	157,250	157,250	157,250	157,250	0	0	0	0	0	0,00	157,25	157,25	157,25	157,25	629,00
		6418 .PEA.001 - Data GTRA Provinsi	03 - Jumlah Data GTRA Provinsi*	33	34	34	34	34	20.526,31	21.704,07	22.138,14	22.565,99	23.047,38						20.526,31	21.704,07	22.138,14	22.565,99	23.047,38	109.981,89
		6418.PEA.002 - Data GTRA Kabupaten/ Kota	*	38	317	317	317	317	12.362,85	8.653,97	8.653,97	8.653,97	8.653,97	0	0	0	0	0	12.362,85	8.653,97	8.653,97	8.653,97	8.653,97	46.978,73
		6413.QAA.U21- PBT Redistribusi Tanah Kategori 1		21.000	0	0	0	0	4.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,60
		6413.QAA.U22- PBT Redistribusi Tanah Kategori 2		24.000	0	0	0	0	4.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,10
		6413.QAA.U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3		73.770	0	0	0	0	11.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,29
		6413.QAA.U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4		31.400	0	0	0	0	3.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,48
		6413.QAA.U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5		22.890	0	0	0	0	1.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,10
		6413.QAA.U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6		2.800	0	0	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	648,20
		6413.QAA.U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali		0	5.502	10.224	5.502	6.571	0,00	2.384,57	4.431,08	2.384,57	2.847,87	0	0	0	0	0	0,00	2.384,57	4.431,08	2.384,57	2.847,87	12.048,09
		6413.QAA.U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali		0	178.877	332.293	178.874	213.722	0,00	42.912,59	79.717,09	42.911,87	51.271,91	0	0	0	0	0	0,00	42.912,59	79.717,09	42.911,87	51.271,91	216.813,46
		PP 06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman																						
		KP 05-Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu		3.824	1.900	5.237	5.437	5.669	1.741,00	825,41	2.518,31	2.628,31	2.738,31	0	0	0	0	0	1.741	1.451	4.788	4.988	5.188	18.157
		ProP 02-Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kawasan		3.824	1.900	5.237	5.437	5.669	1.741,00	825,41	2.518,31	2.628,31	2.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	1.451,31	4.788,31	4.988,31	5.188,31	18.157,24
		6413.QAA.U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	*	70	70	70	70	70	33,06	33,06	33,06	33,06	33,06	0	0	0	0	0	33,06	33,06	33,06	33,06	33,06	165,30
		6413.QAA.U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	*	122	122	122	122	122	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	0	0	0	0	0	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	245,70
		6413.QAA.U29- PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	*	104	104	104	104	104	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	0	0	0	0	0	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	173,80
		6413.QAA.U30- PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	*	74	74	74	74	74	19,19	19,19	19,19	19,19	19,19	0	0	0	0	0	19,19	19,19	19,19	19,19	19,19	95,95
		6413.QAA.U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	*	267	267	267	267	299	52,16	52,16	52,16	52,16	52,16	0	0	0	0	0	52,16	52,16	52,16	52,16	52,16	260,80
		6413.QAA.U34- PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali	*											0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6413.QAA.U35- PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali	*											0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6422.QAA.U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I	*	350	0	0	0	0	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	213,70
		6422.QAA.U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II	*	610	0	0	0	0	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	327,61
		6422.QAA.U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III	*	520	0	0	0	0	261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	261,61
		6422.QAA.U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV	*	370	0	0	0	0	170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	170,21
		6422.QAA.U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V	*	1.337	0	0	0	0	579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	579,56

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS			PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (juta rupiah)					ALOKASI NON-APBN (juta rupiah)					TOTAL (juta rupiah)					TOTAL 2025-2029 (juta rupiah)	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		6422.QAA.U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali	*	0	375	2.000	2.000	2.000	0,00	162,56	900,00	900,00	900,00	0	0	0	0	0	0,00	375	2.000	2.000	2.000	6.375,00	
		6422.QAA.U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	*	0	888	2.600	2.800	3.000	0,00	474,54	1.430,00	1.540,00	1.650,00	0	0	0	0	0	0,00	888	2.600	2.800	3.000	9.288,00	
		6416.QAA.U20 - SHAT Konsolidasi Tanah	*											0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PP 07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan																									
KP 06-Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi				2.036.237	733.880	733.880	733.880	733.880,00	488.492,81	176.057,83	176.057,83	176.057,83	176.057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	488.493	176.058	176.058	176.058	176.058	1.192.724	
ProP 03-Redistribusi Aset (Tanah) Transmigrasi				2.036.237	733.880	733.880	733.880	733.880	488.492,81	176.057,83	176.057,83	176.057,83	176.057,83	0	0	0	0	0	488.493	176.058	176.058	176.058	176.058	1.192.724	
		6413.QAB.U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali	*	2.036.237	733.880	733.880	733.880	733.880	488.492,81	176.057,83	176.057,83	176.057,83	176.057,83						488.492,81	176.057,83	176.057,83	176.057,83	176.057,83	1.192.724,13	
PN 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan																									
PP 02-Reformasi Hukum																									
KP 04-Pembangunan Hukum Sektor Strategis			Persentase penyelesaian kasus pertanahan (persen)	2.151	2.151	2.955	3.256	3.445,00	80.604,23	79.336,69	158.053,18	174.699,08	190.104,63												
		ProP 01-Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.151	2.151	2.955	3.256	3.445	80.604,23	79.336,69	158.053,18	174.699,08	190.104,63	0	0	0	0	0	80.604,23	79.336,69	158.053,18	174.699,08	190.104,63	682.797,81	
		5576.QCE.002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat	*	40	40	41	42	44	4.631,09	5.090,15	5.008,71	4.925,64	4.931,50	0	0	0	0	0	4.631,09	5.090,15	5.008,71	4.925,64	4.931,50	24.587,10	
		6427.QCE.002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah	*	894	894	1.445	1.480	1.515	42.087,88	42.087,88	113.712,00	122.290,00	131.442,00	0	0	0	0	0	42.087,88	42.087,88	113.712,00	122.290,00	131.442,00	451.619,75	
		4404.QCE.003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat	*	12	12	12	12	12	1.577,01	1.577,01	1.655,87	1.738,66	1.824,03	0	0	0	0	0	1.577,01	1.577,01	1.655,87	1.738,66	1.824,03	8.372,59	
		6425.QCE.007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah	*	26	26	26	27	27	1.466,76	1.466,76	1.525,43	1.647,46	1.752,31	0	0	0	0	0	1.466,76	1.466,76	1.525,43	1.647,46	1.752,31	7.858,72	
		5573.QCE.003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat	*	70	70	70	70	70	2.843,74	2.843,74	2.985,92	3.135,22	3.289,16	0	0	0	0	0	2.843,74	2.843,74	2.985,92	3.135,22	3.289,16	15.097,77	
		6426.QCE.003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah	*	1.044	1.044	1.296	1.560	1.712	20.973,27	20.973,27	27.337,57	34.551,66	39.814,14	0	0	0	0	0	20.973,27	20.973,27	27.337,57	34.551,66	39.814,14	143.649,92	
		6425.QCE.008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah	*	65	65	65	65	65	7.024,48	5.297,89	5.827,67	6.410,44	7.051,49	0	0	0	0	0	7.024,48	5.297,89	5.827,67	6.410,44	7.051,49	31.611,97	
PP 10-Pemerintah Digital																									
KP 04-Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Digital				6.293.053	12.734.460	17.955.277	16.978.670	17.256.560	697.147,90	1.023.557,60	1.193.241,60	1.186.832,24	1.124.344,40	0	0	0	0	0	697.147,90	1.023.557,60	1.193.241,60	1.186.832,24	1.124.344,40	5.225.123,74	
		ProP 04-Transformasi Pelayanan Pertanian		6.293.053	12.734.460	17.955.277	16.978.670	17.256.560	697.147,90	1.023.557,60	1.193.241,60	1.186.832,24	1.124.344,40	0	0	0	0	0	697.147,90	1.023.557,60	1.193.241,60	1.186.832,24	1.124.344,40	5.225.123,74	
		(Pusat)	*	33	1	1	1	1	1.163,07	406,16	1.219,66	1.361,32	1.515,32	0	0	0	0	0	1.163,07	406,16	1.219,66	1.361,32	1.515,32	5.665,53	
		6420.QMA.001 - Data Pengadaan Tanah (Daerah)	*	512	95	512	512	512	5.003,14	2.356,62	6.054,50	6.659,84	7.325,83	0	0	0	0	0	5.003,14	2.356,62	6.054,50	6.659,84	7.325,83	27.399,93	
		5527.TBA.963 - Layanan Data dan Informasi	*	24	25	25	25	25	1.163,06	406,16	1.407,34	1.549,00	1.703,00	0	0	0	0	0	1.163,06	406,16	1.407,34	1.549,00	1.703,00	6.228,56	
		5563.RBO.001 - Peta Zona Nilai Tanah	*	2.746.968	5.228.000	7.908.810	5.919.099	5.549.664	25.827,00	54.003,96	91.146,37	60.909,70	46.734,16	0	0	0	0	0	25.827,00	54.003,96	91.146,37	60.909,70	46.734,16	278.621,19	
		6421.RBO.001 - Peta Zona Nilai Tanah	*	209.300	0	2.286.748	3.266.782	4.037.062	1.571,08	0,00	17.164,33	24.520,47	30.302,19	0	0	0	0	0	1.571,08	0,00	17.164,33	24.520,47	30.302,19	73.558,07	
		6411.RBO.002 - Peta Panjang Batas Kawasan Hutan	*	519					8.000,00						0	0	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		6413.QAB.U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali	*	10	1.000	1.000	1.000	1.000	771,60	771,60	771,60	771,60	771,60	0	0	0	0	0	771,60	771,60	771,60	771,60	771,60	3.858,00	
		6413.QAB.U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali	*	40	2.000	2.000	2.000	2.000	79,40	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0	0	0	0	0	79,40	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	15.959,40	
		6413.QAB.U26 - PBT PTSL Desa/ Kelurahan Lengkap Jawa Bali	*	463.217	171.872	171.872	171.872	171.872	200.758,25	74.489,32	74.489,32	74.489,32	74.489,32	0	0	0	0	0	200.758,25	74.489,32	74.489,32	74.489,32	74.489,32	498.715,53	
		6413.QAB.U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga	*	0	0	153.671	153.671	162.888	0,00	0,00	64.486,12	64.486,12	68.353,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00	64.486,12	64.486,12	68.353,92	197.326,16	
		6413.QAB.U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga	*	0	0	99.102	132.172	0	0,00	0,00	44.711,38	59.631,41	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	44.711,38	59.631,41	0,00	104.342,79	
		7971 .QAA.U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1	*	148.215	147.965	147.965	147.965	147.965	38.174,97	38.174,97	38.174,97	38.174,97	38.174,97	0	0	0	0	0	38.174,97	38.174,97	38.174,97	38.174,97	38.174,97	190.874,85	
		7971 .QAA.U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2	*	151.289	151.289	151.289	151.289	151.289	34.040,03	34.040,03	34.040,03	34.040,03	34.040,03	0	0	0	0	0	34.040,03	34.040,03	34.040,03	34.040,03	34.040,03	170.200,15	
		7971 .QAA.U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3	*	406.411	406.411	406.411	406.411	406.411	78.843,73	78.843,73	78.843,73	78.843,73	78.843,73	0	0	0	0	0	78.843,73	78.843,73	78.843,73	78.843,73	78.843,73	394.218,65	
		7971 .QAA.U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4	*	181.865	181.865	181.865	181.865	181.865	28.916,54	28.916,54	28.916,54	28.916,54	28.916,54	0	0	0	0	0	28.916,54	28.916,54	28.916,54	28.916,54	28.916,54	144.582,70	
		7971 .QAA.U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5	*	1.938.888	6.423.007	6.423.007	6.423.007	6.423.007	242.361,00	691.548,23	691.548,23	691.548,23	691.548,23	0	0	0	0	0	242.361,00	691.548,23	691.548,23	691.548,23	691.548,23	3.008.553,92	
		7971 .QAA.U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3	*	12.329	4.924	4.924	4.924	4.924	2.663,06	1.063,58	1.063,58	1.063,58	1.063,58	0	0	0	0	0	2.663,06	1.063,58	1.063,58	1.063,58	1.063,58	6.917,38	
		7971 .QAA.U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5	*	25.594	11.165	11.165	11.165	11.165	3.454,55	1.507,28	1.507,28	1.507,28	1.507,28	0	0	0	0	0	3.454,55	1.507,28	1.507,28	1.507,28	1.507,28	9.483,67	
		7971 .QAB.U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2	*	34	27	34	34	34	24,96	16,35	16,35	16,35	16,35	0	0	0	0	0	24,96	16,35	16,35	16,35	16,35	90,36	
		7971 .QAB.U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3	*	448	508	508	508	508	267,90	17,30	17,30	17,30	17,30	0	0	0	0	0	267,90	17,30	17,30	17,30	17,30	337,10	

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS			PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (juta rupiah)					ALOKASI NON-APBN (juta rupiah)					TOTAL (juta rupiah)					TOTAL 2025-2029 (juta rupiah)
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		7971 .QAB.U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4	*	13	0	0	0	0	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
		7971 .QAB.U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	*	1.003	605	605	605	605	306,92	306,80	306,80	306,80	306,80	0	0	0	0	0	306,92	306,80	306,80	306,80	306,80	1.534,12
		7971 .QAB.U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	*	0	37	37	37	37	0,00	66,30	66,30	66,30	66,30	0	0	0	0	0	0,00	66,30	66,30	66,30	66,30	265,20
		7971 .QAB.U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	*	8	2	2	2	2	10,23	2,99	2,99	2,99	2,99	0	0	0	0	0	10,23	2,99	2,99	2,99	2,99	22,19
		7971 .QAB.U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	*	101	53	115	115	115	59,09	31,01	67,28	67,28	67,28	0	0	0	0	0	59,09	31,01	67,28	67,28	67,28	291,94
		7971 .QAB.U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	*	38	0	0	0	0	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
		6413.QAH.007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali	*	3.982	1.602	1.602	1.602	1.602	17.479,19	7.031,18	7.382,74	7.751,87	8.139,47	0	0	0	0	0	17.479,19	7.031,18	7.382,74	7.751,87	8.139,47	47.784,45
		6413.QAH.010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali	*	2.212	2.007	2.007	2.007	2.007	6.159,43	5.587,49	5.866,86	6.160,21	6.468,22	0	0	0	0	0	6159,43	5587,49	5866,86	6160,21	6468,22	30.242,20
PN 08-Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur																								
	PP 02- Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa																							
	KP 04-Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat			0	10.075	10.090	10.090	10.080	50,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	76	0	0	0	0	9.460	12.950	12.950	12.950	12.950	61.260
		ProP 02-Pelindungan Hutan Adat yang berada di APL dan Tanah Ulayat, Penegakan dan Pelayanan Hukum		0,00	10.075,00	10.090,00	10.090,00	10.080,00	50,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,53	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	61.259,53
		7977.QAB. 001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan	*	0	50	50	50	50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,52					0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
		7977.QAB. 002 - Pendaftaran Tanah Ulayat	*	0	25	40	40	30	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00						0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	31.600,00
		4402.QAB.001. Data Inventarisasi Tanah Ulayat	*	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						9459,531	5000	5000	5000	5000	29459,53

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

Kerangka Regulasi Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
SEKRETARIAT JENDERAL						
1	Presentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, terdapat penambahan terkait Naskah Dinas Elektronik (NDE).	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Kementerian ATR/BPN	2025
2		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan	Adanya penambahan unit kerja baru yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta penyesuaian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja Kementerian.	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	Kementerian PAN-RB	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Sehingga perlu adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian.			
3		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan	Penyesuaian organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	Kementerian PAN-RB	2025
4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan tentang Pertanahan Nasional Penyelenggaran Kearsipan	1. Sedang proses pembahasan dengan unsur teknis terkait Pengelolaan Arsip Elektronik. 2. Naskah akademik: https://ppskatp.atrbpn.go.id/kms/public/video/kajian-kebijakan-tata-kelola-arsip-yang-sesuai-dengan-karakter-kementerian-atr-bpn#	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	1. Kementerian ATR/BPN; dan 2. ANRI.	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			Draf Batang Tubuh telah disepakati pada rapat 1 Oktober 2024 di ruang PTSL yang dihadiri oleh internal Kementerian ATR/BPN dan ANRI Draf batang tubuh dan Lampiran: https://bit.ly/RapermenArsip Rapermen ini merupakan gabungan beberapa substansi pokok (SDM Kearsipan, Alih Media Arsip, Arsip Vital, Arsip Terjaga, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Elektronik, dan Pengawasan Kearsipan).			
5		Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dengan prioritas nasional, efisiensi program dan anggaran, serta respons terhadap dinamika agraria, tata ruang, dan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian PAN-RB; dan 3. Kementerian PPN/Bappenas.	2025
6		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian	Perlu disusun dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sekretariat Negara	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional				
7		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Utara	Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pertanahan di Provinsi Kalimantan Utara.	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	Kementerian PAN-RB	2025
8		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pola Karier		Biro Sumber Daya Manusia		2025
9		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Risiko		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko		2025
10	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala	1. Penambahan Klasifikasi Arsip seiring dengan Penambahan Struktur Organisasi Kementerian. 2. Perubahan Masa Retensi Arsip pada jenis arsip yang dimiliki unit pengolah.	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Kementerian ATR/BPN	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip				
11	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip	Jadwal Retensi Arsip menyesuaikan dengan klasifikasi arsip yang terbaru, sehingga saat klasifikasi arsip berubah maka perlu dilakukan perubahan pada Jadwal Retensi Arsip.	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	1. Kementerian ATR/BPN; dan 2. ANRI.	2026
12	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) belum pernah diterbitkan dalam bentuk peraturan sehingga diperlukan permen tersebut. SKKAAD dapat dibuat setelah permen klasifikasi arsip diterbitkan. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan salah satu dari empat pedoman yang diperlukan dalam proses pengelolaan arsip dinamis selain dari Pedoman Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip.	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Kementerian ATR/BPN	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan pedoman para pengelola arsip dalam memberikan layanan akses terhadap arsip dinamis.			
13		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu	1. Untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu yang diberikan keringanan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai tindak lanjut peraturan pelaksana terhadap perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang saat ini masih dalam proses pembahasan; 2. Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan upaya menggerakkan ekonomi nasional perlu adanya pengaturan yang menjadi dasar hukum atas pelayanan dengan tarif tertentu; dan 3. Sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi nasional dan sebagai bentuk	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Kementerian Keuangan	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			responsibilitas terhadap dinamika pelayanan yang terjadi, diharapkan agar peraturan dimaksud dapat menjadi acuan bagi pelayanan baik untuk kegiatan berusaha, kegiatan non berusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional.			
14		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tarif, Akomodasi, dan Konsumsi Pelayanan Pertanahan		Biro Keuangan dan Barang Milik Negara		2026
15		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial	Perlunya pengaturan mengenai uraian jabatan dan peta jabatan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	1. Kementerian PAN-RB; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. BKN.	2026
16		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja	Perlunya pengaturan mengenai pemberian tunjangan kinerja, pengurangan tunjangan kinerja, penambahan tunjangan kinerja, tata cara pembayaran kinerja dan pemantauan evaluasi.	Biro Sumber Daya Manusia	1. Kementerian PAN-RB; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. BKN.	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
17		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Belum adanya pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagai amanat dari <i>core value</i> berakhlak yang bertujuan untuk membina karakter/watak, moral, perilaku, kesadaran akan tanggung jawab, keteladanan dan wawasan kebangsaan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN.	Biro Sumber Daya Manusia	1. Kementerian PAN-RB; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. BKN.	2026
18		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Sebagai pedoman setiap pegawai (Menteri, wakil Menteri dan ASN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan tertib penggunaan pakaian dinas dan atribut pada hari kerja.	Biro Sumber Daya Manusia	1. Kementerian PAN-RB; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. BKN.	2026
19		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan pelayanan khususnya terkait Standar Pelayanan Pertanahan pada Kementerian ATR/BPN serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	1. Kementerian PAN-RB; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. BKN.	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di mana setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara dan kebutuhan masyarakat.			
20		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Survei dan Pemetaan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan pelayanan khususnya terkait Survei dan Pemetaan pada Kementerian ATR/BPN serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di mana setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara dan kebutuhan masyarakat.	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko	1. Kementerian PAN-RB; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. BKN.	2026
21		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala		Biro Sumber Daya Manusia		2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Talenta				
22		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Kinerja		Biro Sumber Daya Manusia		2026
23		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Peta Proses Bisnis		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko		2026
24		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko		2026
26		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Biro Hukum		2026
27		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	1. Perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Biro Hukum	1. Kementerian ATR/BPN;	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya; dan 2. Perlu penegasan pengaturan mengenai mekanisme pengusulan pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian ATR/BPN terutama melalui izin prakarsa.		2. Kementerian Hukum.	
28		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Perlu penambahan pengaturan mengenai mekanisme pemberian fasilitasi bantuan hukum di pusat, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan kantor pertanahan. 2. Perlu menambah wakil ketua dalam tim fasilitasi bantuan hukum di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi dan kantor pertanahan.	Biro Hukum	1. Inspektorat Jenderal; 2. Direktorat Jenderal; 3. Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan 4. Kementerian Hukum.	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			3. Perlu dipertegas mengenai kewenangan pemberian bantuan hukum, apakah sampai upaya hukum luar biasa.			
29		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Agraria Pertanahan dan Tata Ruang	Perlunya pengaturan mengenai tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional, pengangkatan Jabatan Fungsional, pembinaan Jabatan Fungsional dan Organisasi Profesi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.	Biro Sumber Daya Manusia	1. Kementerian PAN-RB; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. BKN.	2027
30		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	1. Sebagai payung hukum dan standardisasi praktik perlindungan data pribadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 2. Sebagai target kenaikan indeks SPBE.	Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang	1. Kementerian Hukum; dan 2. Kementerian Komunikasi dan Digital.	2027
31		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3	Perubahan perlu dilakukan karena ketentuan yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi kepegawaian dan tata kelola perjalanan dinas luar negeri. Selain itu, adanya kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran, penyederhanaan prosedur perizinan, serta sinkronisasi dengan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	1. Kementerian Luar Negeri; 2. Kementerian Sekretariat Negara; dan 3. Kementerian Keuangan.	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.	aturan lintas kementerian/lembaga terkait perjalanan dinas luar negeri.			
32		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan pedoman kerja sama dengan perkembangan kebutuhan program strategis, termasuk kerja sama internasional dan lintas sektor. Selain itu, diperlukan harmonisasi dengan regulasi terbaru terkait tata kelola perjanjian, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan agar kerja sama lebih efektif dan akuntabel.	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	1. Kementerian Hukum; 2. Kementerian Luar Negeri; dan 3. Kementerian PPN/Bappenas	2027
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL						
1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Struktur dan	Sektor pendidikan mendapatkan tantangan serius untuk menyuguhkan konsep pendidikan yang menerapkan pembelajaran dengan praktik yang lebih dominan ketimbang unsur teori (Hartanto, F. C., Rusdiarti, &	STPN	1. Biro Organisasi dan Kepegawaian	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN	Abdurrahman. (2019). Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul. Seminar Nasional Pascasarjana 2019, 163–171.) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (PTKL), menyebutkan bahwa PTKL menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian lain atau LPNK. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, menyebutkan bahwa Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Dengan adanya peraturan dimaksud maka STPN sudah tidak sesuai lagi jika disebut sebagai Sekolah Tinggi.		Kementerian ATR/BPN; 2. Biro Hukum Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek; 4. Kementerian PAN-RB; dan 5. Kementerian Keuangan.	

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			Sehingga perlu perubahan kelembagaan STPN menjadi Politeknik STPN. Organisasi penyelenggara Pendidikan di STPN belum sepenuhnya mengacu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang paling sedikit harus memuat unsur: penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha. Istilah jabatan organisasi pada Organisasi dan Tata Kerja STPN (OTK) sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.			

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
2		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Statuta Politeknik Agraria STPN	Sebagai tindak lanjut dari perubahan kelembagaan dari Sekolah Tinggi menjadi Politeknik perlu disusun tata aturan yang mengatur proses bisnis serta tata kelola penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Agraria STPN.	STPN	1. Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN; 2. Biro Hukum Kementerian ATR/BPN; dan 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek.	2025
3		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Ikatan Dinas pada Politeknik Agraria STPN	Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia teknis dan spesifik yang ahli di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan yang tidak bisa disediakan perguruan tinggi umum di Kementerian ATR/BPN dan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1), salah satu transformasi STPN adalah menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan.	STPN	1. Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN; 2. Biro Hukum Kementerian ATR/BPN;	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			Perguruan tinggi dituntut menjaga eksistensinya bahkan meningkatkan penyerapan agar terus diakui keberadaanya. Dengan tujuan utama menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja (Mali, M. G. (2020). Internasionalisasi Kampus Sebagai Strategi Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, 2(1), 68-78.)		3. Biro Perencanaan dan Kerja sama Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek; 5. Kementerian PAN-RB; 6. Kementerian Keuangan; dan 7. BKN.	
4		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang		STPN		2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan				
5		Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana Terapan		STPN		2027
INSPEKTORAT JENDERAL						
1		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian	Sebagai upaya meningkatkan peran strategis pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, tata kelola pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien perlu diatur agar dapat memberikan nilai tambah dalam	Inspektorat Jenderal	1. BPK; dan 2. BPKP.	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.			
2		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Hukuman Disiplin		Inspektorat Jenderal		2025
3		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Dalam rangka mengatur penanganan laporan adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN melalui <i>whistleblowing system</i> maka perlu untuk mengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang juga sudah tidak sesuai dengan Organisasi Tata Kerja (OTK).	Inspektorat Jenderal	1. BPK; dan 2. BPKP.	2026
4		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Benturan Kepentingan		Inspektorat Jenderal		2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
5		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi	Urgensi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ini adalah: a. sebagai acuan kepada Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam meningkatkan pemahaman terkait gratifikasi; b. menguraikan tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi, jenis-jenis gratifikasi; dan c. untuk mengetahui alur pelaporan dan penanganan gratifikasi serta hak dan perlindungan untuk pelapor gratifikasi.	Inspektorat Jenderal	KPK RI	2026-2027
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG						
1	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Nomor 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Mendukung perwujudan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yang menitikberatkan penyelenggaraan penataan ruang pada tingkat nasional sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan yang tercantum dalam ASTA CITA.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan,	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	
2	IKP: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) IKK: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mendukung perwujudan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yang menitikberatkan penyelenggaraan penataan ruang sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan yang tercantum dalam ASTA CITA.	Sekretariat DJTR	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP,	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
					KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	
3	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Kawasan Berbak - Bukit Tiga Puluh	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda,	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				dan K/L terkait lainnya	
4	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional					
5	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Pemenuhan Dokumen RTR Nasional					
6	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Dokumen RTR Nasional					
7	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Napan dan Kefamenanu	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
8	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Long Nawang	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2025
9		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala				2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Penata Ruang				
10		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon				2025
11		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen				2025
12		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan				2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
13		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik				2025
14		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas				2025
15	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jabodetabek – Punjur	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar,	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	
16	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG,	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				BRIN, BNPP, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	
18		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara				2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
19		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				2026
20	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP,	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	
21	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG,	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	
22	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Khatulistiwa	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar,	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	
23	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bang Sejahtera	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG,	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	
24	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Metropolitan Nusamba	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda,	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional				dan K/L terkait lainnya	
25	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Pemenuhan Dokumen RTR Nasional					
26	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Sangiran	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Dokumen RTR Nasional					
27	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
28	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Soroako dan Sekitarnya	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
29	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Observasi Nasional Timau	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
30	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Tanjung Puting	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
31	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Jawa - Sumatra	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
32	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Miangas	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
33	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Jayapura	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
34	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Long Pahangai	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
35	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kwandang	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
36	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Tanah Merah	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
37	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
38	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
39	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Surakarta	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
40	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Pekanbaru	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
42	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional kawasan Perkotaan Malang Raya	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
43	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Sembilang	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
44	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Hutan Hujan Sumatera	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
45	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Sabang	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
46	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Daruba, Sanggowo dan Bere-Bere **)	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPBP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
47	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Papua	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
48	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
49	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Hutan Lindung Mahato	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
50	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Lorentz	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
51	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Belitong	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
52	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ijen	Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
53	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Sei Manggaris	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
54	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Tarakan	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
55	IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalabahi	Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat.	Direktorat Perencanaan Tata Ruang	Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya	2029

DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN TANAH DAN RUANG

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
1		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Survei Pemetaan, Pertanahan dan Ruang	- Mempercepat penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka terselenggaranya pemetaan untuk seluruh bidang tanah di Indonesia. - Untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan dan ruang serta perlu tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BIG	2025
2		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan Data Spasial Pendaftaran Tanah	- Mewujudkan penanganan yang seragam dan terstandardisasi terhadap permasalahan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia. - Mewujudkan basis data spasial bidang tanah yang berkualitas.	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	BIG	2025
3		Revisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Untuk menyesuaikan dengan perkembangan surveyor berlisensi saat ini, untuk Pengukuran dan pemetaan ruang/3D.	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang	BIG	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang surveyor berlisensi				
4		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral				2026
DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH						
1		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan	1. Pelaksanaan Layanan Elektronik sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Proses Pendaftaran Tanah. 2. Meningkatkan efektifitas dalam penanganan dan menjalankan tugas dan fungsi atas pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pendaftaran		2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah		Tanah dan Ruang		
2		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tarif Hak Pengelolaan	Kebutuhan ketersediaan lahan, maka Hak Pengelolaan (HPL) diharapkan dapat hadir sebagai bentuk strategi pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap lahan dengan berbagai tujuan yang melayani kepentingan umum, dan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Jangkauan pengaturan dalam kebijakan peraturan tarif pemanfaatan tanah HPL meliputi Objek Tanah HPL, Subjek (Pemegang) HPL, Pihak yang akan melakukan kerja sama arah pengaturan meliputi: - Nilai Ekonomi; - Keadilan; - Konsultasi <i>Stakeholder</i>; dan - Dampak Sosial.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah		2025
3		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Hak Guna Usaha				2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
4		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Perlunya pengaturan untuk mengakomodir perubahan Tata Usaha Pendaftaran Tanah setelah penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1. Sekretaris Jenderal; dan 2. Kementerian ATR/BPN - Direktorat Jenderal Survei dan Pengukuran Pemetaan Pertanahan dan Ruang.	2026
5		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat berbentuk dokumen elektronik, serta amanat Pasal 86 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. 2. Penyempurnaan ketentuan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan terhadap PPAT seperti wilayah kerja, usia PPAT, formasi PPAT dan pengaturan mengenai uang jasa PPAT. Di samping itu juga untuk menyesuaikan ketentuan yang	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	Kementerian Hukum	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			sudah tidak relevan seperti rangkap jabatan PPAT dan perpanjangan masa jabatan PPAT. 3. Memenuhi kebutuhan hukum saat ini maka dibuat pengaturan baru mengenai Pembuatan akta PPAT secara elektronik dan layanan terintegrasi secara elektronik di bidang ke-PPAT-an. 4. Menyatukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan PPAT sehingga memudahkan dalam penerapannya.			
6		Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah				2026
7		Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan	Perlunya pengaturan pemberian Hak atas Tanah pada wilayah perairan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada perseorangan dan masyarakat hukum adat yang tinggal di	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah -	Direktorat Jenderal Survei dan Pengukuran Pemetaan	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			wilayah perairan, dan kepada badan hukum yang memerlukan tanah untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan di wilayah perairan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan perlindungan pada fungsi dan ekosistem perairan untuk mempertahankan kemampuan menyediakan jasa lingkungan, dengan cara mengenakan pembatasan dan pembebanan sejumlah kewajiban kepada subjek pemegang HAT.	Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang	Pertanahan dan Ruang	
8		Rancangan Peraturan Presiden tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah				2026
9		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Peralihan Hak Elektronik dan Akta Elektronik	1. Penyederhanaan Pelayanan Peralihan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Layanan Pendaftaran Tanah dalam rangka Transformasi Digital. 2. Pelaksanaan ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa akta PPAT dapat berbentuk dokumen elektronik, serta amanat Pasal	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pendaftaran Tanah dan Ruang	Badan Siber dan Sandi Negara	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.			
10		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Dalam rangka penyesuaian prosedur dan tata cara pelaksanaan Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT		2027
11		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Administrasi Atas Satuan Rumah Susun sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah	Pengaturan mengenai hak atas tanah dan pemberdayaan tanah wakaf yang di atasnya dibangun rumah susun, Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Satuan atas Rumah Susun, Pemeliharaan Data Satuan Rumah Susun, Pendaftaran Tanah SHM, Pengaturan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah SHM Sarusun, Peningkatan kualitas Rumah Susun yang telah terbit SHM Sarusun.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Susun maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan lebih lanjut di bidang administrasi pertanahan atas tanah yang diatasnya berdiri rumah susun dan/atau satuan rumah susun				
12		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah untuk Penyesuaian Pelaksanaan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021	1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan HPL dan Hak Atas Tanah untuk Penyesuaian Pelaksanaan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. 2. Regulasi untuk mengakomodir ketentuan pelaksanaan terkait dengan Hak Guna Usaha Tanaman Karbon, Pengaturan Tanah Negara, Penyesuaian Ketentuan HPL, Penyesuaian Jangka Waktu Hak, Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan, Penyesuaian Ketentuan Ruang Atas Tanah/Ruang Bawah Tanah, Penyesuaian Ketentuan Kewajiban Pemegang Hak dan Ketentuan Tanah Bersama Orang Asing,	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang	1. Kementerian Pertanian; 2. Kementerian Kehutanan; dan 3. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			Perlindungan Hukum Pelaksana Pendaftaran Tanah.			
13		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat				2027
14		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	1. Perlu mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2. Perlunya pengaturan untuk mengakomodir perubahan layanan pertanahan secara elektronik dan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pendaftaran Tanah dan Ruang	Direktorat Jenderal Survei dan Pengukuran Pemetaan Pertanahan dan Ruang	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan.			
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA						
1	Persentase Penerima Reforma Agraria Yang Meningkatkan Kesejahteraannya	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria, Penyelenggaraan Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Pengalihan Hak atau Pengalihan Fungsi TORA, serta Pemindahtanganan Sertipikat Hak Atas Tanah Transmigrasi	- Perlunya menyusun peraturan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yaitu mengenai: a. Penyelenggaraan audit pemenuhan kewajiban alokasi 20% (dua puluh persen) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 9 ayat (3); b. Pengalihan hak atau pengalihfungsian TORA sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 ayat (3); dan c. Pemindahtanganan sertipikat Hak Atas Tanah transmigrasi yang diamanatkan Pasal 37 ayat (3). - Penguatan pengaturan yang mengatur substansi mekanisme Redistribusi Tanah; dan - Penguatan pengaturan yang mengatur substansi Penataan Akses.	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Kehutanan; 4. Kementerian Transmigrasi; dan 5. Kementerian Koordinator Bidang IPK	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
2	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	- Penyesuaian pengaturan mengenai Persyaratan Rekomendasi Tanah Timbul dan Pembagian Kewenangan Pemberian Rekomendasi Tanah Timbul (Berdasarkan Luasan atau Letak Lokasi); - Pendalaman penjelasan terkait penguasaan atas Pulau-Pulau Kecil (aturan terkait maksimal 70% (tujuh puluh persen) penguasaan 1 pulau, 30% (tiga puluh persen) Kawasan Lindung); - Penataan permukiman di atas air (menunggu perkembangan RPerpres Permukiman di Atas Air yang saat ini sedang tahap harmonisasi); dan - Pengaturan mengenai konsep 3R atau Kebijakan Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung.	Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Penatagunaan Tanah	1. Kementerian ATR/BPN (Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah); dan 2. KKP.	2026
3	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12	Perlu penyesuaian dengan kebijakan Peraturan Pemerintah yang menjadi acuannya yang sedang disusun perubahannya/revisi.	Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Penatagunaan Tanah	1. Kementerian ATR/BPN; dan 2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M.	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan				
4	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah	Peraturan Pemerintah ini perlu dilakukan penyesuaian mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menjadi acuan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.	Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Penatagunaan Tanah	1. Kementerian ATR/BPN; dan 2. Kementerian Dalam Negeri.	2027
5	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Petani/Nelayan	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian	- Perlunya dilakukan perubahan dan menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Pembaruan Agraria/Reforma Agraria yang terbaru dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang beririsan dengan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pun baiknya agar bisa disesuaikan agar pengaturan Peraturan Pemerintah bersifat lebih umum dibandingkan dengan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat <i>Landreform</i>	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. Kementerian Pertanian.	2028

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			pengaturan Peraturan Presiden sesuai dengan hierarki yang berlaku. - Penyesuaian pengaturan mengenai ganti kerugian terkait dengan besaran uang ganti kerugian, kewenangan pemberian ganti kerugian.			
6	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Petani/Nelayan	Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	- Perlunya pembaruan mengenai batas minimum tanah pertanian, larangan pemecahan tanah pertanian dan pengaturan gadai; - Penyesuaian pengaturan mengenai kepemilikan minimal luas tanah pertanian kurang dari dua hektar; - Penyesuaian pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah pertanian yang mengakibatkan luas kurang dari dua hektar; dan - Penyesuaian pengaturan mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar.	Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ <i>Landreform</i>	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kementerian Pertanian; dan 3. Kementerian Dalam Negeri.	2029
DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN						
1		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala	Untuk melandasi penyelenggaraan penilaian tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan	Direktorat Penilaian Tanah	1. Kementerian Dalam Negeri;	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Badan Pertanahan Nasional tentang Penilaian Tanah	Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	dan Ekonomi Pertanahan	2. Kementerian PPN/Bappenas; dan 3. Kementerian Keuangan.	
2		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum				2025
3		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12	Untuk menyesuaikan mengenai beberapa perkembangan dan pembaruan dalam kegiatan konsolidasi tanah.	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian PUPR; dan 3. Kementerian PPN/Bappenas.	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah				
4		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Untuk menyesuaikan perubahan : - Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum; - Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan - Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.	Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian PUPR; 3. Instansi yang Memerlukan Tanah; 4. LMAN; 5. Kementerian Keuangan; dan 6. Pemerintah Daerah	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
5		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat				2026
6		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan	Untuk menyesuaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengenai substansi pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.	Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Instansi yang Memerlukan Tanah; 3. LMAN; dan 4. Kementerian Keuangan.	2026
7		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Penilaian dampak sosial kegiatan pembangunan di Indonesia, termasuk pengadaan tanah, merupakan komponen penilaian dampak lingkungan dalam kajian	Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian PUPR;	2026/ 2027

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
		tentang Penilaian Dampak Sosial Pengadaan Tanah	dokumen lingkungan hidup. Sebagai bagian upaya untuk memperkuat kebijakan pengadaan tanah, ATR/BPN tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penilaian Dampak Sosial Pengadaan Tanah. Penilaian Dampak Sosial yang lebih komprehensif diharapkan akan membantu memahami risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan pembangunan dengan lebih baik dan terstruktur. Pada akhirnya risiko dan dampak yang teridentifikasi tersebut diharapkan dapat dimitigasi atau bahkan dihindari. Salah satu elemen penting dari penilaian dampak sosial ini adalah partisipasi masyarakat dalam proses terhadap pengadaan tanah. Pada akhirnya, diharapkan dengan proses yang lebih terstruktur dan runut ini dapat berkontribusi pada proses, akan meningkat dan pengadaan tanah yang dapat selesai tepat waktu. Hasil Penilaian Dampak Sosial juga akan memberikan panduan bagi instansi yang memerlukan tanah dan pemilik proyek, serta		3. Instansi yang Memerlukan Tanah; 4. LMAN; 5. Kementerian Keuangan; dan 6. Pemerintah Daerah.	

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
1		Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar	Regulasi yang ada belum mencakup hal-hal, antara lain: - pengaturan larangan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang sedang dalam proses evaluasi dan peringatan tanah telantar; - pengaturan yang mewajibkan pimpinan instansi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penetapan kawasan telantar oleh Kementerian ATR/BPN; - pengaturan mengenai penghapusan/pengeluaran dari basis data tanah terindikasi telantar pada tahap peringatan dalam hal pemegang HAT/HPL/DPAT telah melaksanakan kewajibannya; - pengaturan mengenai dimungkinkan adanya kondisi pemegang HAT/HPL melakukan pelepasan HAT/HPL dalam proses penertiban tanah telantar; dan - pengaturan pendayagunaan terhadap tanah yang telah dilakukan pelepasan oleh pemegang HAT/HPL.	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M; 3. Kementerian ESDM; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Perindustrian ; 6. Kementerian Pariwisata; dan 7. Kementerian PKP.	2025

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
2		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengendalian dan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	- Belum adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian hak atas tanah, HPL, dan dasar penguasaan atas tanah (termasuk di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu (WP3WT)). - Belum adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah.	Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Ruang	Kementerian ATR/BPN	2025
3		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar	Regulasi yang ada belum mencakup hal-hal, antara lain: - pengaturan larangan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang sedang dalam proses evaluasi dan peringatan tanah telantar; - pengaturan yang mewajibkan pimpinan instansi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penetapan kawasan telantar oleh Kementerian ATR/BPN; - pengaturan mengenai penghapusan/pengeluaran dari basis data tanah terindikasi telantar pada tahap peringatan dalam hal pemegang	Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Ruang	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M; 3. Kementerian ESDM; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Perindustrian ;	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
			HAT/HPL/DPAT telah melaksanakan kewajibannya; - pengaturan mengenai dimungkinkan adanya kondisi pemegang HAT/HPL melakukan pelepasan HAT/HPL dalam proses penertiban tanah telantar; dan - pengaturan pendayagunaan terhadap tanah yang telah dilakukan pelepasan oleh pemegang HAT/HPL.		6. Kementerian Pariwisata; dan 7. Kementerian PKP.	
4		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	- Regulasi yang ada belum mencakup hal-hal yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. - Penyesuaian dengan peraturan di atasnya (UUCK dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021).	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M; dan 3. Pemerintah Daerah.	2026
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN						
1	Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah	Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan	1. Tahapan penanganan yang belum dijelaskan secara detail untuk	Direktorat Jenderal Penanganan	Kementerian ATR/BPN	2026

No	IKSS	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
1		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Uji Kompetensi Penata Ruang				2027
2		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Uji Kompetensi Penata Kadastral				2027
3		Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Asisten Penata Kadastral				2027

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

Metadata Matriks Kinerja Pendanaan Kementerian ATR/BPN

Visi/ Misi/Tujuan	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
VISI									
MISI 1: Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis									
TUJUAN 1: Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang									
	Indikator Kinerja Tujuan	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS	Kementerian ATR/BPN	1. Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, yang dikontribusikan melalui penyediaan dokumen RTR 2. Melalui penyediaan RDTR yang terintegrasi OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat	1. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RDTR yang terintegrasi OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS 2. Semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS dan semakin banyak daerah yang memiliki RDTR terintegrasi OSS, diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha 3. Kondisi 100% tercapai jika seluruh RDTR sudah terintegrasi dengan OSS	$IKT = \frac{\frac{RDTR\ OSS\ Nasional\ (t)}{RDTR\ Nasional\ (t)} \sum Penduduk\ Nasional\ (t)}{\sum Penduduk\ Nasional\ (t)} - 100\%$	(Variabel) 1. RDTROSS_NASIONAL(t): Total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t 2. RDTR_NASIONAL(t): total RDTR secara nasional sampai tahun t 3. ΣPENDUDUK NASIONAL(t): Jumlah penduduk nasional tahun t (Sumber) 1. Jumlah Penduduk: BPS 2. RDTR terintegrasi OSS: Database DJTR Asumsi: Penduduk terdistribusi merata pada tiap WP RDTR	Persen (%)	Tahunan
Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									
Sasaran Strategis 1:		Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif,							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan							
		Level Nasional	Kementerian ATR/BPN	1. Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, yang dikontribusikan melalui dokumen RTR yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan 2. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, diasumsikan akan memiliki (potensi) ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan, karena dokumen RTR sudah memperhatikan aspek lingkungan dan kerawanan bencana, daya dukung dan daya tampung wilayah	1. Melalui penyediaan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan pertimbangan aspek lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung wilayah, akan mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dari sisi perencanaan tata ruang 2. Semakin banyak jumlah RTRW yang terbit dan sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup diharapkan terjaga dan meningkat melalui kontribusi pengaturan, pembinaan, dan perencanaan tata ruang	$IKSS_1 = \frac{Penduduk_RTRWPPB_{(i)(t)}}{Penduduk_Nasional_{(t)}} - 100\%$	(Variabel) 1. Penduduk_Nasional(t): Jumlah penduduk Indonesia pada tahun t 2. Penduduk_RTRWPPB(i)(t): Jumlah penduduk provinsi i dengan RTRW Provinsi yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan pada tahun t (Sumber Data) 1. Jumlah Penduduk: BPS 2. RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan: Database DJTR	Persen (%)	Tahunan
DJTRPENTAG		Level Provinsi (Rata-Rata)				$IKSS_1 = \frac{Penduduk_RTRWKPB_{(i)(t)}}{Penduduk_Provinsi_{(j)(t)}} - 100\%$	(Variabel) 1. Penduduk_Provinsi (j)(t): Jumlah penduduk provinsi j pada tahun t 2. Penduduk_RTRWKPB(i)(t): Jumlah penduduk Kab/Kota i pada tahun t dengan RTRW Kab/Kota yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan (Sumber Data) 1. Jumlah Penduduk: BPS 2. RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan : Database DJTR	Persen (%)	Tahunan

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
			Sasaran Program	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas							
			Indikator Kinerja Program	1. Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP	Kementerian ATR/BPN	1. Sebagai bentuk fokus agar Pemerintah mendorong dan memperkuat komitmen serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan dan menetapkan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan RTRW Provinsi yang sudah terintegrasi dengan RZWP3K sebagai implementasi OSPP 2. Sebagai bentuk penilaian kinerja pembinaan perencanaan tata ruang daerah. Peran ATR/BPN, melalui DJTR, selaku regulator dan fasilitator dalam perencanaan tata ruang daerah	IKP ini merupakan nilai proporsi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP pada level Pemerintah Daerah. Kondisi 100% diharapkan terjadi sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dan pembinaan oleh ATR/BPN dalam menyelesaikan RTRW	$IKP_1 = \sum \frac{Pemda_RTRWPB_{(t)}}{Pemda} 100\%$	(Variabel) 1. Pemda_RTRWPB(t): Jumlah Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP 2. PEMDA: Jumlah total Prov/Kab/Kota di seluruh Indonesia (Sumber) Database DJTR dan BPS	Persen (%)	Tahunan
		DJTR PENTAG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.2 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS	Kementerian ATR/BPN	1. Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, yang berkontribusi melalui penyediaan dokumen RTR 2. Melalui penyediaan RDTR yang terintegrasi OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat 3. Kondisi 100% tercapai jika seluruh RDTR sudah terintegrasi dengan OSS	1. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RDTR yang terintegrasi OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS 2. Semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS dan semakin banyak daerah yang memiliki RDTR terintegrasi OSS, diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha 3. Kondisi 100% tercapai jika seluruh RDTR sudah terintegrasi dengan OSS	$IKSS_2 = \frac{\frac{RDROSS_NASIONAL_{(t)}}{RDTR_NASIONAL_{(t)}} \sum PENDUDUK_NASIONAL_{(t)}}{\sum PENDUDUK_NASIONAL_{(t)}} 100\%$	(Variabel) 1. RDTROSS_NASIONAL(t): Total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t 2. RDTR_NASIONAL(t): total RDTR secara nasional sampai tahun t 3. ΣPENDUDUK NASIONAL(t): Jumlah penduduk nasional tahun t (Sumber) 1. Jumlah Penduduk: BPS 2. RDTR terintegrasi OSS: Database DJTR Asumsi: Penduduk terdistribusi merata pada tiap WP RDTR	Persen (%)	Tahunan
			Sasaran Program	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas							
			Indikator Kinerja Program	2. Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Kementerian ATR/BPN	1. Persentase K-KKPR sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang 2. IKP ini juga merupakan Indikator Kinerja RPJMN bidang tata ruang	Semakin tinggi proporsi konfirmasi KKPR mengindikasikan semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS serta meningkatnya akses dan ekosistem kemudahan berusaha.	$IKP_2 = \sum \frac{K_KKPR_{(t)}}{KKPR_{(t)}} 100\%$	(Variabel) 1. K_KKPR(t): Jumlah Konfirmasi KKPR yang terbit pada tahun t 2. KKPR(t): Jumlah penerbitan KKPR pada tahun t (Sumber) GISTARU dan BKPM	Persen (%)	Tahunan
			Sasaran Program	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas							

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data	
			Indikator Kinerja Program	3. Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional	Kementerian ATR/BPN	1. Persentase akumulasi realisasi pemenuhan dokumen RTR Nasional sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pelaksanaan perencanaan tata ruang khususnya penyediaan RTR nasional 2. Persentase akumulasi penilaian kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pemanfaatan ruang 3. Persentase akumulasi pemenuhan NSPK Tata Ruang sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pengaturan penataan ruang melalui penyediaan NSPK	Pemenuhan dokumen RTR Nasional, NSPK Tata Ruang, dan instrumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang sebagai upaya peningkatan kinerja perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional. Semakin tinggi persentase akan meningkatkan kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional dalam mendukung terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	$IKP_3 = (0,4NAS_i + 0,4SPR_i + 0,2NSPK_i) 100\%$	(Variabel) 1. NAS(i): Persentase akumulasi realisasi pemenuhan dokumen RTR Nasional 2. SPR(i): Persentase akumulasi penilaian kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR 3. NSPK(i): Persentase akumulasi pemenuhan NSPK Tata Ruang (Sumber) Laporan Kinerja DJTR	Persen (%)	Tahunan	
	Indikator Kinerja Tujuan			Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang								
	PPTR		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	1.3	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	Kementerian ATR/BPN	Nilai yang menunjukkan kondisi ruang yang aman dan nyaman yang diukur dari tingkat kepatuhan pengguna ruang terhadap rencana tata ruang dan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).	Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap KKPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap RTR, dimana Ketika RTR sudah dipatuhi, maka kualitas ruang hidup masyarakat akan naik dan tujuan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat akan tercapai	$IKSS_1 = \sum \frac{KKPR \text{ Patuh}}{KKPR \text{ yg Dinilai}}$	Variabel : KKPR Patuh : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh KKPR yang Dinilai : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai Sumber Data : Laporan Kineja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase (%)	Tahunan
			Sasaran Program	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali								
			Indikator Kinerja Program	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Kementerian ATR/BPN	Nilai yang mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang seperti KKPR yang patuh, perwujudan RTR dan rekomendasi penerapan insentif dan disinsentif. Indikator ini dikontribusikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban pemanfaatan ruang dimana, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKPR dan rencana tata ruang merupakan kondisi dimana outcome pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai.	Kepatuhan terhadap KKPR dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR mencerminkan sejauh mana tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Melalui tingkat kepatuhan KKPR, tergambar sejauh mana pelaku kegiatan pemanfaatan ruang melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan, sedangkan tingkat perwujudan RTR menunjukkan seberapa besar ketepatan pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan. Kedua indikator ini diwujudkan melalui pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk upaya pencegahan	$IKP_1 = \sum \left(\left(\frac{KKPR \text{ patuh}_{(t)}}{KKPR \text{ dinilai}_{(t)}} \right) + \left(\frac{RTR \text{ terwujud}_{(t)}}{RTR \text{ dinilai}_{(t)}} \right) + \left(\frac{Rekomendasi \text{ Indis}}{Target \text{ Rekomendasi Indis}_{(t)}} \right) \right)$	Keterangan : KKPR patuh (t) : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh pada tahun t KKPR dinilai (t) : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai pada tahun t RTR terwujud (t) : Jumlah kawasan yang terwujud sesuai dengan RTR yang dilakukan pada tahun t RTR dinilai (t) : Jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya pada tahun t Rekomendasi indis (t) : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Target Rekomendasi indis : Target Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang	Persentase (%)	Tahunan	

			Visi/ Misi/Tujuan	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
			Sasaran Strategis 1:		Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif,							
			PPTR	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian ATR/BPN	Nilai yang menunjukkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini mengukur peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK).	Semakin banyak pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang dapat semakin terlayani dengan baik.	$IKSS_2 = \sum \frac{Prov \text{ yg mengalami peningkatan kinerja TURBINLAK}}{Provinsi \text{ di Indonesia}}$	Variabel : Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kinerja TURBINLAK : Jumlah Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) Provinsi di Indonesia : Jumlah Provinsi di Indonesia Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase (%)	Pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK) dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) Tahun Sekali sejak RTR ditetapkan (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 Pasal 211 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Pasal 231 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang)
			Sasaran Program		Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali							
				Indikator Kinerja Program	Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Kementerian ATR/BPN	Nilai yang mengukur kinerja penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.	Penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui 4 jenis pengawasan, yaitu pengawasan kinerja fungsi kawasan, pengawasan kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang, pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK), pengawasan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang. Semakin tinggi nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka kinerja Pemerintah Daerah semakin baik dalam melayani Masyarakat.	$IKP_2 = \sum \left(\frac{\left(\frac{Kaw \text{ yg berkinerja min.sedang}(t)}{\text{Target Kaw yg dinilai berkinerja min.sedang}(t)} \right) + \left(\frac{Prov \text{ yg berkinerja SP} \geq 50 (t)}{\text{Target Prov yg berkinerja SP} \geq 50(t)} \right) + \left(\frac{Prov \text{ yg bernilai kinerja} \geq 50(t)}{\text{Target Prov yg berkinerja turbinlak} \geq 50(t)} \right) + \left(\frac{Prov \text{ yang berkinerja PM Efektif \& Efisien}(t)}{\text{Target Prov yg dinilai berkinerja PM Efektif \& Efisien}(t)} \right)}{4} \right)$	Keterangan : Jumlah Kawasan yg Berkinerja min.sedang (t) : Jumlah Kawasan yang telah Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Target Kawasan yg dinilai Berkinerja min.sedang (t) : Target Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Jumlah Provinsi yg Berkinerja SP ≥ 50 (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Target Provinsi yg Berkinerja SP ≥ 50 (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Jumlah Provinsi yang Bernilai Kinerja ≥50 (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Target Provinsi yang Dinilai Kinerja Turbinlak (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Jumlah Provinsi yg Berkinerja Fungsi & Manfaat Penataan Ruang dengan Nilai Efektif dan Efisien (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Target Provinsi yg Berkinerja Fungsi & Manfaat Penataan Ruang dengan Nilai Efektif dan Efisien (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase (%)	Tahunan

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
Indikator Kinerja Tujuan			Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian								
Program:			Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanian								
Sasaran Strategis 2:				Peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanian dan tata ruang dalam mendukung							
			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan program strategis terhadap perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah yang efektif, penataan ruang yang optimal, dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan nilai tanah secara signifikan.	Semakin mendekati nilai indeks 1 (kenaikan nilai tanah sebanding dengan kenaikan nilai tambah ekonomi pertanian) maka semakin optimal tingkat pengelolaan pertanian dan ruang	$\frac{\text{rata-rata nilai tanah}_{(t)} - \text{rata-rata nilai tanah}_{(t0)}}{\text{rata-rata nilai tanah acuan}_{(t0)}}$ $\frac{\text{Rata-rata (a+b+c+d)}}{e}$ Keterangan: - Laju pertumbuhan nilai transaksi (a) $= \frac{\text{nilai transaksi}_t - \text{nilai transaksi}_{t-1}}{\text{Nilai transaksi}_{t-1}}$ - Laju pertumbuhan nilai PNBP (b) $= \frac{\text{nilai PNBP}_t - \text{nilai PNBP}_{t-1}}{\text{Nilai PNBP}_{t-1}}$ - Laju pertumbuhan nilai BPHTB (c) $= \frac{\text{nilai BPHTB}_t - \text{nilai BPHTB}_{t-1}}{\text{Nilai BPHTB}_{t-1}}$ - Laju pertumbuhan nilai HT (d) $= \frac{\text{nilai HT}_t - \text{nilai HT}_{t-1}}{\text{Nilai HT}_{t-1}}$ - Laju pertumbuhan nilai tanah (e) $= \frac{\text{nilai tanah}_t - \text{nilai tanah}_{t-1}}{\text{Nilai tanah}_{t-1}}$	Keterangan: t = tahun berjalan t-1 = periode tahun sebelumnya	Indeks	Tahunan
			Sasaran Program 1	Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanian dalam mendukung ekonomi pertanian							
			Indikator Kinerja Program	Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Indikator ini mencerminkan peningkatan nilai tanah yang merupakan hasil dari kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanian	Semakin tinggi persentase peningkatan nilai tanah mencerminkan kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanian yang optimal	$\frac{\text{rata-rata nilai tanah}_{(t)} - \text{rata-rata nilai tanah}_{(t0)}}{\text{rata-rata nilai tanah acuan}_{(t0)}}$	Keterangan: t = tahun berjalan t0 = tahun acuan (tahun 2024)	Persen (%)	Tahunan
TUJUAN 2:			Meningkatkan kepastian hak atas tanah dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional								
Indikator Kinerja Tujuan			Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah (HAT)								
Sasaran Strategis 3:				Kepastian Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat							
			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah		Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur bidang tanah bersertipikat yang memiliki kepastian hukum. Jika jumlah tanah bersertipikat yang dibatalkan sedikit maka dapat dianggap semakin baik kepastian perlindungan hak atas tanah	Semakin mendekati 100 %, maka semakin baik nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	Jumlah bidang tanah bersertipikat dikurangi jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ Jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100%			
			PHPT PSKP	3.1							

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
			Sasaran Program 1	Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum							
			Indikator Kinerja Program	1. Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Penghitungan untuk menghitung persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya	Semakin kecil persentase maka semakin rendah jumlah bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya	Jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ Jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100%			
			Sasaran Program 1	Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan							
			Indikator Kinerja Program	Persentase penyelesaian kasus pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020	semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Jumlah Penyelesaian Kasus Pertanahan s.d. tahun berjalan / Jumlah kasus pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Sumber Data : SKMPP dan Aplikasi Justisia	persen	triwulan
			Sasaran Program 2	Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat							
			Indikator Kinerja Program	3. Persentase Layanan Rutin Pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Penghitungan untuk menghitung layanan rutin yang diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN terkait Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Semakin mendekati 100%, maka penyelesaian terhadap pelayanan pertanahan semakin baik	Realisasi penyelesaian layanan pertanahan bidang PHP / Jumlah berkas masuk pada tahun berjalan * 100%			
TUJUAN 3:			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan penurunan tingkat kemiskinan melalui bidang pertanahan dan tata ruang								
			Indikator Kinerja Tujuan	Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya							
Sasaran Strategis 4:			Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								
PENTAG & PPTR			Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan	Kementerian ATR/BPN	Penghitungan untuk mengukur ketimpangan pemilikan tanah pada rumah tangga petani/nelayan penerima redistribusi tanah	Semakin tinggi nilai penurunan indeks gini maka makin kecil ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan, Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna	$IKSS\ (IG) = 1 - \sum (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$	Variabel: 1. Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Redistribusi Tanah 2. Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Akses Reforma Agraria Sumber Data: Laporan Kinerja (LKj)	Indeks	Tahunan
			Sasaran Program 1	Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan							
			Indikator Kinerja Program	1. Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Kementerian ATR/BPN	Penghitungan untuk mengukur realisasi luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah	Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi realisasi TORA	$IKP_1 = \left(\sum \frac{Luas\ tanah\ yang\ ditetapkan\ sebagai\ Objek\ Redistribusi\ Tanah}{Luas\ TORA} \right) x 100\%$	Variabel: 1. Sumber TORA2. Jumlah Subjek Redistribusi Tanah Sumber Data	Persen (%)	Tahunan

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
			Indikator Kinerja Program	2. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan	Kementerian ATR/BPN	Penghitungan jumlah rumah tangga miskin yang telah dilaksanakan penataan aset melalui Redistribusi Tanah dan dinyatakan dalam persentase	Semakin tinggi persentase maka makin banyak rumah tangga miskin yang menerima penataan aset melalui Redistribusi Tanah	$IKP_2 = \left(\frac{\sum \text{Subjek RT Miskin Penerima Redistribusi Tanah}}{\sum \text{Subjek Penerima Redistribusi Tanah}} \right) \times 100\%$	Variabel: 1. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berasal dari data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2. Jumlah Rumah Tangga Penerima Redistribusi Tanah Sumber Data: 1. Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kemenko PMK 2. Data Redistribusi Tanah Kementerian ATR/BPN	Persen (%)	Tahunan
			Indikator Kinerja Program	3. Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya	Kementerian ATR/BPN	Nilai yang mengukur rasio optimalisasi penguasaan pemilihan penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap total target tanah yang menjadi objek pengendalian dan penertiban	Semakin tinggi rasio optimalisasi P4T maka, semakin optimal aspek penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.	$IKP_3 = \frac{\left(\frac{\sum \text{Pengendalian P4T Pusat}_{(t)}}{\sum \text{Target Pengendalian P4T Pusat}_{(t)}} + \left(\frac{\sum \text{Pengendalian P4T Daerah}_{(t)}}{\sum \text{Target Pengendalian P4T Daerah}_{(t)}} \right) + \left(\frac{\sum \text{Penertiban P4T Pusat}_{(t)}}{\sum \text{Target Penertiban P4T Pusat}_{(t)}} \right) + \left(\frac{\sum \text{Penertiban P4T Daerah}_{(t)}}{\sum \text{Target Penertiban P4T Daerah}_{(t)}} \right) \right)}{4}$	Variabel : Pengendalian P4T (t) : Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun tahun t Target Pengendalian P4T : Target Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun t Penertiban P4T (t) : Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Target Penertiban P4T: Target Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilihan dan Penggunaan Tanah	Rasio	Tahunan
			Indikator Kinerja Program	4. Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah	Kementerian ATR/BPN	Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya LSD ke dalam rencana tata ruang	Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan LP2B.	$IKP_4 = \frac{\left(\frac{\sum \text{Pemantauan Evaluasi LSD Pusat}_{(t)}}{\sum \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Pusat}_{(t)}} \right) + \left(\frac{\sum \text{Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}_{(t)}}{\sum \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}_{(t)}} \right)}{2}$	Variabel : Pemantauan Evaluasi LSD pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD pusat : Target Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Pemantauan Evaluasi LSD daerah (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD daerah: Target Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu serta Keputusan Rekomendasi Perubahan Penguanaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.	Rasio	Tahunan
	PPTR	Kegiatan 5:	Pengendalian Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan								
			Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah		Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya LSD ke dalam rencana tata ruang	Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan LP2B.	$IKK_1 = \frac{\left(\frac{\sum \text{Pemantauan Evaluasi LSD Pusat}_{(t)}}{\sum_{t=1}^6 \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Pusat}} + \frac{\sum \text{Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}_{(t)}}{\sum_{t=1}^6 \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}} \right)}{2}$	Variabel : Pemantauan Evaluasi LSD pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD pusat : Target Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Pemantauan Evaluasi LSD daerah (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD daerah: Target Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu serta Keputusan Rekomendasi Perubahan Pungunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.	Rasio	

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
Sasaran Strategis 4:				Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								
PENTAG		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		4.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Penghitungan jumlah subjek penerima Reforma Agraria yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria	Semakin tinggi persentase maka makin banyak penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	$IKSS\ 4.2 = \frac{((\text{Pendapatan Setelah} - \text{Pendapatan Sebelum}))}{(\text{Pendapatan Sebelum})} \times 100\%$	Variabel: 1. Penerima Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reform	Persen (%)	Tahunan
		Sasaran Program 1			Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima reforma agraria							
		Indikator Kinerja Program			1. Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Penghitungan jumlah rumah tangga petani/nelayan penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria dan dinyatakan dalam persentase	Semakin tinggi persentase maka makin banyak rumah tangga petani/nelayan yang menerima Penataan Aset melalui Redistribusi Tanah dan Penataan Akses melalui Akses Reforma Agraria	$IKP = \left(\sum \frac{Subjek\ Petani/Nelayan}{Penerima\ RA} \right) \times 100\%$	Variabel: 1. Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Redistribusi Tanah2.	Persen (%)	Tahunan
MISI 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong												
TUJUAN 4: Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang optimal, cepat,												
		Indikator Kinerja Tujuan		Business Ready: Business Location (Nilai Kementerian ATR/BPN)								
Sasaran Strategis 5:				Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien								
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		5.1	(Business Location) B-Ready / Business Ready	World Bank	Indikator yang dirancang untuk mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara, dengan fokus pada kerangka regulasi dan penyediaan layanan publik terkait yang ditujukan pada perusahaan dan pasar, serta efisiensi			Mengikuti Manual Handbook World Bank	Nilai	
		Sasaran Program 1			Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh							
		Indikator Kinerja Program			1. Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran tanah dengan total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan	Signifikansi dan dampak dari angka persentase tersebut terhadap kondisi pertanahan di Indonesia, baik dari sisi kepastian hukum, pengelolaan, maupun pembangunan.	$IKP = \frac{(\text{Total Luas Bidang Tanah Terpetakan})}{(\text{Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan})} \times 100\%$	Variabel:1. Total Luas Bidang Tanah Terpetakan2. Total luas areal penggunaan lain	Persen (%)	Tahunan

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data	
			Indikator Kinerja Program	2. Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang mengacu pada indikator kuantitatif yang mengukur tingkat keberhasilan atau kelengkapan dalam mengelola (mulai dari pengumpulan hingga pemanfaatan) Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang berkaitan dengan pertanahan dan ruang di suatu wilayah, atau secara nasional.	Nilai persentase terhadap kondisi dan kualitas data pertanahan dan tata ruang.	IKP = (Jumlah tema IGT yang tersedia dan terintegrasi / Total tema IGT yang ditargetkan) x 100%	Variabel:1. Jumlah tema IGT yang tersedia dan terintegrasi 2. Total tema IGT yang	Persen (%)	Tahunan	
			Sasaran Program 2	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat								
			Indikator Kinerja Program	Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan adalah indikator kinerja yang mengukur efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas atau permohonan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan tanah yang bersifat rutin atau reguler.	Angka persentase tersebut dalam konteks kinerja dan efisiensi suatu lembaga dalam menjalankan tugas-tugas survei dan pemetaan rutin.	IKP = (Jumlah Layanan Rutin yang Selesai / Jumlah Target Layanan Rutin) x 100%	Variabel:1. Jumlah Layanan Rutin yang Selesai2. Jumlah Target Layanan Rutin	Persen (%)	Tahunan	
Tujuan 5:			Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Manajemen Risiko yang kuat serta Pengendalian Kepatuhan (Compliance)									
Indikator Kinerja Tujuan			Indeks Reformasi Birokrasi									
		Program:	1.Dukungan Manajemen Internal 2.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah									
Sasaran Strategis 6:			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak									
		ORPEG	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	6.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN & RB No. 3/2023 Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.	Semakin tinggi Nilai pada Indeks Reformasi Birokrasi maka tercapainya indikator-indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Kepmen PAN & RB No. 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Variabel:1. Penilaian RB General2. Penilaian RB TematikSumber Data:LHE RB (Ken	Indeks RB	Tahunan
			Sasaran Program 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional								

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
		Biroren	Sasaran Program 1	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi	Semakin tinggi Nilai padaCapaian Akuntabilitas Kinerja maka mendukung tercapainya penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Kepmen PAN & RB No. 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024		Nilai	Tahunan
		Birokeu		Capaian Akuntabilitas Keuangan	Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Penilaian ini mengacu pada sejauh mana suatu entitas (seperti instansi pemerintah atau organisasi) mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mereka, termasuk penggunaan dana, pencapaian target, dan kepatuhan terhadap peraturan	Semakin tinggi Nilai padaCapaian Akuntabilitas Kinerja maka mendukung tercapainya penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Kepmen PAN & RB No. 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Kepmen PAN & RB No. 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Persentase	Tahunan
		Orpeg/ Ortala MR		Indeks Pelayanan Publik	Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur dan menilai kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuann PEKPPP adalah untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang mencerminkan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa unit-unit pelayanan publik bekerja secara optimal dan akuntabel. Proses ini bersifat sistematis, artinya dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis data. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, maupun kepuasan pengguna layanan. Hasil dari proses ini diwujudkan dalam bentuk Indeks Pelayanan Publik (IPP), yaitu angka atau skor yang menggambarkan sejauh mana standar pelayanan telah terpenuhi. IPP berfungsi sebagai cerminan kinerja unit kerja sekaligus alat pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan di masa depan.	Mekanisme dan Instrumen PEKPPP mengacu pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 Rumus Perhitungan: Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir-02 + 25% Nilai Indeks Formulir-03 Keterangan: Formulir-02: Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif Formulir-03: Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	Variabel: 1. Nilai Indeks Formulir-02 2. Nilai Indeks Formulir-03 Sumber Data: Surat Keputusan dari Kementerian PANRB	Indeks	Tahunan

Visi/ Misi/Tujuan		Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
	Orpeg/ Ortala MR		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kementerian ATR/BPN	Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah menggunakan sistem <i>Case Survey Management System</i> (CSMS) yang dapat dilakukan secara online oleh masyarakat dan sampel data dilakukan.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil dari survei ini disajikan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang dinyatakan dalam skala nilai antara 1 (satu) hingga 4 (empat), sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SKM bersifat wajib bagi seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, dengan frekuensi minimal satu kali dalam satu tahun. Tujuan dari pelaksanaan SKM adalah untuk memperoleh data dan informasi yang objektif sebagai dasar dalam upaya perbaikan, peningkatan mutu, serta penyempurnaan sistem penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan. Kementerian Agraria dan Tata	Rumus pengukuran yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Rumus perhitungan tersebut telah diakomodir ke dalam sistem CSMS sehingga pengolahan data dapat dilakukan secara realtime dan dapat menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara cepat dan akurat.	Sumber data: cms.atrbpn.go.id	Indeks	Triwulanan
	Pusdatin		Indeks SPBE	Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE sebagaimana Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara	Indeks SPBE merupakan komponen RB General dalam menentukan evaluasi indeks reformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN. Bahwa dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE memiliki perhitungan bobot yang paling tinggi yaitu 9. Penilaian Indeks SPBE meliputi 4 domain yang terdiri dari 47 indikator yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE dan domain layanan SPBE. selain indeks SPBE dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi terdapat penilaian indeks penilaian untuk Enterprise Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi berbagai elemen SPBE, seperti proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, untuk menciptakan layanan pemerintah yang terintegrasi dan efisien. Tujuannya adalah menjelaskan	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Permen PANRB No 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sumber Data: Surat Keputusan dari Kementerian PANRB	Indeks	Tahunan
	Setitjen		Nilai SPI KPK	Komisi Pemberantasa n Korupsi (KPK)	Nilai SPI KPK adalah skor yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur tingkat integritas suatu instansi pemerintah berdasarkan persepsi dan pengalaman para responden internal (pegawai), eksternal (mitra kerja/pengguna layanan) dan Expert (para ahli/pengamat).	Nilai SPI KPK menunjukkan tingkat persepsi dan pengalaman terhadap integritas organisasi, baik dari pegawai internal, mitra kerja, maupun masyarakat yang menerima layanan. Semakin tinggi nilai SPI, semakin baik pula budaya antikorupsi, transparansi, dan sistem pengendalian yang diterapkan di lingkungan organisasi tersebut.	Metode pengukuran yang digunakan yaitu berdasarkan hasil penilaian SPI yang dikeluarkan oleh KPK.	Sumber data yang digunakan yaitu hasil survei tahunan yang dilakukan oleh KPK (biasanya melalui metode kuantitatif dan kualitatif); wawancara dan kuesioner terhadap ASN, pengguna layanan publik, mitra kerja, dan akademisi; serta validasi melalui data sekunder dan analisis sistem pengendalian internal.	Nilai	Tahunan

Visi/ Misi/Tujuan		Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
	Orpeg/ SDM		Indeks BerAKHLAK	Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Core Values ASN BerAKHLAK adalah Nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. Indeks BerAKHLAK merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat implementasi dan internalisasi nilai-nilai core values ASN BerAKHLAK.	Skor indeks BerAKHLAK mengindikasikan sejauh mana nilai nilai tersebut telah menjadi bagian dari perilaku individu dan sistem organisasi, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin kuatnya integrasi nilai BerAKHLAK dalam keseharian kerja pegawai dan tata kelola instansi. Interpretasi indeks ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan budaya kerja, sebagai dasar penyusunan strategi penguatan nilai ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan	Rumus pengukuran Indeks BerAKHLAK merupakan:1. Hasil Survei BerAKHLAK	Variabel: 1. Hasil Survei BerAkhlak 2. Hasil Evaluasi Organisasi Sumber Data: Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK	Indeks	Tahunan
	Birokeu		Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian WTP	Badan Pemeriksa Keuangan	Pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah	Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP maka mencerminkan wajarnya penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah dalam batas materialitas yang telah ditentukan	Kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah ditetapkan berdasarkan batas materialitas yang ditentukan oleh BPK RI dengan memperhitungkan ketepatan dan kesesuaian pengelolaan keuangan dan barang milik negara dengan peraturan yang berlaku serta penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI.	Sumber Data: 1. SOP/Juknis/Juklak yang berlaku di kementerian2. Aplikasi SAKTI	Opini	Tahunan
	Birorum		Layanan Perkantoran	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum	Serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional kementerian.	Terlaksananya kegiatan pelayanan operasional perkantoran yang mencakup pengadaan barang jasa, pengelolaan tata naskah dan kearsipan, tersedianya sarana dan prasarana satker pusat dan daerah	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 3. Persent	Variabel: 1. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 3. P	Nilai dan Persentase	Tahunan
	Biro Hukum		Indeks Reformasi Hukum	Kementerian Hukum	IRH adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga	IRH merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia	Variabel penilaian IRH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu: Variabel I: Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi Peraturan Perundang- undangan (Bobot 25%); Variabel II: Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas (Bobot 25%); Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang- undangan berdasarkan hasil reviu (Bobot 30%); dan Variabel IV: Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (Bobot 20%)	Variabel: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang- undangan; 2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan Sumber Data: Hasil Penilaian IRH	Indeks	Tahunan
	Setitjen		Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Zona Integritas melalui mekanisme penilaian eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Persentase ini menunjukkan seberapa besar proporsi satuan kerja yang berhasil lolos dan ditetapkan dari total satuan kerja yang diusulkan mengikuti proses penilaian.	Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas mencerminkan efektivitas dan kualitas implementasi nilai-nilai integritas, reformasi birokrasi, serta pelayanan publik bebas korupsi di satuan kerja yang diusulkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar pula tingkat kesiapan satuan kerja secara substantif dan sistemik untuk diakui sebagai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB	Sumber data yang digunakan yaitu dokumen usulan pembangunan Zona Integritas, laporan hasil Evaluasi dan Keputusan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait satuan kerja penerima predikat zona integritas, serta evaluasi tim penilai nasional dan survei ekstern. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase success rate Pembangunan Zona Integritas antara lain, yaitu: - Jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN , menunjukkan jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN, menunjukkan jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas, yaitu rasio antara jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN dengan jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN.	Indeks	Tahunan

Visi/ Misi/Tujuan			Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Instansi penghasil	Konsep/definisi	Interpretasi	Metode/Rumus Perhitungan	Variabel dan sumber data	Satuan	Periode/Frekuensi penyajian data
		BPSDM	Sasaran Program	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang							
			Indikator Kinerja Program	Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhklak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang	Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indeks BerAKHLAK adalah sistem pengukuran untuk menilai penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK adalah nilai-nilai yang berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. Indeks ini digunakan sebagai baseline untuk target tahun berikutnya dan sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan, serta menjadi dasar perbaikan manajemen sumber daya manusia.	Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi, peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi utama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai, baik dari aspek teknis maupun manajerial, kebijakan ini diarahkan untuk membentuk aparatur negara yang tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mampu berpikir strategis, responsif terhadap perubahan, serta tanggap terhadap dinamika sosial dan kebijakan nasional. Langkah-langkah strategis ini diwujudkan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek: mulai dari penguatan teknis pertanahan dan tata ruang, keterampilan manajerial, hingga literasi digital. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola risiko (risk management), menyusun kebijakan berbasis data, serta melakukan pengawasan internal dengan pendekatan compliance yang kuat.	Rumus Perhitungan Indeks BerAKHLAK merupakan hasil penjumlahan antara variabel sebagai berikut: 1. Hasil Survei BerAKHLAK dihitung dengan pembobotan 80% dari hasil pengukuran survei BerAKHLAK 2. Hasil Evaluasi Organisasi dihitung dengan pembobotan 20% dari hasil pengukuran evaluasi organisasi	Sumber Data: Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK KemenpanRB Variable : 1. Hasil Survei BerAKHLAK 2. Hasil Evaluasi Organisasi	Indeks	Tahunan
		Program:	Program Dukungan Manajemen								
		Sasaran Strategis 6:			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia						
		ITJEN	Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola dan kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, integritas, dan akuntabilitas Kementerian melalui transformasi pengawasan intern							
			Indikator Kinerja Program	Indeks Kapabilitas APIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Skor Kapabilitas APIP adalah tingkat kematangan dan kompetensi fungsi pengawasan intern yang dimiliki oleh APIP berdasarkan Kerangka Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model/IA-CM).	Skor kapabilitas tidak dihitung secara kuantitatif, melainkan diperoleh melalui penilaian mandiri dan/atau reviu eksternal oleh BPKP. Semakin besar level tingkatan skor kapabilitas APIP, maka menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan mendukung reformasi birokrasi melalui layanan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang berkualitas.	Metode pengukuran menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif kualitatif dan kuantitatif berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang disusun oleh The IIA (Institute of Internal Auditors) dan diadaptasi oleh BPKP sebagai pembina APIP.	Sumber data yang digunakan yaitu Laporan Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP. Variabel yang digunakan yaitu tingkatan skor Kapabilitas APIP. Semakin besar level tingkatan skor kapabilitas APIP, maka menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan mendukung reformasi birokrasi melalui layanan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang berkualitas.	Level	Tahunan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

Matriks Tagging Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Pada Kementerian ATR/BPN

NO	OBJEK MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO	K/L ENTITAS UTAMA
1	Kegiatan Prioritas: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul.	Ketidakpastian hukum Hak Atas Tanah, Sengketa Lahan serta Proses Pengadaan Tanah yang tidak transparan, menjadi potensi yang berdampak pada mundurnya pelaksanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul. Pernyataan Risiko Lintas Sektor: Ego sektoral dalam kerjasama lintas sektor dalam mitigasi risiko pembangunan nasional	1. Melakukan verifikasi Hak Atas Tanah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan; 2. Menyelesaikan penggunaan lahan yang masih memiliki status hukum bermasalah; dan 3. Percepatan proses pengadaan tanah dengan melibatkan kolaborasi antar instansi. Perlakuan Risiko Lintas Sektor: Perumusan kebijakan bersama yang mempertimbangkan risiko Kementerian/Lembaga dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pemegang Risiko.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	K/L Pemegang Risiko: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI

NO	OBJEK MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO	K/L ENTITAS UTAMA
2	Kegiatan Prioritas: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	Terhambatnya pembangunan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat menghambat implementasi proyek Transisi Energi yang berkeadilan. Pernyataan Risiko Lintas Sektor: Ego sektoral dalam kerjasama lintas sektor dalam mitigasi risiko pembangunan nasional	1. Menetapkan zonasi untuk pemanfaatan lahan EBT ke dalam RTR; 2. Percepatan penyelesaian dan digitalisasi RDTR serta integrasi RDTR dengan OSS 3. Percepatan Penerbitan KKPR Perlakuan Risiko Lintas Sektor: Perumusan kebijakan bersama yang mempertimbangkan risiko Kementerian/Lembaga dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pemegang Risiko.	Direktorat Jenderal Tata Ruang	K/L Pemegang Risiko: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
3	Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Papua Selatan (Kementerian Pertanian).	Tanpa kepastian hukum pertanahan dan kesesuaian tata ruang, terdapat risiko sengketa lahan dengan masyarakat adat atau pemilik lahan, serta alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pangan. Pernyataan Risiko Lintas Sektor:	1. Melakukan inventarisasi dan verifikasi status Hak Atas Tanah; 2. Penegasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam dokumen tata ruang untuk mencegah alih fungsi. Perlakuan Risiko Lintas Sektor: Perumusan kebijakan bersama yang mempertimbangkan risiko Kementerian/Lembaga dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pemegang Risiko.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	K/L Pemegang Risiko: Kementerian Pertanian

NO	OBJEK MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO	K/L ENTITAS UTAMA
		Ego sektoral dalam kerjasama lintas sektor dalam mitigasi risiko pembangunan nasional.			
4	Kegiatan Prioritas: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo (Kementerian Pariwisata).	Terhambatnya investasi pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo. Pernyataan Risiko Lintas Sektor: Ego sektoral dalam kerjasama lintas sektor dalam mitigasi risiko pembangunan nasional	1. Menetapkan zonasi wisata yang mendukung pelestarian lingkungan dan budaya setempat ke dalam RTR 2. Percepatan penyelesaian dan digitalisasi RDTR serta integrasi RDTR dengan OSS 3. Percepatan Penerbitan KKPR Perlakuan Risiko Lintas Sektor: Perumusan kebijakan bersama yang mempertimbangkan risiko Kementerian/Lembaga dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pemegang Risiko.	Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	K/L Pemegang Risiko: Kementerian Pariwisata RI

Matriks Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	IDENTIFIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
1	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	1. Keterlambatan penyelesaian RTRW 2. Terhambatnya akses kemudahan berusaha masyarakat karena Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) 3. Meningkatnya pelanggaran pemanfaatan ruang akibat ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 4. Terdapat penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak memperhatikan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan. 5. Adanya tumpang tindih batas wilayah akibat ketidakjelasan batas wilayah, akses yang sulit, minimnya data spasial, dan potensi konflik sosial.	1. Asistensi dan pendampingan penyelesaian RTRW serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRW 2. Percepatan penyelesaian dan digitalisasi RDTR serta integrasi RDTR dengan OSS 3. Penegakan sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan perundangan, serta sosialisasi masif kepada pelaku usaha dan masyarakat; 4. Meningkatkan validasi dokumen sebelum penerbitan hak atau izin, serta melakukan monitoring pasca-penerbitan untuk memastikan kepatuhan. 5. Sinkronisasi data pertanahan dan tata ruang di kawasan perbatasan. 6. Melibatkan partisipasi pemerintah daerah, serta koordinasi yang intensif dengan BNPP dan TNI.	Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
2	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang dalam Mendukung	1. Munculnya masalah hukum pada proses pengadaan tanah 2. Adanya perbedaan persepsi dengan Kementerian/Lembaga lain mengenai regulasi terkait penyelenggaraan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan 3. Kualitas data yang mendukung perhitungan indikator sasaran strategis peningkatan nilai tambah ekonomi (PNBP, BPHTB, transaksi Hak Tanggungan, dan nilai tanah) kurang memadai	1. Pendampingan dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah dengan melibatkan stakeholder terkait 2. Harmonisasi regulasi dengan Kementerian/Lembaga terkait penyelenggaraan pengadaan tanah 3. Koordinasi dengan Pusdatin ATRBPN untuk menyusun standard data yang mendukung perhitungan Indikator Sasaran Strategis (PNBP, BPHTB, Transaksi, Hak Tanggungan, dan Nilai Tanah)	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	IDENTIFIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
	Perekonomian Nasional	4. Adanya dinamika Masyarakat yang dapat menghambat penyelenggaraan konsolidasi tanah 5. Status tanah yang akan menjadi Lokasi konsolidasi tanah bermasalah	4. Sosialisasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah 5. Penyusunan materi teknis konsolidasi tanah dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat.	
3	Kepastian Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	1. Sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif yang masih memungkinkan adanya pembatalan produk hukum baik karena cacat administrasi maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan; 2. Adanya berbagai macam alas hak kepemilikan tanah sebagai peninggalan sejarah masa lalu; 3. Adanya perbedaan persepsi dengan Kementerian/Lembaga lain mengenai regulasi terkait	1. Peningkatan kualitas data pertanahan baik spasial maupun tekstual melalui digitalisasi produk pertanahan; 2. Melaksanakan program konversi dan penyeragaman alas hak ke sistem hukum pertanahan nasional, disertai inventarisasi dan pendataan ulang secara partisipatif; 3. Melakukan harmonisasi regulasi dan pembentukan forum koordinasi antar-kementerian untuk menyatukan persepsi dan interpretasi kebijakan.	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
4	Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan aset dan penataan akses reforma agraria; 2. Potensi subjek penerima reforma agraria kurang tepat sasaran; 3. Tumpang tindihnya peraturan dan regulasi antar sektor sehingga menghambat pelaksanaan reforma agraria; 4. Tidak tercapainya target pengentasan kemiskinan ekstrim karena data subjek tidak tepat sasaran, masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. 5. Adanya potensi penguasaan fisik oleh pihak lain atau masyarakat di objek Tanah Terlantar.	1. Membentuk tim koordinasi lintas sektor yang memiliki target kinerja jelas, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria; 2. Melakukan Inventarisasi, verifikasi dan validasi lapangan berbasis data spasial dan sosial-ekonomi, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam proses seleksi penerima reforma agraria agar lebih sistematis dan komprehensif; 3. Melakukan harmonisasi regulasi, pembentukan forum sinkronisasi kebijakan, dan penerbitan panduan teknis yang menyatukan interpretasi aturan.	Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	IDENTIFIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
		6. Adanya potensi Hak Tanggungan atas Objek Tanah Terlantar. 7. Adanya potensi perubahan data subyek dan perbuatan hukum yang belum tercatat dalam perubahan buku tanah dan basis data tanah terindikasi terlantar. 8. Potensi adanya penguasaan fisik oleh pihak lain/Masyarakat objek tanah terindikasi terlantar 9. Potensi adanya Hak Tanggungan atas objek tanah terlantar 10. Potensi terjadi perubahan data subyek, data fisik atau perbuatan hukum yang belum tercatat dalam perubahan di buku tanah dan basis data tanah terindikasi terlantar 11. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan LSD menjadi kawasan LP2B atau KP2B dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dengan berbasis spasial 12. Banyaknya permintaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD dari Masyarakat/Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang berada dalam kawasan non LP2B/KP2B dalam Rencana Tata Ruang (RTR) 13. Belum ditetapkannya LSD pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia	4. Melaksanakan identifikasi penguasaan fisik dan Hak Tanggungan serta pemutakhiran data atas objek tanah terlantar dan melibatkan kerjasama lintas sektor dalam penyelesaiannya. 5. Penguatan regulasi serta koordinasi lintas sektor K/L pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah dalam integrasi LSD pada RTR sebagai bagian dari Tanaman Pangan/ KP2B/LP2B melalui bimbingan teknis serta peran dalam pembahasan lintas sektor saat pemerintah daerah dalam penyusunan atau revisi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Rencana Tata Ruang. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi yang sudah diberikan dan jika dalam 3 tahun tidak dilakukan atau dilaksanakan maka lahan yang direkomendasikan tersebut dikembalikan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) 7. Mempercepat penetapan revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.	

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	IDENTIFIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
5	Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien	1. Kualitas Data dan Informasi Geospasial Pertanahan dan Tata Ruang yang masih rendah; 2. Sistem informasi antar instansi pemerintah masih belum sepenuhnya terintegrasi, berdampak pada kurangnya sinkronisasi data dan perlambatan proses pelayanan; 3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik di bidang Pertanahan dan Tata Ruang.	1. Melakukan melakukan pemutakhiran data secara berkala, menerapkan standar nasional/internasional geospasial serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi teknologi dan validasi data; 2. Membangun <i>interoperability framework</i> dan <i>Application Programming Interface</i> (API) bersama, melakukan sinkronisasi basis data secara berkala, serta membentuk tim koordinasi teknis lintas instansi; 3. Melakukan perencanaan kebutuhan infrastruktur berbasis prioritas layanan, memanfaatkan teknologi cloud untuk mengurangi beban fisik server, dan meningkatkan kapasitas jaringan.	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang)
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdampak	1. Potensi tumpang tindih regulasi internal dan eksternal yang mempengaruhi konsistensi kebijakan; 2. Potensi rendahnya budaya risiko pada seluruh pegawai/Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga menunda deteksi dini dan respon terhadap risiko; 3. Potensi lemahnya pengendalian yang menyebabkan prosedur tidak terimplementasi sepenuhnya.	1. Menyusun matriks perbandingan (<i>gap analysis</i>) antara ketentuan eksternal (undang-undang, PP, Perpres) dengan kebijakan internal, mengidentifikasi tumpang tindih. 2. Merancang mekanisme internalisasi, pelatihan untuk seluruh level pegawai, serta pemantauan yang dilakukan oleh unit masing-masing maupun lini kedua. 3. Pemberian reward untuk staf kunci yang menjadi agen perubahan 4. Melakukan Reviu dan memperbaharui <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dengan menambahkan langkah-langkah pengendalian yang jelas 5. Memperkuat sistem pengawasan internal, menerapkan audit kepatuhan secara berkala, dan memperjelas pembagian tugas serta wewenang	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	IDENTIFIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
			dalam <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan meningkatkan peran keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi implementasi prosedur. 6. Melakukan harmonisasi regulasi, pembentukan forum sinkronisasi kebijakan, dan penerbitan panduan teknis yang menyatukan interpretasi aturan; 7. Menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko secara rutin, membangun sistem pelaporan risiko yang mudah diakses, serta mengintegrasikan indikator kesadaran risiko dalam penilaian kinerja pegawai; 8. Penyederhanaan SOP/Proses Bisnis menjadi lebih ringkas dan mudah diterapkan.	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID